



EVALUASI SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL



THE EDUCATION SECTOR ANALYTICAL AND CAPACITY DEVELOPMENT
PARTNERSHIP (ACDP - 020)

EVALUASI SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL

LAPORAN EVALUASI AKHIR

Disusun oleh:

PT. TRANS INTRA ASIA (TIA), INDONESIA

Bekerjasama dengan:

The Institute of Public Administration of Canada (IPAC), Canada

KEMITRAAN UNTUK PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN ANALISIS PENDIDIKAN (ACDP):

Pemerintah Republik Indonesia (dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama dan BAPPENAS), Australian Agency for International Development (AusAID), Uni Eropa (EU) dan Bank Pembangunan Asia (ADB) telah membentuk Kemitraan untuk Pengembangan Kapasitas dan Analisis Pendidikan (ACDP) sebagai fasilitas untuk memajukan dialog kebijakan dan reformasi kelembagaan dan organisasi sektor pendidikan dalam mendukung pelaksanaan kebijakan dan membantu mengurangi kesenjangan dalam kinerja pendidikan di provinsi dan kabupaten di Indonesia. Kegiatan ini merupakan bagian integral dari Program Pendukung Sektor Pendidikan (ESSP) yang terdiri dari dukungan sektor anggaran UE dengan pengaturan yang telah disetujui untuk pencairan hibah dan kebijakan dan program yang dialokasikan oleh AusAID sektor pendukung hibah pengembangan yang terdiri dari: program prasarana sekolah dan sebuah program pengembangan pengelolaan sekolah di kabupaten secara nasional serta sebuah program untuk mempercepat akreditasi sekolah-sekolah Islam swasta di Indonesia. Laporan ini disiapkan dengan dukungan hibah dari AusAID dan UE melalui ACDP.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN



KEMENTERIAN
AGAMA



BAPPENAS



EUROPEAN UNION



PERUSAHAAN KONSULTAN:

Dua perusahaan konsultan utama yang bertanggungjawab terhadap penyiapan Laporan Evaluasi Akhir (2013-02-05) ini adalah: PT. Trans Intra Asia (TIA), Indonesia dan Institute of Public Administration of Canada (IPAC). Konsultan utama ini juga berasosiasi dengan lima (5) lembaga, yaitu: dua (2) dari Kanada (Queens University dan Dalhousie University) dan tiga (3) dari Indonesia (Institut Pertanian Bogor, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran dan Lembaga Pengembangan Ekonomi dan Keuangan).

TIM KONSULTAN YANG MENYIAPKAN LAPORAN:

1. **John Walter Henly**, Team Leader/Education Quality Expert
2. **Bambang Soepeno**, Education Expert
3. **Edy Priyono**, Education Finance Specialist,
4. **Muhammad Nur Aidi**, Data Analyst

EVALUASI SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL

Daftar Isi

Daftar Isi	ii
Daftar Istilah	vii
Ringkasan Eksekutif	ix
Bab 1 Pendahuluan	1
1.1. Tujuan Pembangunan	1
1.2. Maksud Evaluasi	1
1.3. Landasan Evaluasi	1
1.4. Fokus Evaluasi	2
1.5. Tujuan	2
1.6. Ruang Lingkup	3
1.7. Kegiatan	3
Bab 2 ANALISIS SITUASI	7
2.1. Kerangka Peraturan	7
2.2. Standar yang Harus Dipenuhi	8
2.3. Pelaksanaan Program	8
2.4. Isu-isu Kebijakan	11
Bab 3 METODOLOGI	15
3.1. Tinjauan Evaluasi	15
3.2. Pengambilan Sampel	17
3.3. Keterbatasan Studi	21
Bab 4 PENCAPAIAN TUJUAN	25
Bab 5 HASIL DAN ANALISIS	29
5.1. Profil Sistem SBI	29
5.1.1. Lokasi	29
5.1.2. Distribusi Menurut Jenis RSBI	30
5.1.3. Statistik Sekolah	31
5.1.4. Kecepatan Persetujuan/Pendirian RSBI Sejak Awal berdasarkan Tipe Sekolah	33
5.2. Analisis Finansial	33
5.2.1. Pendahuluan	33
5.2.2. Analisis Keuangan Sekolah	34
5.2.2.1. Biaya Satuan: RSBI Dibandingkan Non-RSBI	34
5.2.2.2. Sumber Keuangan: RSBI Dibandingkan Non-RSBI	35
5.2.2.3. Struktur Biaya RSBI	36
5.2.3. Analisis Belanja Publik	36
5.2.4. Analisis Beasiswa dan Bantuan Lain untuk Murid Miskin	37
5.3. Evaluasi Pemenuhan Standar Tertentu dalam Persyaratan SBI	38
5.3.1. Akreditasi	40

5.3.2. Kurikulum & Kompetensi Lulusan	41
5.3.3. Proses Belajar Mengajar	45
5.3.4. Evaluasi	50
5.3.5. Kualifikasi Guru	51
5.3.6. Kualifikasi Kepala Sekolah	53
5.3.7. Infrastruktur	55
5.3.8. Manajemen	57
5.3.9. Pendanaan Sekolah	59
5.3.10. Ringkasan Analisis Pemenuhan	62
5.4. Pengamatan Kelas	62
5.4.1. Perilaku Guru Selama di dalam Kelas	63
5.4.2. Perilaku Murid selama di Kelas	64
5.5. Analisis Kualitatif	64
5.5.1. Kepala Sekolah	65
5.5.2. Guru	66
5.5.3. Orang Tua	67
5.5.4. Komite Sekolah	68
5.5.5. Murid	69
5.5.6. Pejabat Pemerintah (Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten)	69
5.5.7. Perbandingan Dengan Sekolah Non-RSBI	69
5.5.8. Ringkasan Analisis Kualitatif	69
Bab 6 RANGKUMAN ANALISIS	71
6.1. Pengujian Dasar Pemikiran	71
6.2. Konsep SBI: Karakteristik dan Pendekatan	71
6.2.1. Perspektif Internasional – Bahasa Pengantar	71
6.2.2. Adopsi Akreditasi dan Kurikulum OECD atau Negara Maju lain	73
6.3. Efektivitas Model: Praktek dan Hasil Pendidikan	73
6.4. Kelayakan Pelaksanaan: Kapasitas, Efisiensi, Pertimbangan Sosial dan Pemerataan	74
6.5. Kesimpulan	77
Bab 7 OPSI KEBIJAKAN SSI	79
LAMPIRAN	
Lampiran 1. Kerangka Acuan Kerja	87
Lampiran 2. Peraturan Dan Regulasi Yang Mengatur SSI	94
Lampiran 3. Kriteria Pemenuhan Standar SBI	95
Lampiran 4. Isu Yang Muncul Dari Evaluasi	96
Lampiran 5. Desain Studi Evaluasi Dan Rencana Kerja Maksud Dari Evaluasi	98
Lampiran 6. Matriks Evaluasi	116
Lampiran 7. Sampel Studi Lapangan Sampel Sekolah Rsbi	118
Lampiran 8. Dokumen-Dokumen Yang Dikonsultasikan Selama Evaluasi	121
Lampiran 9. Tinjauan Kebijakan	124
Lampiran 10. Tabel Data Survei Kuantitatif Sekolah	125
Lampiran 11. Bagan Organisasi Provinsi	141
Lampiran 12. Studi Metode Pengambilan Sampel	148

Lampiran 13 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2009	151
Lampiran 14. Jadwal Pencapaian	164
ANEX	
Laporan Pelaksanaan Workshop	165
DAFTAR TABEL	
Tabel 1. Aktivitas Evaluasi	2
Tabel 2. Elemen Utama Evaluasi	3
Tabel 3. Kinerja Kabupaten/Kota dalam Mendirikan Satu RSBI untuk Setiap Jenjang Pendidikan	12
Tabel 4. Responden Survei Cepat	18
Tabel 5. Distribusi Sampel berdasarkan Tipe Sekolah	19
Tabel 6. Distribusi Sosial-ekonomi Sampel Studi Lapangan	19
Tabel 7. Rata-rata PDB Menurut Strata	20
Tabel 8. Ringkasan Jenis dan Sumber Data	21
Tabel 9. Ringkasan Pencapaian Tujuan Studi	25
Tabel 10. Distribusi RSBI berdasarkan Populasi (data Kemdikbud)	29
Tabel 11. Distribusi RSBI berdasarkan Provinsi (diolah dari data Kemdikbud)	30
Tabel 12. Distribusi Jenis RSBI berdasarkan Jumlah	30
Tabel 13. Distribusi Jenis RSBI berdasarkan Persentase	31
Tabel 14. Jumlah Kelas Internasional dari Hasil Survei Cepat (n=854)	31
Tabel 15. Jumlah Murid di Sekolah RSBI	32
Tabel 16. Jumlah Guru di Kelas Internasional	32
Tabel 17. Alokasi Hibah RSBI 2007 - 2010	37
Tabel 18. Indikator Kinerja Sekolah Standard Internasional	39
Tabel 19. Rata-rata Ujian Nasional Dibandingkan dengan Hasil Evaluasi (2011)	43
Tabel 20. Frekuensi Penggunaan Bahasa di Kelas	48
Tabel 21. Frekuensi Bahasa Pengantar Menurut Jenis Sekolah	48
Tabel 22. Daftar Perilaku yang mungkin untuk diamati dalam Pengamatan Kelas	62
Tabel 23. Perbandingan Nilai Ujian Nasional 2011	73
DAFTAR GAMBAR	
Gambar 1. Proses Seleksi Sekolah	9
Gambar 2. Aliran Dana RSBI	11
Gambar 3. Ringkasan Pertanyaan Evaluasi	16
Gambar 4. Ringkasan Integrasi KAK dan Desain Evaluasi	16
Gambar 5. Ringkasan Metode Sampling Studi Lapangan	18
Gambar 6. Biaya Satuan Per Murid (Rp. '000) Menurut Status Sekolah untuk Pengeluaran Non-Gaji	34
Gambar 7. Biaya Satuan Per Murid (Rp. '000) RSBI untuk Pengeluaran Non-Gaji	35
Gambar 8. Sumber Pendanaan Tahunan RSBI dan Non-RSBI (Nilai per Sekolah)	35
Gambar 9. Pendanaan Tahunan untuk RSBI dan Non-RSBI Per Sekolah dalam Persentase)	36
Gambar 10. Konsep Proses Pengembangan SBI	38
Gambar 11. Strategi dan Tujuan dari Strategi Nasional	32

Gambar 12. Sumber Daya Finansial PAUD HI	45
Gambar 13. Diagram Pengkategorian Model PAUD	84
Gambar 14. Diagram Pengelompokan Model PAUD	88
Gambar 15. Strategi Nasional Pemerintah Indonesia untuk PAUD HI: Kebijakan dan Strategi	99
Gambar 16. Hasil dari Model PAUD HI yang Bekerja dengan Baik	99
Gambar 17. Pelaksanaan PAUD HI	100
Gambar 18. Tantangan Strategis di Tingkat Lokal, Regional dan Nasional	103
Gambar 19. Pembiayaan PAUD	112
Gambar 20. Kebijakan ECCE di Jamaika	112
Gambar 21. PAUD di Kanada	115
Gambar 22. Kelayakan Pilihan Strategis PAUD	119

DAFTAR GRAFIK DAN TABEL

Grafik 1. Jenis Sekolah vs Tahun Pendirian (Sumber: Kemdikbud)	33
Bagan 2. Rata-rata Jumlah Penerima Beasiswa	37
Bagan 3. Akreditasi "A" oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN) - Keseluruhan	40
Bagan 4. Akreditasi "A" oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN) - Berdasarkan Jenis Sekolah	40
Bagan 5. Akreditasi OECD atau Akreditasi dari Negara Maju lainnya	41
Bagan 6. Adopsi Kurikulum dari OECD atau Negara Maju Lainnya	41
Bagan 7. Adopsi Kurikulum dari Negara Lain menurut Jenis Sekolah	42
Bagan 8. Rata-rata Nilai Ujian Nasional Sampel Studi	42
Bagan 9. Perbandingan dengan Rata-rata Ujian Nasional untuk SMP	43
Bagan 10. Perbandingan dengan Rata-rata Ujian Nasional untuk SMA	44
Bagan 11. Perbandingan dengan Rata-rata Ujian Nasional untuk SMK	44
Bagan 12. Rata-rata Nilai Ujian Berdasarkan Survei Cepat menurut Lokasi	45
Bagan 13. Metode Belajar Mengajar - Keseluruhan	45
Bagan 14. Metode Belajar Mengajar - Menurut Jenis Sekolah	46
Bagan 15. Sekolah Lain Menggunakan SBI sebagai Referensi	46
Bagan 16. Sekolah Lain Menggunakan SBII sebagai Referensi - Menurut Jenis Sekolah	47
Bagan 17. Hasil Pengamatan Kelas terhadap Bahasa Pengantar	48
Grafik 18. Persentase Guru Kelas Internasional dengan Skor TOEFL >450	49
Grafik 19. Penggunaan Metode Evaluasi Internasional	50
Grafik 20. Tingkat Pemenuhan Standar 20% Guru Berpendidikan S2/S3	51
Grafik 21. Kemampuan Guru Menggunakan TIK	52
Grafik 22. Kepala Sekolah Kualifikasi S2/S3	53
Grafik 23. Kepala Sekolah Mampu Berbahasa Asing	54
Grafik 24. Frekuensi Infrastruktur Berbasis TIK	55
Grafik 25. Ketersediaan TIK di Ruang Kelas Berdasarkan Jenis Sekolah	56
Grafik 26. Fasilitas TIK di Perpustakaan	57
Grafik 27. Pemenuhan Syarat Hubungan sebagai Sister School	57
Grafik 28. Pemenuhan ISO	58
Grafik 29. Jumlah Sekolah yang Melaporkan Seluruh Penerimaan Masuk dalam Anggaran	59
Grafik 30. Sekolah Melaporkan Anggaran yang Dapat Diakses Publik	60
Grafik 31. Rata-rata Jumlah Penerima Beasiswa	60
Bagan 32. Tingkat Capaian Sekolah di Kota Besar Menuju 20% Murid Penghasilan Rendah	61
Bagan 33. Tingkat Capaian Sekolah di Kota Kecil Menuju 20% Murid Penghasilan Rendah	61

Bagan 34. Tingkat Capaian Sekolah Sekolah di Kabupaten Menuju 20% Murid Peng	62
Bagan 35. Perilaku Guru yang Teramati	63
Bagan 36. Perilaku murid yang diamati	64
Bagan 37. Manfaat Menjadi RSBI	65
Bagan 38. Kesulitan RSBI Memenuhi Kriteria	65
Bagan 39. Principals' Perspective on Teacher Training	66
Bagan 40. Perubahan di Sekolah Sejak Menjadi RSBI	67
Bagan 41. Mengapa Orang Tua Memilih Sekolah ini	67
Bagan 42. Ekspektasi Orang Tua	67
Bagan 43. Keterlibatan Orang Tuadalam RSBI	68
Bagan 33. Tingkat Capaian Sekolah di Kota Kecil Menuju 20% Murid Penghasilan Rendah	61
Bagan 34. Tingkat Capaian Sekolah Sekolah di Kabupaten Menuju 20% Murid Peng	62
Bagan 35. Perilaku Guru yang Teramati	63
Bagan 36. Perilaku murid yang diamati	64
Bagan 37. Manfaat Menjadi RSBI	65
Bagan 38. Kesulitan RSBI Memenuhi Kriteria	65
Bagan 39. Principals' Perspective on Teacher Training	66
Bagan 40. Perubahan di Sekolah Sejak Menjadi RSBI	67

Daftar Istilah

ACDP	: <i>Analytical and Capacity Development Partnership</i> (Kemitraan untuk Pengembangan Kapasitas dan Analisis Pendidikan)
AusAID	: <i>Australian Agency for International Development</i>
BAPPENAS	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BALITBANG	: Badan Penelitian dan Pengembangan
BPPT	: Badan Pengkajian Penerapan Teknologi
BOS	: Bantuan Operasional Sekolah
DJ	: Direktur Jenderal
MP	: Mitra Pembangunan
UE	: Uni Eropa
Kemendikbud	: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kemenag	: Kementerian Agama
PKLK	: Pendidikan Khusus Layanan Khusus
PTK	: Pendidik dan Tenaga Kependidikan
PLB	: Pendidikan Luar Biasa
RSBI	: Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional
SBI	: Sekolah Bertaraf Internasional
SSI	: Sekolah Standar Internasional
SSN	: Sekolah Standar Nasional
SNP	: Standar Nasional Pendidikan



RINGKASAN EKSEKUTIF

LATAR BELAKANG

Asian Development Bank (ADB) tengah mengelola program bantuan teknis yang didanai bersama oleh *European Union* (EU) dan *Australian Agency for International Development* (AusAID) yang disebut Kemitraan Untuk Pembangunan Kapasitas Dan Analisis Pendidikan ((ACDP) untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam memenuhi komitmen pencapaian kebijakan dan strategi pembangunan jangka menengah untuk mengurangi kemiskinan. Tujuan proyek ini adalah untuk membantu dalam memenuhi tujuan UU Sistem Pendidikan Nasional (20/2003) yang menetapkan tiga prioritas utama pembangunan pendidikan di Indonesia, yaitu: 1) meningkatkan pemerataan dan akses, 2) meningkatkan kualitas dan relevansi, dan 3) memperkuat manajemen dan akuntabilitas. Evaluasi Sekolah Standar Internasional ini dilaksanakan sebagai bagian dari program ACDP tersebut.

TEMUAN UTAMA

Pemetaan

Karena tidak adanya basis data terpadu/tunggal mengenai Sekolah Bertaraf Internasional, Tim Studi telah membuat basis data tunggal melalui pengumpulan data dari empat direktorat di Kemendikbud dan Kemenag (dengan temuan bahwa Kemenag tidak lagi memiliki program sekolah bertaraf internasional). Sebuah Survei Cepat telah dilaksanakan untuk mengkonfirmasi atau memvalidasi informasi ini. Tim Evaluasi telah dapat menghubungi secara langsung 62% dari sekolah-sekolah tersebut dan data-data telah dimasukkan ke dalam basis data yang terkonsolidasi. Pemetaan telah menghasilkan suatu basis data yang komprehensif yang mencakup daftar, lokasi dan informasi profil 1.339 sekolah RSBI di 33 provinsi. Seluruh RSBI distratifikasi berdasarkan wilayah¹. Hasilnya ditunjukkan sebagai berikut:

- Jumlah RSBI di Indonesia 1.339
- 14% sekolah RSBI berlokasi di Kota Besar; 30% di Kota Kecil; 56% di wilayah Kabupaten
- 57% sekolah RSBI berada di Jawa, 19% berlokasi di Aceh, Bali, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Timur; dan sisanya 24% tersebar secara tidak merata diprovinsilainnya. Provinsiterpencil memiliki sedikit sekolah RSBI (Lihat Tabel 10 di bawah ini)
- Perlu tambahan 884 sekolah untuk memenuhi target empat sekolah (untuk semua jenjang) per Kota/kabupaten

1 Stratifikasi: Kota Besar=>1 juta; Kota Kecil =<1 juta; Pedesaan

Pemenuhan (*Compliance*) terhadap Standard SBI

Secara umum, hasil evaluasi tentang tingkat pemenuhan persyaratan sebagai SBI adalah sebagai berikut:

- Belum ada sekolah yang benar-benar menjadi SBI (memenuhi sepeuhnya seluruh persyaratan)
- Kriteria yang paling sulit dipenuhi adalah:
 - Bahasa Inggris sebagai pengantar
 - Akreditasi internasional
 - Adopsi kurikulum internasional
 - 20% murid dari keluarga miskin
 - 20% guru-guru dengan kualifikasi S2/S3

Kesimpulan: Kriteria pemenuhan atas syarat-syarat saat ini sangat sulit untuk dicapai, dan semua sekolah RSBI masih jauh dari pencapaian status SBI.

Pembiayaan

Hasil dari analisis keuangan mengindikasikan:

- Peraturan Menteri 78/2009 mewajibkan seluruh tingkat pemerintahan (pusat, provinsi dan kabupaten/kota) dan masyarakat untuk membiayai RSBI, termasuk biaya masuk dan biaya sekolah
- Pemerintah telah memberikan subsidi sekitar Rp 1 triliun selama lima tahun untuk program tersebut
- Atas dasar biaya satuan (unit cost), RSBI empat (4) kali lebih mahal dibanding non-RSBI (Rp4,5 juta dibandingkan dengan Rp 1,05 juta)
- Orang tua berkontribusi 68% dari biaya investasi RSBI, seluruh tingkatan pemerintah berkontribusi 24%
- Dana BOS juga diberikan untuk SD dan SMP
- 88% murid berasal dari keluarga kelas atas dan menengah
- Kecuali SMK, sekolah-sekolah masih jauh untuk dapat mencapai kuota 20% murid dari keluarga berpenghasilan rendah (rata-rata 12%, kecenderungan lebih tinggi di SMK).

Kapasitas Organisasi

Hasil analisis kapasitas organisasi mengindikasikan:

- Di tingkat pusat, masing-masing direktorat di Kemendikbud telah (secara terpisah) menerbitkan pedoman penyelenggaraan (khususnya syarat-syarat yang harus dipenuhi), serta memberikannya kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan RSBI
- Tidak ada pendekatan yang konsisten terhadap RSBI di tingkat Provinsi dan Kota/Kabupaten
- Terdapat dua jenis struktur organisasi pemerintah di tingkat implementasi:
 - Struktur yang memiliki unit tersendiri/khusus untuk RSBI
 - Struktur yang memadukan tugas-tugas yang terkait RSBI pada unit-unit yang ada saat ini
- Terdapat perbedaan yang besar mengenai pendekatan monitoring dan dukungan di dinas pendidikan, rentangnya mulai dari beberapa kunjungan per tahun hingga tidak ada kunjungan untuk monitoring
- Kantor-kantor yang memiliki unit khusus melakukan monitoring dan memberikan dukungan yang lebih baik daripada kantor yang tidak memiliki unit khusus.
- Instrumen monitoring pemenuhan yang komprehensif telah dilaksanakan oleh beberapa dinas pendidikan, dan laporan pemantauan telah dihasilkan dan dikirim ke sekolah-sekolah.
- Pengembangan profesi staf sekolah terutama difokuskan dalam hal Bahasa Inggris dan kompetensi TIK. Pengembangan profesional berkelanjutan diharapkan digunakan untuk praktek mengajar.

RINGKASAN ANALISIS

Secara keseluruhan, sekolah-sekolah (RSBI) dan masyarakat (di lingkungan sekolah RSBI) memiliki sikap sangat positif terhadap keberadaan RSBI. Mereka merasa bahwa kehadiran sekolah ini membantu masyarakat. Program RSBI dianggap telah menghasilkan banyak sekolah dengan lingkungan yang lebih

baik, lulusan berkualitas tinggi, dan adanya pergeseran fokus ke pengembangan staf yang disertai dengan pelaksanaan monitoring yang berorientasi hasil; selama pelaksanaan program kemungkinan dapat meningkatkan keterampilan dan kompetensi lulusan yang diharapkan.

Bagi masyarakat secara keseluruhan, terdapat bukti-bukti yang menunjukkan bahwa RSBI secara tidak proporsional memberi layanan pendidikan lebih kepada keluarga berpendapatan menengah dan atas (golongan ini mencapai 88%, $n = 854$). Kecuali sekolah teknik (SMK), sebagian besar sekolah mencapai kurang dari kuota yang dipersyaratkan untuk menyediakan layanan kepada 20% murid berpenghasilan rendah. Sejumlah alasan dari aspek keuangan, sosial, dan akademik mungkin memberi kontribusi pada situasi ini, dan perhatian yang lebih besar dari pemerintah sangat diperlukan untuk memastikan terpenuhinya ketentuan mengenai pelayanan bagi murid dari keluarga berpenghasilan rendah.

Meskipun sekolah-sekolah (RSBI) tetap memandang positif keberadaan RSBI, sejumlah isu kunci berikut ini berkontribusi terhadap hambatan dan kendala bagi sekolah untuk mengambil tindakan yang memadai dalam upaya mencapai tujuan program.

Isu 1: Implementasi Kebijakan

Pelaksanaan Peraturan Menteri Nomor 78/2009 bervariasi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Evaluasi ini telah mengidentifikasi daerah-daerah yang tercakup dalam sistem yang berkontribusi terhadap kurangnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program secara keseluruhan seperti yang diinginkan. Pengaturan keuangan belum mampu berfungsi sebagai dasar bagi keberhasilan perencanaan dan penganggaran sekolah. Formula alokasi dan belum konsisten dari tahun ke tahun: sekolah yang ikut program belakangan menerima dukungan pendanaan yang lebih kecil dari pemerintah. Pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, hasil evaluasi menunjukkan terdapat variasi interpretasi kebijakan mengenai peran dan tanggung jawab terhadap pengelolaan RSBI. Standar minimum akreditasi belum dicapai oleh semua sekolah², dan tanggung jawab dan kegiatan monitoring sangat bervariasi. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kapasitas sistem memerlukan perbaikan mendasar, serta kurangnya dukungan yang konsisten untuk monitoring pemenuhan persyaratan (sebagai SBI) sehingga sekolah tidak mampu melaksanakan perencanaan dan penganggaran secara efektif. Dalam rangka meningkatkan kapasitas sistem pendukung RSBI, langkah-langkah pembangunan kapasitas harus diambil dengan fokus pada sumber daya pendukung sekolah, disertai dengan monitoring dan pengawasan berbasis hasil.

Isu 2: Hambatan terhadap Pemenuhan Persyaratan

Berbagai hambatan dan kendala kontekstual telah menghalangi sekolah dalam mencapai pemenuhan sembilan standar SBI. Penelitian tingkat nasional dan internasional menunjukkan bahwa hasil pembelajaran/kurikulum menjadi terganggu manakala Bahasa Inggris digunakan sebagai pengantar dalam proses belajar-mengajar. Akreditasi internasional masih diluar jangkauan sebagian besar sekolah untuk memenuhi standar tersebut, dan hal ini kemungkinan besar berhubungan dengan bahasa dan kemampuan lobi pemerintah (pusat) guna memfasilitasi proses akreditasi internasional. Adopsi kurikulum mengindikasikan hal serupa, disamping adanya hambatan dan kendala kapasitas mengajar dan belajar. Kesulitan yang masih muncul dalam upaya mencapai kuota 20% untuk murid berpenghasilan rendah kemungkinan berhubungan dengan perbedaan status sosial-ekonomi, khususnya isu rendahnya kualifikasi akademik di kalangan murid berpenghasilan rendah. Sekolah mengalami kesulitan untuk mencapai 20% guru berpendidikan S2 atau S3, yang mungkin berhubungan dengan masalah biaya dan waktu.

² Dari 70 sekolah yang disurvei dalam studi lapangan, 4 sekolah memiliki tingkat akreditasi kurang dari "A".

Isu 3: Pengaturan Keuangan berbasis Sekolah

Pemungutan uang sekolah kepada orang tua murid diperlukan untuk memastikan bahwa ada dana yang tersedia untuk pemenuhan standar yang berhubungan dengan fasilitas sekolah, khususnya TIK. Akan tetapi, struktur biaya saat ini mungkin menjadi penghalang bagi sekolah untuk meningkatkan akses bagi murid berpenghasilan rendah. Pengaturan keuangan yang berlaku saat ini memungkinkan RSBI memungut uang masuk sekolah dan uang bulanan, dengan jumlah total diserahkan kepada kebijaksanaan sekolah (sesuai dengan penawaran dan permintaan). Pengaturan demikian itu pada dasarnya bisa menguntungkan mereka yang mampu membayar, dengan mengorbankan mereka yang tidak mampu, dan temuan evaluasi ini mendukung hal ini di mana data distribusi beasiswa memiliki korelasi yang nyata terhadap kondisi tingkat sosial ekonomi. Penyesuaian pengaturan keuangan berbasis sekolah untuk membatasi kontribusi total, ditambah dengan perekrutan murid berpenghasilan rendah secara proaktif dan program-program bermuatan sosial yang memberikan sanksi bagi sekolah-sekolah yang tidak taat, serta membahas masalah-masalah diskriminasi sosial melalui program yang mengasah kepekaan dan toleransi sosial kemungkinan akan memberikan efek positif secara keseluruhan ke arah perlakuan yang lebih adil.

OPSI-OPSI KEBIJAKAN UNTUK SBI

Dari evaluasi ini, telah diidentifikasi opsi kebijakan yang mempertimbangkan arahan dari UU 20/2003 untuk membentuk “unit-unit pendidikan bertaraf internasional”. Opsi-opsi kebijakan ini dimaksudkan untuk dipilih dalam konteks peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku. Setelah melakukan analisis data secara intensif dan konsultasi dan wawancara dengan mitra kunci pemerintah di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota dan dengan personil sekolah dan anggota masyarakat, tiga pilihan/opsi mengenai masa depan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) diajukan untuk dipertimbangkan oleh penentu kebijakan (uraian mendalam ada dalam Bab 7 mengenai dasar pemikiran dan konsekuensi dari setiap opsi, dengan perubahan kebijakan yang disarankan pada saat ini: Opsi Kebijakan 3).

OPSI 1: Mempertahankan Kebijakan SBI Saat ini

Dasar Pemikiran: UU 20/2003 adalah hukum negara, dan meskipun sedang dikaji oleh Mahkamah Konstitusi, masih terlalu dini untuk mengubah hukum serta kebijakan rinci berbagai peraturan pelaksanaan UU tersebut. Mengubah peraturan tingkat yang lebih rendah seperti keputusan menteri pada umumnya dapat dilakukan tanpa kesulitan. Namun, mengubah UU adalah sebuah langkah yang tidak mudah, terutama karena melibatkan DPR yang biasanya lebih menekankan unsur politik ketimbang pertimbangan teknis.

Investasi besar-besaran telah dilakukan dalam program RSBI untuk membangun infrastruktur, pengadaan peralatan dan melatih para guru. Investasi ini telah dilakukan dengan dana pemerintah yang jumlahnya besar (lebih dari Rp 1 triliun), termasuk pinjaman yang cukup besar dari ADB untuk SMK Bertaraf Internasional, serta sejumlah besar biaya yang dibayar oleh orang tua dan kontribusi dari dunia usaha. Harapan pada murid, personil sekolah, orang tua dan masyarakat telah demikian tinggiterait dengan prospek sebuah sekolah internasional yang tersedia di setiap kabupaten dan kota di Indonesia.

Konsekuensi: Kelanjutan dari kebijakan saat ini akan menegaskan bahwa kebijakan tersebut efektif. Namun, hal ini akan bertentangan dengan banyak temuan dari evaluasi yang menunjukkan bahwa kebijakan dan peraturan tidak efektif untuk mencapai tujuan utama undang-undang tersebut. Meskipun program ini mendapatkan banyak dukungan, namun beberapa pemangku kepentingan yang berpengaruh prihatin tentang biaya dan persepsi bahwa itu merupakan program pemerintah bersubsidi untuk kelompok “elit.”

Kesimpulan untuk Opsi 1: Temuan evaluasi menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan yang diharapkan dapat terwujud dengan meningkatkan standar sekolah terpilih untuk memenuhi standar internasional ternyata belum efektif dalam meningkatkan kinerja murid dalam ujian nasional³. Temuan tersebut juga menunjukkan bahwa akan sangat sulit, mahal dan memakan waktu untuk mewujudkan 1.339 sekolah yang ditunjuk sebagai RSBI untuk memenuhi semua standar dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri 78/2009. Selanjutnya, jika Permen ini diikuti, itu berarti 884 RSBI lain perlu dibentuk dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang yang menyatakan bahwa pada setiap tingkat pendidikan dasar dan menengah harus dibentuk di setiap kabupaten dan kota.

OPSI 2: Menghentikan Program RSBI

Dasar Pemikiran: Program ini sangat mahal dan menyerap dana pemerintah yang sebenarnya dapat digunakan untuk kebutuhan yang lebih mendesak seperti membantu sekolah dan kabupaten/kota memenuhi SPM dan melaksanakan pendidikan dasar gratis sesuai dengan kebijakan saat ini. Penelitian ini menunjukkan bahwa setelah enam tahun, mayoritas sekolah RSBI belum memenuhi kebutuhan infrastruktur maupun peralatan sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri 78/2009. Pemenuhan persyaratan ini membutuhkan investasi lebih lanjut yang cukup besar selama tahun-tahun mendatang. Selain itu, kelanjutan dari kebijakan mengenai satu sekolah (SBI) pada setiap jenis sekolah untuk setiap kabupaten/kota akan membutuhkan 884 sekolah tambahan, yang membutuhkan lebih banyak investasi untuk mencapai target yang ditentukan.

Sejumlah besar investasi, baik dari pemerintah, orang tua dan masyarakat selama enam tahun terakhir tidak menghasilkan perbaikan yang terukur dalam hal kinerja murid (diliat dari hasil Ujian Nasional yang rata-rata sama dengan murid dari sekolah yang sebanding yang tidak berstatus RSBI) dan adanya fakta bahwa peralatan mahal yang sudah dibeli tidak digunakan secara efektif.

Kritikan utama dari program RSBI adalah bahwa ia bersifat diskriminatif terhadap anak-anak dari strata sosial ekonomi bawah. Peraturan saat ini mensyaratkan paling sedikit 20% murid kurang mampu ditampung di sekolah-sekolah standar internasional, namun data evaluasi menunjukkan bahwa rata-rata murid yang menerima beasiswa (artinya: berasal dari kelompok tidak mampu) hanya sekitar 12%⁴. Selain hambatan keuangan, murid yang kurang mampu juga menghadapi hambatan akademik dan budaya yang mungkin memiliki efek negatif secara nyata pada kemauan mereka untuk mendaftar ke RSBI. Kinerja akademik anak dari kelompok sosial ekonomi bawah cenderung lebih rendah dibandingkan dengan mereka dari strata sosial ekonomi yang lebih tinggi, dan sering kali murid kurang mampu yang menerima subsidi (di RSBI) mendapat menghadapi ejekan dari murid yang lebih kaya.

Konsekuensi: Opsi ini memiliki konsekuensi politik yang signifikan, karena membutuhkan perubahan dalam undang-undang (UU 20/2003). Selain itu, jika opsi ini diambil, perlu pertimbangan yang matang terkait investasi yang telah dilakukan pada 1.339 RSBI saat ini. Investasi ini mungkin bisa “dihapuskan” sebagai proyek percontohan yang tidak memenuhi harapan. Pada opsi ini pengecualian yang memungkinkan SD dan SMP negeri menarik biaya akan dibatalkan. Subsidi BOS tidak akan cukup untuk menutupi biaya operasional dan pemeliharaan yang mahal atas investasi peralatan dan infrastruktur yang sudah dilakukan. Evaluasi ini tidak menemukan bukti apakah sekolah-sekolah swasta bisa mencapai standar internasional yang didefinisikan saat ini tanpa bantuan pemerintah.

Data kualitatif menunjukkan bahwa ada banyak kebanggaan masyarakat terhadap RSBI; dan orang tua, personil sekolah dan *stakeholder* kunci memiliki harapan tinggi untuk masa depan. Bukti menunjukkan bahwa ada motivasi tinggi bagi para guru untuk meningkatkan mutu pengajaran, belajar Bahasa Inggris dan untuk meraih gelar yang lebih tinggi. Sekolah-sekolah lain (non RSBI) telah termotivasi untuk meningkatkan kualitas pengajaran dengan harapan bahwa sekolah tersebut suatu hari nanti dapat masuk program RSBI. Penghentian program kemungkinan akan membuat para guru dan tenaga

3 Meskipun murid RSBI unggul berdasarkan rata-rata nasional, data tidak meyakinkan karena rata-rata nasional termasuk sekolah di semua tingkat akreditasi, sedangkan hampir semua RSBI dalam sampel sudah di tingkat akreditasi “A”.

4 Lihat juga “*Design Research Policy Implementation RSBI*”, Pusat Penelitian Kebijakan, BALITBANG, Kemendikbud, Jakarta, 2011

kependidikan dan segmen tertentu masyarakat menjadi tertekan dan putus asa, yang dapat berakibat negatif terhadap dukungan masyarakat yang ada di sekitar sekolah, dan terhadap motivasi peningkatan kualitas pendidikan dalam beberapa waktu ke depan.

Berbagi hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Bahasa Inggris sebagai pengantar secara signifikan mengurangi pencapaian keseluruhan tujuan kurikulum⁵. Temuan ini, bersama dengan sulitnya sekolah mencapai akreditasi dan adopsi kurikulum internasional telah mendukung klaim bahwa hal-hal tersebut telah menjadi hambatan yang signifikan untuk peningkatan kualitas pendidikan, dan jika hambatan tersebut dihapus, kinerja sekolah kemungkinan akan meningkat.

Kesimpulan untuk Opsi 2: Terdapat suatu efek samping potensial dari investasi yang sudah dilakukan jika kebijakan tersebut dihentikan, dan tunjangan khusus untuk RSBI untuk membebaskan biaya dibatalkan. BOS saja tidak cukup untuk mengoperasikan dan memelihara peralatan yang telah diadakan. Pemutusan kebijakan ini kemungkinan akan mengakibatkan RSBI kembali menjadi standar sebelumnya yang dapat mengakibatkan berkurangnya motivasi para pemangku kepentingan, dan berpotensi memiliki dampak negatif terhadap sikap masyarakat pemangku kepentingan RSBI dan motivasi untuk peningkatan kualitas pendidikan. Akhirnya, tanpa dukungan khusus yang melalui kebijakan ini, potensi untuk mengubah situasi dan menggunakan secara baik investasi tersebut dengan dukungan lanjutan yang relatif lebih moderat dari pemerintah dan masyarakat akan hilang.

Opsi 3: Modifikasi Kebijakan dan Regulasi

Dasar Pemikiran: Temuan evaluasi jelas menunjukkan bahwa murid di sekolah RSBI tidak menunjukkan kinerja yang lebih baik daripada rata-rata murid di sekolah sejenis yang tidak berstatus RSBI. Temuan juga menunjukkan bahwa sekolah RSBI masih jauh dari memenuhi semua persyaratan dan standar yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri 78/2009. Namun, bersama dengan beberapa penelitian tentang RSBI saat ini, evaluasi ini menunjukkan bahwa sebagian besar kekurangan yang teridentifikasi dapat diatasi dengan membuat modifikasi regulasi dalam payung hukum UU 20/2003 tanpa harus mengubah UU 20/2003 itu sendiri.

Keuntungan opsi ini adalah ia akan:

- mempertahankan dan memanfaatkan lebih lanjut investasi yang sudah dilakukan melalui program RSBI;
- tidak mengecewakan dan mengurangi motivasi di tingkat akar rumput akibat penghentian program, dan terus menjadi faktor pendorong untuk meningkatkan kualitas yang lebih baik di RSBI dan sekolah lainnya;
- meneruskan titik awal bagi praktik terbaik internasional tanpa kesulitan untuk mencapai persyaratan-persyaratan SBIterkait adopsi kurikulum dan akreditasi negara maju;
- hanya membutuhkan investasi lebih lanjut yang tidak terlalu besar oleh pemerintah dengan memanfaatkan kontribusi dari orang tua yang mampu dan dunia usaha;
- Mengenaikan sanksi untuk memastikan 20% murid yang kurang mampu ditampung oleh RSBI.

Konsekuensi: Opsi ini akan membutuhkan perubahan signifikan dalam Peraturan Menteri 78/2009 - seperti menghapus persyaratan penggunaan Bahasa Inggris sebagai pengantar - tapi tidak membutuhkan perubahan dalam UU. Isu-isu besar lainnya yang perlu ditangani adalah yang berkaitan dengan: praktik pendanaan dan akomodasi untuk murid yang secara sosio-ekonomi kurang mampu, pertimbangan mengenai suatu standar akreditasi baru yang lebih tinggi dari Sekolah Standar Nasional tetapi tidak pada tingkat standar internasional sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri 78/2009, perbaikan manajemen pengawasan dan monitoring, status saat ini sekolah-sekolah RSBI yang

5 Lihat Nunan (2003); Kirkpatrick (2011); Sultan, et.al. (2012)

belum mencapai status SBI; target yang tidak terpenuhi untuk membangun empat tingkat bertaraf internasional di setiap kabupaten/kota sebagaimana diamanatkan oleh UU 20/2003 (diperlukan tambahan 884 sekolah atau lebih).

Kesimpulan untuk Opsi 3: Temuan evaluasi menunjukkan bahwa dengan menghapus hambatan pemenuhan SBI, RSBI memiliki potensi sebagai titik awal dan pusat penyebaran praktik terbaik internasional yang sangat dibutuhkan (tidak hanya dalam hal proses belajar-mengajar, tetapi juga dalam hal manajemen dan organisasi). Yang disajikan di bawah ini adalah rekomendasi khusus untuk sebuah peraturan menteri yang baru untuk menggantikan Peraturan Menteri 78/2009.

Langkah yang direkomendasikan untuk Pilihan 3:

Rencana dan Pengawasan Kebijakan

- Membentuk gugus tugas antar-direktorat untuk memfasilitasi dan memonitor proses penyusunan peraturan menteri yang baru dan sebagai forum komunikasi/konsultasi

Pemenuhan Persyaratan (*Compliance*)

- Hapus ketentuan Bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar
- Hapus persyaratan formal untuk Akreditasi Negara OECD atau Negara maju lainnya
- Hapus persyaratan formal Adopsi Kurikulum Negara OECD atau negara maju lain
- Kaji ulang kebijakan Pemenuhan terhadap ISO, terutama untuk sekolah-sekolah SD
- Sertakan kurikulum dari OECD atau dari negara lain sebagai referensi Kurikulum⁶
- Bahasa Inggris diajarkan sebagai mata pelajaran wajib
- Menuntut persyaratan kelulusan murid lebih tinggi dengan mengadopsi inovasi dalam ujian sebagai praktek inovasi ujian internasional (misalnya adopsi tes PISA, menerapkan Pertanyaan Kritis untuk menilai pemikiran kritis dan kompetensi pemecahan masalah)

Pengaturan Keuangan

- Terapkan batas atas (pagu) kontribusi orang tua untuk mengurangi perbedaan kelompok-kelompok penduduk dengan kondisi sosial-ekonomi yang berbeda di sekolah
- Bekukan pendanaan untuk infrastruktur dari pemerintah, dan menerapkan penilaian kebutuhan infrastruktur yang komprehensif yang disesuaikan dengan standar minimum
- Lanjutkan pembiayaan BOS
- Menyediakan voucher bagi murid berpenghasilan rendah untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler

Kesamaan Akses bagi Murid Berpendapatan Rendah

- Memperkenalkan suatu persyaratan perekrutan murid secara aktif untuk mencapai kuota 20% murid berpenghasilan rendah
- Menerapkan sanksi bagi sekolah yang tidak mencapai kuota tersebut.
- Memperkenalkan toleransi program inklusi dan harmonisasi untuk memperbaiki isu-isu sosial budaya yang mungkin timbul antara murid dari kelompok sosial-ekonomi dan budaya yang berbeda

⁶ Suatu "Referensi kurikulum" akan merupakan sumber daya pengajaran tambahan untuk pengkayaan muatan dan alternative metodologi praktik pengajaran, namun rekomendasi tersebut tidak akan membutuhkan adopsi formal. Pedoman deskriptif khusus untuk kurikulum referensi perlu dikembangkan.

Persyaratan Tingkat Akreditasi Baru

- Menetapkan suatu persyaratan tingkat akreditasi yang baru yang lebih tinggi dari SSN tetapi lebih rendah dari SBI untuk memungkinkan adanya peningkatan kualitas yang ditargetkan dapat dikelola dalam konteks Indonesia

Pengembangan Kapasitas

- Merumuskan Peraturan Menteri baru yang memuat persyaratan pengembangan kapasitas di tingkat pemerintah daerah untuk membantu aparatur di daerah memahami peraturan dan mendapatkan keterampilan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan dan monitoring.

Monitoring dan Evaluasi Program

- Tunda ekspansi RSBI di kabupaten/kota yang tersisa agar lebih fokus pada pelaksanaan langkah-langkah baru yang direkomendasikan
- Monitoring berkelanjutan atas program yang memberikan umpan balik untuk penilaian program dan kegiatan evaluasi
- Setelah tiga tahun pelaksanaan atas langkah-langkah yang disarankan, suatu evaluasi yang ekstensif harus dilakukan terhadap langkah-langkah baru tersebut untuk menilai sejauh mana keberhasilan langkah-langkah baru dalam peningkatan kualitas

Peringatan Sebelum Keputusan Mahkamah Konstitusi

Program SBI saat ini tengah ditangguhkan menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi apakah ketentuan UU 20/2003 (UU Sisdiknas) adalah konstitusional. Ada kemungkinan bahwa Mahkamah akan memutuskan adanya pelanggaran konstitusi, yang menyebabkan penyusunan ulang Undang-Undang Sisdiknas. Jika hal ini terjadi, pemahaman kita adalah bahwa program SBI tidak lagi berlaku. Jika hal ini terjadi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan direkomendasikan untuk mengubah nama sekolah RSBI menjadi "Sekolah Rujukan Internasional". Pelaksanaan yang efektif dari rekomendasi tersebut diharapkan akan menghasilkan program yang lebih adil.



Bab 1

Pendahuluan

1.0 PENDAHULUAN⁷

Sebuah tim yang terdiri atas satu tenaga ahli internasional dan empat tenaga ahli nasional telah melakukan penelitian dengan bekerja secara penuh waktu selama lima bulan. Tim ini dibantu oleh empat orang operator pemasukan data yang bekerja dari kantor pusat dan 14 peneliti lapangan. Penelitian tersebut telah menyelesaikan seluruh kegiatan dan memenuhi semua output dalam jangka waktu yang diamanatkan oleh Kerangka Acuan Kerja ACDP (Lampiran 1).

1.1. Tujuan Pembangunan

Terkait pembangunan, Evaluasi Sekolah Bertaraf Internasional adalah untuk memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan social dan ekonomi jangka menengah dan jangka panjang melalui pengembangan/penyesuaian kebijakan, strategi, dan program-program untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

1.2. Maksud Evaluasi

Evaluasi Sekolah Bertaraf Internasional ini dimaksudkan untuk melakukan analisis situasi Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) untuk mendapatkan wawasan dan pemahaman tentang isu-isu kunci dan faktor yang berpengaruh dalam lingkungan kebijakan dan praktek pelaksanaannya dalam rangka penyusunan rekomendasi yang informatif untuk penyesuaian kebijakan dan perbaikan program.

1.3. Landasan Evaluasi

Evaluasi SBI dilakukan pada akhir periode program percobaan enam tahun. Agar para pembuat kebijakan terlibat dalam dialog dan pengambilan keputusan mengenai kebijakan dan pelaksanaan SBI, analisis situasional program perlu dilakukan untuk menentukan status pelaksanaan, efektivitas kebijakan tentang hasil yang diharapkan, dan untuk membantu membangun pemahaman isu-isu, tantangan dan hambatan empiris dengan berbasis pada fakta dalam konteks sistem pendidikan di Indonesia. Sebuah penelitian mendalam secara kuantitatif dan kualitatif dimaksudkan untuk melihat

⁷ Saat ini belum ada SBI di Indonesia, yang ada adalah Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI)

status program saat ini yang akan mengarah pada upaya peningkatan kualitas atau mengatasi hambatan kebijakan atau penerapannya. Selain itu, program ini telah menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan akses dan pemerataan, dan telah menimbulkan pertanyaan mengenai konstitusionalitas program dan potensi konflik kebijakan yang terkait dengan maksud dari UU Sistem Pendidikan Nasional (UU 20/2003) dan Standar Nasional Pendidikan (PP 19/2005). Oleh karena itu kemudian menjadi penting untuk memetakan situasi SBI, memasukkannya dalam dialog kritis tentang program, dan mengatasi masalah berdasarkan bukti lapangan. Hanya dengan cara seperti itu kemudian dapat diambil keputusan untuk penyesuaian kebijakan dan perbaikan program seperti yang diinginkan.

1.4. Fokus Evaluasi

Kerangka Acuan Kerja (KAK/TOR) kegiatan evaluasi memberi panduan perumusan tujuan dan perencanaan untuk penugasan.

Tabel 1–Aktivitas Evaluasi

AKTIVITAS	TUJUAN/RELEVANSI	INDIKATOR
Pemetaan & Analisis SBI	Melihat status saat ini	Jumlah sekolah menurut jenis, kelas, lokasi geografis, kota/kabupaten, status sosial-ekonomi dari lokasi, pendaftaran di kelas internasional, sekolah yang direncanakan
Evaluasi pemenuhan syarat-syarat yang terkait dengan prestasi	Melihat tingkat pencapaian pemenuhan	Bahasa pengantar, pelaksanaan kurikulum, metode pembelajaran, materi belajar mengajar, kualifikasi guru dan kepala sekolah, pengembangan profesi guru, penilaian terhadap murid dan praktik pemeriksaan dan hasilnya, fasilitas sekolah termasuk TIK, kegiatan ekstrakurikuler, praktik manajemen sekolah, peran pemerintah, supervisi sekolah, pembiayaan sekolah, analisis pembelanjaan publik, beasiswa, akreditasi, kebijakan dan analisis kerangka peraturan

1.5. Tujuan

Kerangka Acuan Kerja (KAK/TOR) kegiatan evaluasi memberi panduan perumusan tujuan dan perencanaan untuk penugasan⁸. Setelah mempertimbangkan dengan cermat dan melalui serangkaian diskusi dengan pengguna (klien) mengenai dasar pemikiran dan maksud di balik KAK/TOR, lima (5) tujuan utama untuk evaluasi telah diidentifikasi selama Tahap Awal penugasan, yaitu:

- 1) Memperoleh data kuantitatif yang valid dan dapat diandalkan untuk melaksanakan analisis situasi program SBI dalam hal pemenuhan persyaratan, proses perubahan, dan perbandingan dengan sekolah non-SBI
- 2) Menugaskan Tim Studi Lapangan untuk melaksanakan survei *random sampling* minimal 70 RSBI dan 9 non-RSBI, melaksanakan pengamatan dan perekaman data secara akurat dan wawancara mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan

⁸ Lihat Kerangka Acuan Kerja Lampiran 2.

- 3) Memperoleh data kualitatif yang valid dan dapat diandalkan dalam untuk mendapatkan informasi tentang alasan yang mendasari isu-isu kunci guna membuat rekomendasi yang informatif terkait kebijakan dan praktek untuk perbaikan kebijakan dan peningkatan kualitas program
- 4) Melaksanakan wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota guna mendapatkan wawasan tentang interpretasi kontekstual kebijakan, praktek pelaksanaan, dan informasi kapasitas organisasi secara keseluruhan yang mendukung RSBI.
- 5) Membangun kapasitas di Pusat Penelitian Kebijakan (Balitbang) melalui pelibatan *counterpart* dalam studi lapangan.

1.6. Ruang Lingkup

Kegiatan evaluasi Sekolah Bertaraf Internasional bertujuan untuk menyediakan data yang handal dan relevan untuk lebih memahami lingkungan kebijakan dan situasi, serta kecenderungan pelaksanaan program SBI dalam hal pemenuhan persyaratan, proses perubahan, dan perbandingan dengan sekolah non-SBI. Oleh karenanya ruang lingkup penelitian adalah untuk membuat sebuah “peta” profil RSBI dan informasi status pemenuhan persyaratan, dan untuk menghasilkan data yang relevan dan diandalkan untuk memungkinkan analisis yang akurat tentang situasi dan wawasan terhadap kebijakan kunci dan isu-isu implementasi, yang dilaksanakan sesuai sumber daya dan waktu. Studi ini mencakup: 1) Survei Cepat ke seluruh (1.339) RSBI, 2) Kajian lapangan mendalam secara kuantitatif dan kualitatif terhadap sampel acak 70 RSBI dan 9 non-RSBI; dan 3) Wawancara dengan pemangku kepentingan di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota (lihat keterangan lengkap tentang metodologi dalam Bagian 3). Meskipun secara ideal ukuran sampel yang lebih besar akan meningkatkan akurasi dan mengurangi kesalahan survei, namun aspek kepraktisan dan biaya membatasi jumlah sekolah dalam survei lapangan.

Survei Cepat dilakukan dari kantor TIA menggunakan tim yang terdiri dari empat peneliti. Studi lapangan menugaskan tujuh tim yang masing-masing terdiri dari dua orang untuk pengumpulan data secara mendalam pada 70 RSBI dan 9 sekolah non-RSBI (sebagai pembandingan) di 23 Kota/Kabupaten di 12 Provinsi. Semua jenis sekolah termasuk dalam sampel: SD, SMP, SMA, dan SMK, negeri dan swasta⁹. Tim Studi lapangan mengunjungi setiap kantor Dinas Pendidikan kabupaten/Kota sampel untuk melakukan wawancara mendalam kepada pemangku kepentingan, dan untuk mengambil sampel sekolah guna mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif yang komprehensif untuk mendukung analisis.

1.7. Kegiatan

Tabel 3 di bawah ini meringkas elemen-elemen utama dari setiap kegiatan:

Tabel 2–Elemen Utama Evaluasi

Kegiatan	Tujuan	Metode	Jenis Data
Survei Cepat	Untuk mendapatkan gambaran cepat tentang situasi RSBI	Survei secara terpusat melalui telepon/fax/email	Data dasar profil sekolah, termasuk biaya sekolah, jumlah murid, kelas internasional, juga data pemenuhansyarat seperti persentase murid berpenghasilan rendah, kompetensi guru dalam Bahasa Inggris, tingkat pendidikan, hasil ujian, dll

⁹ Awalnya juga memasukkan madrasah, namun setelah berdiskusi dengan Kementerian Agama terungkap tidak ada madrasah yang mengikuti model RSBI, dan tak satupun madrasah yang menerapkan standar internasional seperti didefinisikan oleh Kemendikbud..

Studi lapangan	Pengamatan secara mendalam dalam hal pemenuhan, sejarah (proses) dan perbandingan situasi untuk mengidentifikasi isu-isu kunci dan kecenderungan.	Penugasan Tim Studi lapangan untuk melakukan survey mendalam secara kuantitatif dan kualitatif terhadap sekolah sampel yang diambil secara acak dan terhadap pemangku kepentingan dengan menggunakan kuesioner	Data kuantitatif sekolah yang mendalam termasuk: status akreditasi, jumlah murid, fasilitas, kurikulum, metode belajar mengajar, manajemen sekolah. Juga wawancara mendalam untuk mendapatkan data kualitatif tentang isu-isu kunci dan informasi situasional untuk keperluan triangulasi.
Wawancara Pemangku Kepentingan	Kebijakan, tata laksana, dan pelaksanaan diskusi untuk memberikan wawasan tentang isu-isu kunci dan untuk panduan analisis program	Wawancara tatap muka	Data kualitatif yang meliputi perspektif kebijakan, kecenderungan interpretasi, pengaturan organisasi RSBI, mekanisme pemenuhan sekolah, sistem pengelolaan program, alur kerja, dan tanggung jawab;



Bab 2.

ANALISIS SITUASI

2.1. Kerangka Peraturan

Kebijakan dan peraturan tentang Sekolah Bertaraf Internasional didasarkan pada UU Pendidikan Nasional (20/2003) yang menetapkan mandat untuk membentuk satuan pendidikan bertaraf internasional yang akan mempersiapkan murid agar mampu bersaing di kancah internasional. Maksud UU 20/2003 adalah untuk menetapkan arahan hukum dalam perumusan standar pendidikan yang mencakup standar internasional sebagai strategi peningkatan kualitas. Pasal 50 Undang-Undang tersebut menetapkan bahwa pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah harus membentuk 'satu sekolah bertaraf internasional' pada setiap tingkat pendidikan (SD, SMP, SLTA umum dan kejuruan) di masing-masing kota/kabupaten. Selanjutnya, pengembangan program sekolah bertaraf internasional diatur oleh berbagai peraturan (daftar peraturan disajikan pada Lampiran 2).

Dalam peraturan tentang program sekolah bertaraf internasional, pada tahap awal tiga dokumen kebijakan utama (setelah UU 20/2003) menjadi panduan pelaksanaan dan pengelolaan program SBI. Ketiga dokumen ini adalah: 1) Peraturan Pemerintah 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang menetapkan standar untuk semua sekolah, termasuk sekolah bertaraf internasional; 2) Peraturan Pemerintah 38/2007 tentang pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kota/Kabupaten yang membahas peran pemerintah dalam sekolah bertaraf internasional, dan 3) Peraturan Menteri Nomor 78/2009 tentang pengoperasian sekolah bertaraf internasional di jenjang pendidikan dasar dan menengah. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah 17/2010 memberi landasan, mengkonsolidasikan, memperkuat, dan berupaya untuk memperjelas kebijakan sebelumnya dengan menetapkan (atau menegaskan) parameter spesifik implementasi SBI dan menetapkan tanggung jawab/tugas pemerintah pusat hingga ke provinsi dan kabupaten/kota yang mencakup tanggung jawab dalam hal keuangan, kepegawaian, dan pengawasan.

Dalam kerangka hukum Indonesia, mengubah peraturan tingkat yang lebih rendah seperti peraturan menteri merupakan hal yang umum dan dapat dilakukan tanpa kesulitan. Akan tetapi, mengubah Undang-Undang merupakan hal yang lebih sulit, karena melibatkan DPR yang serigkali mengedepankan pertimbangan politik ketimbang teknis. Undang-Undang yang menetapkan persyaratan sekolah bertaraf internasional telah menjadi bahan perdebatan selama beberapa tahun terakhir dan saat ini sedang ditinjau oleh Mahkamah Konstitusi. Tim Evaluasi telah menyadari sepenuhnya konsekuensi hukum tersebut dan telah mempertimbangkan dengan hati-hati dalam menyajikan pilihan kebijakan untuk SBI.

2.2 Standar yang Harus Dipenuhi

Standar pemenuhan yang berlaku untuk program SBI didasarkan pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) 19/2005. Untuk lolos seleksi sebagai calon SBI, sekolah harus memenuhi delapan standar SNP ditambah dengan “standar pendidikan dari negara-negara maju”¹⁰. SNP memberikan dasar bagi SBI, sedangkan persamaan berikut menggambarkan konsep:

SNP + “X” = SBI dimana “X” sama dengan standar tambahan kualitas yang dimaksudkan oleh program. Peraturan Menteri 78/2009 menetapkan sejumlah standar tambahan untuk sekolah Indonesia yang baik untuk menjadi Sekolah Bertaraf Internasional. Standar tambahan yang dimaksud diantaranya adalah: penggunaan Bahasa Inggris sebagai pengantar di mata pelajaran IPA, matematika, dan mata pelajaran kejuruan; adopsi kurikulum dan standar akreditasi dari Negara OECD atau negara maju lainnya; diakreditasi lembaga akreditasi Negara OECD atau negara maju lainnya; bekerja sama dengan pihak luar negeri dan menerapkan program “sister school”; guru dan kepala sekolah yang memiliki jenjang S2 (master), memiliki fasilitas TIK lengkap; dll

Tim Evaluasi telah mempelajari Permendiknas 78/2009 dengan sangat rinci untuk menjadi dasar dalam penilaian pemenuhan persyaratan di sekolah yang telah ditunjuk menjadi SBI. Persyaratan yang tercantum dalam peraturan jumlahnya banyak dan dalam beberapa kasus tidak jelas (misalnya, standar “diperkaya” dengan standar dari negara lain, diperkaya tidak didefinisikan dan dengan demikian sulit untuk mengukur pemenuhan). Selanjutnya kami menemukan bahwa direktorat-direktorat di pusat (SD, SMP, SMA, SMK) telah menerbitkan pedoman masing-masing untuk RSBI, dan terdapat perbedaan dalam penafsiran kebijakan di antara direktorat. Hal ini menimbulkan banyak kebingungan atau beban ekstra pada pemerintah daerah untuk melaksanakan empat panduan dengan empat gugus kriteria pemenuhannya yang berbeda.

Kami juga menemukan adanya variasi dalam persepsi para pemangku kepentingan terkait pemahaman tujuan pemerintah dalam mendirikan SBI di daerah, mulai dari memberikan kemudahan akses orang tua untuk mempersiapkan anak-anak mereka untuk belajar di universitas asing (setelah lulus dari SMA), hingga untuk mempersiapkan murid mendapatkan pekerjaan di luar negeri segera setelah lulus dari sekolah kejuruan, melalui peningkatan kualitas semua sekolah di Indonesia secara keseluruhan. Salah satu tujuan evaluasi ini adalah untuk membantu mengklarifikasi apakah harapan tersebut realistis dan layak untuk dapat dicapai dalam waktu dekat dan menengah dengan mempertimbangkan sumber daya yang terbatas di Indonesia.

2.3 Pelaksanaan Program

Kerangka SNP + “X” yang didasarkan pada kebijakan dan peraturan menteri di tahap awal telah mengarahkan pembentukan rintisan SBI pertama kali pada tahun 2006. Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) merupakan sekolah yang dipilih dan disetujui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai calon untuk menjadi SBI sepenuhnya setelah periode pengembangan. Dengan penunjukan RSBI, sekolah menerima dana tambahan untuk mendukung upaya mereka untuk memenuhi persyaratan SBI secara penuh, serta mendapat pengecualian dari kebijakan “pendidikan gratis” (Peraturan Menteri 29/2007), sehingga memungkinkan sekolah RSBI untuk mengumpulkan dana dari orang tua guna mendukung program standar internasional dan kebutuhan sumber daya

Praktik Organisasi dan Manajemen RSBI

Praktek manajemen dan organisasi cukup bervariasi. Terdapat praktek-praktek manajemen dan organisasi yang berbeda di tingkat pemerintah provinsi dan kabupaten. Praktek-praktek ini dapat

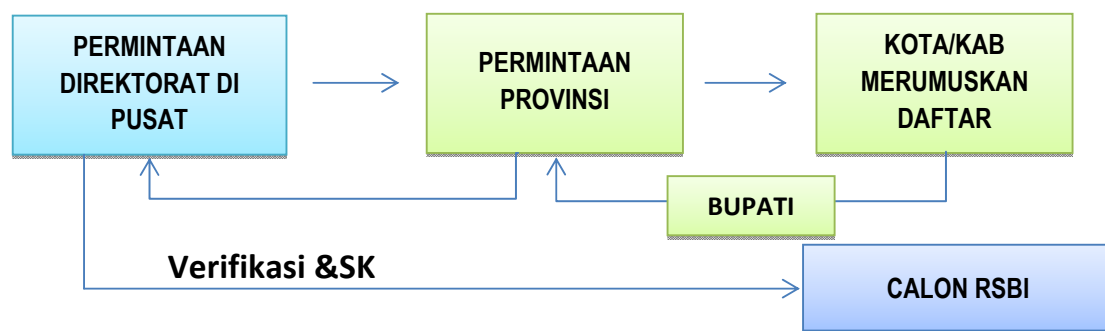
¹⁰ Regulasi Pemerintah No. 17 Tahun 2010, Pasal 1 Ayat 35

dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu struktur organisasi yang memiliki unit dan staf khusus untuk mengelola dan menyelenggarakan RSBI dan struktur organisasi yang memberikan tanggung jawab RSBI kepada unit dan staf yang ada sebagai tanggung jawab tambahan.

Sekitar 20% dari waktu staf dialokasikan untuk manajemen dan administrasi RSBI pada struktur yang terakhir. Struktur yang memiliki unit-unit terkait khusus untuk pengelolaan RSBI cenderung melakukan monitoring dan evaluasi dan pelaporan yang lebih mendalam. Sebanyak 12% dari Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten yang dikunjungi melaporkan bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas pengelolaan RSBI. Satu kantor Dinas Provinsi di lokasi studi juga menyatakan hal yang sama, bahwa mereka tidak memiliki kewenangan dalam pengelolaan RSBI.

Seleksi Sekolah

Temuan umum yang kami peroleh adalah bahwa sekolah-sekolah dengan reputasi terbaik di telah terpilih sebagai calon SBI. Proses seleksi tersebut dimulai dengan permintaan Direktorat Jenderal di Pusat (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) kepada masing-masing Direktorat (SD, SMP, SMA, SMK) yang kemudian meminta Dinas Pendidikan Provinsi untuk membuat daftar calon SBI yang direkomendasikan di masing-masing provinsi. Dinas Provinsi kemudian meminta kota/kabupaten untuk memberikan daftar calon.



Gambar1–Proses Seleksi Sekolah

Proses seleksi mengalir cukup logis, dan diskusi kami dengan masing-masing Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten menegaskan bahwa beberapa kantor dinas telah mengembangkan proses seleksi formal yang bersifat lokal, dengan persetujuan akhir dari rekomendasi diperoleh dari Bupati (kepala daerah), yang kemudian diteruskan ke provinsi dan selanjutnya ke pusat. Pusat melakukan verifikasi sekolah sebelum memberikan persetujuan akhir. Dalam beberapa kasus, Bupati tidak terlibat dalam proses seleksi.

Seperti dugaan, sekolah yang dipilih untuk menjadi rintisan SBI merupakan sekolah yang dianggap bagus, diantaranya merupakan yang terbaik diantara sekolah-sekolah yang ada. Dalam beberapa kasus sekolah-sekolah ini berada di daerah yang lebih kaya di wilayah kabupaten atau kota dan dengan demikian cenderung untuk melayani bagian masyarakat yang lebih kaya, dan dengan demikian orang tua lebih bersedia untuk membayar biaya tambahan. Para pembuat kebijakan telah menyadari hal ini dan telah menuntut agar beasiswa atau bentuk lain dari bantuan keuangan disediakan bagi murid dari keluarga miskin (minimal 20% dari populasi murid harus berpenghasilan rendah untuk kriteria SBI). Studi Evaluasi menemukan bahwa terdapat sekitar 12% murid dari keluarga berpenghasilan rendah dari keseluruhan RSBI ($n = 854$), porsi yang besar ada di sekolah menengah kejuruan (SMK). Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa di beberapa tempat sekolah mengalami kesulitan dalam merekrut murid dari keluarga dengan latar belakang sosial ekonomi yang rendah dengan sejumlah alasan, termasuk diantaranya ketidakmampuan secara akademis untuk masuk sekolah dengan standar yang lebih tinggi, menghadapi ejekan dari murid dari keluarga kaya (karena mereka tidak membayar uang sekolah), dan murid miskin malu bergaul dengan murid dari latar belakang sosial ekonomi lebih tinggi.

Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi (M&E) dilakukan pada setiap tingkat pemerintahan. Semua memonitor kinerja sekolah dalam melaksanakan delapan SNP serta tambahan indikator ("Faktor X") yang ditetapkan pada SBI (berdasarkan Peraturan Menteri 78/2009)¹¹. Provinsi dan kota / kabupaten juga memantau penggunaan berbagai jenis dana yang diterima oleh RSBI. Pemerintah provinsi memonitor penggunaan dana yang mereka distribusikan ke sekolah dari APBD mereka sendiri dan juga memonitor dana hibah untuk RSBI yang diterima dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Akan tetapi, tidak semua provinsi menerima paket hibah tersebut pada tahun tertentu. Kota/kabupaten memonitor dana yang dialokasikan untuk RSBI dari APBD mereka sendiri, dan juga memonitor penggunaan dana sekolah yang diterima langsung dari Kemdikbud. Kemdikbud mendistribusikan instrumen M&E yang selanjutnya oleh provinsi dan kabupaten dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan mereka. Prosedur M&E standar memiliki instrumen lengkap untuk sekolah yang dikirim ke kabupaten yang kemudian mengkonsolidasikan data dan kemudian dikirim ke provinsi untuk konsolidasi lebih lanjut, dan kemudian dikirim ke direktorat terkait di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan demikian, provinsi menyerahkan empat laporan-masing-masing satu laporan untuk keempat direktorat di Kemdikbud yang bertanggung jawab dalam mengelola program RSBI. Sekolah juga mengirimkan laporan langsung ke Direktorat Kementerian.

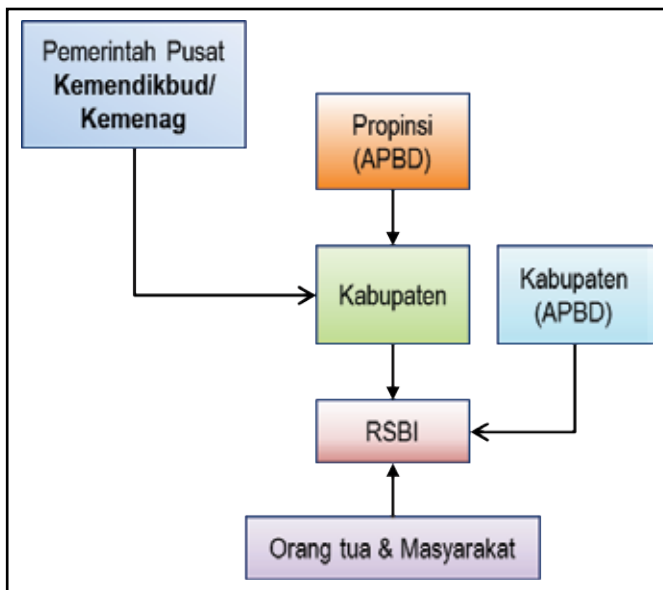
Pelatihan untuk Manajemen RSBI

Staf di provinsi dan kab/kota yang bertanggung jawab langsung menangani RSBI belum menerima pelatihan khusus tentang manajemen, administrasi dan monitoring dan evaluasi RSBI. Beberapa staf tersebut telah mendapatkan "sosialisasi" mengenai tujuan dan prosedur pelaksanaan dari Kemdikbud atau dari atasan yang sebelumnya mengikuti sosialisasi, dan meneruskan informasi kepada orang lain dalam organisasi. Beberapa staf yang menerima informasi tersebut telah dipindahkan ke unit lain dan dalam banyak kasus informasi khusus tentang RSBI tidak diteruskan kepada penggantinya. Semua direktorat di Kemdikbud telah menerbitkan manual dan pedoman pelaksanaan SSI, namun ada variasi dalam hal sejauh mana staf benar-benar memahami manual dan pedoman tersebut.

Pengaturan Keuangan

Pemerintah pusat (melalui anggaran tahunan Kemdikbud) menyalurkan dana langsung ke sekolah-sekolah (Lihat Gambar 9, Bagian 5.2.2.2 bawah). Pemerintah provinsi juga membiaya RSBI dari anggaran mereka sendiri (APBD), tetapi menyalurkannya melalui pemerintah kabupaten/kota sebagai "penyalur dana" (dana tersebut tidak masuk dalam APBD kabupaten/kota). Perlu dicatat bahwa salah satu provinsi yang menjadi lokasi studi ini tidak memberikan dukungan keuangan kepada RSBI, yang menunjukkan adanya variasi yang cukup besar dalam pengaturan keuangan untuk RSBI. Dalam kasus ini, Dinas Pendidikan Provinsi percaya bahwa dukungan RSBI bukan bagian dari tanggung jawab mereka, peraturan yang berlaku saat ini meninggalkan beberapa ruang interpretasi (misalnya, penggunaan istilah "dapat" yang berarti "tidak harus"). Beberapa kabupaten, tapi tidak semua, juga mengucurkan dana langsung ke RSBI dari anggaran mereka. Kontribusi orang tua dan masyarakat diberikan secara langsung ke sekolah-sekolah. Sekolah diminta untuk mencatat semua sumber pendapatan dan pengeluaran secara transparan dan akuntabel. Analisis data di bawah ini (Bagian 5.3) menunjukkan bahwa pencatatan keuangan dilakukan dengan baik, tetapi RSBI tidak sepenuhnya mentaati unsur transparansi. Sekolah yang disurvei sebagian besar telah menggunakan TIK untuk mendukung pencatatan keuangan, tetapi beberapa masih mengelola catatan keuangan secara manual (7% di RSBI, 14% di non-RSBI). Sekolah melaporkan kegiatan kunjungan terjadwal yang dilakukan oleh pengawas. Gambar 2 di bawah ini menunjukkan aliran dana RSBI. (Analisis lebih dalam mengenai keuangan disajikan pada Bagian 5.2 dan 6.4).

11 Peraturan Menteri 78/2009 diberikan dalam lampiran. Sembilan standar terdiri dari "X" faktor. Lihat Bab 5.0 di bawah ini untuk indikator dan kriteria.



Gambar 2 – Aliran Dana RSBI

2.4 Isu-isu Kebijakan

Sejak dimulainya program SBI, perdebatan di dalam dan di luar pemerintah telah mengangkat isu-isu mengenai efektivitas kebijakan dan strategi pelaksanaan SBI dalam mengembangkan tujuan awal/asli program tersebut^{12, 13}. Secara khusus, perdebatan Program SBI berpusat pada isu-isu keadilan, akses, dan kapasitas sekolah, dan apakah kebijakan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip dasar terkait kualitas dan akses yang adil dalam pendidikan di Indonesia, termasuk ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (UU 23/2002). Debat publik telah berkembang ke tingkat di mana masalah politik dan sosial telah membawa kasus SBI ke Mahkamah Konstitusi. Meskipun profil bagus program SBI diakui dalam perdebatan program ini, dalam komunitas pendidikan itu sendiri pengamatan dan diskusi tentang program mengangkat pertanyaan tentang kebijakan pada tataran yang lebih praktis dan operasional.

Perdebatan saat ini ditekankan pada pilihan kebijakan apa saja di masa depan terkait SBI. Seperti dijelaskan di atas, program RSBI saat ini sangat mahal ditinjau dari biaya satuan per murid, yakni sekitar empat kali lipat dari dana sekolah reguler. Meskipun sebagian besar dana tambahan berasal dari biaya orang tua dan kontribusi lain dari dunia usaha, pemerintah telah mensubsidi RSBI dalam jumlah lebih dari Rp 1 triliun (USD 113 juta) selama enam tahun terakhir. Salah satu tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai sejauh mana efektivitas biaya investasi pemerintah tersebut. Seperti yang akan terlihat dari analisis dalam laporan ini (Bagian 6.4), hasil evaluasi menunjukkan bahwa dari sisi pembiayaan program RSBI saat ini tidak dapat dianggap efektif. Tak satu pun dari 1.339 RSBI yang telah mencapai status SBI dan sangat sedikit yang hampir memenuhi standar dalam waktu dekat. Sebagian besar hal ini disebabkan oleh batasan atau standar itu sendiri dan konteks pembangunan di mana standar-standar ini diterapkan. Indikasi dari studi ini dan studi-studi lainnya menunjukkan bahwa standar SBI seperti yang didefinisikan saat ini tampaknya menghambat kinerja murid. Misalnya, analisis di bawah ini menunjukkan bahwa persyaratan untuk mengajar dalam Bahasa Inggris menimbulkan sebuah hambatan bagi guru dan murid untuk memahami materi dalam kurikulum nasional, sehingga hasil ujian nasional murid RSBI secara rata-rata tidak jauh lebih baik (bahkan dalam beberapa kasus lebih buruk) daripada murid di sekolah non-RSBI yang sebanding. (Hal ini dibahas secara lebih rinci dalam Bab 6.)

¹² Lihat daftar lengkap isu-isu pada Lampiran 4.

¹³ Lihat Dokument yang dikonsultasikan pada Lampiran 2

UU 20/2003 mengamanatkan untuk setidaknya ada satu sekolah bertaraf internasional dari masing-masing empat jenjang pendidikan (SD, SMP, SMA, SMK) di setiap kabupaten/kota yang berarti jumlah minimal adalah 1.996 sekolah (saat ini jumlah kabupaten/kota = 499). Hasil pemetaan menunjukkan bahwa 1.339 sekolah telah ditunjuk sebagai RSBI. Namun, sejumlah kota/ kabupaten (81 dari 499) telah mendirikan lebih dari satu sekolah RSBI, sementara beberapa kabupaten tidak memiliki sama sekali (99 dari 499).

Sebagai bagian dari kegiatan pemetaan SBI, Tim Evaluasi ingin menentukan jumlah kota/kabupaten yang memiliki jenis yang lengkap dari sekolah yang ditunjuk sebagai RSBI. Untuk melakukan hal ini, kami membutuhkan dua gugus data yang berbeda, yaitu:

- 1) Data jenis sekolah RSBI dan lokasi kota/kabupaten
- 2) Data lokasi dan nama kota / kabupaten

Tim Evaluasi telah dapat melacak data ini dari Kemendikbud. Namun, untuk gugus data butir 2, jumlah kabupaten yang diidentifikasi dan dinilai keberadaan RSBI-nya adalah 440 (dibandingkan dengan 499 – jumlah kab/kota yang digunakan dan secara umum diterima). Angka-angka yang disajikan di bawah ini akurat untuk 440 kota/kabupaten

Hasil pemetaan menyimpulkan terdapat 884 sekolah lain yang seharusnya masuk dalam proses pengembangan Sekolah Bertaraf Internasional (Tabel 3).

Tabel3–Kinerja Kabupaten/Kota dalam Mendirikan Satu RSBI untuk Setiap Jenjang Pendidikan¹⁴

Jumlah kab/kotayang memiliki tipe RSBI lengkap	19
Jumlah kab/kotayang memiliki lebih banyak tipe RSBI lengkap	82
Jumlah kab/kotayang masih perlu mendirikan sekolah SD RSBI	189
Jumlah kab/kotayang masih perlu mendirikan sekolah SMP RSBI	238
Jumlah kab/kotayang masih perlu mendirikan sekolah SMA RSBI	227
Jumlah kab/kotayang masih perlu mendirikan sekolah SMK RSBI	230
Total Sekolah RSBI yang diperlukan untuk memenuhi UU 20/2003 (n=440kota/kab)	884

Terlepas dari kontroversi yang ada, program SBI secara gamblang mengangkat isumenegenai keprihatinan terhadap kualitas, efisiensi, dan efektivitas dalam konteks pendidikan Indonesia yang lebih luas. Kebijakan program dan lingkungan implementasi SBI dimaksudkan untuk meningkatkan standar pendidikan pada kelompok sekolah terpilih dengan menerapkan langkah-langkah peningkatan kualitas tertentu dan menyediakan berbagai sumberdaya. Studi evaluasi ini dan analisis terhadap kebijakan, strategi implementasi dan efeknya mungkin dapat berfungsi untuk menginformasikan kebijakan terkait peningkatan kualitas yang lebih menyeluruh secara lebih luas. Dengan kata lain, dengan melakukan suatu evaluasi ketat terhadap program SBI, sebuah peluang telah muncul untuk digunakan oleh pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan pendidikan dalam menjawab pertanyaan tentang apa yang sebenarnya dibutuhkan untuk peningkatan kualitas berkelanjutan dalam pendidikan di Indonesia Analisis Situasi program RSBI ini memberikan bukti yang dapat menjadi dasar pilihan kebijakan untuk menginformasikan dan mendukung keputusan pemerintah yang harus dilakukan dalam waktu dekat dengan mempertimbangkan program berbiaya tinggi dan berlangsungnya debat publik. Studi ini menyajikan pilihan strategis berikut untuk menjadi pertimbangan para pembuat kebijakan:

- Melanjutkan program seperti apa adanya dengan mempertimbangkan 884 sekolah lain belum ditunjuk sebagai RSBI sesuai dengan UU 20/2003 yang mengharuskan empat sekolah atau masing-masing satu pada tiapjenjang (SD, SMP, SMA, SMK) di semua (499) kabupaten/kota. Sebagian besar

¹⁴ Berdasarkan n=440 Kabupaten/Kota

dari 1.339 sekolah saat ini masih jauh dari pemenuhan standar SBI seperti yang diamanatkan. Meskipun biaya untuk memenuhi itu akan sangat besar, UU 20/2003 merupakan hukum negara dan harus dipatuhi.

- Menghentikan program ini karena akan sangat mahal untuk mencapai target yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Pilihan ini memiliki konsekuensi politik yang signifikan dan untuk itu membutuhkan suatu perubahan mendasar terhadap UU Sistem Pendidikan Nasional (UU 20/2003). Selanjutnya, jika opsi ini diambil, perlu pertimbangan yang matang terhadap investasi yang sudah dilakukan kepada 1.339 RSBI saat ini. Haruskah investasi ini “dihapus” sebagai proyek percontohan yang tidak memenuhi harapan, atau apakah ada cara menghentikan investasi besar berikutnya oleh pemerintah tetapi pada saat yang sama mengatur kebijakan yang memungkinkan sekolah-sekolah untuk mempertahankan perbaikan yang memang telah dibuat oleh sekolah-sekolah dan dampak positif keseluruhan pada masyarakat?
- Melakukan penyesuaian kebijakan yang ada (Permendiknas 78./2009), dan mendefinisikan standar yang relevan secara kontekstual yang akan mengubah tujuan pencapaian standar internasional dan akreditasi asing namun tetap mempertahankan fokus internasional dimana praktek-praktek internasional yang baik secara bertahap disesuaikan untuk mencapai sekolah Indonesia yang berkualitas tinggi. Mungkin standar akreditasi baru yang berada diantara Sekolah Standar Nasional dan Sekolah bertaraf Internasional dapat diterapkan.



Bab 3.

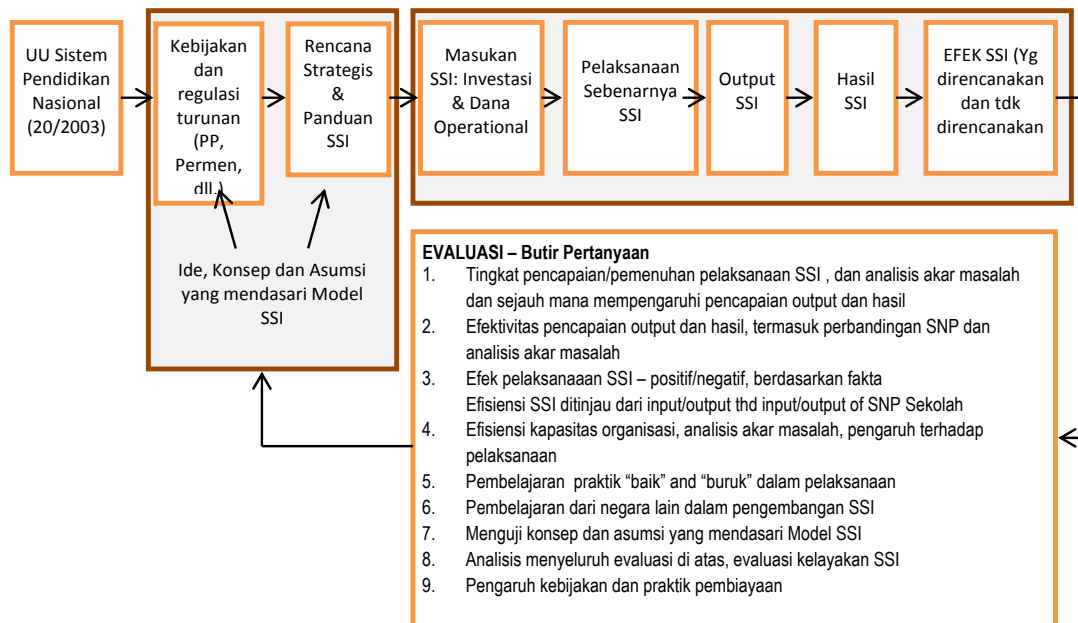
METODOLOGI

3.1. Tinjauan Evaluasi

Evaluasi ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang program SBI, sehingga keputusan berbasis fakta dapat dibuat oleh para pembuat kebijakan untuk penyesuaian kebijakan dan perbaikan program. Studi ini menilai lingkungan kebijakan secara keseluruhan serta arahan kebijakan khusus –seperti persyaratan kurikulum OECD dan Bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar– dan menganalisis serta mengevaluasi efektivitas kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas yang diharapkan. Penelitian ini juga bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai kapasitas organisasi, manajemen pendidikan, lingkungan sekolah dan masyarakat terkait dengan standar kualitas yang diharapkan di Sekolah Bertaraf Internasional. Pertanyaan ini dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik terhadap masing-masing item dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data kuantitatif dan kualitatif dari pemangku kepentingan pemerintah dan sekolah dalam rangka untuk membangun gambaran situasional yang lebih akurat dari: 1) operasional dan manajemen, 2) situasi pemenuhan standar oleh sekolah, 3) akibat-akibat dari perbedaan antara sekolah SBI dan sekolah reguler, dan 4) bagaimana sekolah mengalami evolusi sejak pertama berpartisipasi dalam program ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mendefinisikan secara operasional konsep “kualitas” dan “internasional”, dan bagaimana hal tersebut ditafsirkan dan diwujudkan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara langkah implementasi dengan kebijakan dan peningkatan kualitas yang diinginkan. Penelitian ini juga berusaha mendapatkan fakta untuk lebih memahami kendala dan hambatan yang dihadapi sekolah dalam upaya mereka untuk mencapai pemenuhan standar. Ini termasuk mencari informasi dan kasus yang akan membantu untuk lebih memahami peran dan tanggungjawab Dinas Pendidikan di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota terhadap RSBI, terutama tanggungjawab pembiayaan, pemantauan dan evaluasi pemenuhan standar oleh sekolah.

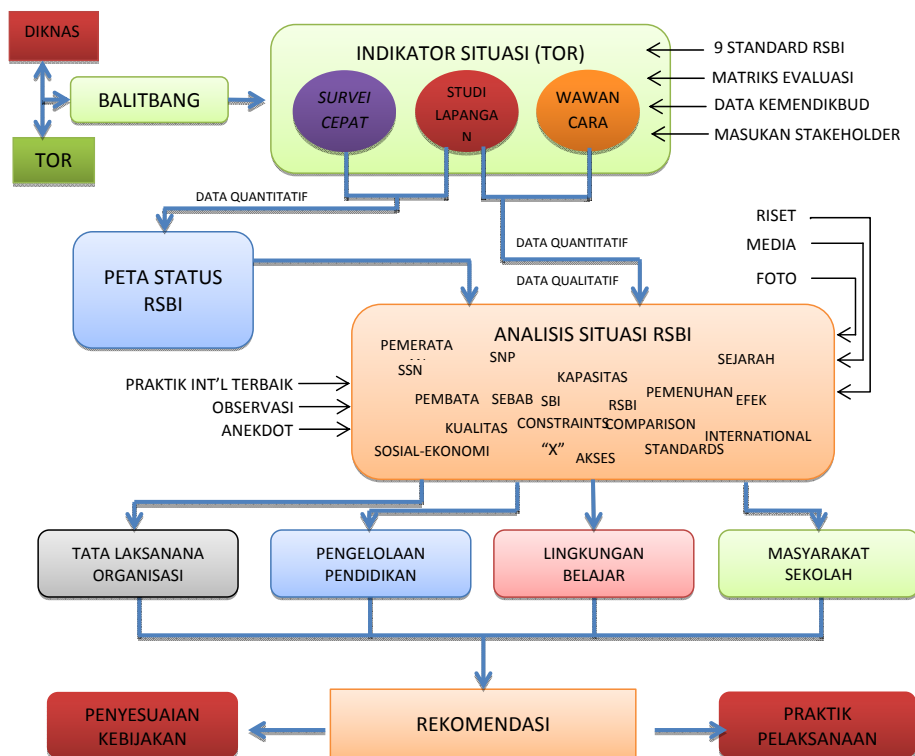
Hasil evaluasi yang diinginkan adalah gambaran yang lebih jelas situasi berdasarkan fakta empiris dan kasus yang akan menginformasikan dan memberikan dukungan pembuatan rekomendasi untuk memperbaiki kebijakan dan program. Gambar 1 berikut ini merangkum poin-poin Evaluasi SBI:



Gambar 3. Ringkasan Pertanyaan Evaluasi

Fokus Teknis

Evaluasi membahas bidang/isu yang terkait dengan SBI untuk membangun sebuah analisis situasi berdasarkan data kuantitatif dan kualitatif untuk mendukung rekomendasi mengenai kebijakan dan praktek SBI di Indonesia. Gambar 4 di bawah ini merangkum integrasi KAK/TOR proyek dengan desain penelitian. KAK/TOR dan desain studi disajikan masing-masing di Lampiran 2 dan Lampiran 5.



Gambar 4. Ringkasan Integrasi KAK dan Desain Evaluasi

Pertanyaan-pertanyaan Evaluasi

Ada 5 pertanyaan menjadi kerangka penelitian, yakni:

- 1) Bagaimana status pemenuhan program SBI?
- 2) Apa isu-isu utama pemenuhanstandaryang efektif dan berkualitas?
- 3) Apa saja intepretasi kebijakan dan praktik organisasi yang mempengaruhi isu-isu implementasi RSBI?
- 4) Penyesuaian kebijakan apa dan langkah-langkah apa yang akan membantu menyelesaikan masalah ini?
- 5) Bagaimana pengaturan keuangan memberi dampak pada pencapaian visi dan prestasi?

Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi dasar penyelidikan dari tiga komponen, yaitu: pemenuhan, proses perubahan, dan perbandingan. Dalam masing-masing komponen, empat domain akan menjadi fokus penyelidikan. Domain tersebut adalah: 1) pengaturan organisasi, 2) manajemen pendidikan, 3) lingkungan belajar, dan 4) komunitas sekolah. Untuk membantu pertanyaan fokus pada domain, terdapat tiga tema peningkatan kualitas lintas sektor --kapasitas pemenuhan, pengembangan profesi, dan kepemimpinan – guna menghasilkan konsistensi dalam formulasi pertanyaan, serta menekankan unsur-unsur sistem mutu yang penting dalam peningkatan kapasitas keseluruhan. Tema-tema ini akan beririsan dengan masing-masing domain evaluasi, dan membantu membentuk dan memfokuskan penyelidikan evaluasi, manajemen data, analisis dan rekomendasi. Secara bersama empat domain dan tiga tema lintas sektor membentuk Matrix Evaluasi (Lampiran 6).

Kegiatan Evaluasi

Tujuan evaluasi ini adalah untuk mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif yang memadai untuk memberikan bukti empiris dan “anecdotal” tentang situasi sekolah RSBI dan struktur pendukungnya dalam rangka pembuatan kebijakan dan keputusan implementasi mengenai program. Ada tiga kegiatan dalam evaluasi, yakni: Survei Cepatterhadap seluruh RSBI, Studi Lapanganmendalam terhadap sampelacak, dan Wawancara pemangku kepentingan secara luas (pejabat pemerintah dan non pemerintah). Masing-masing kegiatan ini menerapkan prinsip penelitian pendidikan untuk merancang kegiatan dengan menggunakan Matriks Evaluasi sebagai panduan penelitian dalam batas-batas ketersediaan sumber daya dan waktu yang dialokasikan oleh proyek.¹⁵

3.2. Pengambilan Sampel

Tim Evaluasi mendapatkan data tentang kontak masing-masing RSBI dan data status untuk SD, SMP, SMA, dan SMK.¹⁶ dari Direktorat di Kemendikbud. Dari data ini, Tim menemukan jumlah total RSBI sebanyak 1.339 sekolah untuk semua jenis/jenjang.

Sampel Survei Cepat

Sebuah Survei Cepat terhadap 1.339 sekolah RSBI dilakukan untuk mengkonfirmasi data Kemdikbud dan mengumpulkan data kuantitatif tentang beberapa aspek pemenuhan persyaratan sebagai RSBI. Tim Survei Cepat ‘hanya’ berhasil menghubungi 64% (n=854) dari total 1.339 RSBI yang ada dala Kemdikbud, terutama karena kurang akuratnya data Kemdikbud dan kesulitan Tim dalam mendapatkan informasi kontak sekolah dari Dinas Pendidikan kota/kabupaten. Distribusi responden Survei Cepat yang berhasil dihubungi dapat dilihat dalam Tabel 4 berikut ini:

¹⁵ Lihat Creswell (2005), 2nd Ed.

¹⁶ Tidak ada Sekolah Madrasah RSBI.

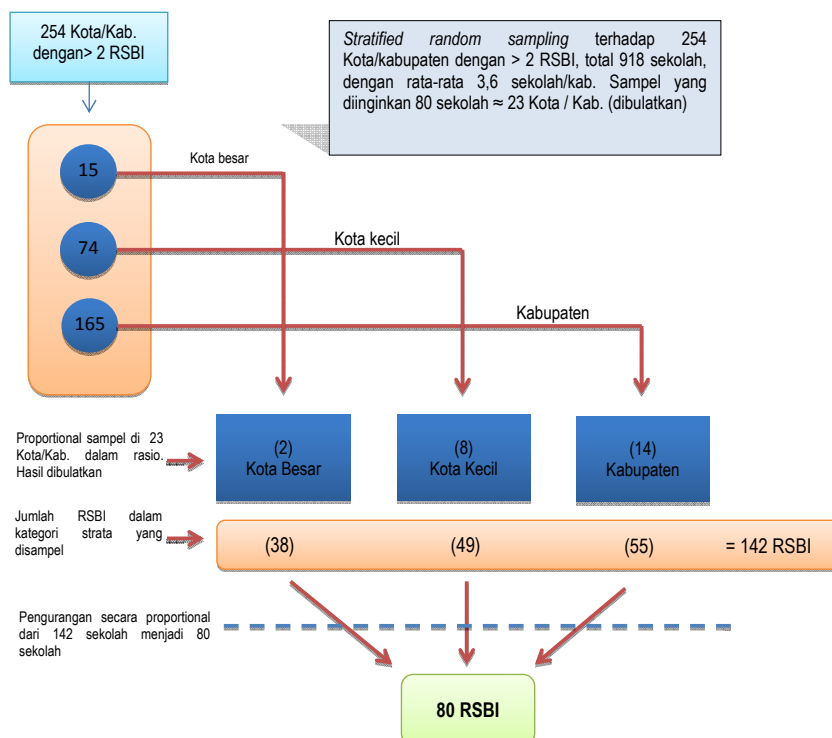
Tabel 4– Responden Survei Cepat

Jenis Sekolah	Jumlah (n)
SD	154
SMP	254
SMA	224
SMK	222
TOTAL	854

Sampel Survei Lapangan

Untuk mengidentifikasi sampel studi lapangan, metode *stratified random sampling* diterapkan terhadap 254 kota/kabupaten yang memiliki lebih dari dua (> 2) RSBI, dikelompokkan berdasarkan Kota Besar, Kota Kecil, dan Kabupaten¹⁷. Ada 3 alasan untuk menerapkan pendekatan ini, yakni: 1) karena sebagian besar sekolah RSBI berada di daerah perkotaan Jawa, sehingga jika *sampling random* diterapkan pada 1.339 sekolah akan terjadi bias terhadap sampel di daerah perkotaan Jawa, 2) memilih populasi dari kota/kabupaten dengan lebih dari dua sekolah meningkatkan kemungkinan memilih kabupaten yang lebih awal mendirikan sekolah RSBI, memberikan sampel yang lebih representatif untuk memungkinkan generalisasi lebih dapat dipercaya tentang interpretasi kebijakan, pelaksanaan program, dan sistem monitoring, 3) stratifikasi melalui ukuran populasi memungkinkan analisis komparatif dalam sosial-ekonomi masyarakat, dan faktor implementasi yang terkait dengan ukuran populasi.

Gambar 5 di bawah ini merangkum metode sampling dalam studi lapangan. Prosedur rinci sampling dengan rincian lokasi dan jenis disajikan di Lampiran 12. Daftar sekolah sampel yang diperoleh disajikan di Lampiran 7.



Gambar 5–Ringkasan Metode Sampling Studi Lapangan

17 Kota besar = $> 1,000,000$; kota kecil = $< 1,000,000$; Kabupaten = rural. Lihat Lampiran X untuk uraian sampling.

Distribusi sekolah yang menjadi sampel Studi Lapangan dapat dilihat dalam Tabel 4, dengan sekolah non-RSBI sebagai pembandingan [dalam kurung]:

Tabel 5– Distribusi Sampel berdasarkan Tipe Sekolah

	NEGERI	SWASTA	TOTAL RSBI	TOTAL NON-RSBI	TOTAL SAMPEL
SD	11[1]	6[2]	17	3	20
SMP	12[1]	3[1]	15	2	17
SMA	15[2]	5[0]	20	2	22
SMK	18[2]	0[0]	18	2	20
TOTAL	56	14	70	9	79 ¹⁸

Strata Sosial-Ekonomi dalam Sampel

Seperti disebutkan di atas, sampel studi lapangan pertama dikelompokkan berdasarkan jumlah penduduk. Sekolah berada antara di Kota atau Kabupaten. Dengan membandingkan strata (1 = Kota Besar, 2 = Kota Kecil, 3 = Kabupaten) dengan produk bruto per kapita, ada korelasi dengan penurunan masing-masing pendapatan. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa strata yang dibuat dalam studi ini mewakili tingkat pendapatan yang berbeda, sehingga mendukung klaim terkait hasil penelitian. Kota Tangerang dan Kota Tarakan tidak cocok dengan korelasi tersebut. Kemungkinan hal itu terjadi karena Kota Tangerang adalah kota baru yang mungkin belum mengembangkan basis ekonomi, sedangkan produk bruto Kota Tarakan kemungkinan sangat dipengaruhi oleh industri minyak dan gas di kota tersebut.

Tabel 6 –Distribusi Sosial-ekonomi Sampel Studi Lapangan

No	FIELD SAMPLE LOCATION	Strata	POPULATION 2010	GROSS PRODUCT 2010 (000,000)	GROSS PRODUCT PER CAPITA (000,000)
1	Kota Tangerang Selatan (new)	1	1,290,322	5,378,417	4.17
2	Kota Bandung	1	2,536,649	31,697,282	12.50
3	Kota Jakarta Selatan	1	1,894,236	88,687,180	46.82
4	Kota Semarang	1	1,527,433	21,180,000	13.87
5	Kota Makasar	1	1,339,374	16,282,481	12.16
6	Kota Palembang	1	1,538,938	18,053,204	11.73
7	Kota Sukabumi	2	287,443	1,920,727	6.68
8	Kota Salatiga	2	170,352	1,849,275	10.86
9	Kota Tomohon	2	91,553	663,557	7.25
10	Kota Malang	2	820,243	14,044,625	17.12
11	Kota Yogyakarta	2	388,627	5,244,851	13.50
12	Kota Tarakan (Oil & Gas City)	3	239,787	11,804,015	49.23
13	Kabupaten Sukabumi	3	2,341,409	8,641,734	3.69
14	Kabupaten Pekalongan	3	838,621	7,226,000	8.62
15	Kabupaten Semarang	3	983,000	5,560,000	5.66
16	Kabupaten Wonosobo	3	795,000	1,888,808	2.38
17	Kabupaten Lamongan	3	1,179,770	5,880,536	4.98
18	Kabupaten Malang	3	2,443,604	14,537,635	5.95
19	Kabupaten Trenggalek	3	674,411	3,066,326	4.55
20	Kabupaten Sleman	3	1,093,110	6,373,200	5.83
21	Kabupaten Kulon Progo	3	384,921	1,828,304	4.75
22	Kabupaten Pinrang	3	353,367	2,532,000	7.17
23	Kabupaten Sumbawa	3	415,789	1,720,935	4.14
24	Kabupaten Aceh Barat	3	173,558	1,265,376	7.29

18 Sampel final=79 sekolah: 70 RSBI; 9 non-RSBI

Tabel 7 - Rata-rata PDB Menurut Strata

Strata	Rata-rata GDP	Rata-rata PDB tanpa Tangerang & Tarakan
Kota Besar	16.87	19.41
Kota Kecil	11.08	11.08
Pedesaan	8.79	5.42

Sekolah Pembanding

Sekolah non-RSBI sebagai sekolah pembanding dipilih melalui non-probability sampling. Metode sampling ini diterapkan untuk memilih sekolah dengan reputasi yang baik dalam komunitas yang sama dengan sekolah-sekolah (RSBI) yang diteliti. Hal ini memungkinkan untuk menjadikan sekolah pembanding sebagai sekolah “baseline/acuan” yang mungkin memiliki kualitas yang sama dengan sekolah RSBI yang diteliti. Sekolah-sekolah pembanding dipilih dari kota/kabupaten sampel penelitian. Lampiran 7 memuat daftar sekolah studi, lokasi, jenis dan distribusinya.

Data untuk Studi

Data mengenai RSBI diterima dari Kemdikbud. File data yang ada tersebut tersedia untuk masing-masing jenis/jenjang (SD, SMP, SMA, dan SMK), digunakan sebagai sumber data untuk Survei Cepat dan untuk Studi Lapangan. Direktorat di Kemenag dikunjungi untuk memperoleh file data RSBI, tetapi ditemukan bahwa tidak ada sekolah madrasah yang mengikuti kebijakan SBI¹⁹. Hasil pemetaan berdasarkan data disajikan dalam Bab 5.

Sumber informasi penting lain diperoleh dari berbagai dokumen review dokumen. Dokumen-dokumen ini termasuk undang-undang, kebijakan dan peraturan, keputusan menteri, artikel penelitian yang dipublikasikan, artikel surat kabar, laporan donor, dll. Daftar lengkap dokumen yang dikonsultasikan disajikan di Lampiran 8.

Data kuantitatif dan kualitatif dikumpulkan dari kuesioner survei melalui Survei Cepat dan Studi Lapangan. Data dikumpulkan dari para pemangku kepentingan dan praktisi, pejabat pendidikan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kepala sekolah, guru, murid, komite sekolah, dll.

Tipe Data

Data kuantitatif dan kualitatif dikumpulkan dalam rangka untuk mengevaluasi SBI. Tabel 8 di bawah ini merangkum jenis data, sumber data, metode pengumpulan, dan lokasi. Pembahasan rinci desain evaluasi ada dalam Lampiran 5:

Manajemen Data

Tiga kegiatan evaluasi terdiri dari: 1) Survei Cepat; 2) Studi Lapangan, dan 3) Wawancara Stakeholder. Untuk survei cepat, empat petugas dipekerjakan di kantor proyek untuk melakukan survei melalui telepon/fax/ email ke padasemua RSBI. Untuk studi lapangan, tujuh tim yang terdiri dari satu peneliti dan satu enumerator direkrut, dilatih, dan dikirim ke lokasi studi untuk mensurvei sekolah dan Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten. Tim Evaluasi (Ahli Pendidikan, Ahli Keuangan Pendidikan dan Ahli Analisis Data) mengunjungi Dinas Pendidikan Provinsi untuk wawancara dengan pemangku kepentingan, serta mengawasi tim studi Lapangan di lapangan. Informasi kuantitatif dan transkrip wawancara yang ditulis ke dalam kuesioner yang telah disiapkan. Kuesioner sudah lengkap dikirim ke kantor TIA untuk dikelola dan disimpan.

File entri data disiapkan oleh Ahli Analisis Data dan Ketua Tim. Entri data dilakukan oleh tim sesuai aktivitas masing-masing. Koding untuk data kualitatif dilakukan oleh tim studi lapangan di bawah pengawasan Tim Evaluasi. Data digabung dan ditabulasi oleh Ahli Analisis Data dan Ketua Tim.

¹⁹ File data yang lengkap dan terbaru dihasilkan dari Survei Cepat diberikan di dalam CD ROM terlampir.

Tabel 8–Ringkasan Jenis dan Sumber Data

	Jenis Data	Sumber	Metode	Lokasi
Kuantitatif				
1	Informasi faktual	Dokumen publik, catatan sekolah dan pemerintah	Survei dengan kuisioner	Pusat: survey viatelepon/fax/email; kunjungan lapangan ke kantor pemerintah dan sekolah
2	Pengamatan perilaku individu	Ceklist perilaku	Pengamatan langsung	Kelas
3	Test kinerja	Catatan sekolah	Survei dengan kuisioner	Survei dengan telepon; kunjungan lapangan ke sekolah
Kualitatif				
4	Catatan dan laporan lapangan	Tim Evaluasi; Tim Study lapangan	Pengamatan langsung	Kunjungan ke sekolah
5	Struktur transkrip, wawancara terbuka	Pemangku kepentingan pendidikan pemerintah dan tingkat sekolah	Wawancara tatap muka oleh Tim Evaluasi dan Tim study lapangan	Kunjungan kantor Pemerintah Pusat; Kunjungan lapangan ke Dinas kota/kabupaten
6	Foto	Tim evaluasi		Kunjungan lapangan

Manajemen Data

Tiga kegiatan evaluasi terdiri dari: 1) Survei Cepat; 2) Studi Lapangan, dan 3) Wawancara Stakeholder. Untuk survei cepat, empat petugas dipekerjakan di kantor proyek untuk melakukan survei melalui telepon/fax/ email kepada semua RSBI. Untuk studi lapangan, tujuh tim yang terdiri dari satu peneliti dan satu enumerator direkrut, dilatih, dan dikirim ke lokasi studi untuk mensurvei sekolah dan Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten. Tim Evaluasi (Ahli Pendidikan, Ahli Keuangan Pendidikan dan Ahli Analisis Data) mengunjungi Dinas Pendidikan Provinsi untuk wawancara dengan pemangku kepentingan, serta mengawasi tim studi Lapangan di lapangan. Informasi kuantitatif dan transkrip wawancara yang ditulis ke dalam kuesioner yang telah disiapkan. Kuesioner sudah lengkap dikirim ke kantor TIA untuk dikelola dan disimpan.

File entri data disiapkan oleh Ahli Analisis Data dan Ketua Tim. Entri data dilakukan oleh tim sesuai aktivitas masing-masing. Koding untuk data kualitatif dilakukan oleh tim studi lapangan di bawah pengawasan Tim Evaluasi. Data digabung dan ditabulasi oleh Ahli Analisis Data dan Ketua Tim.

Analisis Data

Analisis data dilakukan oleh Tim Evaluasi dan Direktur Teknis Proyek TIA. Lihat bagian bawah untuk temuan dan analisis rinci.

3.3. Keterbatasan Studi

Studi kami memiliki sejumlah keterbatasan yang dapat mempengaruhi keandalan dari temuan kami.

Ruang Lingkup Studi

Ukuran sampel yang lebih besar akan membantu untuk memperkuat temuan kami. Kami akan senang jika memiliki sumber daya dan waktu untuk memperbesar sampel pembandin(non-RSBI). Temuan tentang nilai ujian akan lebih kuat jika ada kesempatan untuk melaksanakan survei lebih banyak pada sekolah pembanding. Kami juga akan senang jika Tim Studi Lapangan mendapat tambahan kesempatan satu hari lagi untuk mengumpulkan informasi dari sektor swasta dan masyarakat sipil setempat untuk melihat secara lebih baik dampak RSBI di daerah. Hal ini juga akan memungkinkan tim untuk memiliki

lebih banyak pilihan responden (dari kalangan masyarakat) untuk mengendalikan bias pemilihan oleh sekolah.

Akurasi Sumber Data

Kami menemukan bahwa alamat lokasi sekolah Kemendikbud dan data kontak tidak lengkap dan banyak sekolah tidak bisa dihubungi. Upaya kami untuk menghubungi Dinas Pendidikan kota/kabupaten untuk memperbaharui catatan tidak sepenuhnya berhasil.

Seleksi Responden

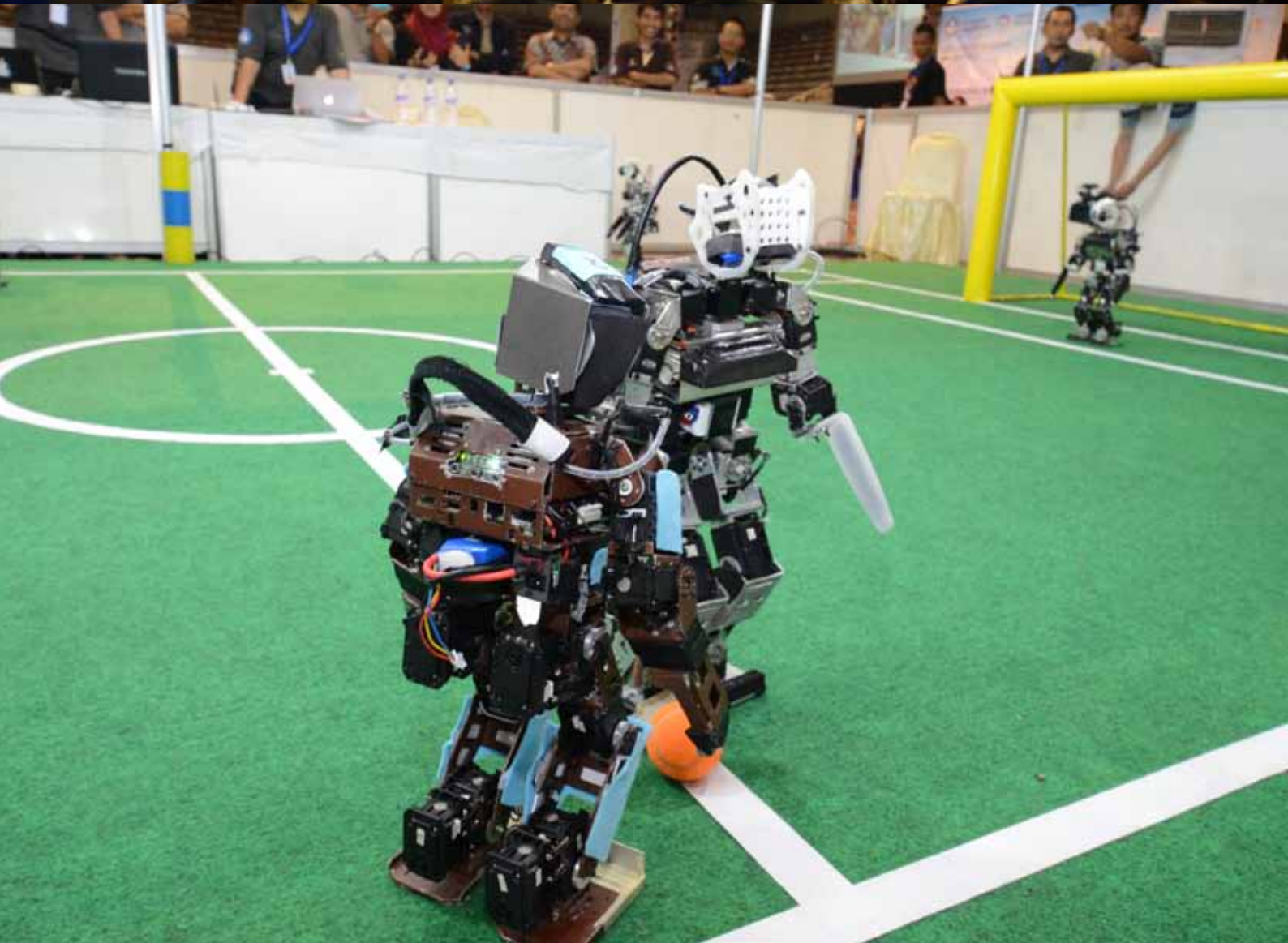
Kami mengandalkan sekolah untuk memilih responden. Akan sulit untuk melakukan sebaliknya, tetapi, seperti yang kita sampaikan di atas, jika tersedia lebih banyak sumber daya dan waktu akan memberikan kesempatan untuk wawancara tambahan guna memperbesar gugus data kualitatif. Ini merupakan bias atau keterbatasan yang tidak dapat dikendalikan. Triangulasi memungkinkan kami untuk mengkonfirmasi beberapa klaim.

Pengalaman Peneliti

Kami berhasil melibatkan staf peneliti sesuai dengan kerangka acuan penelitian ini. Kami melaksanakan uji coba yang komprehensif dan pelatihan untuk membantu mengurangi bias dalam pengumpulan data, dan kami merasa yakin bahwa hasil dari data kualitatif dapat diandalkan. Wawancara mendalam pemangku kepentingan jauh lebih sulit untuk dimonitor, dan pengawas lapangan kami menyaksikan beberapa ketidak-konsistenan pada panduan wawancara. Kami juga melihat dari catatan lapangan bahwa terdapat beberapa peluang yang terlewatkan untuk memperpanjang diskusi terbuka guna memperkaya klaim dan temuan.

Kedalaman Pertanyaan

Keterbatasan lain dari penelitian ini adalah tidak cukupnya waktu dan sumber daya untuk menyelidiki lebih dalam klaim oleh responden, terutama terhadap indikator pemenuhan mengajar dan belajar. Jika tersedia lebih banyak waktu di masing-masing sekolah akan memberikan analisis situasi sekolah yang lebih akurat, dan beberapa indikator pemenuhan akan diperoleh di bawah pengawasan yang lebih baik.



Bab 4.

PENCAPAIAN TUJUAN

Tim Evaluasi telah mengidentifikasi lima tujuan kunci (Lihat Bagian 3). Tabel 9 di bawah ini menyajikan ringkasan dari pencapaian tujuan studi:

Tabel 9–Ringkasan Pencapaian Tujuan Studi

NO.	TUJUAN	KEGIATAN	HASIL/CAPAIAN	KENDALA
1	Untuk memperoleh data kuantitatif yang valid dan dapat diandalkan untuk membangun analisis situasi dari program SSI dalam hal pemenuhan standar oleh sekolah, perubahan sejarah, dan perbandingan dengan sekolah non-SSI.	Konsultasi pemangku kepentingan	Catatan data dari direktorat SD, SMP, SMA, SMK telah diperoleh sehingga dimungkinkan perancangan penelitian, sampling, dan menghubungi sekolah	Kesulitan membuat janji
		Survei Cepat	Survei cepat sepenuhnya dilaksanakan untuk memperoleh data kuantitatif profil sekolah dan pemenuhan oleh RSBI. Sebanyak 1.339 sekolah telah diidentifikasi sebagai RSBI, 62% dari sekolah menanggapi. Peta lokasi sekolah telah dibuat, dan berkas data yang dihasilkan dari catatan diperbarui untuk responden sekolah. Catatan-catatan itu telah diperiksa silang untuk akurasi melalui telepon dan triangulasi oleh data studi lapangan	Ketidaktepatan catatan data dari masing-masing direktorat
		Studi lapangan	Pengamatan dan data faktual kuantitatif catatan sekolah yang diperoleh dari 70 RSBI dan 9 sekolah non-RSBI pembanding. Pelatihan Tim Studi lapangan dan uji coba instrumen pengumpulan data untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas data. pengawasan lapangan oleh tim konsultan.	Isolasi geografis, sumberdaya, hari libur nasional; kesediaan pemangku kepentingan

NO.	TUJUAN	KEGIATAN	HASIL/CAPAIAN	KENDALA
2	Mengirim Tim Studi Lapangan untuk melaksanakan survei random sampling minimal 70 RSBI dari 9 dan non-RSBI untuk melaksanakan secara akurat pengamatan dan merekam wawancara mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan.	Pengamatan lapangan	Dilaksanakannya random sampling. Tim dikirim ke semua sekolah binaan. Pengamatan fasilitas sekolah dilakukan pada 79 sekolah. Observasi kelas dilakukan pada 78/79 sekolah. (satu observasi kelas tidak terjadi)	Logistik dan waktu untuk observasi kelas
		Wawancara mendalam	Beberapa pemangku kepentingan di 79 sekolah. Semua bentuk wawancara diterima dari lapangan, dicatat dan diproses.	Ketersediaan individu pemangku kepentingan selama kunjungan;
3	Untuk memperoleh data kualitatif yang valid dan dapat diandalkan dalam rangka untuk mendapatkan informasi tentang alasan kausal yang mendasari isu-isu kunci untuk membuat rekomendasi informatif kebijakan dan praktek untuk penyesuaian kebijakan dan peningkatan kualitas program.	Studi lapangan	Diperoleh data kualitatif dari wawancara mendalam 7 individu pemangku kepentingan di masing-masing 79 sekolah, triangulasi antar-pemangku kepentingan untuk menilai keandalan pernyataan;	Pemilihan pemangku kepentingan Non-random
		Wawancara pemangku kepentingan (pusat)	Diperoleh data kualitatif dari pejabat pusat di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan termasuk Direktur SMA, SMK, Direktur Pendidikan Islam Kemenag, Direktur BSNP, Direktur Puslitjak. (Lihat Rekomendasi di bagian selanjutnya)	Tidak dapat membuat janji, mis. Direktur SD; BAPPENAS
4	Melaksanakan wawancaramendalam dengan pemangku kepentingan di tingkat provinsi dan kabupaten guna memperoleh wawasan tentang interpretasi kebijakan kontekstual, praktek pelaksanaan, dan data terkait kapasitas organisasi secara keseluruhan yang mendukung RSBI	Wawancara pemangku kepentingan; kunjungan lapangan oleh Ketua Tim	Memenuhi target Wawancara: 12 Dinas Pendidikan Provinsi, 23 dinas pendidikan kota/kabupaten, wawancara pendukung di pemerintah tingkat Pusat (lihat di atas)	Dalam beberapa kasus ketersediaan kepala dinas
5	Membangun kapasitas di Pusat Penelitian Kebijakan (Balitbang) dengan melibatkan counterpart dalam studi lapangan.	Studi lapangan	Counterpart dari Pusat Penelitian Kebijakan berpar-tisipasi, berbagi informasi, menyertai Ketua Tim dalam kunjungan lapangan	Kesediaan counterparts untuk berpartisipasi dalam studi



Bab 5.

HASIL DAN ANALISIS

Bab ini akan menyajikan hasil evaluasi dan analisis data kuantitatif dan kualitatif. Analisis lebih lanjut akan dilakukan dalam Bab 6 (Analisis Ringkas).

5.1. Profil Sistem SBI

Profil sistem SBI meliputi data tentang lokasi, distribusi, dan informasi sosio-ekonomi. Data-data dari data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini diberikan kepada tim studi pada awal evaluasi.

5.1.1. Lokasi

Bagian ini memberikan suatu analisis lokasi RSBI yang diambil dari data yang dikumpulkan dari direktorat-direktorat di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Perlu dicatat bahwa basis data pusat RSBI tidak ada, oleh karena itu tim studi menyusun basis data ini dari empat direktorat yang terkait dengan Kemendikbud (TK / SD, SMP, SMA, SMK). Tabel 10 dan Tabel 11 di bawah ini menunjukkan lokasi berdasarkan populasi dan distribusi jenis sekolah berdasarkan provinsi yang dirinci ke dalam Kota Besar (> 1.000.000), Kota Kecil (<1.000.000), dan Kabupaten. Data disajikan sebagai persentase terhadap total RSBI.

Tabel 10– Distribusi RSBI berdasarkan Populasi (data Kemdikbud)

	% Kota Besar (>1 juta)	% Kota Kecil (< 1 juta)	% Kabupaten	%TOTAL
SD	2	5	15	22
SMP	5	7	14	26
SMA	4	9	14	27
SMK	3	9	13	24
TOTAL	14	30	56	100

Tabel 11– Distribusi RSBI berdasarkan Provinsi (diolah dari data Kemdikbud)

PROVINSI	SD	SMP	SMA	SMK	TOT	PROVINSI	SD	SMP	SMA	SMK	TOT
Aceh	11	8	8	8	35	Maluku	4	1	2	2	9
Bali	10	10	12	12	44	Maluku Utara	3	0	2	2	7
Bangka-Belitung	6	2	3	3	14	NTB	1	0	1	1	3
Banten	10	17	12	12	41	NTT	1	0	1	1	3
Bengkulu	7	3	4	4	18	Papua	3	0	3	3	9
D.I. Yogyakarta	7	12	15	15	46	Papua Barat	1	0	2	2	5
D.K.I Jakarta	10	35	15	15	75	Riau	13	6	6	6	31
Gorontalo	5	3	4	4	17	Kepulauan Riau	3	2	3	3	11
Jambi	4	4	4	4	16	Sulawesi Barat	5	1	2	2	10
Jawa Barat	21	37	44	44	146	Sulawesi Selatan	18	10	13	13	54
Jawa Tengah	23	67	62	62	214	Sulawesi Tenggara	5	4	3	3	15
Jawa Timur	25	72	69	69	235	Sulawesi Tengah	6	4	3	3	16
Kalimantan Barat	8	3	3	3	17	Sulawesi Utara	6	6	5	5	22
KalSel	10	4	7	7	28	Sumatera Barat	19	9	10	10	48
KalTeng	8	2	2	2	14	Sumatera Selatan	8	8	10	10	36
Kalimantan Timur	7	11	11	11	40	Sumatera Utara	2	5	11	11	29
Lampung	8	8	7	7	30						

5.1.2. Distribusi Menurut Jenis RSBI

Tabel 12 dan 13 di bawah ini merupakan agregasi berdasarkan jenis sekolah: jumlah total dan persentase.

Tabel 12–Distribusi Jenis RSBI berdasarkan Jumlah

	NEGERI	SWASTA	TOTAL
SD	222	74	296
SMP	306	45	351
SMA	306	57	363
SMK	304	25	329
TOTAL	1138	201	1339

Tabel 13–Distribusi Jenis RSBI berdasarkan Persentase

	% NEGERI	% SWASTA	% TOTAL
SD	16	6	22
SMP	23	3	26
SMA	23	4	27
SMK	23	2	25
TOTAL	85	15	100

Hasil dan Analisis: Kebanyakan RSBI merupakan sekolah negeri, dengan SD menempati persentase tertinggi di antara sekolah-sekolah swasta. SMP, SMA, dan SMK negeri secara merata diwakili. Sekolah SD menempati persentase terendah dalam RSBI. Sejumlah alasan bisa menjelaskan hal ini: Urutan pelaksanaan direktorat-direktorat di Kemendikbud (Lihat Bagan 1 di bawah), secara parsial melengkapi basis data Kemendikbud. Perlu dicatat bahwa Kemenag tidak lagi memiliki sekolah yang berpartisipasi dalam program RSBI.

5.1.3. Statistik Sekolah

Jumlah Kelas Internasional (Sumber data: Survey Cepat n=854)

Sejumlah besar sekolah RSBI tidak sepenuhnya melaksanakan kelas standar internasional, namun hanya menetapkan kelas tertentu yang mengikuti standar internasional. Data jumlah kelas internasional disajikan di bawah ini didasarkan pada 854 sekolah yang menjawab pertanyaan. Data ini dinormalisasi dengan $n = 854$, dan disajikan sebagai total dari kelas internasional dibandingkan dengan kelas total dalam sekolah.

Tabel 14 – Jumlah Kelas Internasional dari Hasil Survei Cepat (n=854)

	TOTAL KELAS	TOTAL KELAS INTERNASIONAL	PERSENTASE KELAS INTERNASIONAL	RATAAN KELAS INT'L. PER SEKOLAH
SD (n=154)	2.702	1.322	49%	8,6
SMP (n=254)	5.717	4.759	83%	18,7
SMA (n=224)	5.594	3.852	69%	17,2
SMK (n=222)	8.496	5.887	69%	26,5
TOTAL (n=854)	22.509	15.820	70%	18,5

Hasil dan Analisis: Data hasil Survei Cepat menunjukkan bahwa SMP RSBI memiliki persentase kelas tertinggi yang mengklaim sebagai kelas internasional. Sekolah SD memiliki persentase terendah. Namun, jumlah kelas di sekolah SMK secara rata-rata hampir 30% lebih banyak daripada jumlah kelas per sekolah di sekolah jenis lain. Hal ini bisa menunjukkan bahwa di sekolah SMK, murid memiliki akses lebih besar terhadap kelas internasional²⁰.

Jumlah Murid SBI

Data jumlah murid SBI disajikan dalam tabel berikut berdasarkan 863 sekolah yang menjawab pertanyaan ($n = 863$).

20 Temuan penelitian kami menunjukkan bahwa terdapat definisi yang berbeda mengenai “kelas internasional”. Berdasarkan review terhadap literatur, dokumen, dan publikasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kami tidak dapat menemukan definisi yang jelas selain indikator umum yang tercantum dalam standar pemenuhan oleh SBI. Kami merasa bahwa terdapat laporan yang campur aduk mengenai indikator ini, dan hasilnya tidak dapat diandalkan.

Tabel 15–Jumlah Murid di Sekolah RSBI

	TOTAL MURID			TOTAL MURID KELAS INTERNASIONAL			% MURIDKELAS INTERNASIONAL	
	PRIA	WANITA	TOTAL	PRIA	WANITA	TOTAL	% PRIA	% WANITA
SD	26.085	26.753	52.838	11.464	11.973	23.437	49%	51%
SMP	71.321	91.465	162.786	55.883	73.824	129.707	43%	57%
SMA	72.322	104.413	176.735	46.672	69.561	116.233	40%	60%
SMK	167.594	115.975	283.569	75.666	51.209	126.875	60%	40%
TOTAL	337.322	338.606	675.928	189.685	206.567	396.253		

Hasil dan Analisis: Menimbang bahwa 62% dari RSBI menjawab survei cepat, dengan ekstrapolasi, ada kemungkinan lebih dari 1.000.000 murid yang terdaftar di RSBI di Indonesia. Pembaca dapat melihat bahwa sebagian besar murid pada pendidikan umum kelas internasional RSBI adalah anak perempuan. Namun kesetaraan gender belum dicapai dalam kelas SMK internasional di mana ada anak laki-laki 20% lebih banyak dibandingkan anak perempuan.

Jumlah Guru di Kelas Internasional

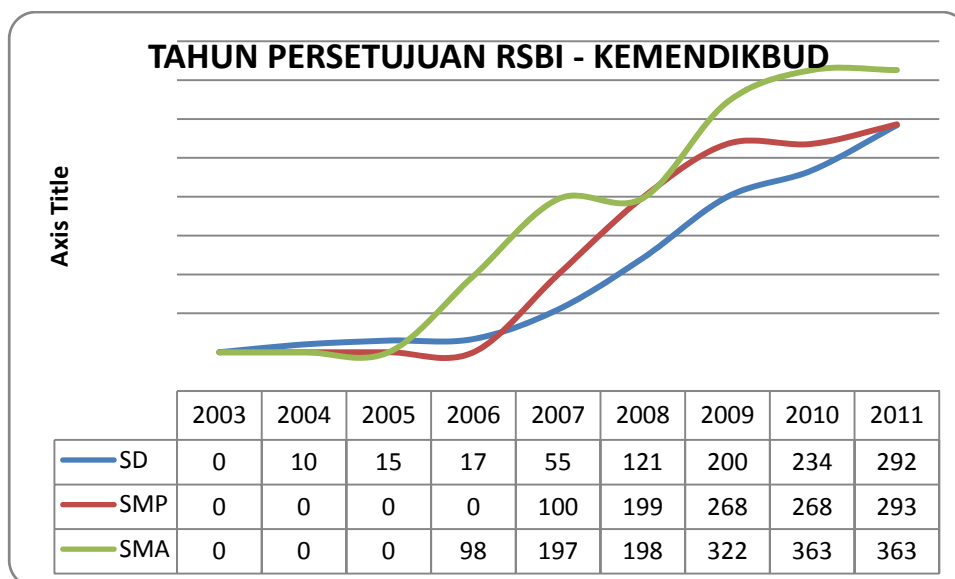
Survei cepat mencari data tentang jumlah total guru di sekolah dibandingkan dengan jumlah guru kelas internasional. Kami tidak membedakan dalam penelitian apakah guru di kelas internasional mengajar di kelas reguler juga, tapi kemungkinan besar seperti itu. Tabel 16 di bawah ini menunjukkan jumlah guru dibandingkan dengan jumlah mengajar di kelas internasional.

Tabel 16–Jumlah Guru di Kelas Internasional

	JUMLAH GURU	GURU DI KELAS INTERNASIONAL	% GURU DI KELAS INTERNASIONAL
SD	4.993	2.440	49%
SMP	13.215	11.389	86%
SMA	14.020	10.640	76%
SMK	21.236	10.670	50%
TOTAL	54.464	35.139	65%

Hasil dan Analisis: Dengan mengekstrapolasi ke seluruh RSBI, terdapat hampir 100.000 guru di sekolah-sekolah RSBI dengan 65% dari mereka dilaporkan mengajar di kelas internasional.

5.1.4. Kecepatan Persetujuan/Pendirian RSBI Sejak Awal berdasarkan Tipe Sekolah



Grafik1– Jenis Sekolah vs Tahun Pendirian (Sumber: Kemdikbud)

Grafik 1 di atas menyajikan jumlah sekolah yang diplot sesuai tahun pendiriannya. Data ini diperoleh dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan telah dikonfirmasi melalui survei cepat. Data SMK tidak tersedia dalam data base Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Data yang disajikan bersifat kumulatif.

Hasil dan Analisis: Kecepatanpendirian RSBI memberikan indikasi sejarah pelaksanaan, urutan prioritas, dan kapasitas sistem. Hal ini dapat dilihat dari plot bahwa prioritas pelaksanaan RSBI berurutatn dari SMA, SMP, dan kemudian SD. Data ini juga menunjukkan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan RSBI di SMA dan SMP dalam 100 angkatan sekolah, dan mengalami penurunan setelah Tahun ketiga. Akan tetapi, SDtampaknya diimplementasikan dengan cara yang berbeda, secara bertahap, dan seimbang. Sangat menarik untuk dicatat bahwa 25 SD RSBI ditetapkan pada tahun 2004-05, dua tahun sebelum peluncuran program secara resmi pada 2006. Berdasarkan analisis data lebih lanjut, kami mengidentifikasi bahwa sekolah-sekolah ini kemungkinan besar berpartisipasi dalam peluncuran program percontohan. Seluruh sekolah ini memiliki nama yang sama (TK / SD Bertaraf Internasional).

5.2. Analisis Finansial

5.2.1. Pendahuluan

Permendiknas 78/2009 mewajibkan pemerintah pusat, provinsi dan kota/ kabupaten dan masyarakat untuk membiayai SBI (Bagian 7, Pasal 2). Peraturan tersebut juga memungkinkan SBI untuk membebaskan biaya (guna menutupi biaya yang berada di atas biaya normal) berdasarkan rencana sekolah (Bagian 7, Pasal 3). Semua tingkat pemerintahan dapat memberikan bantuan keuangan, sarana dan prasarana, guru dan tenaga pendidikan dan bentuk bantuan lain ke SBI ditetapkan oleh pemerintah dan masyarakat.

Penelitian telah mengumpulkan dan menganalisis data yang berkaitan dengan pembiayaan program RSBI yang disajikan di bawah ini. Kesimpulan keseluruhan adalah bahwa sekolah RSBI tergolong mahal

dalam hal pengeluaran pemerintah dan masyarakat. Pemerintah telah memberikan subsidi untuk RSBI sebesar lebih Rp 1 triliun (US \$ 113 juta) selama enam tahun terakhir. Tetapi persentase anggaran pemerintah pusat untuk RSBI terhadap anggaran nasional untuk pendidikan sangat sederhana, misalnya, subsidi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk SD dan SMP RSBI pada tahun 2011 hanya 5% dari seluruh anggaran Kementerian.

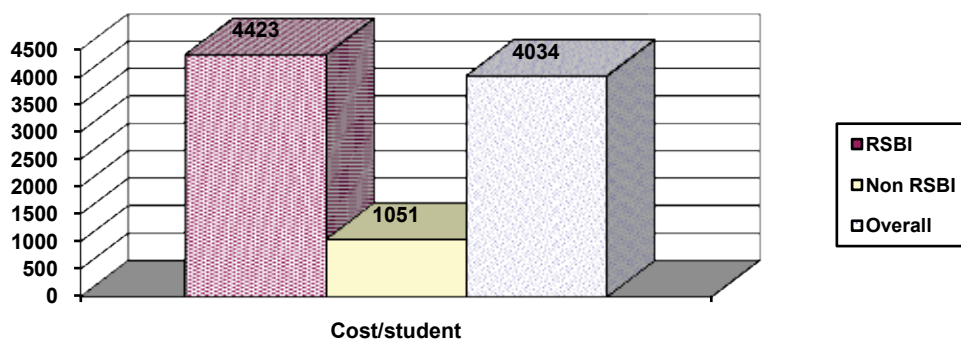
Sementara pemerintah memberikan sejumlah besar uang untuk membiayai pengembangan SBI, orang tua berkontribusi lebih melalui pungutan uang masuk dan biaya bulanan. Orang tua kaya tampaknya lebih mampu untuk membayar biaya tersebut. Sementara murid dari latar belakang sosial ekonomi kurang mampu yang berhak menerima beasiswa atau bentuk lain dari bantuan keuangan seperti pengurangan biaya (syarat minimum adalah 20% murid berpenghasilan rendah), tidak semua memanfaatkan kesempatan dan dalam beberapa kasus murid tersebut enggan untuk masuke ke RSBI karena takut diejek oleh murid yang lebih kaya.

5.2.2. Analisis Keuangan Sekolah

Data di bawah ini adalah dari bagian dari kuesioner Survei Sekolah (n = 70 RSBI, 9 Non-RSBI). Setelah kunjungan sekolah, surveyor bertemu dengan staf sekolah untuk melakukan tabulasi data berdasarkan catatan sekolah. Data untuk analisis belanja publik diambil dari anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan dari studi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

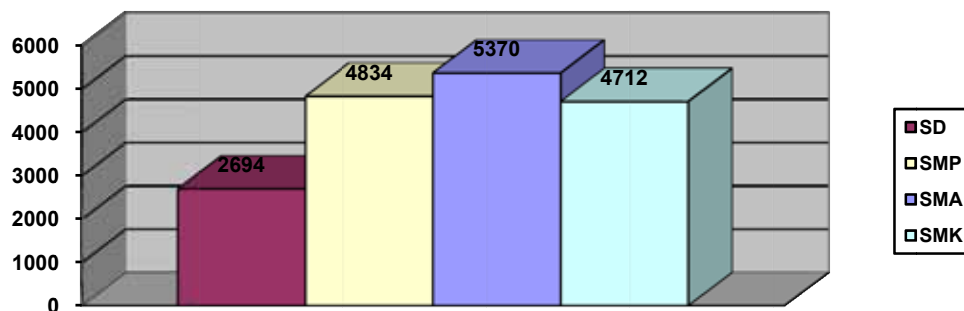
5.2.2.1. Biaya Satuan: RSBI Dibandingkan Non-RSBI

Biaya satuan (unit cost) RSBI jauh lebih mahal daripada non-RSBI, yaitu sekitar empat kali (Gambar 6). Rata-rata uang masuk RSBI adalah Rp5,9 juta, dibandingkan dengan Rp1,2 juta di Non-RSBI. Biaya tahunan RSBI non-teknis (non-SMK) terlihat sebanding: SD / SMP rata-rata Rp.6 juta, untuk SMA Rp8,7 juta. Biaya satuan RSBI SMK secara signifikan lebih rendah, rata-rata Rp.2,3 juta. Rata-rata biaya satuan per murid RSBI di semua tingkatan adalah sekitar Rp.4.5 juta, dengan maksimum ditemukan dalam penelitian menjadi lebih Rp31 juta (SMK), tetapi biayarata-rata yang paling mahal adalah di RSBI SMA (Gambar 7).



Gambar 6 - Biaya Satuan Per Murid (Rp. '000) Menurut Status Sekolah untuk Pengeluaran Non-Gaji

(Sumber data: Survei sekolah n=70)

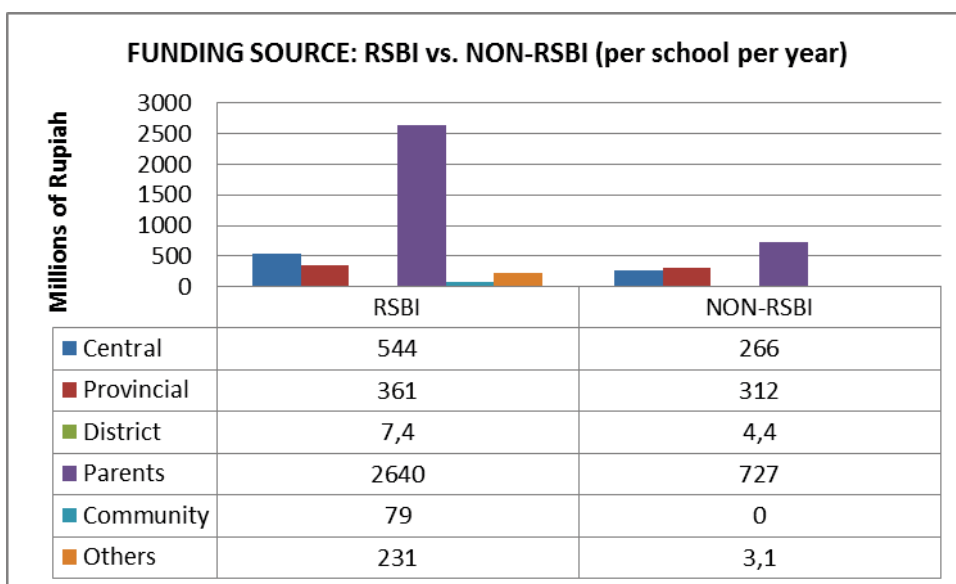


Gambar7 - Biaya Satuan Per Murid (Rp. '000) RSBI untuk Pengeluaran Non-Gaji

(Sumber Data: Survei sekolah n=70)

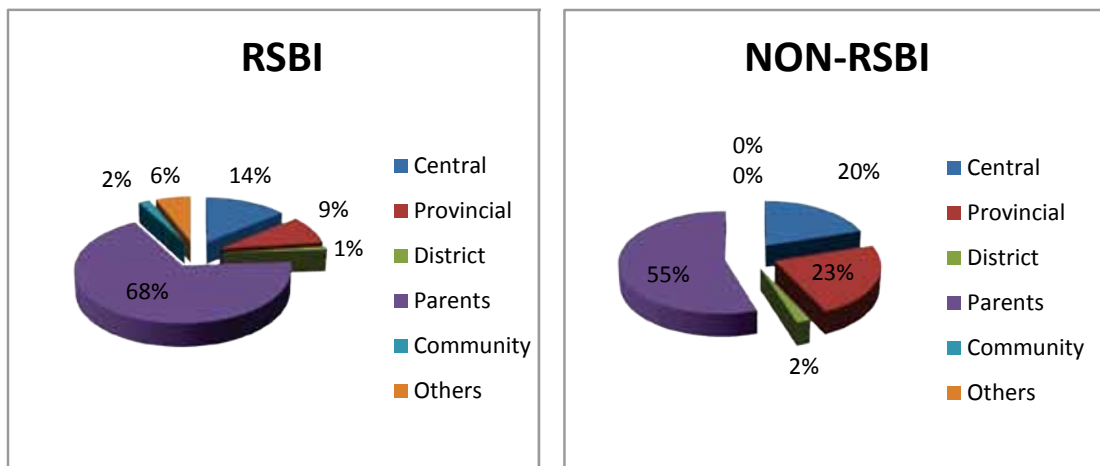
5.2.2.2. Sumber Keuangan: RSBI Dibandingkan Non-RSBI

Sekolah RSBI menerima dana dari berbagai tingkat pemerintahan, orang tua, masyarakat, dan dalam beberapa kasus dari dunia usaha. Seperti terlihat pada Gambar 8 dan 9 di bawah ini, di tingkat sekolah, sumber terbesar dana RSBI adalah dari orang tua (68%) diikuti oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Pemerintah provinsi memberikan kontribusi sedikit lebih besar ke RSBI dibandingkan dengan dukungan ke non-RSBI, sedangkan kontribusi kabupaten untuk RSBI hampir dua kali lipat ketimbang kontribusi untuk non-RSBI. Perlu dicatat bahwa salah satu provinsi dalam sampel tidak berkontribusi terhadap RSBI sama sekali dan beberapa kabupaten tidak berkontribusi. Sekolah Non-RSBI juga menerima persentase terbesar dana dari orang tua, namun dana oleh orang tua untuk RSBI lebih dari tiga kali lipat dibandingkan di Non-RSBI (Gambar 9).



Gambar 8 - Sumber Pendanaan Tahunan RSBI dan Non-RSBI(Nilai per Sekolah)

(Sumber data: Survei sekolah n=70)



Gambar 9 - Pendanaan Tahunan untuk RSBI dan Non-RSBI Per Sekolah dalam Persentase)

(Sumber data: Survei sekolah n=70)

5.2.2.3. Struktur Biaya RSBI

Sebagian besar dana dari orang tua dan pemerintah digunakan untuk menutupi biaya infrastruktur dan peralatan untuk sekolah SD dan SMP RSBI, sementara biaya operasional seharusnya ditanggung oleh BOS (data dikutip di atas tidak termasuk BOS). SMA dan SMK tidak menerima BOS, sehingga pemerintah menyediakan infrastruktur dan peralatan, dan sumber utama dana operasional mereka adalah dari orangtua.

Beberapa sekolah membuat banyak upaya untuk menekan biaya, terutama di kabupaten, di mana jumlah kelas menengah relatif rendah. Rata-rata biaya di sekolah umum hampir 40% lebih rendah daripada sekolah swasta. Pembiayaan sekolah (RSBI) sebagian besar masih ditanggung oleh orang tua, namun, selama wawancara, mereka tidak mengeluh mahal biaya.

5.2.3. Analisis Belanja Publik

Masalah dana pemerintah untuk RSBI dapat dilihat dari dua perspektif. Pertama, jumlah total dana yang pemerintah (pusat) berikan per sekolah RSBI untuk tahun ajaran 2011-2012 rata-rata hampir dua kali lipat jumlah yang disediakan untuk non-RSBI (Rp.544 juta vs Rp.266 juta) sementara pemerintah provinsi memberikan 14% lebih banyak untuk RSBI dibandingkan non-RSBI (Gambar 9). Kedua, persentase semua dana yang disediakan oleh pemerintah (pusat, provinsi dan kabupaten) terhadap total dana jauh lebih kecil daripada yang diberikan kepada non-RSBI sekolah (45% vs 24%) karena tingginya jumlah kontribusi orang tua untuk uang sekolah dan oleh masyarakat pemangku kepentingan lainnya seperti dunia usaha (Gambar 8).

Dilihat dari segi nilai absolut, pengeluaran pemerintah untuk RSBI selama enam tahun terakhir tergolong besar, yakni lebih dari Rp1 Triliun atau USD 113 juta (Tabel 17). Hal itu memperkuat persepsi masyarakat bahwa program RSBI mahal dan bahwa pengeluaran sebenarnya bisa digunakan untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak. Sebagai contoh, studi ACDP 006 memberikan perkiraan awal tentang biaya untuk pendidikan dasar madrasah swasta guna memenuhi SPM tertentu saja: MI membutuhkan Rp.1.5 triliun untuk rehabilitasi infrastruktur, Rp. 340 miliar untuk ruang guru dan perabot, Rp. 41 miliar untuk peralatan laboratorium dan buku; MTs membutuhkan Rp. 920 miliar untuk rehabilitasi infrastruktur dan Rp. 2.3 triliun untuk peralatan laboratorium dan buku. Dengan kata lain, dana pemerintah yang dikeluarkan untuk RSBI selama enam tahun terakhir sebenarnya bisa membantu madrasah swasta memenuhi SPM tertentu.

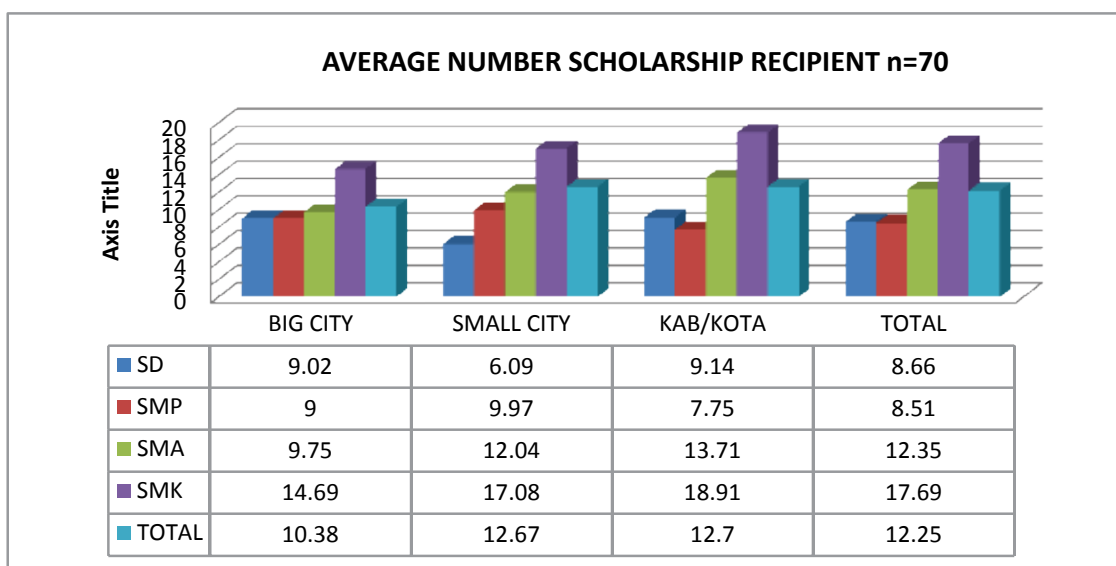
Tabel 17–Alokasi Hibah RSBI 2007 - 2010

LEVEL	YEAR/TOTAL PENDANAAN (Milyar Rupiah)					TOTAL
	2006	2007	2008	2009	2010	
SD	-	19	44.4	23.6	23.1	110.1
SMP	-	40	59.7	80.4	80.4	260.5
SMA	30	59	59.4	150	79.2	378
SMK	50	76	50	123.449	24.7	324.649
TOTAL	80	194.9	213.5	377.449	207.4	1.073

(Sumber Data: Puslitjak, Kemendikbud (data dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, 2011))

5.2.4. Analisis Beasiswa dan Bantuan Lain untuk Murid Miskin

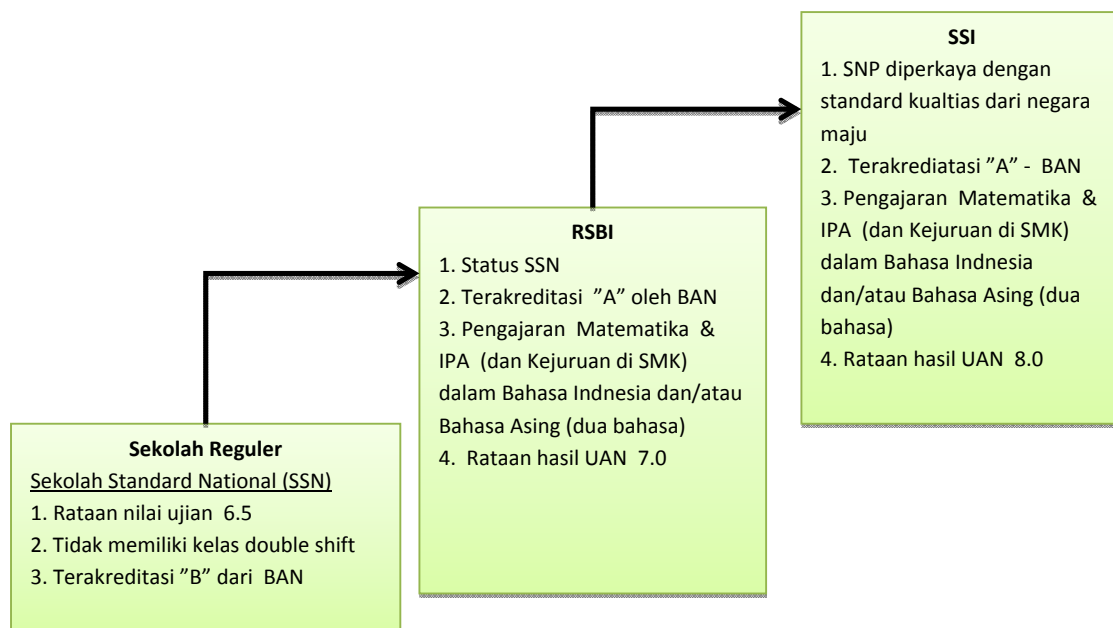
Peraturan Menteri 78/2009 menetapkan alokasi 20% murid adalah untuk mereka yang berasal dari keluarga berpenghasilan rendah, dan sekolah harus menyediakan beasiswa atau beberapa bantuan keuangan lain berdasarkan tingkat pendapatan keluarga. Data menunjukkan bahwa secara keseluruhan, RSBI tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan karena rata-rata hanya sekitar 12% dari murid penerima beasiswa atau bantuan keuangan dalam bentuk pengurangan biaya. Ketika membandingkan strata sosial ekonomi, jumlah relatif untuk masing-masing jenis sekolah adalah sama untuk SMA dan SMK, dengan beberapa variabilitas dengan SD dan SMP. Ada juga variasi di lokasi di mana persentase beasiswa di kota-kota besar yang lebih makmur lebih rendah daripada di kabupaten dan kota kecil. Hal ini merupakan indikasi bahwa RSBI di kota-kota besar terletak di daerah yang lebih kaya hingga calon murid dari kelompok sosial ekonomi kurang mampu lebih sedikit jumlahnya.



Bagan 2 - Rata-rata Jumlah Penerima Beasiswa

5.3. Evaluasi Pemenuhan Standar Tertentu dalam Persyaratan SBI

Tujuan evaluasi ini adalah untuk mengukur kemajuan pencapaian RSBI dalam upaya memenuhi kriteria Sekolah Bertaraf Internasional (SBI). Kata “Rintisan” menunjukkan bahwa mencapai status RSBI bukanlah tujuan itu sendiri, tetapi suatu proses transisi dimana sekolah reguler yang baik diidentifikasi guna mendapatkan perlakuan khusus untuk mencapai atau disertifikasi sebagai sekolah dengan standar internasional (SBI). Tidak ada sekolah yang telah mencapai status ini melalui program pengembangan RSBI yang dimulai pada 2006 dan akan berakhir pada tahun 2012²¹. Gambar 4 di bawah ini menunjukkan proses yang digambarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan²²:



Gambar 10–Konsep Proses Pengembangan SBI

Rumus yang biasa dipakai oleh Kemendikbud²³ untuk menyatakan Sekolah Bertaraf Internasional adalah:

$$\text{Sekolah Bertaraf Internasional} = \text{SNP} + "X"$$

dimana SNP = 8 Standar Nasional Pendidikan²⁴. Menurut Direktorat Jenderal Pengembangan Pendidikan Dasar dan Menengah, “X” bisa dalam bentuk penguatan, pengayaan, perluasan atau pendalaman kualitas pendidikan dengan tujuan untuk mencapai kualitas pendidikan pada standar yang ditetapkan oleh negara-negara OECD atau negara-negara maju sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri (Permendiknas) Nomor 78/2009 tentang pelaksanaan SBI). Direktorat-direktorat di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Pendidikan Dasar) (SD dan SMP), Menengah (SMA) dan Pendidikan Kejuruan (SMK) telah mengembangkan pedoman teknis dan instrumen pemantauan dan evaluasi berdasar pada regulasi tersebut.

²¹ Lihat TOR di Lampiran 2

²² Presentation: “Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional”, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Nasional

²³ Presentasi: “Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional”, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Nasional

²⁴ List

Dalam rangka mengevaluasi “Pemenuhan Standar Tertentu untuk Sekolah Bertaraf Internasional”, penelitian ini telah membentuk seperangkat indikator dan kriteria penilaian yang disajikan dalam Tabel 14. Indikator-indikator ini dipilih dari Peraturan Menteri 79/2009 dan dokumen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan lainnya.

Kinerja pencapaian setiap indikator ditampilkan dalam tabel di bawah ini. Setiap tabel menyajikan data yang dikumpulkan untuk mengukur pemenuhan secara keseluruhan dan ringkasan analisis. Apabila diperlukan, tingkat pemenuhan keseluruhan dianalisis lebih lanjut berdasarkan jenis sekolah dan berdasarkan jenjang (SD, SMP, SMA, SMK) dan status sekolah (negeri atau swasta). Dalam kebanyakan kasus, data non-RSBI disajikan sebagai pembandingan untuk mendapatkan analisis yang lebih informatif.

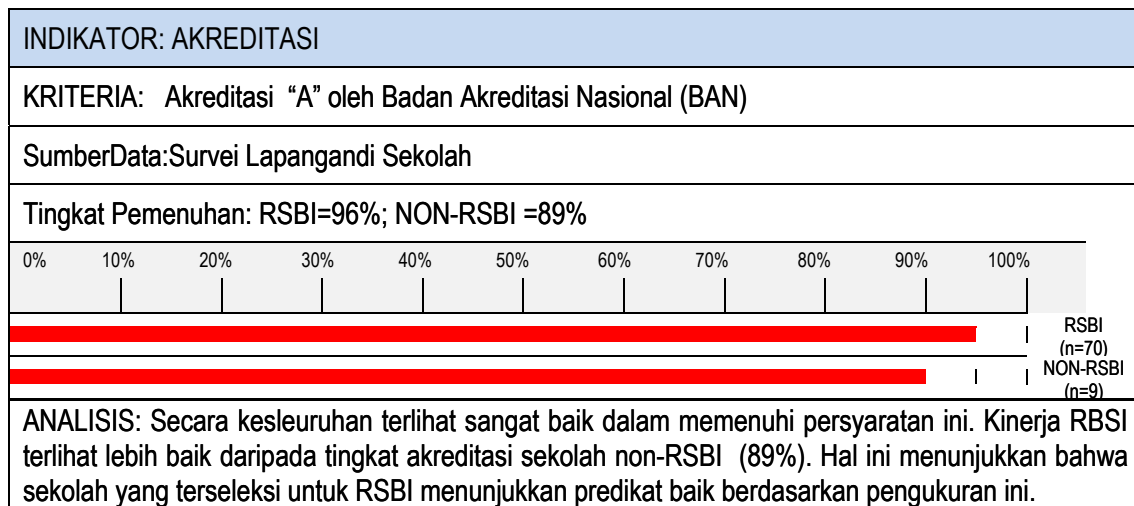
Tabel 18–Indikator Kinerja Sekolah Standard Internasional

INDIKATOR	KRITERIA	CATATAN
Akreditasi	i. Terakreditasi “A” dari BAN ii. Tambahan Akreditasi dari negara OECD atau negara maju lainnya	
Kurikulum dan Kompetensi Lulusan	i. Adopsi Kurikulum dari negara Lain ii. Rerata hasil UAN 7.0 untuk RSBI dan 8.0 untuk SBI	
Proses Belajar Mengajar	i. Adopsi Metode Belajar-Mengajar dari negara lain ii. Sekolah lain menggunakan SBI sebagai referensi iii. Penggunaan Bahasa Inggris atau Bahasa Asing lain untuk mata ajaran tertentu sejak Kelas 4	
Evaluasi	i. Menggunakan standar evaluasi dari negara OECD atau negara maju lainnya	Penggunaan portfolio sebagai bagian proses evaluasi
Kualifikasi Guru	i. Minimum S2/S3: 10% (SD), 20% (SMP), 30% (SMA / K) ii. Mampu menggunakan TIK dalam mengajar	
Kualifikasi Kepala Sekolah	i. Minimum S2/S3 ii. Mampu secara aktif berbahasa asing	
Infrastruktur	i. Infrastruktur TIK tersedia di setiap kelas ii. Perpustakaan dengan Fasilitas TIK/Perpustakaan Digital	
Manajemen	i. Terdapat hubungan resmi dengan Sister School yang ada di Indonesia atau negara maju ii. Memiliki ISO 9001 versi 2000 atau yang terbaru	
Pembiayaan	i. Menerapkan Administrasi Keuangan yang transparent dan akuntabel ii. 20% dari Murid Miskin dan menerima bantuan/beasiswa	

Grafik berikut menyajikan data sesuai dengan indikator pemenuhan standar dan kriteria pada Tabel 18 di atas. Setiap bagian dibawah menyajikan temuan untuk setiap indikator berisi analisis singkat untuk setiap tabel. Indikator pemenuhan, kriteria, dan sumber data juga ada untuk masing-masing tabel.

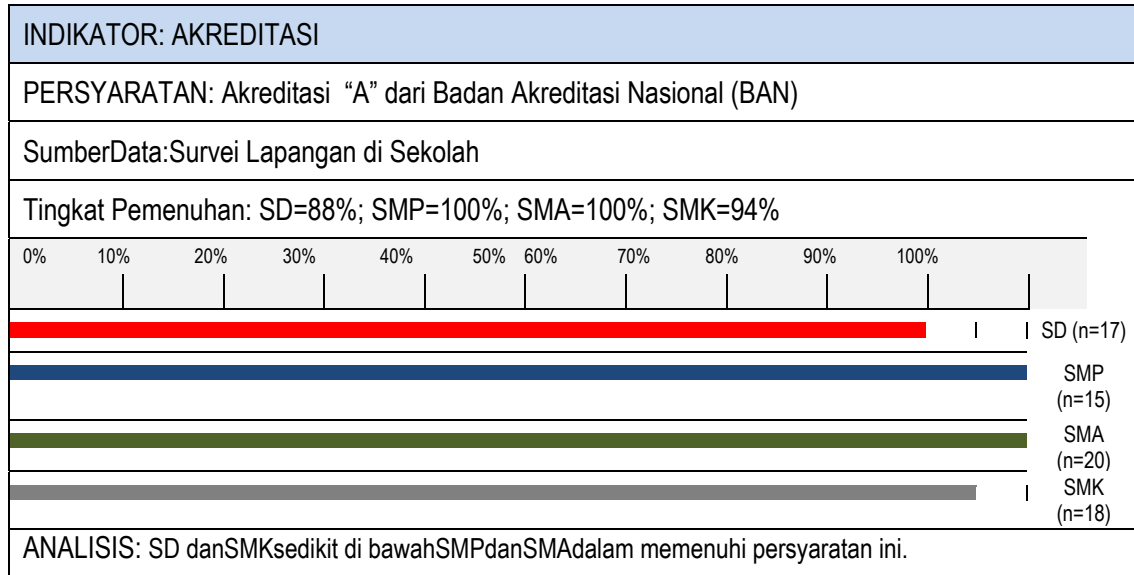
5.3.1. Akreditasi

Akreditasi “A” dari Badan Akreditasi Nasional (BAN) untuk Kinerja Keseluruhan



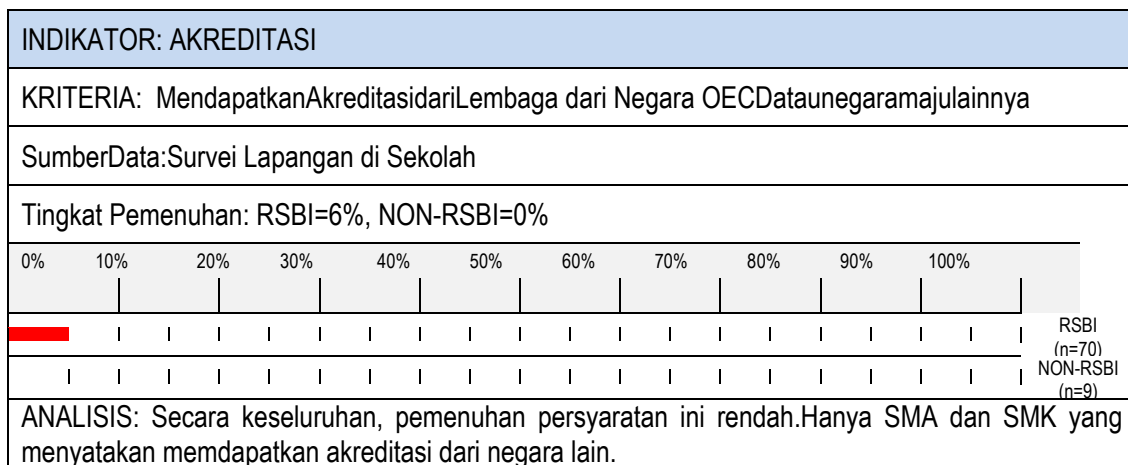
Bagan 3 - Akreditasi “A” oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN) - Keseluruhan

Akreditasi berdasarkan Jenjang Sekolah



Bagan 4 - Akreditasi “A” oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN) - Berdasarkan Jenis Sekolah

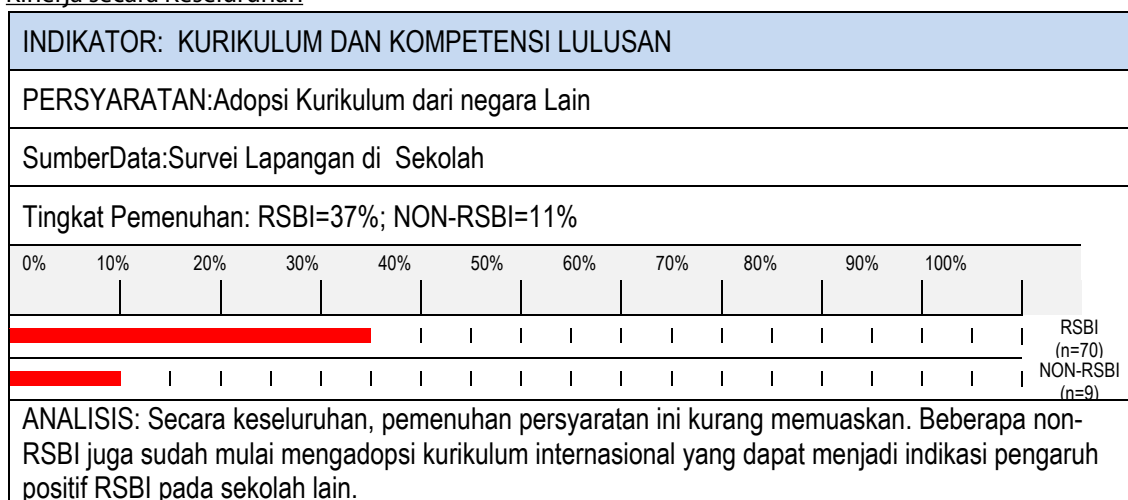
Mendapatkan Akreditasi dari Lembaga OECD atau negara maju lainnya



Bagan 5 – Akreditasi OECD atau Akreditasi dari Negara Maju lainnya

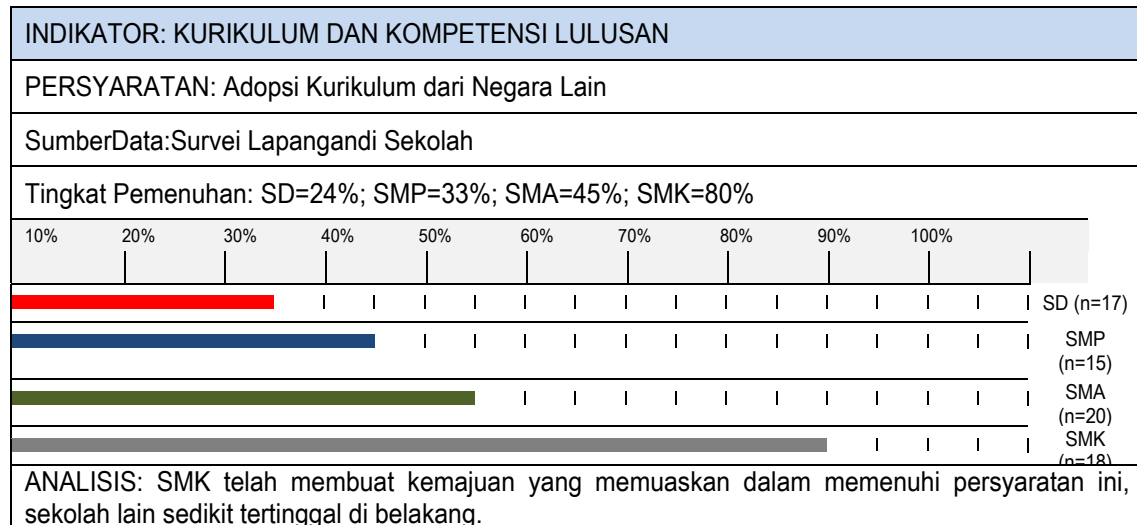
5.3.2. Kurikulum & Kompetensi Lulusan

Kinerja secara Keseluruhan



Bagan 6 - Adopsi Kurikulum dari OECD atau Negara Maju Lainnya

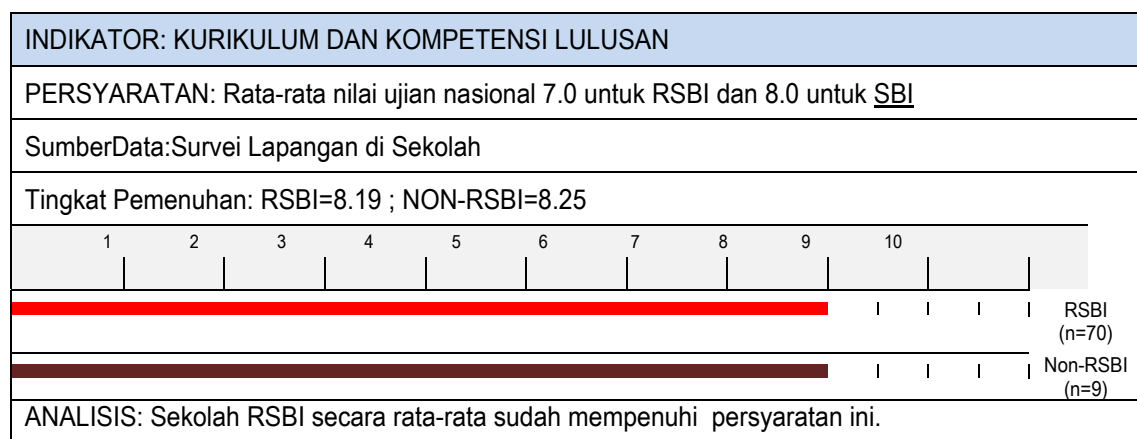
Adopsi Kurikulum dari Negara Lain menurut Tingkat Sekolah



Bagan 7 - Adopsi Kurikulum dari Negara lain menurut Jenis Sekolah

PERBANDINGAN NILAI UJIAN NASIONAL

Ketika dilakukan perbandingan nilai ujian nasional antara sampel RSBI dan non-RSBI, hasilnya adalah sbb:



Bagan 8 - Rata-rata Nilai Ujian Nasional Sampel Studi

Akan tetapi, jumlah sekolah sampel yang digunakan sebagai perbandingan tergolong rendah. Untuk menilai keandalan temuan terkait perbandingan (antara RSBI dengan non-RSBI) diperlukan data set yang lebih besar sehingga hingga temuan menjadi lebih kuat.

Pada bagan di bawah disajikan data yang komprehensif terkait dengan kinerja RSBI dibandingkan dengan rata-rata nasional. Yang disajikan di sini adalah analisis dari tiga set data:

- 1) Rata-rata skor Ujian Nasional²⁵ (semua sekolah selain Madrasah)
- 2) Evaluasi studi lapangan dengan sampel 70 RSBI yang dipilih secara acak
- 3) Survey Cepat (n = 854)

25 From: <http://litbang.kemdikbud.go.id/hasilun/index.php/statistik>

Tabel di bawah ini menunjukkan agregasi yang terkait dengan set data (tidak termasuk Madrasah):

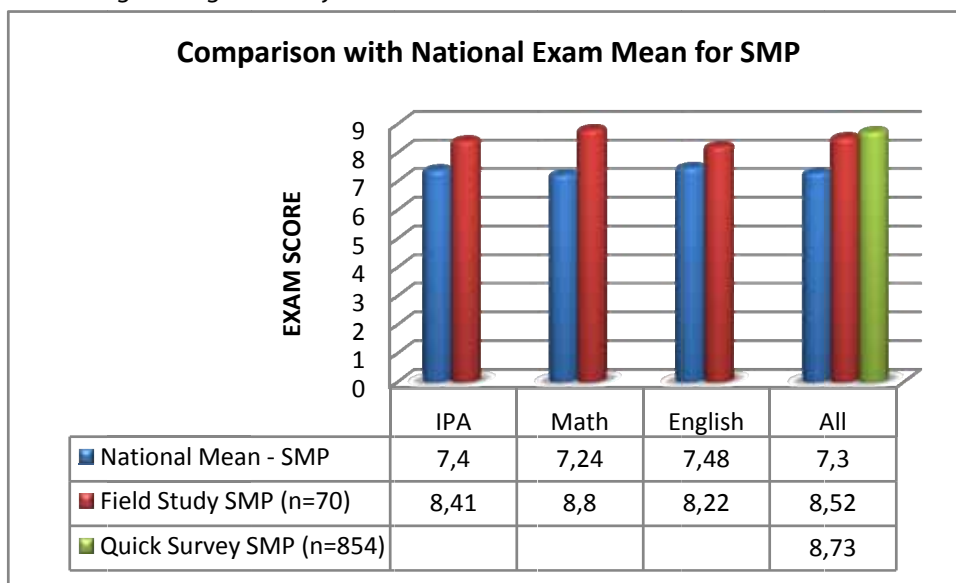
Tabel 19–Rata-rata Ujian Nasional Dibandingkan dengan HasilEvaluasi (2011)

	PERBANDINGAN HASIL UJIAN NASIONAL (Hasil Tahun 2011)													
	Rerata Nasional (2011)				Rerata Studi Lapangan RSBI (n=70)				Survei Cepat (n=854)					
	SMP	SMA	SMK	TOT	SD	SMP	SMA	SMK	TOT	SD	SMP	SMA	SMK	TOT
IPA	7.40	---	8.41	---	8.42	8.41	---	---	8.41	---	---	---	---	---
Fisika	---	8.11	---	8.16	---	---	7.93	---	7.93	---	---	---	---	---
Kimia	---	8.34	---	8.39	---	---	8.57	---	8.57	---	---	---	---	---
Biologi	---	7.81	---	7.86	---	---	8.18	---	8.18	---	---	---	---	---
Mathematika	7.24	8.07	7.45	7.62	8.31	8.80	8.59	8.07	8.43	---	---	---	---	---
Bhs Inggris	7.48	8.10	7.57	7.84	8.99	8.22	8.18	7.48	7.99	---	---	---	---	---
Semua Mapel	7.3	8.04	7.63	7.69	8.33	8.52	8.25	7.72	8.19	8.01	8.72	8.24	7.94	8.30*

*tidak termasuk SD

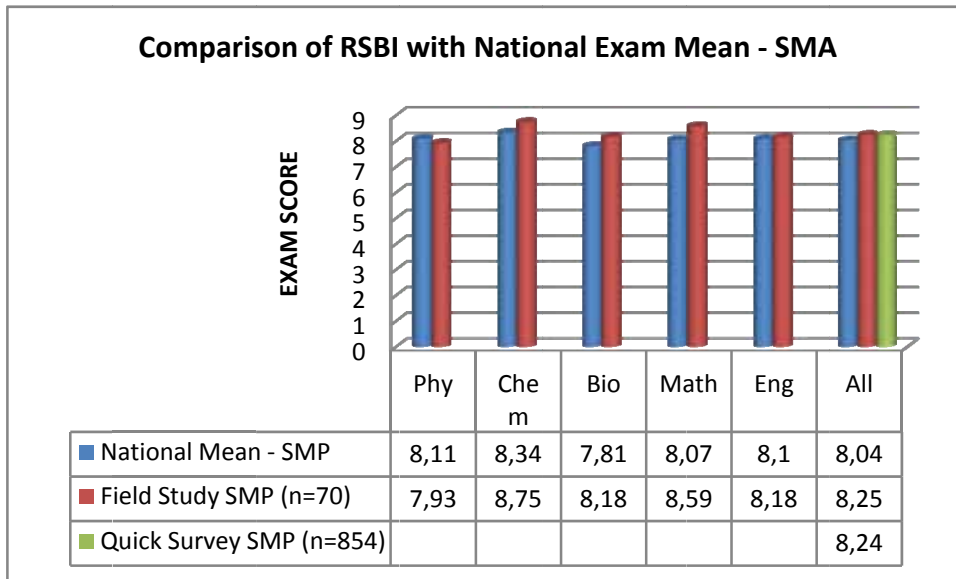
Berikut ini adalah bagan analisis beberapa data di atas. Bagan yang dimaksud merinci perbandingan antar jenjang sekolah RSBI (SMP, SMA, SMK) dengan rata-rata nilai Ujian Nasional untuk 2011. Pada bagan yang sama terdapat rata-rata keseluruhan hasil Survei Cepat dari 854 RSBI. Nilai untuk SD tidak tersedia dalam database Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Perbandingan dengan Nilai Ujian Nasional Rata-rata - SMP



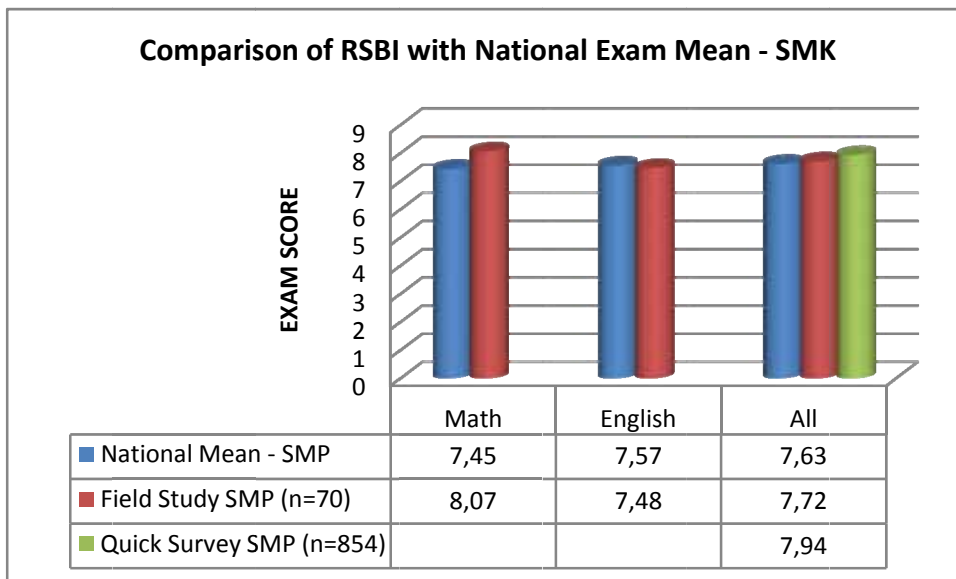
Bagan 9 - Perbandingan dengan Rata-rata Ujian Nasional untuk SMP

Perbandingan dengan Nilai Ujian Nasional Rata-rata - SMA



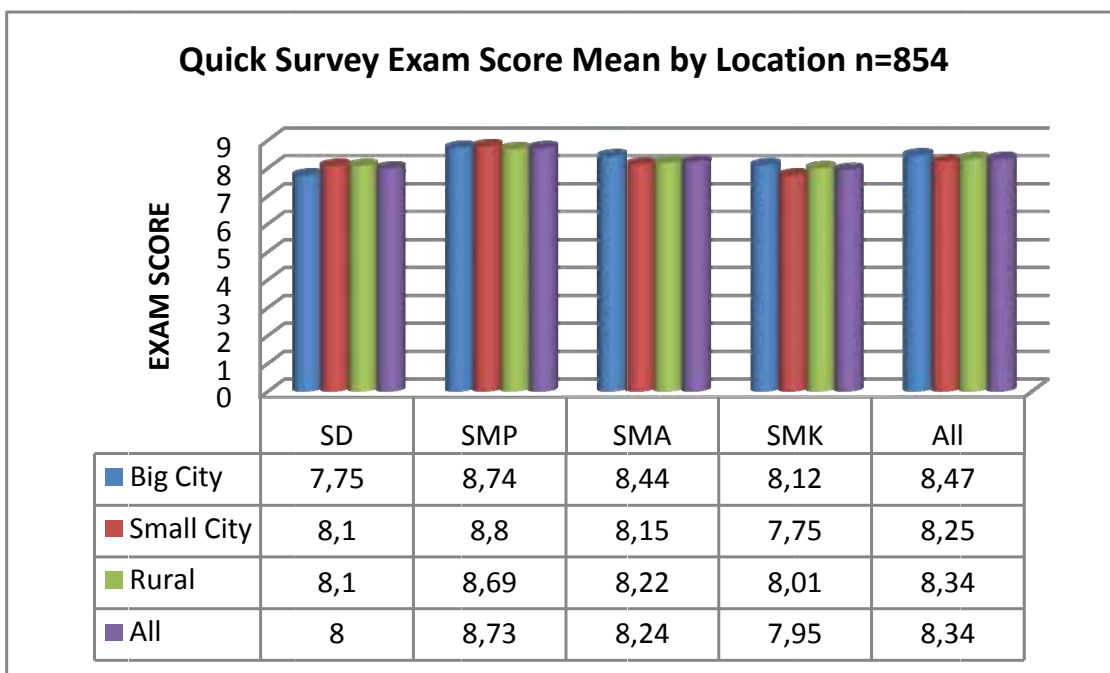
Bagan 10 - Perbandingan dengan Rata-rata Ujian Nasional untuk SMA

Perbandingan dengan Skor Ujian Nasional - SMK



Bagan 11 - Perbandingan dengan Rata-rata Ujian Nasional untuk SMK

Perbandingan antara Nilai Ujian Nasional Berdasarkan Survei Cepat dengan Strata Sosial-Ekonomi
(n = 854)



Bagan 12–Rata-rata Nilai Ujian Berdasarkan Survei Cepat menurut Lokasi

Analisis: Dari data yang disajikan, terlihat bahwa perbedaan kecil ada di antara sampel penelitian ini dengan rata-rata nasional. Beberapa nilai (SMP) terlihat lebih baik di RSBI, akan tetapi sampel rata-rata nasional meliputi semua tingkat akreditasi (termasuk sekolah-sekolah yang mungkin kualitasnya “kurang baik”), yang mungkin mengurangi komparabilitas antara kedua sampel. Hal itu dapat menjelaskan perbedaan nilai dalam temuan ini. Kami merasa bahwa perbedaan yang terlihat tidak dapat disimpulkan, karena data Ujian Nasional yang terpilah menurut tingkat akreditasi tidak tersedia.

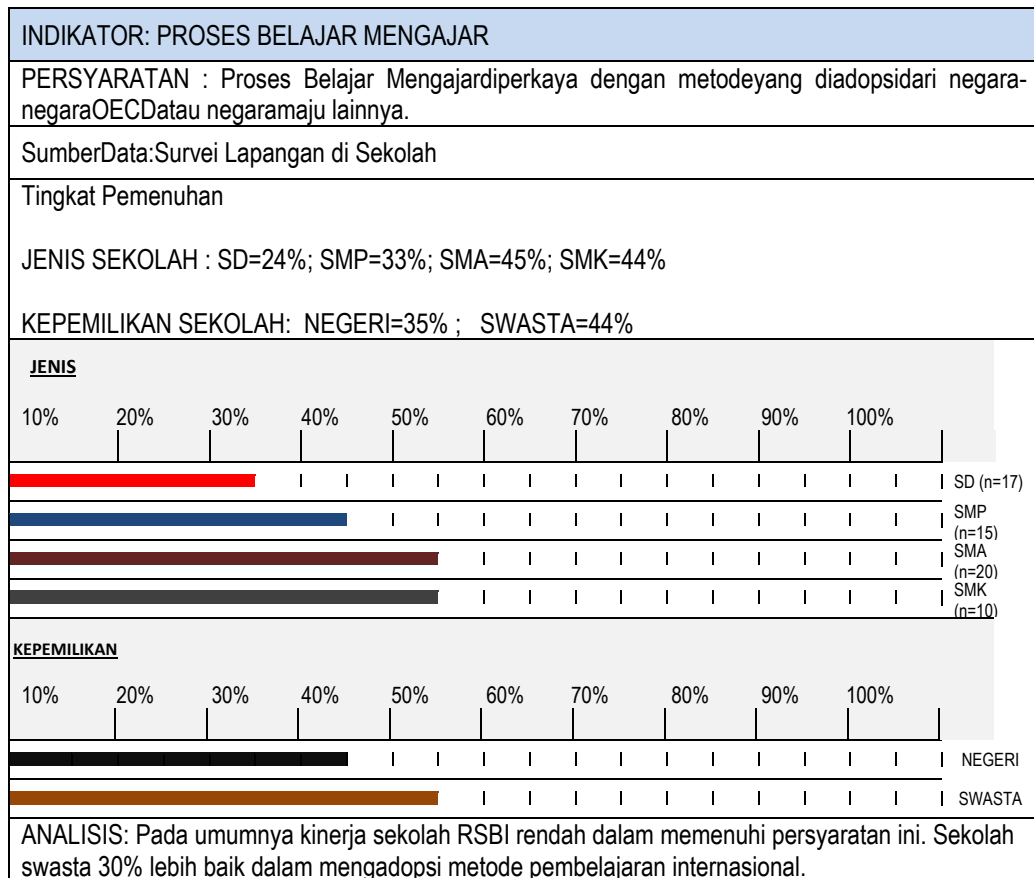
5.3.3. Proses Belajar Mengajar

Diperkaya dengan Metode yang Diadopsi dari Negara OECD-Kinerja Keseluruhan

INDIKATOR: PROSES PEMBELAJARAN	
PERSYARATAN : Proses pembelajaran diperkaya dengan metode yang diadopsi dari negara-negara OECD atau negara maju lainnya.	
Sumber Data: Survei Lapangan di Sekolah	
Tingkat Pemenuhan: RSBI=37%; NON-RSBI=11%	
0%20%30%40%50%60%70%80%90%100% RSBI (n=70) NON-RSBI (n=9)	
ANALISIS: Kinerja terkait indikator ini masih rendah, mengingat bahwa sebagian besar RSBI yang telah menjalankan program selama beberapa tahun. Beberapa sekolah non-RSBI telah mengadopsi metode internasional yang mungkin merupakan efek program RSBI.	

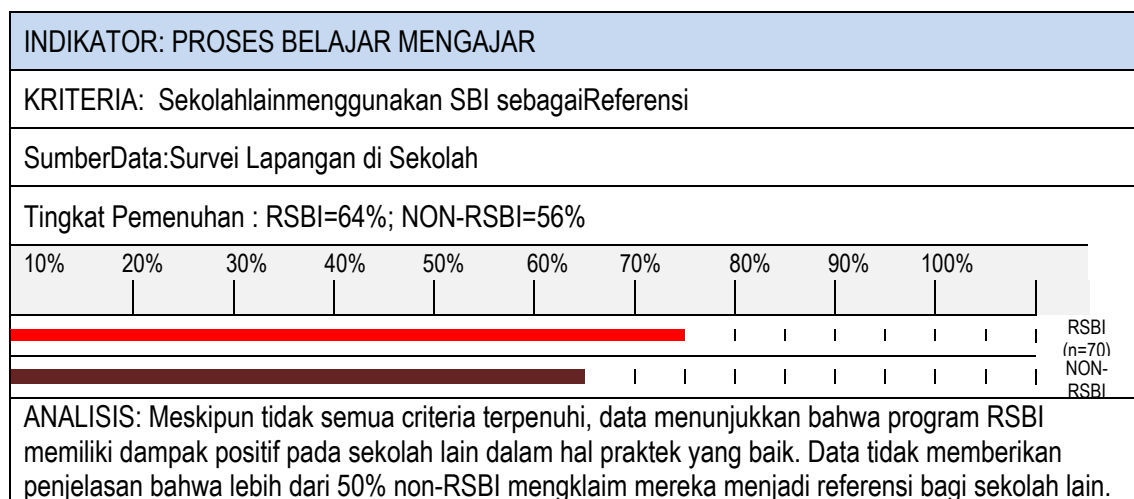
Bagan 13–Metode Belajar Mengajar - Keseluruhan

Mengadopsi Metode Belajar Mengajar Internasional Menurut Jenis Sekolah



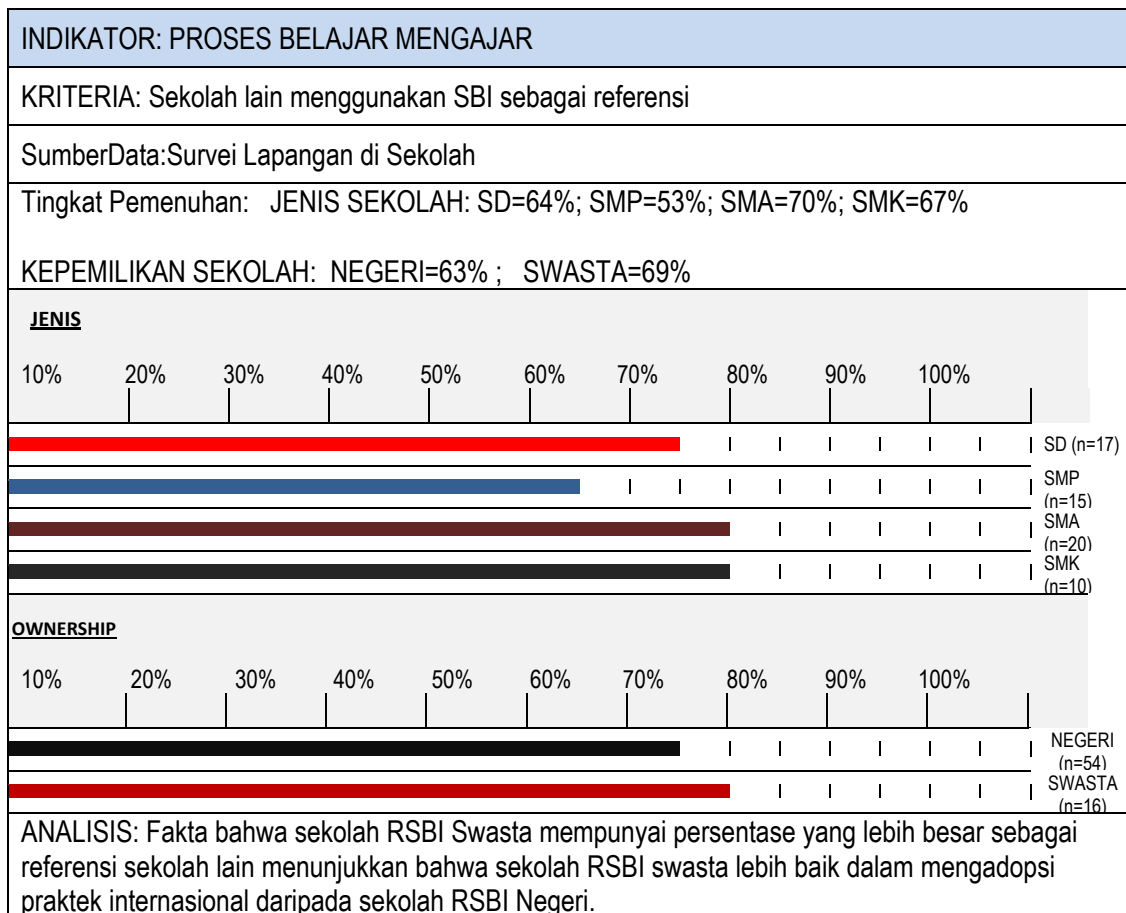
Bagan 14 - Metode Belajar Mengajar - Menurut Jenis Sekolah

Sekolah Lain Menggunakan SBI sebagai Referensi-Kinerja Keseluruhan



Bagan 15 - Sekolah Lain Menggunakan SBI sebagai Referensi

Proses Belajar Mengajar sebagai Referensi bagi Sekolah Lain - Berdasarkan Jenis Sekolah.



Bagan16 - Sekolah Lain Menggunakan SBII sebagai Referensi - Menurut Jenis Sekolah

Penggunaan Bahasa Inggris atau Bahasa Asing Lainnya untuk Mata Pelajaran Tertentu

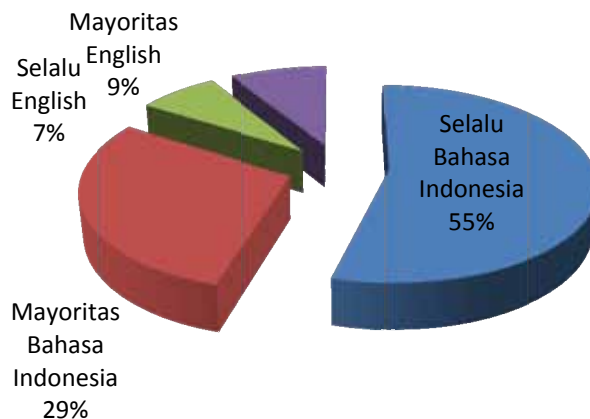
INDIKATOR : Bahasa pengantar
 KRITERIA : Penggunaan Bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya untuk mata pelajaran tertentu
 Sumber Data : Pengamatan Kelas (n = 68)
 Metode : Pengamat kelas diminta untuk menilai frekuensi penggunaan Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia selama jam pembelajaran. Pengamat menilai penggunaan bahasa pengantar sebagai berikut:

- 1) Selalu menggunakan Bahasa Indonesia
- 2) Mayoritas waktu menggunakan Bahasa Indonesia
- 3) Selalu menggunakan Bahasa Inggris
- 4) Mayoritas waktu menggunakan Bahasa Inggris

Bagan-bagan di mentabulasi sekolah RSBI berdasarkan observasi kelas (n = 68):

Tabel 20 - Frekuensi Penggunaan Bahasa di Kelas

	Frekuensi	Persentase
Selalu Bahasa Indonesia	37	55%
Sebagian besar Bahasa Indonesia	20	29%
Selalu Bahasa Inggris	5	7%
Sebagian besar Bahasa Inggris	6	9%
Total	68	100%



Bagan 17–Hasil Pengamatan Kelas terhadap Bahasa Pengantar

Tabel berikut memilah frekuensi yang diamati dalam penggunaan bahasa pengantar menurut jenis sekolah dan kepemilikan:

Tabel 21 - Frekuensi Bahasa Pengantar Menurut Jenis Sekolah

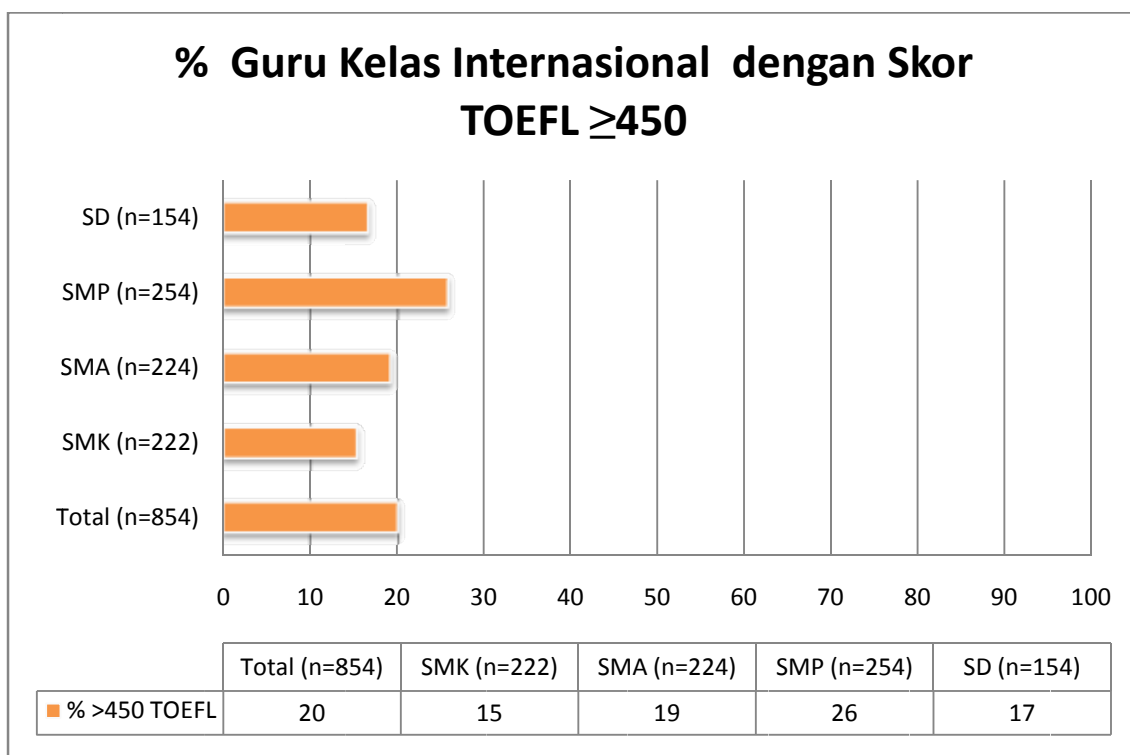
	SD	SMP	SMA	SMK	Negeri	Swasta
Selalu Bahasa Indonesia	6	5	15	11	30	7
Sebagian besar Bahasa Indonesia	4	7	4	5	19	1
Selalu Bahasa Inggris	3	2	0	0	2	3
Sebagian besar Bahasa Inggris	3	1	0	2	4	2
Total	16	15	19	18	55	13

Analisis: Data tentang bahasa pengantar menunjukkan sangat rendahnya pemenuhan standar untuk, khususnya untuk Bahasa Inggris sebagai pengantar. Angka-angka jelas menunjukkan bahwa Bahasa Indonesia digunakan paling banyak (84% dari waktu tatap muka), yang mendukung klaim bahwa RSBI mengalami kesulitan dalam menggunakan Bahasa Inggris sebagai pengantar.

Pemenuhan yang rendah di sini menunjukkan bahwa guru tidak siap untuk mengajar dalam Bahasa Inggris, dan kembali ke Bahasa Indonesia untuk memberikan pelajaran. Sangat menarik untuk dicatat bahwa tidak ada kelas SMA yang diamati memang menggunakan Bahasa Inggris. Hal lain yang juga menarik bahwa frekuensi penggunaan Bahasa Inggris semakin menurun pada kelas-kelas yang lebih tinggi. Satu penjelasan yang mungkin dapat diberikan adalah bahwa secara teknis materi menjadi lebih sulit, sehingga guru tidak dapat mengelola dengan baik materi jika diberikan dalam Bahasa Inggris.

Kemampuan Guru berbahasa Inggris pada Kelas Internasional

Peraturan mengharuskan semua guru di kelas internasional mahir dalam berbahasa Inggris. Saat ini, indikator kualitas yang digunakan adalah TOEFL, dengan persyaratan minimum untuk semua guru kelas internasional ≥ 450 . Tabel berikut menggunakan data Survei Cepat ($n = 854$) untuk menunjukkan persentase guru menurut jenis sekolah dengan nilai TOEFL ≥ 450 .

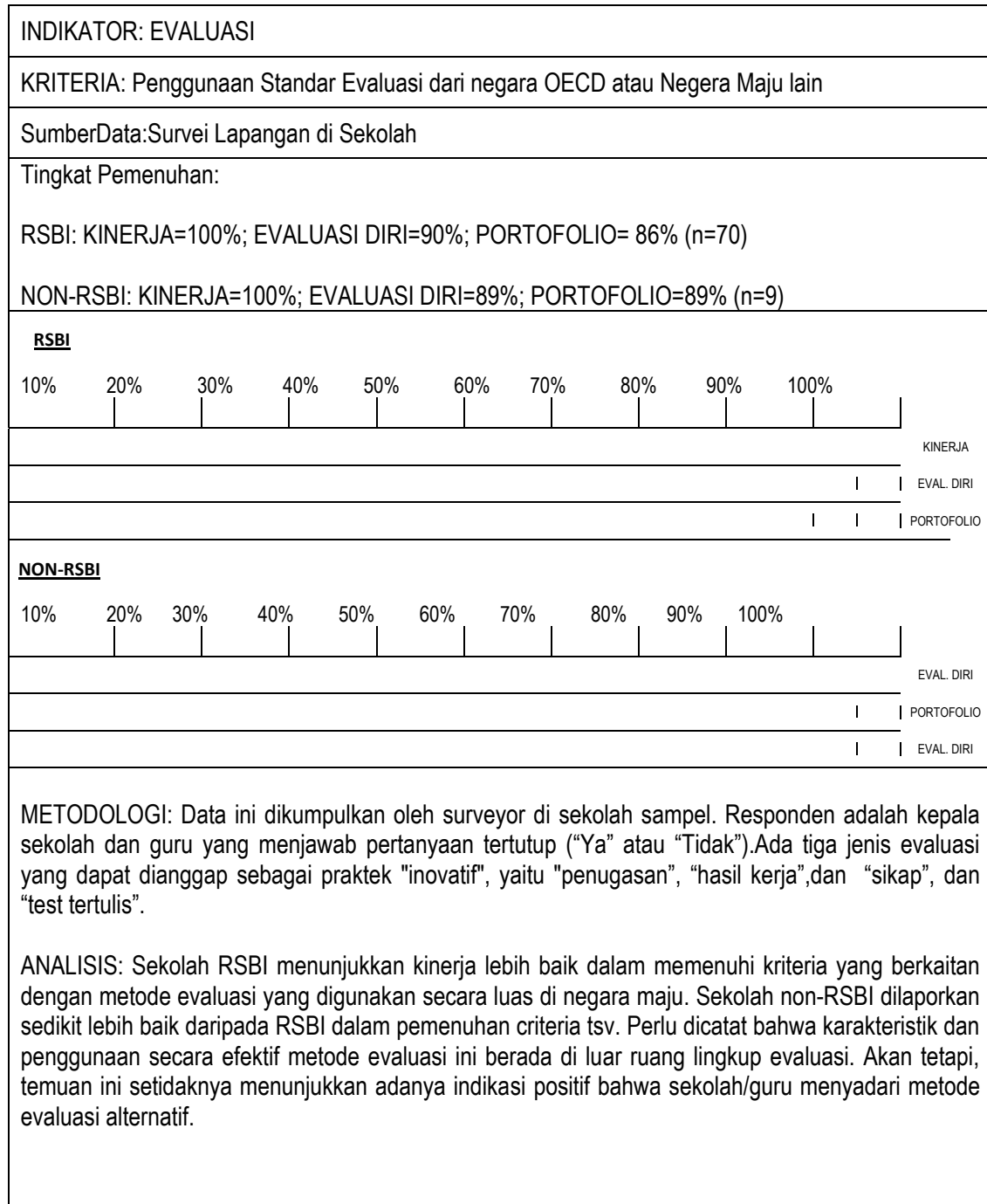


Grafik 18– Persentase Guru Kelas Internasional dengan Skor TOEFL >450

Analisis: Dari grafik di atas cukup jelas bahwa sebagian besar guru yang mengajar di kelas internasional belum mencapai persyaratan minimum untuk kompetensi TOEFL. SMP sedikit lebih baik daripada sekolah lain. Rata-rata keseluruhan hanya 20% dari guru kelas internasional di RSBI telah memenuhi syarat minimum. Perlu dicatat bahwa meskipun TOEFL merupakan indikator internasional dalam kompetensi mengajar dengan Bahasa Inggris, penggunaan skor TOEFL kemungkinan bukan merupakan ukuran yang dapat diandalkan yang mencerminkan kemampuan guru untuk mengajar topik yang kompleks dengan menggunakan Bahasa Inggris.

5.3.4. Evaluasi

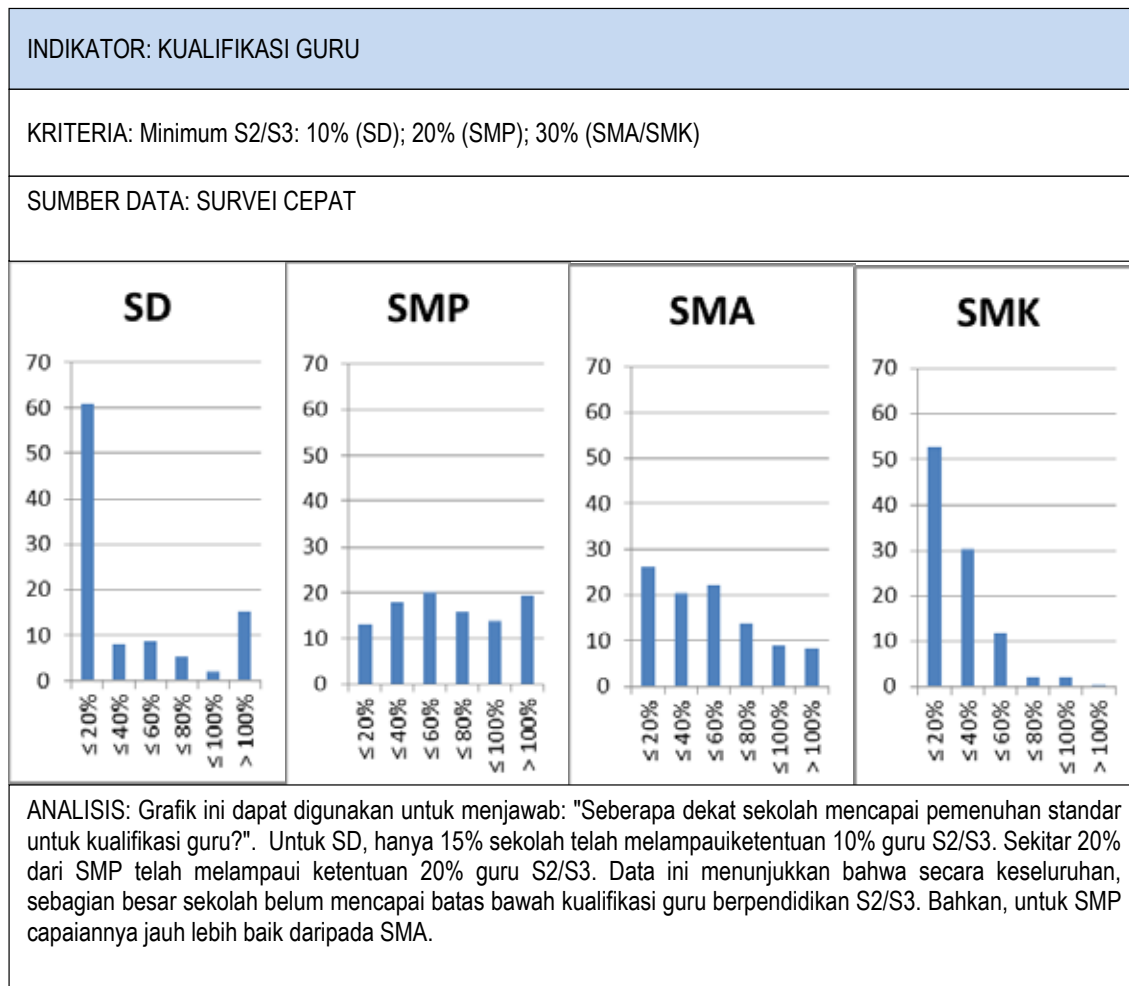
Penggunaan Standar Evaluasi dari Negara OECD atau Negara Maju lain



Grafik 19- Penggunaan Metode Evaluasi Internasional

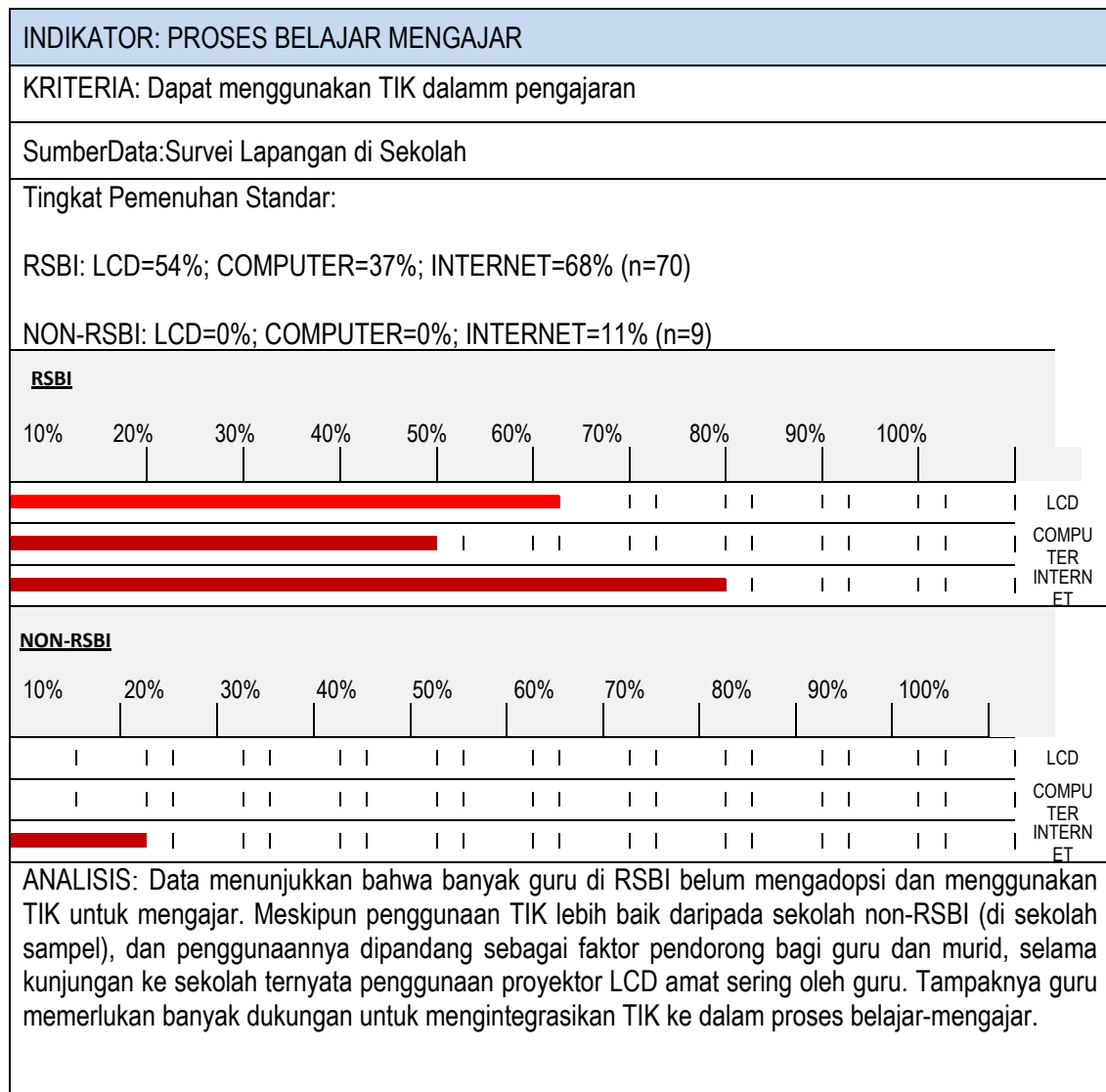
5.3.5. Kualifikasi Guru

Minimum S2/S3: 10% (SD); 20% (SMP); 30% (SMA/K)



Grafik 20–Tingkat Pemenuhan Standar 20% Guru Berpendidikan S2/S3

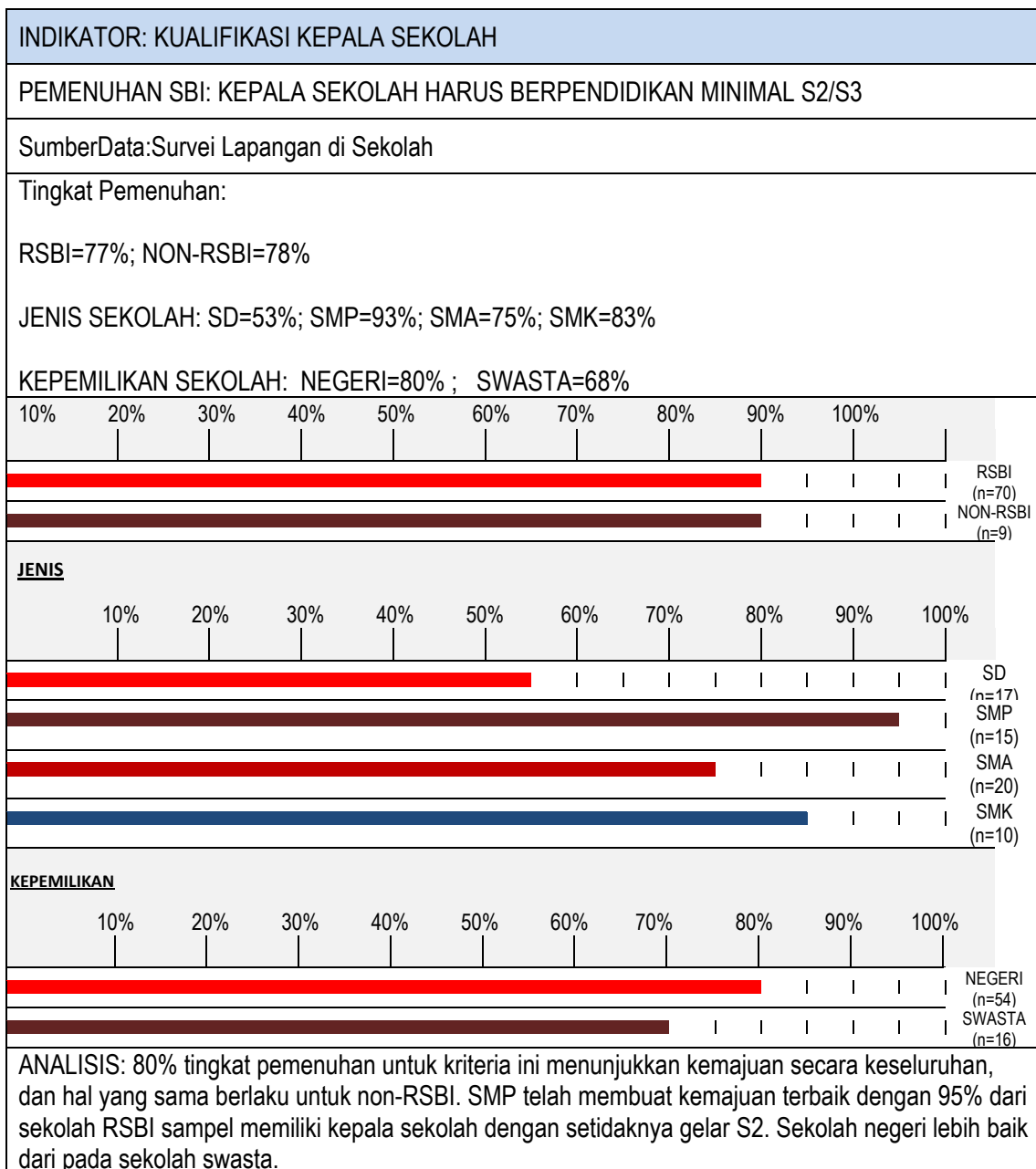
Mampu Menggunakan TIK untuk Mengajar



Grafik 21–Kemampuan Guru Menggunakan TIK

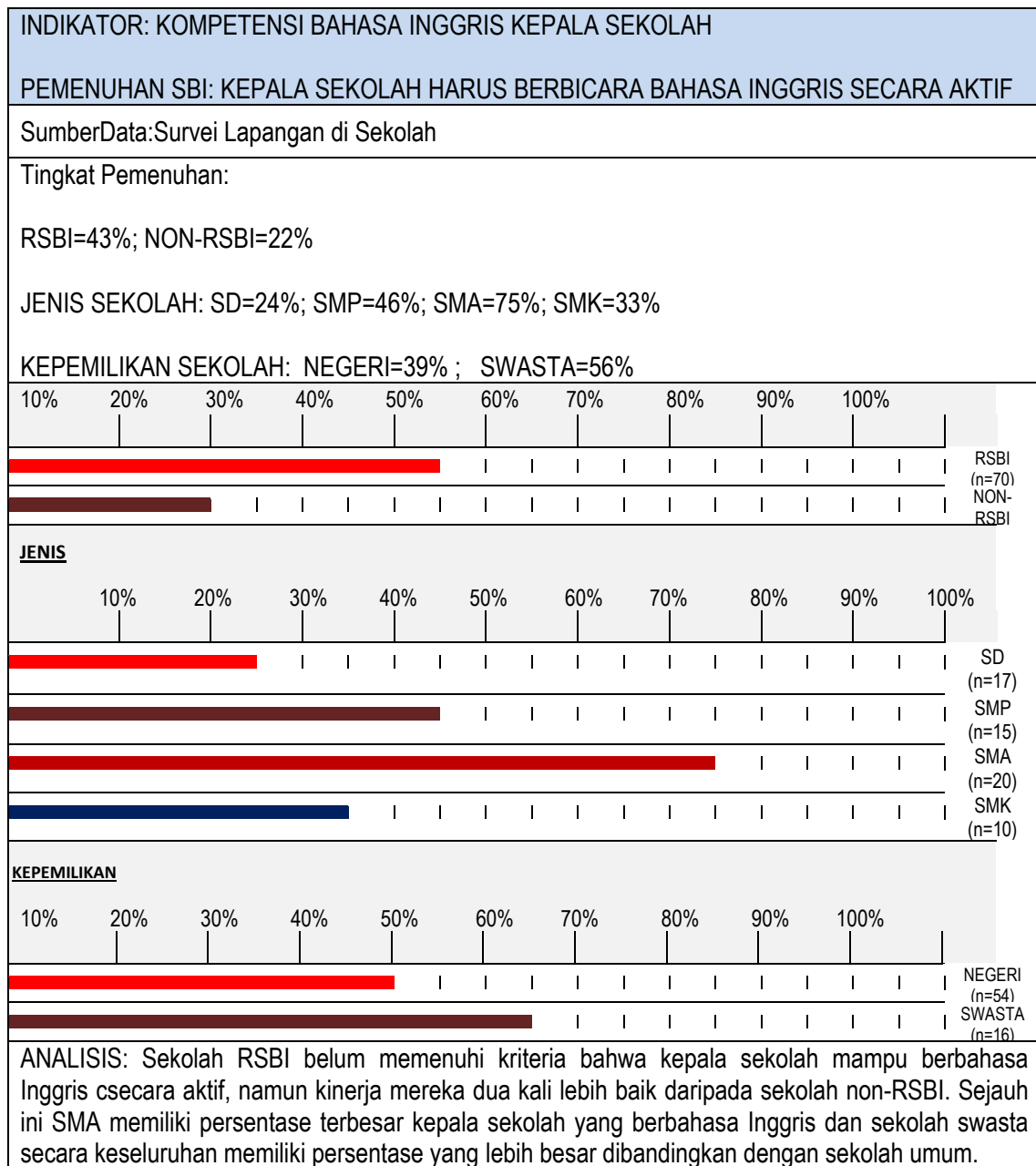
5.3.6. Kualifikasi Kepala Sekolah

Minimum S2/S3



Grafik 22–Kepala Sekolah Kualifikasi S2/S3

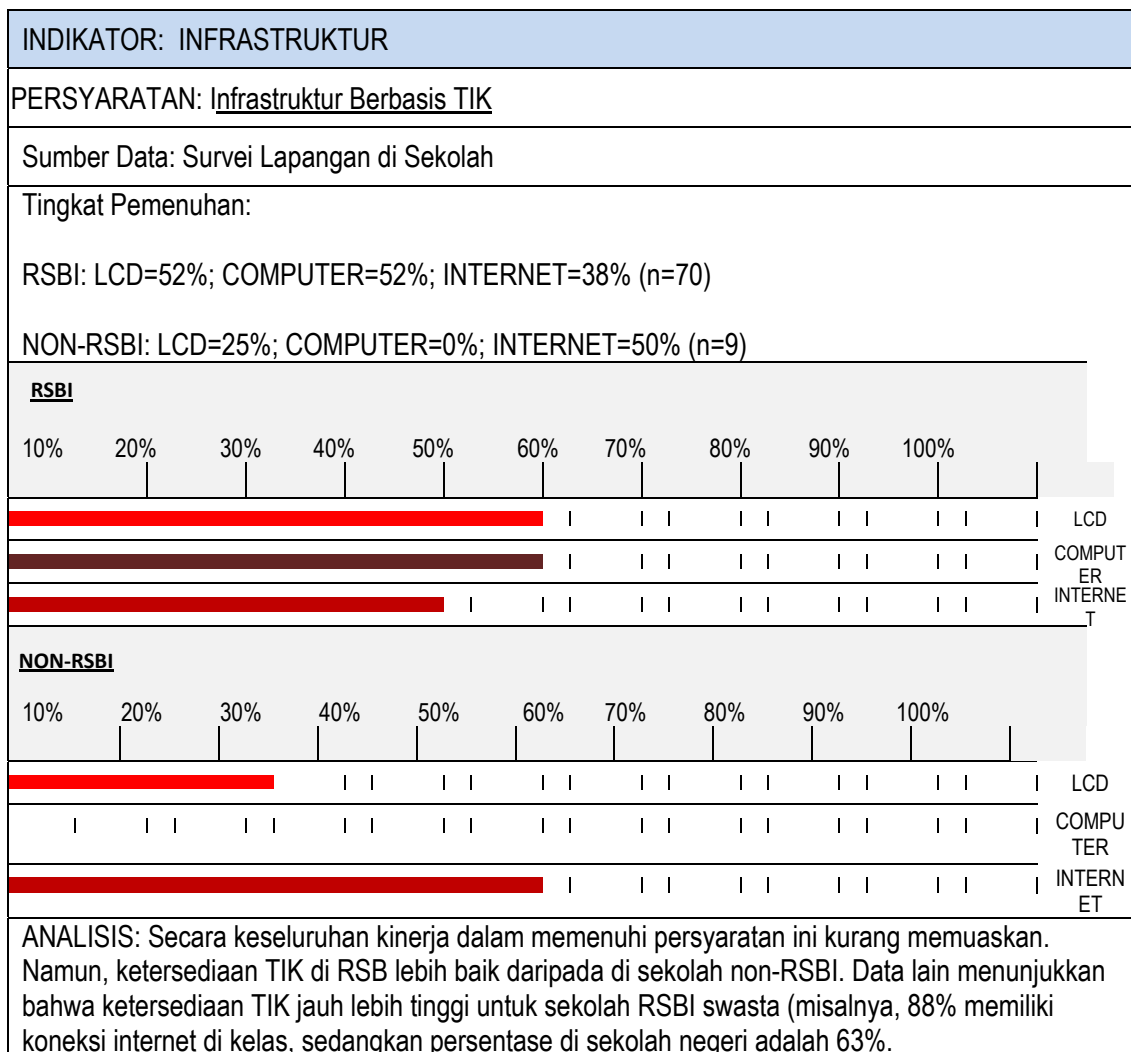
Mampu Berbahasa Asing



Grafik 23–Kepala Sekolah Mampu Berbahasa Asing

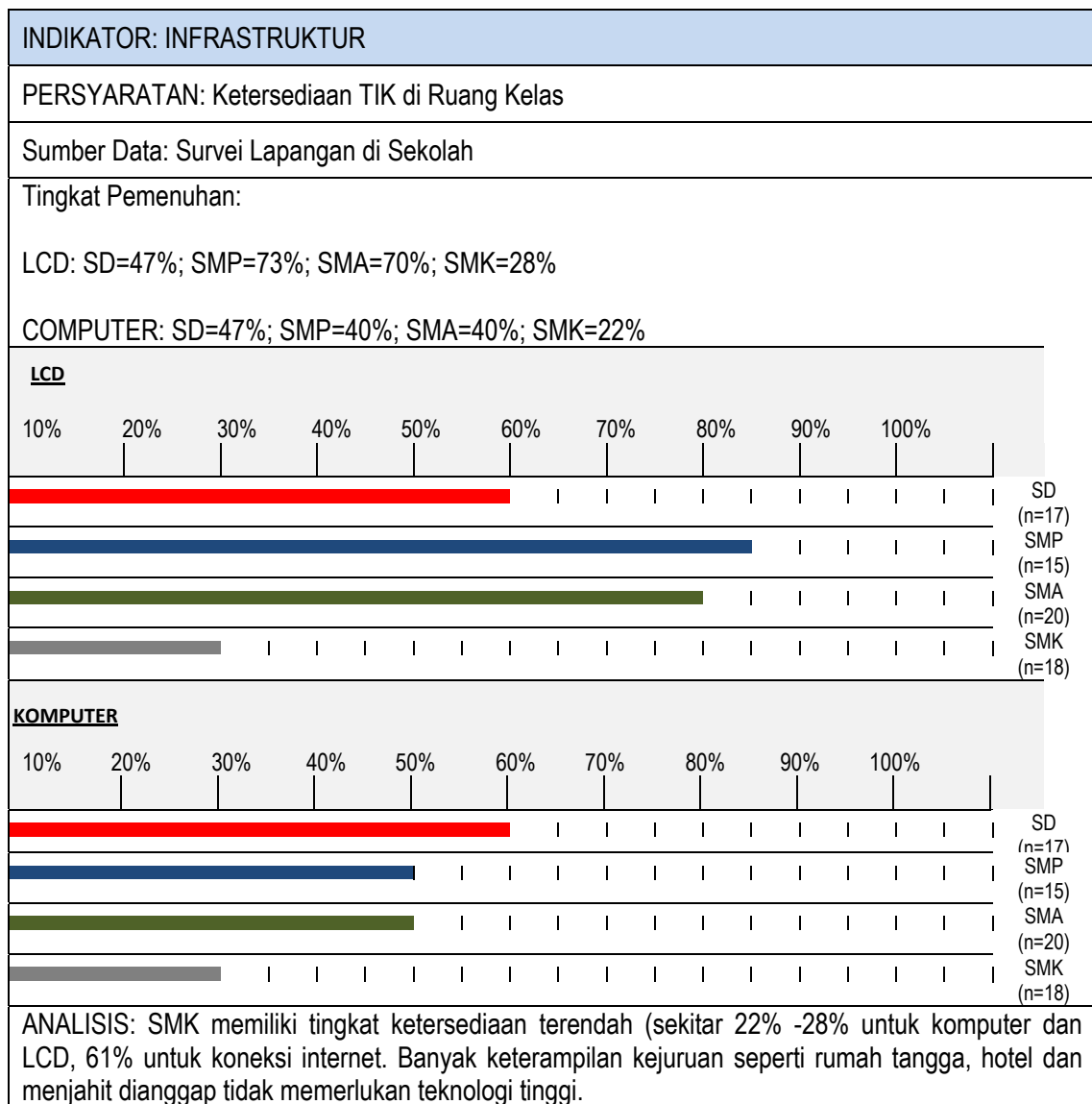
5.3.7. Infrastruktur

Infrastruktur Berbasis TIK



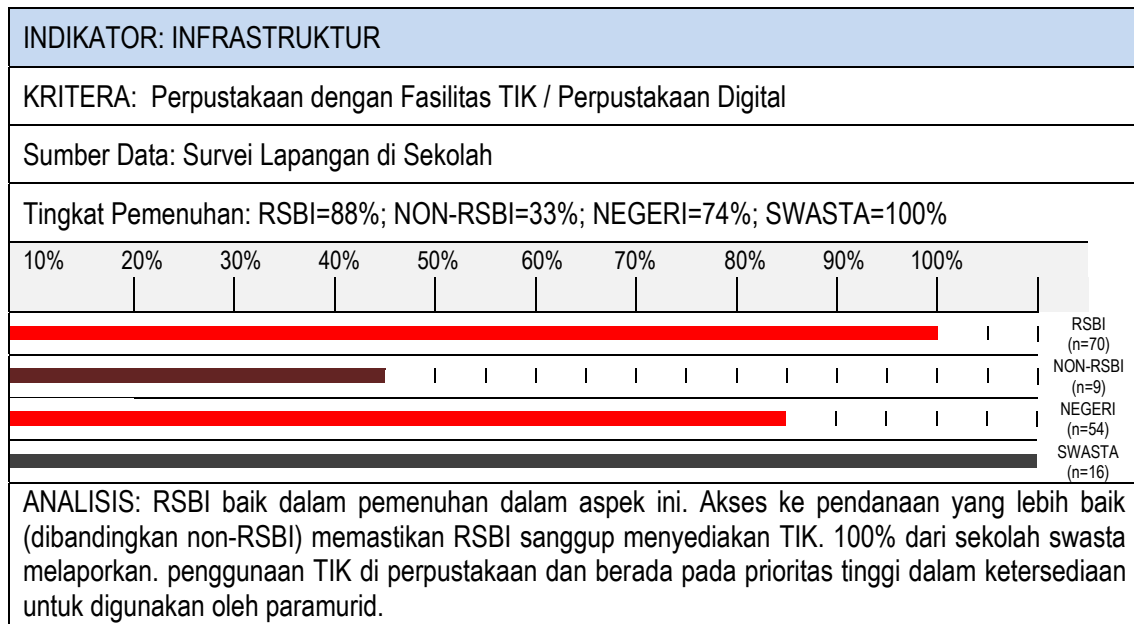
Grafik 24– Frekuensi Infrastruktur BerbasisTIK

Ketersediaan TIK di Kelas Menurut Jenis Sekolah



Grafik 25 - Ketersediaan TIK di Ruang Kelas Berdasarkan Jenis Sekolah

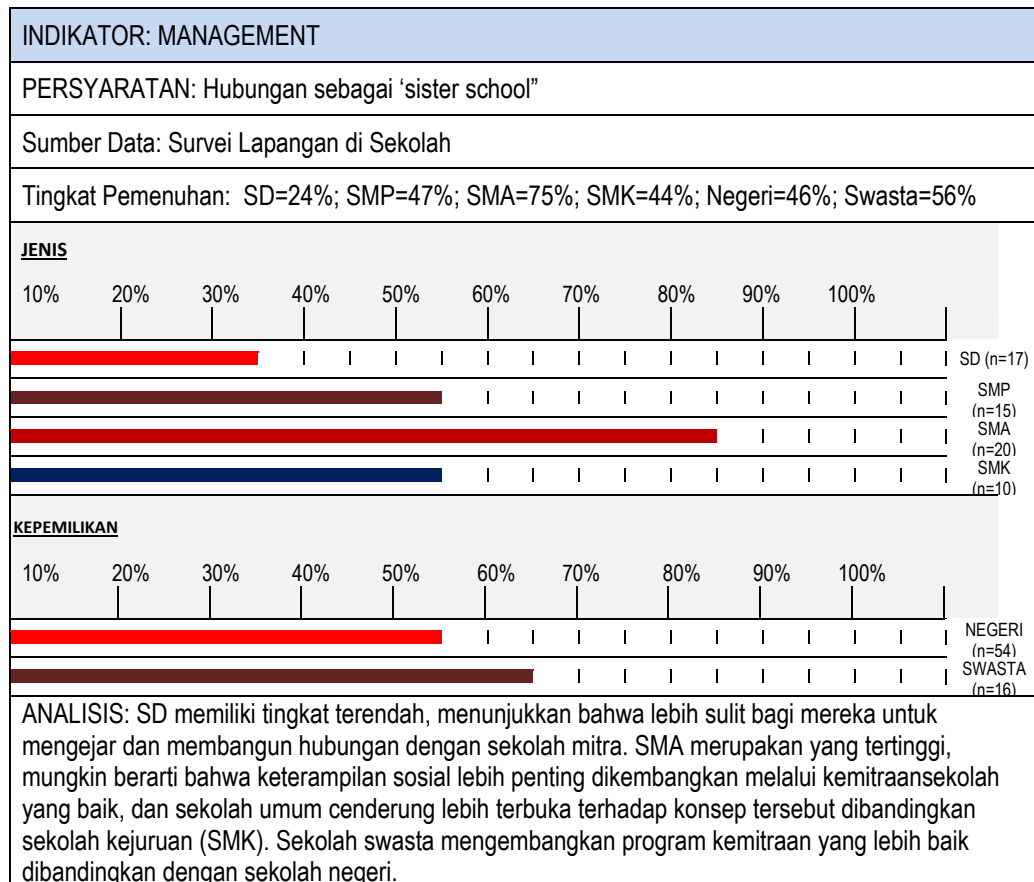
Perpustakaan dengan Fasilitas TIK/Perpustakaan Digital



Grafik 26–Fasilitas TIK di Perpustakaan

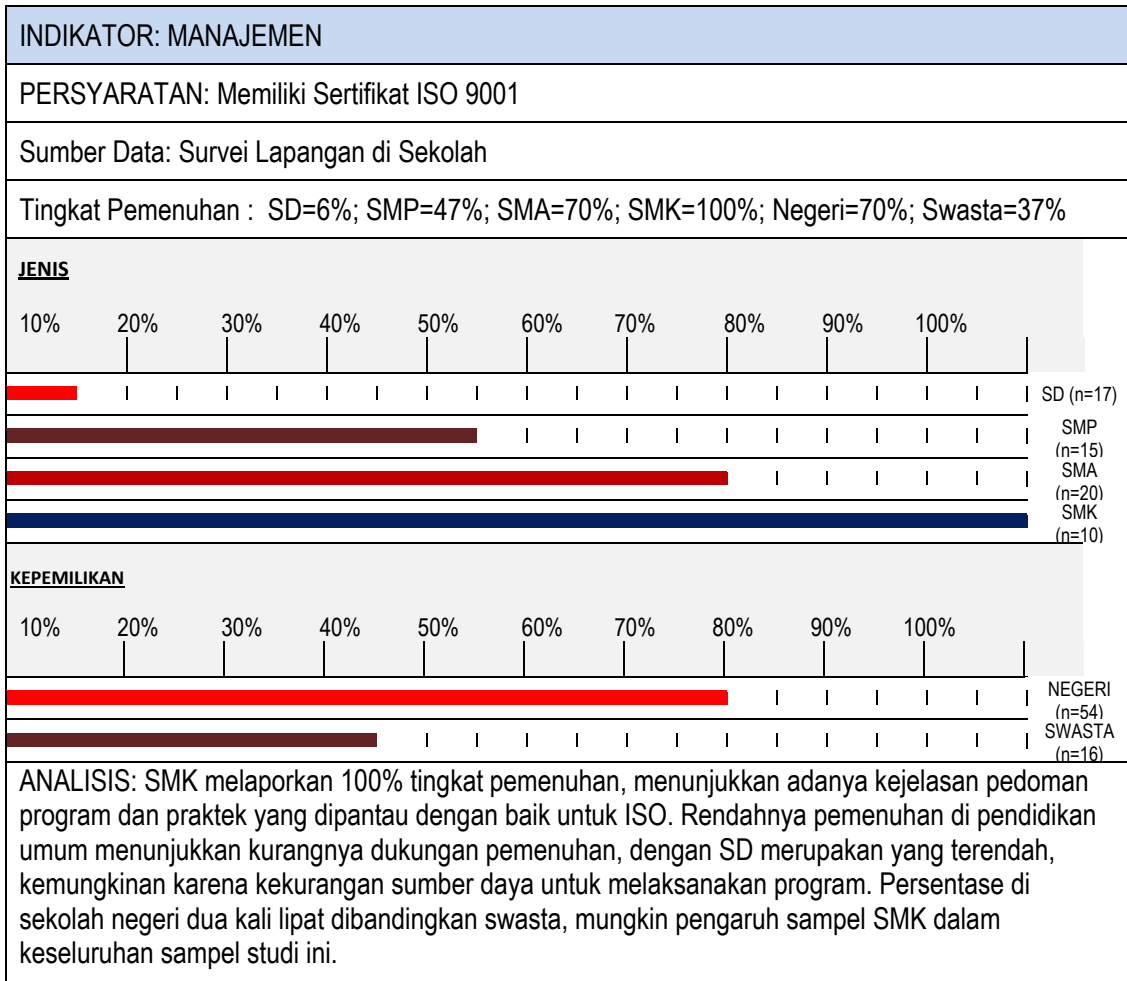
5.3.8. Manajemen

Hubungan sebagai *Sister School* dengan Sekolah Lain di Indonesia atau negara Lain



Grafik 27–Pemenuhan Syarat Hubungan sebagai Sister School

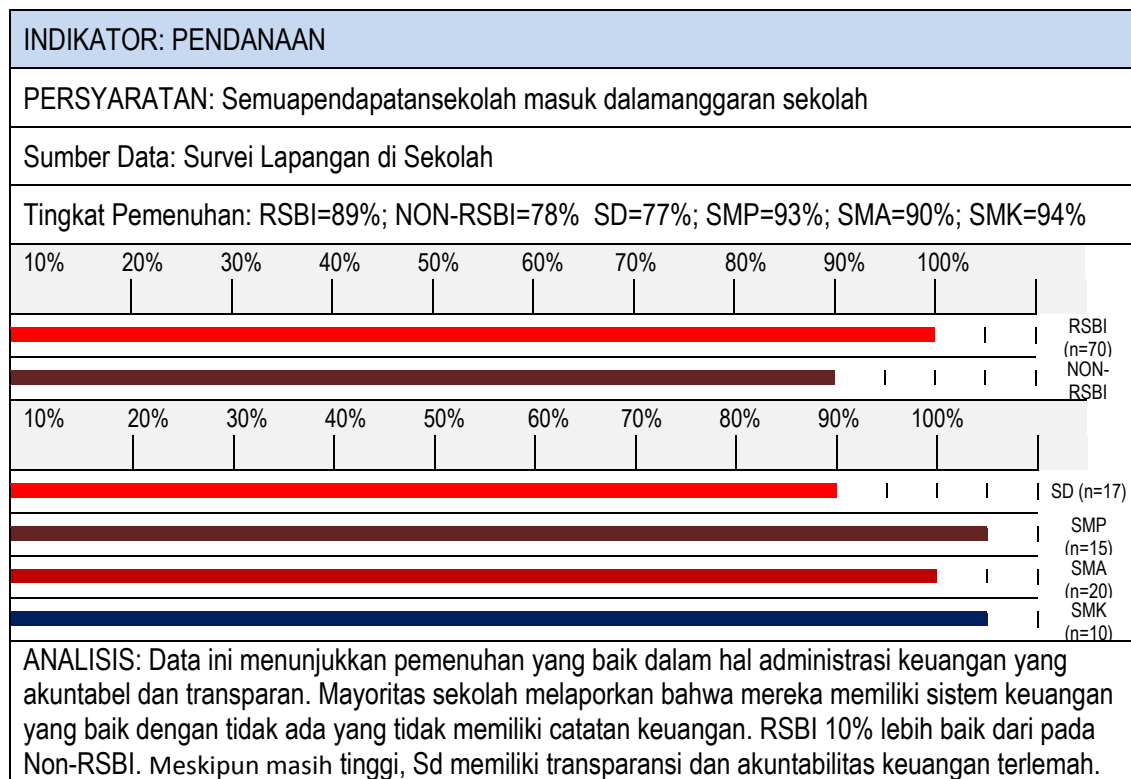
Memiliki Sertifikat ISO 9001



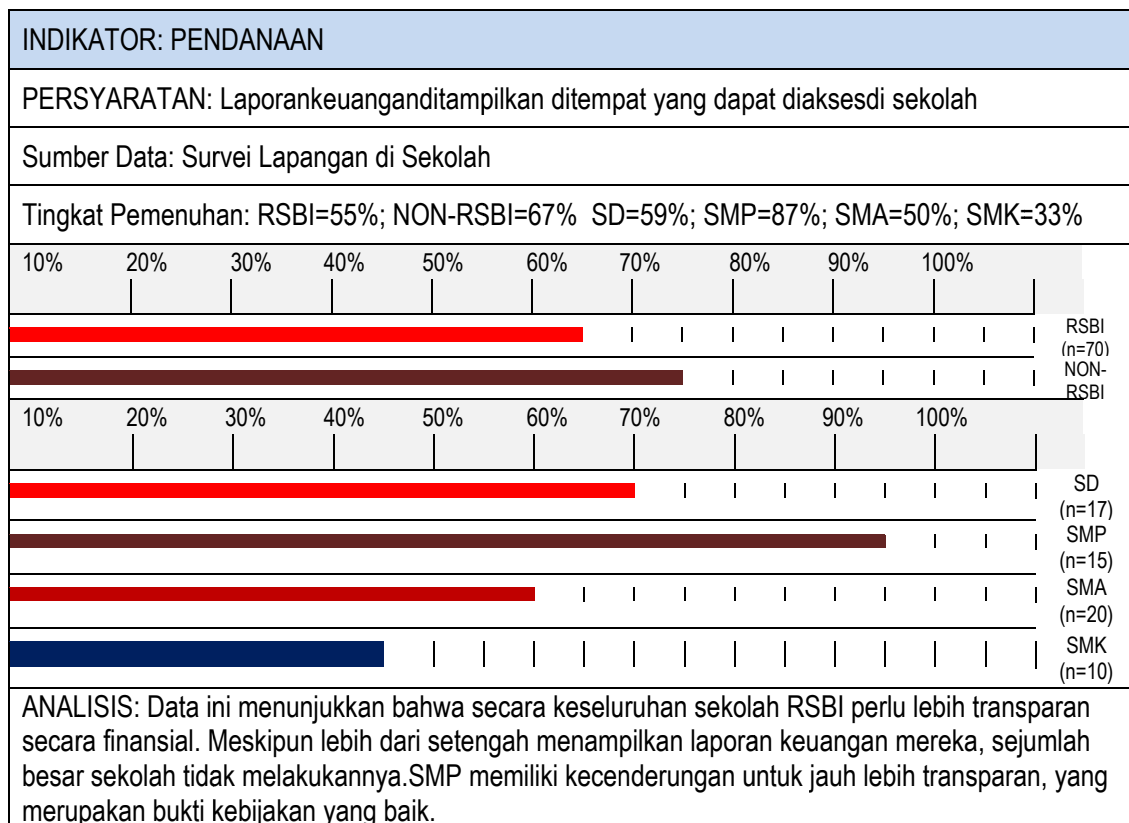
Grafik 28–Pemenuhan ISO

5.3.9. Pendanaan Sekolah

Menerapkan Administrasi keuangan yang Transparan dan Akuntabel



Grafik 29–Jumlah Sekolah yang Melaporkan Seluruh Penerimaan Masuk dalam Anggaran

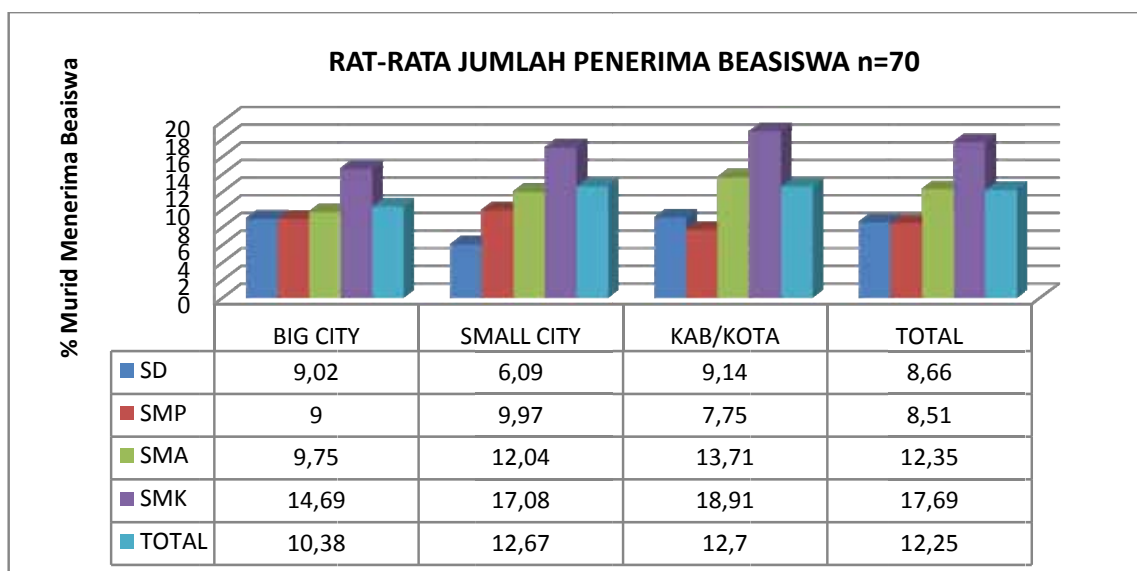


Grafik 30–Sekolah Melaporkan Anggaran yang Dapat Diakses Publik

20% Murid Berpendapatan Rendah dan Menerima Bantuan Bantuan Keuangan

KESELURUHAN MURID BERPENDHASILAN RENDAH

DATA SUMBER: Survey Lapangan Sekolah (n=70)



Grafik 31–Rata-rata Jumlah Penerima Beasiswa

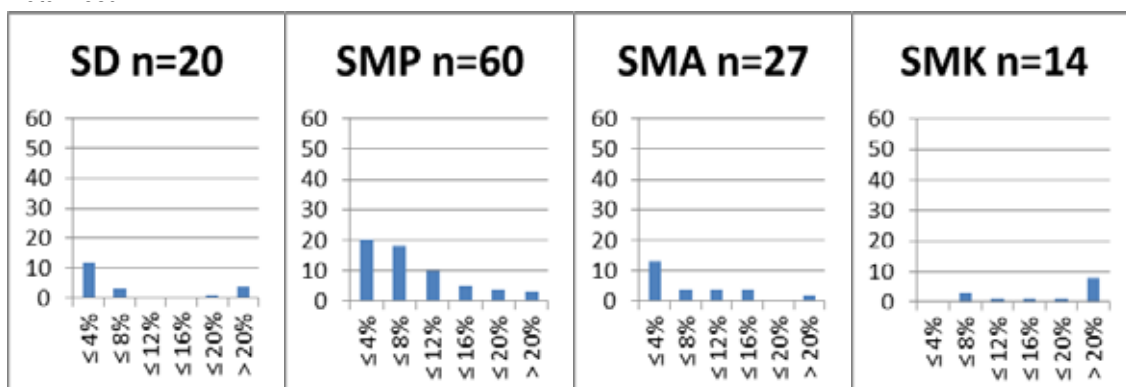
Metodologi: Data ini berasal dari Survei Lapangan di Sekolah ($n = 70$ RSBI). Setelah kunjungan sekolah, surveyor bertemu dengan staf sekolah untuk membuat tabulasi berdasarkan catatan sekolah. Data yang disajikan adalah rata-rata jumlah murid dalam kategori berpenghasilan rendah. Skala ini menunjukkan persentase menuju persyaratan minimal 20%.

Analisis: Peraturan Menteri 78/2009 menetapkan persyaratan murid berpenghasilan rendah yang ada di SBI setidaknya 20% dari total murid, dan sekolah harus menyediakan bantuan keuangan berdasarkan tingkat pendapatan keluarga. Data ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan, RSBI tidak memenuhi syarat pemenuhan (saat ini rata-rata 12%). Ketika membandingkan strata sosial ekonomi, jumlah relatif untuk masing-masing jenis sekolah adalah sama untuk SMA dan SMK, dengan beberapa keragaman di sekolah tingkat SD dan SMP. Dari wawancara dengan Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten terlihat bahwa prestasi akademik yang rendah di antara murid berpenghasilan rendah dapat menjelaskan rendahnya tingkat pemenuhan persyaratan (20%) di RSBI.

Seberapa dekat sekolah untuk mencapai minimal 20% murid berpenghasilan rendah?

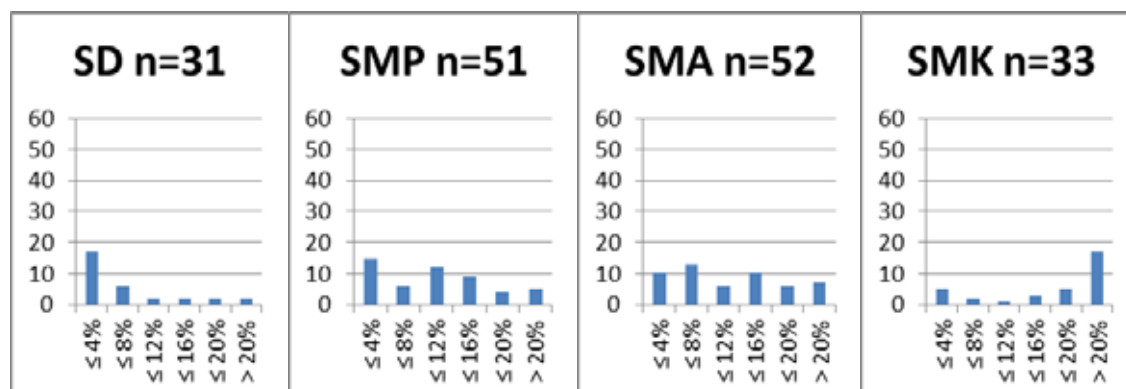
Bagan-bagan di bawah ini menunjukkan distribusi jumlah sekolah dalam strata sosial ekonomi tertentu menurut tingkat keberhasilan untuk memenuhi persyaratan 20% murid berpenghasilan rendah.

Kota Besar



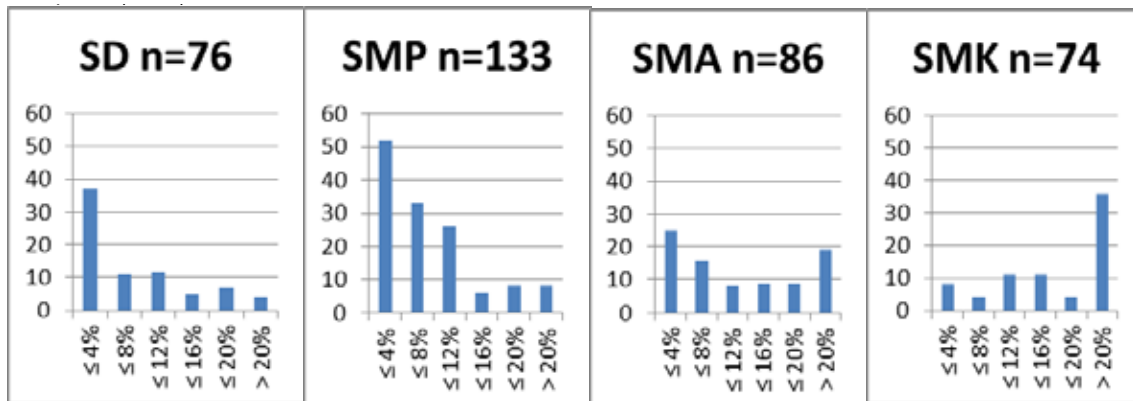
Bagan 32–Tingkat Capaian Sekolah di Kota Besar Menuju 20% Murid Penghasilan Rendah

Kota Kecil



Bagan 33 - Tingkat Capaian Sekolah di Kota Kecil Menuju 20% Murid Penghasilan Rendah

Kabupaten (Rural)



Bagan 34 - Tingkat Capaian Sekolah Sekolah di Kabupaten Menuju 20% Murid Penghasilan Rendah

ANALISIS: Data di atas menunjukkan tingkat pemenuhan yang sangat rendah dalam memenuhi kuota 20% murid berpenghasilan rendah. Data menunjukkan bahwa sekolah SD paling sulit melakukan perekrutan murid miskin. Dalam hal strata sosial ekonomi, tampaknya ada proporsi yang tinggi dari persentase rendah di Kota Besar, tapi ini tampaknya berubah untuk kota-kota kecil. Di daerah Kabupaten, terlihat lagi persentase yang rendah. Penting untuk dicatat bahwa SMK berkontribusi paling besar dalam sekolah-sekolah yang memenuhi persyaratan murid berpenghasilan rendah.

5.3.10. Ringkasan Analisis Pemenuhan

Data yang disajikan di atas menunjukkan situasi pemenuhan dari penelitian kami. Terlihat bahwa ada kendala dan hambatan dalam tiga hal utama: kualifikasi guru, adopsi kurikulum internasional, dan Bahasa Inggris sebagai pengantar. Ketiga aspek ini memberikan hambatan yang paling signifikan untuk menghapus "R" dari RSBI jika tidak dilakukan penyesuaian kebijakan terkait persyaratan dan pemenuhannya.

5.4. Pengamatan Kelas

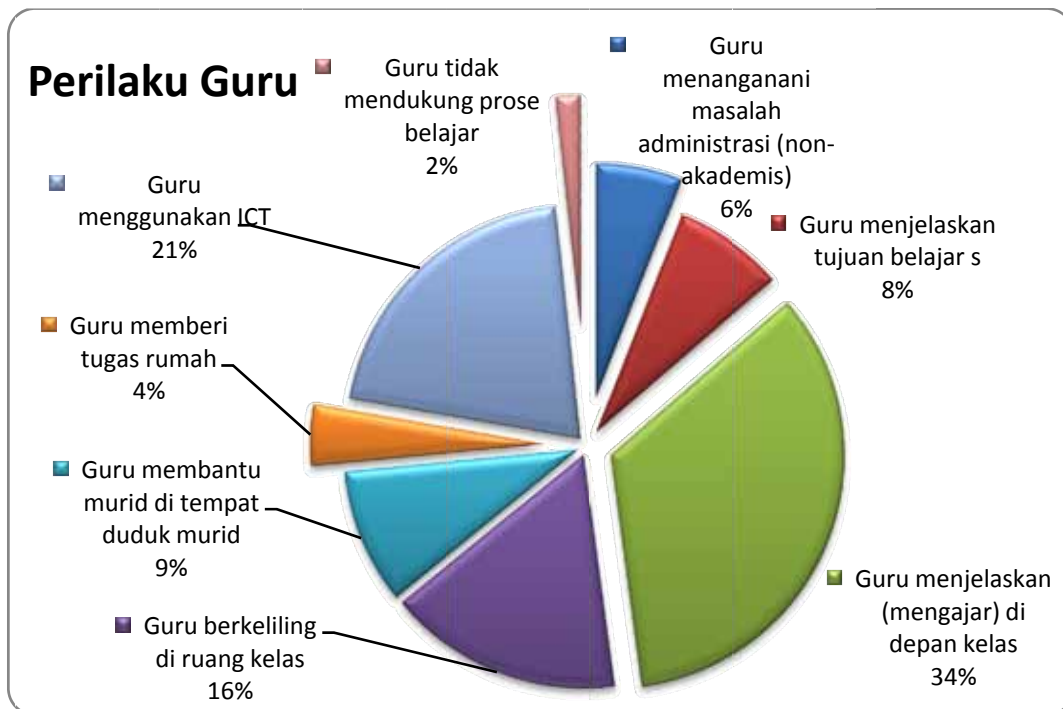
Hasil observasi kelas disajikan pada bagian ini. Kami menggunakan metode pengamatan langsung di mana kegiatan perilaku diukur dari frekuensi/durasi selama di kelas. Kami memilih metode ini karena dua alasan: 1) peneliti mungkin tidak akrab dengan instrumen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menilai perilaku guru di dalam kelas, dan 2) pembelajaran partisipatif menunjukkan perilaku yang berbeda yang dapat dengan mudah diukur melalui pengamatan aktif enumerator. Tabel berikut menunjukkan aktivitas guru dan murid dalam kelas yang diamati:

Tabel 22- Daftar Perilaku yang mungkin untuk diamati dalam Pengamatan Kelas

Guru	Murid
Guru menangani aspek administrasi (non-akademis)	Murid mendengarkan guru
Guru menjelaskan tujuan belajar	Murid mengerjakan tugas individu
Guru menjelaskan (mengajar) di depan kelas	Tanya-jawab guru dan murid
Guru berkeliling di dalam kelas	Murid bekerja kelompok
Guru membantu murid di tempat duduknya	Murid mengikuti guru mengajar menggunakan LCD
Guru member tugas rumah	Murid mencatat
Guru menggunakan ICT	Murid membaca buku
Guru tidak mendukung belajar	Murid menggunakan ICT

5.4.1. Perilaku Guru Selama di dalam Kelas

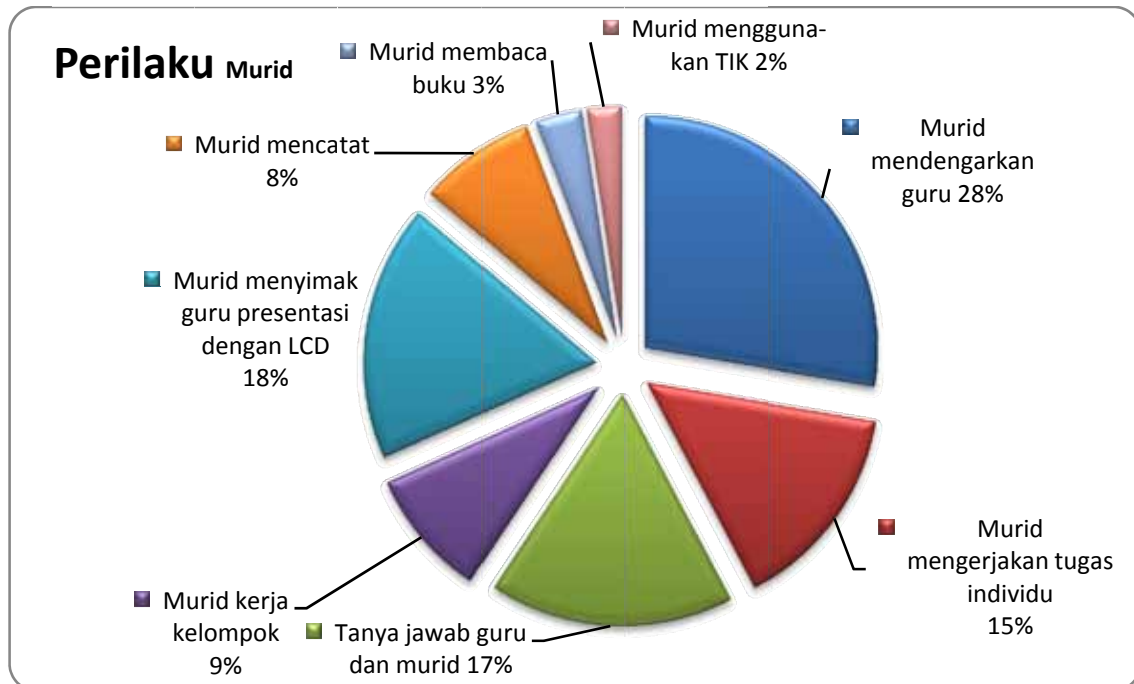
Gambar berikut menunjukkan persentase waktu yang digunakan guru untuk melakukan hal-hal tertentu selama proses belajar-mengajar. Perhatikan bahwa hasil total lebih dari 100% karena adanya beberapa tugas yang terjadi pada saat yang bersamaan, dinormalisasi secara seragam dengan waktu lamanya di kelas.



Bagan 35–Perilaku Guru yang Teramati

Hasil & Analisis: Terlihat jelas dari observasi bahwa guru mengajar didepan kelas merupakan mayoritas penggunaan waktu (8% +34%), meskipun guru juga membantu murid secara individual di tempat duduk mereka (9%). Guru menyampaikan materi kepada murid dengan menggunakan proyektor LCD (lihat data murid di bawah ini.)

5.4.2. Perilaku Murid selama di Kelas



Bagan 36–Perilaku murid yang diamati

Hasil & Analisis: Hasil ini cukup jelas menunjukkan bahwa sebagian besar waktu murid dihabiskan untuk bersikap pasif dan mengerjakan tugas individu. Sedikit sekali kerja kelompok dilakukan. Hasil ini membantu untuk menilai secara kuantitatif hasil moderat di bagian sebelumnya yang menunjukkan bahwa kurang dari 50% laporan menggunakan metode yang diadopsi dari negara lain.

5.5. Analisis Kualitatif

Tujuan Data Kualitatif dalam Studi

Analisis dan data kualitatif sangat penting untuk evaluasi seperti ini karena menyediakan konteks situasional di mana program RSBI dilaksanakan. Evaluasi ini menghabiskan banyak waktu, sumber daya dan upaya untuk mendapatkan dan menganalisa data situasional dari berbagai sekolah dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program RSBI. Di sini disampaikan temuan yang diambil dari wawancara dengan kepala sekolah, guru, komite sekolah, orang tua, dan murid di sekolah, serta pejabat di Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten. Data diperoleh melalui wawancara langsung di mana pertanyaan-pertanyaan terbuka digunakan untuk menggali persepsi dan perubahan dalam fasilitas sekolah dan pengajaran. Data tersebut merupakan persepsi para pemangku kepentingan.

Konteks Historis

Ketika ditanya tentang perubahan apa yang telah terjadi di sekolah mereka (RSBI) dibandingkan dengan sebelum menjadi RSBI, pemangku kepentingan tingkat sekolah berkeyakinan bahwa dalam sebagian besar aspek sekolah mengalami perbaikan dengan adanya pelaksanaan program. Fasilitas-fasilitas sekolah telah diperluas dan ditingkatkan. Integrasi TIK dalam laboratorium, ruang kelas dan perpustakaan memberikan pengalaman pemanfaatan elektronik yang lebih luas. Perubahan kurikulum, meskipun terdapat beberapa kesulitan dalam bahasa dan implementasinya, telah mengalami perbaikan dan diterima secara keseluruhan. Juga tampak bahwa moral dan kepercayaan diri sekolah telah meningkat.

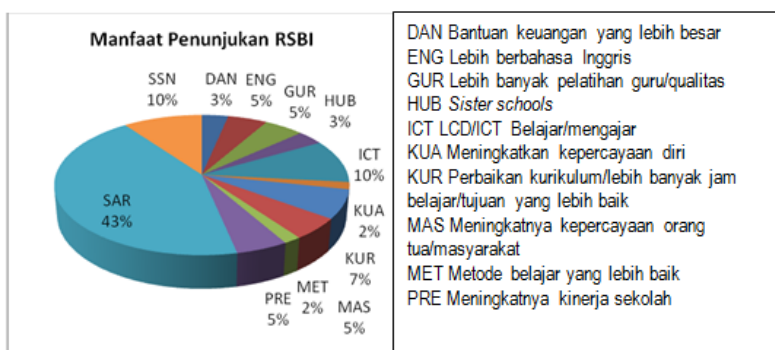
Kesadaran masyarakat, bersama dengan keterlibatan orang tua dan masyarakat telah meningkat, dan secara keseluruhan dilaporkan adanya penerimaan dan kebanggaan akibat dari perubahan yang dibawa oleh pelaksanaan program RSBI

5.5.1. Kepala Sekolah

Kepala sekolah dari RSBI maupun non-RSBI diwawancarai ($n = 79$). Kepala sekolah ditanya tentang manfaat dan tantangan menjadi calon SBI. Mereka juga ditanya apa yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas sekolah mereka, khususnya proses belajar-mengajar, dan sumber daya apa saja dan kesempatan yang bagaimana yang penting untuk perbaikan.

Manfaat yang Dirasakan Kepala Sekolah

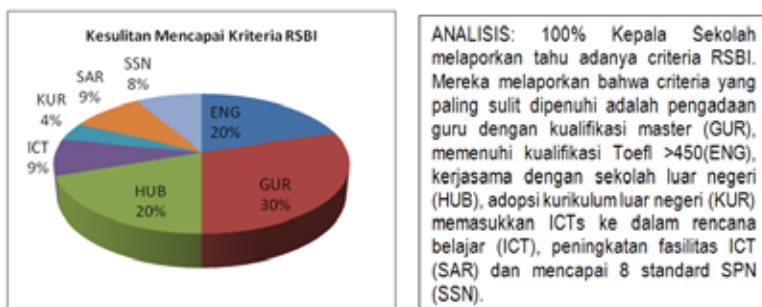
Grafik di bawah ini merangkum manfaat yang dilaporkan terkait program RSBI.



Bagan 37 - Manfaat Menjadi RSBI

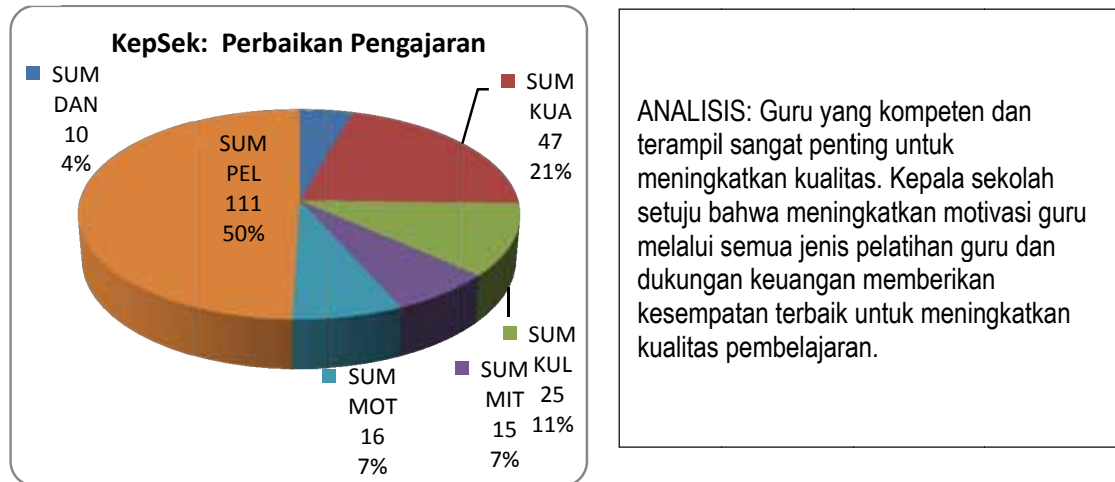
ANALISIS: Kepala sekolah melaporkan berbagai manfaat setelah menjadi sekolah RSBI. Mereka melaporkan bahwa program tersebut telah mempengaruhi semua aspek di sekolah mereka mulai dari perbaikan fasilitas hingga meningkatnya kesadaran dan keyakinan masyarakat. Manfaat yang paling menonjol adalah terkait dengan meningkatnya pendanaan. Manfaat lain berhubungan dengan perilaku dan persepsi peningkatan kualitas guru, jam belajar lebih banyak, kurikulum yang diperkaya, keterlibatan dan kesadaran orang tua dan masyarakat, dan kinerja sekolah secara keseluruhan serta akreditasi.

Kesulitan Memenuhi Kriteria RSBI



Bagan 38 - Kesulitan RSBI Memenuhi Kriteria

Perpektif Kepala Sekolah terhadap Pelatihan Guru

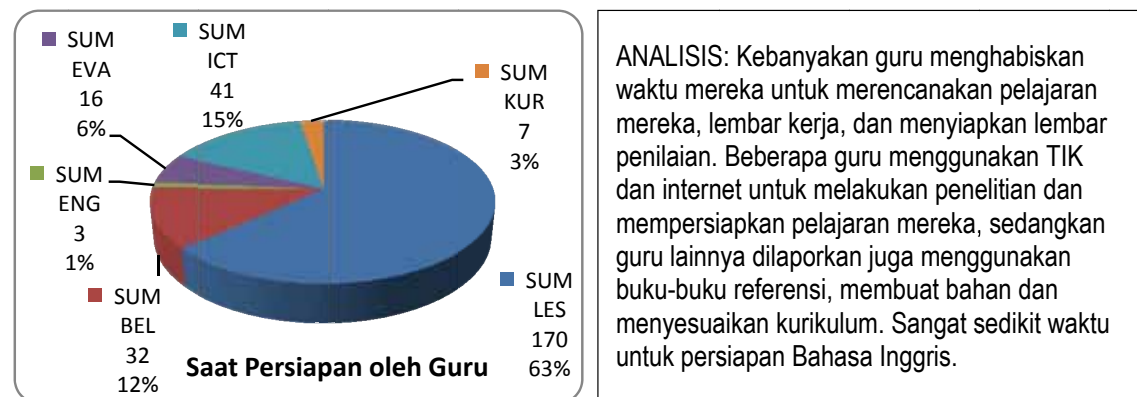


Bagan 39 - Principals' Perspective on Teacher Training

- DAN : Menyediakan dana pengembangan guru untuk pendidikan lanjut
 KUA : Membangkitkan motivasi/kompetensi guru/pertukaran guru
 KUA : Mengajak guru-guru dalam manajemen
 KUL : Pertukaran guru/guru di industri/klaster administrative
 MOT : Memotivasi guru
 PEL : Menyediakan seluruh tipe pelatihan guru

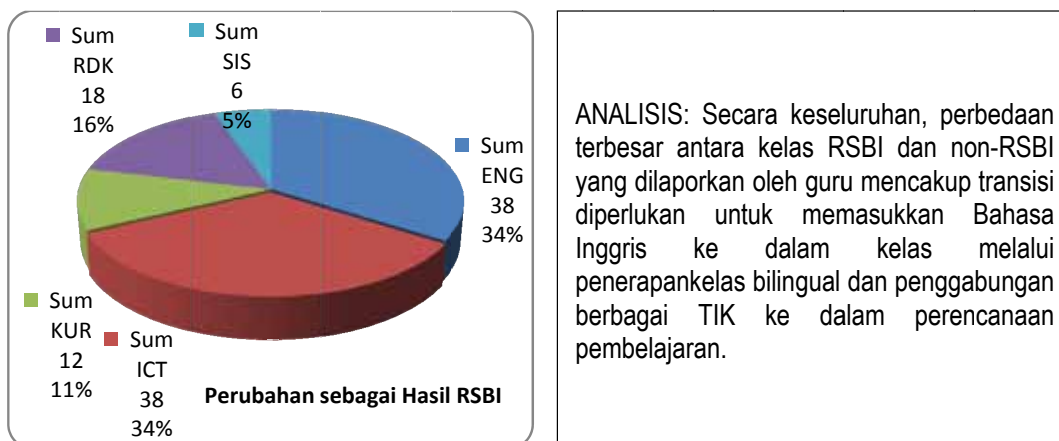
5.5.2. Guru

Tugas-tugas Guru



- LES : Rencana belajar/kehadiran/penyiapan kertas kerja/penyiapan penilaian
 BEL : Mencari buku referensi/menyiapkan kertas kerja/perangkat penilaian/kurikulum/
 menyiapkan materi belajar/mempelajari kembali bahan
 ENG : Menyiapkan pertanyaan/materi dalam Bahasa Inggris
 EVA : Menyiapkan perangkat evaluasi
 KUR : Penggunaan ICT/Internet untuk menyiapkan pelajaran/Integrasi kurikulum
 internasional/ mempelajari standard muatan/indikator

Pengalaman Guru terhadap Perubahan Sejak Menjadi RSBI

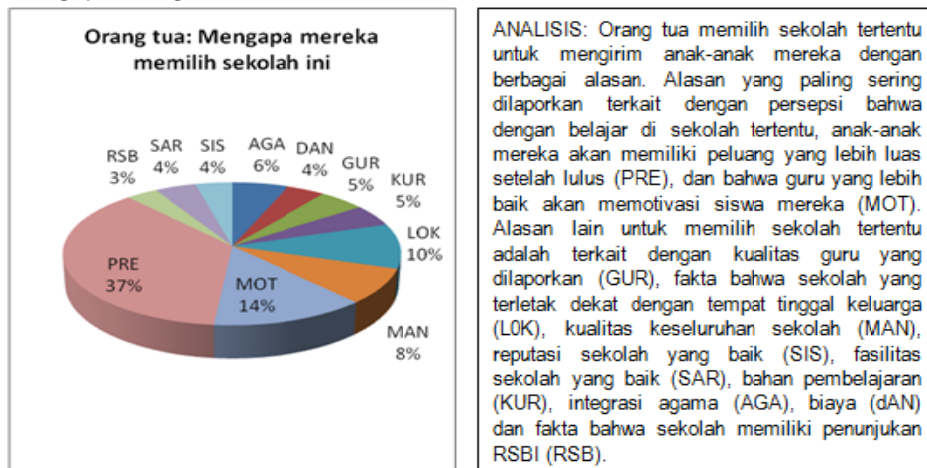


Bagan 40–Perubahan di Sekolah Sejak Menjadi RSBI

- ENG : Bahasa Inggris harus digunakan. Penyiapan vocab/salam/bahan/kelas bilingual
- ICT : Penguasaan ICT, pembelajaran rencana sumberdaya, harus digunakan untuk persiapan pelajaran dan di kelas
- KUR : Adopsi kurikulum OECD ke buku /kerjasama dalam belajar/pemecahan masalah
- RDK : Guru-guru lebih siap/murid lebih siap/lebih menguasai pelajaran
- SIS : Guru-guru non-internasional

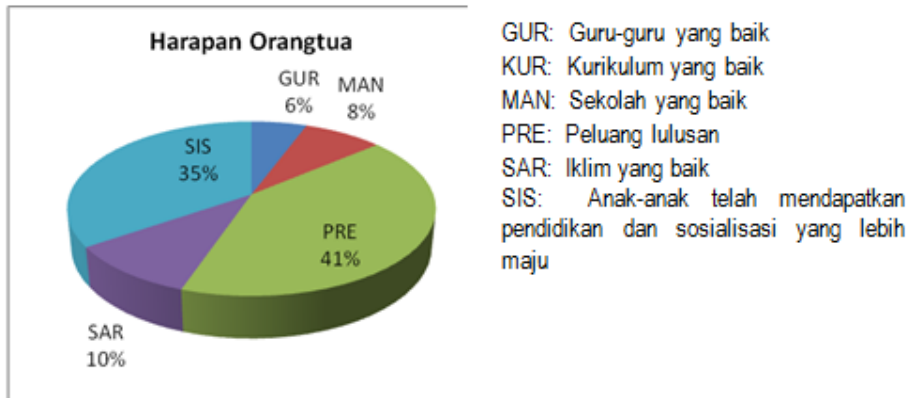
5.5.3. Orang Tua

Mengapa Orang tua Memilih Sekolah ini



Bagan 41 - Mengapa Orang Tua Memilih Sekolah ini

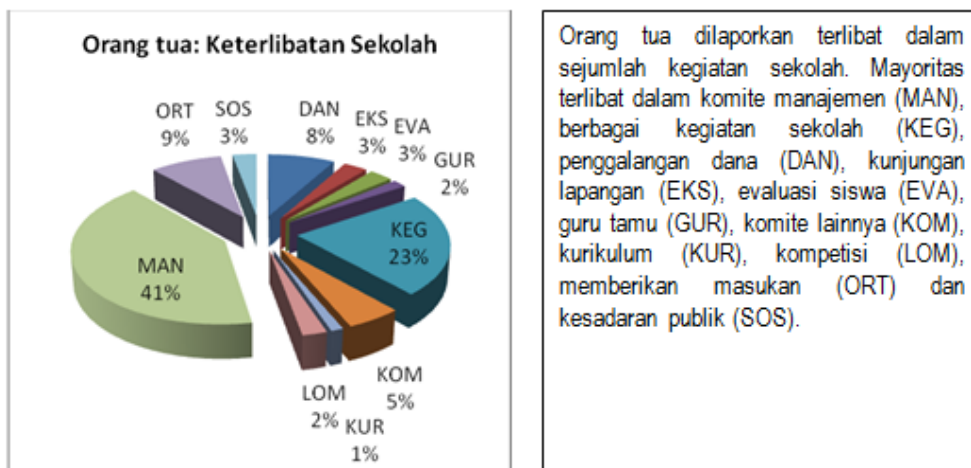
Ekspektasi Orang Tua



Bagan 42 - Ekspektasi Orang Tua

ANALISIS: Harapan orang tua dalam memilih sekolah tertentu tergantung pada persepsi bahwa sekolah RSBI lebih siap dalam memberikan pendidikan yang akan mengarah pada peningkatan peluang lebih baik bagi anak-anak mereka setelah lulus (PRE), bahwa mereka akan mendapatkan pendidikan yang lebih maju daripada sekolah non-RSBI (SIS), suasana pembelajaran yang baik (SAR), sekolah memiliki reputasi baik (MAN) dan guru yang lebih baik (GUR).

Keterlibatan Orang tua



Bagan 43 - Keterlibatan Orang Tuadalam RSBI

5.5.4. Komite Sekolah

Peran dan keterlibatan Komite Sekolah cukup beragam. Komite sekolah diatur dan ditetapkan melalui berbagai cara, termasuk penunjukan dan pemilihan anggota berdasarkan rekomendasi dari masyarakat. Komite sekolah muncul untuk bertindak sebagai penghubung antara sekolah dan masyarakat guna membahas dan membantu proses pengambilan keputusan di banyak urusan sekolah. Beberapa komite sekolah terlibat dalam kebijakan sekolah dan manajemen, pembangunan infrastruktur, evaluasi dan perekrutan guru dan kepala sekolah, evaluasi murid, kegiatan sekolah, dll. Tidak diemukan bukti bahwa Komite Sekolah mengalami beberapa perubahan peran sebagai akibat perubahan status sekolah menjadi RSBI.

5.5.5. Murid

Seperti yang diduga, murid sangat menyukai RSBI, dan mereka merasa diberi kesempatan mendapatkan fasilitas yang baik dan diperkaya dengan materi pembelajaran terbaik untuk mendapatkan keterampilan yang relevan untuk berhasil. Namun, sebagian besar murid melaporkan bahwa mereka berjuang keras dengan di kelas yang diajar dengan Bahasa Inggris. Keprihatinan mereka terletak pada kurang dapatnya menguasai konsep inti materi dan instruksi yang diberikan dalam Bahasa Inggris yang mereka sendiri kurang begitu mahir. Beberapa murid merasa bahwa nilai ujian nasional mereka mungkin menjadi korban karena hal ini, dan mereka mencari bantuan dari luar (les) untuk mengatasi proses belajar mereka. Ini memberikan penjelasan mengapa nilai ujian mereka lebih rendah dibanding sekolah non-RSBI untuk materi-materi inti.

5.5.6. Pejabat Pemerintah (Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten)

Pejabat Dinas Pendidikan melaporkan bahwa mereka adalah kunci dalam membantu sekolah menjadi RSBI. Mereka membantu dan mendukung sekolah melalui rekomendasi, proses verifikasi, evaluasi, dan aplikasi. Peran utama mereka terutama adalah dalam monitoring dan evaluasi sekolah RSBI melalui berbagai proses dan instrumen. M&E mencakup penilaian dalam perekrutan murid, penilaian kualifikasi guru, evaluasi kinerja kepala sekolah, evaluasi kurikulum, evaluasi kinerja sekolah secara keseluruhan, monitoring dan evaluasi program secara keseluruhan.

Peran lain Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota adalah memberi dukungan. Kabupaten/Kota membantu dengan dana, infrastruktur, pelatihan guru, pelatihan administrasi, pelatihan yang diprioritaskan untuk RSBI, beasiswa, sumber daya guru dan peningkatan kesadaran masyarakat.

5.5.7. Perbandingan Dengan Sekolah Non-RSBI

Wawancara dengan pemangku kepentingan di sekolah non-RSBI membantu untuk lebih melihat konteks pengaruh dan persepsi terhadap program RSBI. Sebagian besar kepala sekolah non-RSBI yang diwawancarai mengetahui dengan baik tentang persyaratan menjadi RSBI yang lebih sulit untuk dipenuhi, dan dirasakan bahwa program RSBI menyediakan lebih banyak akses ke fasilitas dan pelatihan. Satu SMP non-RSBI yang dikunjungi menunjukkan dedikasi yang luar biasa, dengan staf dan kepala sekolah yang bermotivasi tinggi, untuk mengacu pada RSBI sebagai suatu standar yang ingin mereka wujudkan. Observasi dan data ini memberikan bukti pendukung bahwa RSBI menjadi referensi bagi sekolah lain, dan RSBI telah menjadi motivator untuk peningkatan kualitas sekolah lain.

5.5.8. Ringkasan Analisis Kualitatif

Data kualitatif menjelaskan bahwa sekolah-sekolah dan masyarakat mendapat keuntungan dari RSBI. Meskipun ada tantangan terhadap pemenuhan, program ini telah memotivasi staf, murid, dan masyarakat sekitar sekolah untuk bersatu mengembangkan sekolah terbaik bagi anak-anak mereka. Kami telah mempelajari bahwa RSBI telah menjadi referensi bagi sekolah lain atau sebagai standar untuk sekolah mereka sendiri. Pemangku kepentingan di semua tingkat telah melaporkan bahwa pengajaran telah menunjukkan perbaikan. Kami juga merasa bahwa nilai ujian nasional tidak cukup untuk mengukur peningkatan prestasi belajar murid, dan bahwa murid dan guru berusaha keras untuk mencapai indikator kurikulum dan penggunaan bahasa asing pada SBI, dan hal ini kemungkinan besar berpengaruh terhadap keberhasilan belajar mereka.



Bab 6.

RANGKUMAN ANALISIS

Pada bagian Rangkuman Analisis ini kita akan menarik temuan dan analisis bersama-sama ke dalam diskusi berbasis fakta yang merupakan dasar untuk rekomendasi opsi kebijakan kami. Di sini akan dibahas dasar pemikiran program dalam hal visi dan preseden internasional. Kami juga menguji konsep SBI, karakteristiknya yang spesifik dan pendekatan, dan efektivitas model dalam hal praktek dan hasil pendidikan, kelayakan pelaksanaan termasuk kapasitas, efisiensi, dan pertimbangan pendanaan, dan implikasi dalam hal keadilan sosial. Bab ini diakhiri dengan kesimpulan yang ditarik dari analisis.

6.1. Pengujian Dasar Pemikiran

Program SBI berawal dari keinginan agar bangsa Indonesia lebih kompetitif secara internasional dalam rangka mendapatkan manfaat dari beragam kesempatan, untuk merangsang inovasi dengan maksud untuk membawa kemakmuran ekonomi dan sosial bagi bangsa. Model SBI dirancang dengan maksud untuk menciptakan sebuah lingkungan di mana murid ditantang, mengembangkan pemikiran kreatif dan kemampuan memecahkan masalah, dan menerapkan pembelajaran dengan situasi baru. Hal ini dirasakan bahwa salah satu keterampilan kunci yang diperlukan adalah penguasaan bahasa internasional (Inggris) bagi murid – dimana di masa depan masyarakat terlibat penuh dalam menyerap seluruh pengetahuan, informasi, dan sumber daya yang tersedia dalam masyarakat internasional. Kemampuan untuk mengakses peluang melalui TIK merupakan inti dari visi ini, dan Bahasa Inggris adalah “lingua franca” guna memanfaatkan secara penuh pengetahuan dan informasi yang tersedia. Tujuan RSBI adalah untuk menguji model guna mengembangkan kualitas tinggi sekolah Indonesia (Sekolah Standar Nasional dengan akreditasi “A”) menjadi sekolah yang memenuhi standar internasional

6.2 Konsep SBI: Karakteristik dan Pendekatan

6.2.1 Perspektif Internasional – Bahasa Pengantar

Kami ingin fokus di sini pada Bahasa Inggris sebagai pengantar. “Kebijakan Bahasa Inggris” di antara para stakeholder SBII cukup kontroversial, dan telah menjadi fokus penelitian Kemendikbud sebelumnya. Jika kita melihat contoh-contoh dari komunitas pendidikan internasional, strategi peningkatan kualitas pendidikan berakar pada tujuan yang sama seperti di Indonesia, dan Bahasa Inggris dirasakan oleh banyak negara sebagai keterampilan penting. Tapi pendekatan yang diambil oleh negara-negara tersebut berbeda dengan model SBI di Indonesia. Di negara seperti Korea Selatan – yang memperoleh nomor satu dalam ujian PISA – mandat pendidikan adalah dalam bahasa nasional, disertai dengan pelajaran Bahasa Inggris yang wajib bagi semua murid yang secara paralel diterapkan

di seluruh pendidikan dasar dan menengah melalui kursus terpisah. Dasar pemikiran pendekatan ini adalah untuk memperkuat keberhasilan akademis dengan memungkinkan guru dan murid untuk sepenuhnya terlibat dalam berbagai hal teknis yang menyulitkan dalam bahasa mereka sendiri, tanpa adanya beban tambahan untuk memahami konsep-konsep inti dalam bahasa asing (Inggris). Gagasan untuk menggunakan pengantar Bahasa Inggris mungkin tampak sebagai cara untuk mempercepat kompetensi bahasa asing dan kami melihat sedikit peningkatan skor Bahasa Inggris dari rata-rata nasional, tapi temuan kami menunjukkan tidak adanya pengaruh pada hasil pelajaran inti. Orang akan berharap bahwa jika “kebijakan Bahasa Inggris” di SBI berhasil, kita akan melihat peningkatan yang signifikan pada nilai ujian nasional, tapi ternyata tidak. Beberapa mata pelajaran di beberapa sekolah sedikit lebih baik (lihat Tabel 19), tapi secara keseluruhan, perbedaan yang kami ukur tidak meyakinkan karena tidak adanya data yang sebanding. Hasil ini menuntun kita untuk percaya bahwa hambatan belajar muncul dalam model SBI, dan salah satu kemungkinan untuk ini adalah penggunaan bahasa asing (Inggris) sebagai pengantar.

Penelitian tentang bahasa pengantar mendukung kesimpulan kami. Nunan (2003) telah meneliti Bahasa Inggris sebagai pengantar dan menunjukkan bahwa negara-negara Asia Tenggara lainnya (Cina, Malaysia, dan Vietnam) telah menginvestasikan sumber daya yang cukup banyak untuk Bahasa Inggris, seringkali dengan mengorbankan konsep inti kurikulum. Nunan melaporkan, dari 62 studi kasus di seluruh wilayah bahwa guru tidak siap untuk memberikan konten yang kompleks dalam Bahasa Inggris, dan situasi ini mempengaruhi kualitas pembelajaran secara keseluruhan, dan bahwa selanjutnya pemerintah memiliki sedikit kapasitas untuk mendukung guru memperoleh keterampilan yang diperlukan guna mengefektifkan kebijakan. Kirkpatrick (2011) meneliti penggunaan Bahasa Inggris sebagai pengantar dalam pendidikan dasar dan menengah, dan ia berpendapat bahwa kecenderungan peningkatan pengenalan Bahasa Inggris dalam kurikulum primer adalah metode pembelajaran yang keliru, dan hal ini sebagai suatu ancaman bagi bahasa lokal dan bagi rasa identitas anak-anak. Meskipun temuan tersebut lebih berhubungan dengan konsekuensi sosial, penting untuk dicatat di sini bahwa Bahasa Inggris sebagai pengantar adalah sangat mengganggu pengembangan pembelajaran, dan bahwa praktek itu mengalihkan perhatian murid untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan untuk membantu mereka berhasil sepanjang pengalaman pendidikan mereka. Temuan kami mendukung kesimpulan kualitatif, baik dari Nunan dan Kirkpatrick, seperti laporan guru dan kepala sekolah bahwa pengajaran Bahasa Inggris merupakan salah satu hambatan kunci untuk mencapai pemenuhan kebijakan SBI.

Penelitian di Indonesia selanjutnya mendukung klaim kami. Sultan, Borland dan Eckersley (2012) mempelajari sekolah SBI di Indonesia, dan melaporkan bahwa hasil tes TOEFL terhadap 260 Kepala Sekolah SMP RSBI, 90% skornya kurang dari 245, dan hanya 10% yang mendapat hasil yang baik. Hasil tes IELTS untuk 40 guru SBI, 80% skor antara 2,5 dan 3,5, dan hanya 20% mendapat score antara 4 dan 4,5. Hasil kami berada dalam kisaran ini. Dari 255 RSBI sekolah SMP, hanya 27% dilaporkan melewati skor TOEFL minimal (lihat Bagan 18). Temuan kami terkait kinerja Ujian Nasional dalam Bahasa Inggris (sedikit lebih tinggi di RSBI) mengkonfirmasi hasil penelitian Sultan, et. al. (2012). Mereka melaporkan bahwa murid yang diajar dengan Bahasa Inggris sebagai pengantar mendapat nilai lebih baik pada materi Bahasa Inggris pada Ujian Nasional di Indonesia. Studi ini juga melaporkan bahwa banyak murid RSBI mengikuti kursus Bahasa Inggris untuk perbaikan.

Hasil evaluasi kami, bersama dengan studi lain yang relevan, mendukung gagasan bahwa sekolah merasa sulit untuk mencapai kompetensi Bahasa Inggris. Meskipun murid RSBI skor Bahasa Inggrisnya sedikit lebih baik, praktek ini memiliki pengaruh signifikan dan merugikan pada kinerja pada mata pelajaran lainnya.

6.2.2 Adopsi Akreditasi dan Kurikulum OECD atau Negara Maju lain

Hanya empat sekolah dalam sampel penelitian kami ($n = 70$) melaporkan telah berhasil meraih akreditasi internasional. Pencapaian yang sangat rendah dan pelaksanaan kebijakan ini menunjukkan sekolah merasa sulit (seperti yang didukung dalam temuan kuantitatif dan kualitatif kami). Dalam investigasi kami, kebijakan akreditasi internasional tidak didefinisikan dengan baik, karena hanya dijelaskan bahwa perlu mendapatkan akreditasi dari lembaga independen internasional dari negara maju sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri 78/2009. Diskusi dengan para pemangku kepentingan menunjukkan persyaratan pemenuhan SBI sangat sulit dicapai karena berbagai alasan, terutama belum adanya panduan yang jelas untuk bekerja sama dengan otoritas asing yang tepat untuk secara koheren menyelaraskan dua persyaratan akreditasi (nasional dan internasional).

Diduga tujuan kebijakan ini adalah untuk memberikan referensi peningkatan kualitas bagi sekolah, dan bahwa instrumen akreditasi negara maju akan memberikan kerangka kerja yang dapat dipahami oleh sekolah untuk mengikuti dan merencanakan. Selain Malaysia, setiap kerangka akreditasi diberikan dalam bahasa asing, dan hal ini dapat menyebabkan kurangnya penyerapan. Adalah masuk akal bahwa program Sister School akan menjadi kendaraan untuk memfasilitasi akreditasi internasional, tetapi kurangnya pedoman menyebabkan adanya kebutuhan terhadap metode untuk mencapai akreditasi hingga ke sekolah.

6.3 Efektivitas Model: Praktek dan Hasil Pendidikan

Dalam membahas topik ini, kita membuat asumsi sebagai berikut: (i) ujian nasional adalah ukuran indikasi utama kualitas, (ii) pembenaran dari sisi keuangan untuk program ini didasarkan pada prestasi murid, dan (iii) indikasi peningkatan kualitas didasarkan pada analisis data kualitatif.

Dengan pertimbangan investasi yang besar baik oleh pemerintah maupun masyarakat yang telah dilakukan pada RSBI, orang akan berharap kinerja akademik murid RSBI secara signifikan lebih baik daripada sekolah yang belum menerima investasi ini. Analisis ini dibatasi oleh data yang tersedia dari Kemendikbud. Perbandingan nilai ujian nasional RSBI tahun 2011 menunjukkan kinerja yang lebih baik secara signifikan pada SMP RSBI, tetapi terdapat sangat sedikit perbedaan untuk SMA dan SMK (dibandingkan dengan sekolah non-RSBI) seperti yang ditunjukkan oleh Tabel 23 di bawah ini (data nasional untuk SD tidak tersedia).

Tabel 23–Perbandingan Nilai Ujian Nasional 2011

TINGKAT	RATAAN NASIONAL SELURUH MATERI UJIAN	RSBI	% Kinerja Lebih Baik oleh RSBI
SMP	7.32	8.72	16%
SMA	8.09	8.24	2%
SMK	7.63	7.94	1%

Namun, kesimpulan ini dibatasi oleh dua pertimbangan tambahan. Pertama, meskipun murid RSBI unggul berdasarkan rata-rata nasional, rata-rata nilai ujian nasional untuk SMP mencakup semua sekolah dari seluruh tingkat akreditasi yang akan menghasilkan nilai rata-rata keseluruhan yang lebih rendah. Hampir semua RSBI dalam sampel Survei Cepat sudah pada tingkat akreditasi “A” sebelum program RSBI dimulai. Kedua, perbandingan nilai ujian nasional RSBI dengan non-RSBI yang memiliki akreditasi setara tingkat “A” menunjukkan sedikit perbedaan dalam nilai, dan dalam beberapa kasus non-RSBI mengungguli RSBI (lihat Tabel 19 dan Grafik 9-11).

Data kualitatif menunjukkan bahwa keberadaan program RSBI telah membawa motivasi yang signifikan untuk sekolah, baik RSBI dan lainnya, untuk meningkatkan kualitas secara keseluruhan.

6.4 Kelayakan Pelaksanaan: Kapasitas, Efisiensi, Pertimbangan Sosial dan Pemerataan

Manajemen dan Organisasi

Praktek manajemen dan organisasi bervariasi. Terdapat praktek manajemen dan organisasi yang berbeda di tingkat pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Praktek-praktek ini dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu struktur organisasi yang memiliki unit dan staf khusus untuk mengelola dan mengadministrasikan RSBI; dan struktur organisasi yang menugaskan staf dan unit yang ada untuk bertanggungjawab atas RSBI sebagai tanggung jawab tambahan. Sekitar 20% dari waktu staf dialokasikan untuk manajemen dan administrasi RSBI pada struktur yang kedua. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah orang yang bertugas terbatas, mengingat unit-unit pendidikan lokal digunakan untuk mengelola sejumlah proyek selain kegiatan rutin administrasi dan monitoring. Setiap Direktorat Kemendikbud memiliki panduan implementasi dan monitoring sendiri yang menambahkan beban di tingkat pemerintah daerah di mana mereka harus menangani empat program RSBI yang berbeda. Data evaluasi menunjukkan program ini tidak efektif dalam melakukan monitoring dan menindaklanjuti dengan rencana perbaikan. Studi ini juga menemukan bahwa struktur yang memiliki unit khusus untuk manajemen RSBI cenderung melakukan monitoring dan evaluasi dan pelaporan yang lebih mendalam. Sebanyak 12% Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten yang dikunjungi menyatakan tidak bertanggung jawab atas RSBI. Salah satu kantor Dinas Provinsi yang distudi menyatakan tidak bertanggung jawab terhadap RSBI, dan satu Kabupaten menyatakan hal yang sama.

Staf provinsi dan kabupaten yang bertanggung jawab menangani RSBI belum menerima pelatihan khusus tentang manajemen, administrasi dan monitoring dan evaluasi RSBI. Beberapa staf tersebut telah menerima "sosialisasi" mengenai tujuan dan prosedur pelaksanaan, baik secara langsung dari Kemendikbud atau dari atasan yang menerima sosialisasi dan meneruskan informasi tersebut kepada orang lain dalam organisasi. Beberapa orang yang telah menerima informasi tersebut telah dipindahkan ke unit lain dan dalam banyak kasus informasi khusus RSBI tidak diteruskan kepada penggantinya. Semua direktorat Kemendikbud telah menerbitkan manual dan pedoman pelaksanaan, tetapi sejauh mana staf memahami atau merujuk kepada panduan tersebut bervariasi. Hal demikian secara negatif mempengaruhi kapasitas manajemen yang menghasilkan inefisiensi dalam sistem.

Pertimbangan Keuangan

Sebagian besar dana dari orang tua dan pemerintah digunakan untuk menutupi biaya infrastruktur dan peralatan untuk SD dan SMP RSBI, sementara BOS menyediakan biaya operasional. SMK menerima subsidi khusus dari anggaran pemerintah pusat untuk operasional, SMA tidak menerima subsidi untuk operasional. Sementara sekolah-sekolah negeri reguler yang menerima BOS tidak diperkenankan memungut biaya, RSBI dibebaskan dari hal ini dan karena itu diperbolehkan menggunakan biaya dan kontribusi untuk menutupi biaya operasional. Kami percaya bahwa hal ini merupakan kebijakan yang efisien dan efektif mengingat biaya operasional dan pemeliharaan terhadap tambahan peralatan akan jauh lebih banyak daripada yang disediakan oleh BOS²⁶.

Evaluasi ini menemukan bukti bahwa beberapa provinsi melakukan monitoring intensif untuk mengukur kesenjangan antara status fasilitas dan peralatan saat ini, misalnya, dan standar-standar yang diberlakukan oleh regulasi. Namun, tidak ada bukti bahwa data monitoring digunakan untuk menentukan bantuan keuangan pemerintah dalam bentuk hibah. Dengan demikian, RSBI harus bergantung pada biaya dan kontribusi terkait untuk kebutuhan dana tambahan untuk investasi infrastruktur disamping biaya operasional. Dalam hal pemenuhan standar infrastruktur saat ini, hal itu

²⁶ Evaluasi tidak mengumpulkan data mengenai penggunaan spesifik kontribusi orang tua

belum terbukti menjadi mekanisme yang efisien atau efektif, misalnya, hanya 50% RSBI yang menjadi sampel studi ini telah memenuhi persyaratan bahwa masing-masing kelas harus memiliki peralatan TIK.

Keadaan ini terjadi terutama karena pola pendanaan Kemendikbud. Misalnya, sekolah-sekolah yang menerima dana hibah dibagi menjadi empat kelompok di mana tahap pertama sekolah menerima dana hibah selama empat tahun, kelompok kedua menerima hibah selama tiga tahun dan kelompok ketiga hanya menerima dana hibah selama dua tahun, dengan besarnya dana hibah (per tahun) relatif konstan. Tidak ada indikasi bahwa suatu penilaian telah dilakukan untuk menentukan jumlah dana yang diterima sekolah. Dalam hal pendanaan pemerintah untuk membantu sekolah memenuhi standar SBI, sistem ini menjadi tidak efisien dan efektif

Berdasarkan analisis kinerja murid yang diukur dengan nilai ujian nasional, program RSBI seperti yang berlangsung saat ini tidak dapat dianggap efektif secara biaya. Namun, terdapat bukti yang cukup baik dari evaluasi ini dan dari penelitian relevan lain tingkat nasional dan internasional bahwa program tersebut memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh di Indonesia.

Pertimbangan Pemerataan Sosial

Pada bagian ini, kita membahas struktur keuangan RSBI dan hubungannya dengan pemerataan akses, khususnya bagi murid miskin atau kurang mampu. Dalam hal keuangan, kami melakukan analisis keuangan secara rinci yang memberikan profil keuangan program. Seperti dapat dilihat dari temuan kami, atas dasar biaya satuan, program SBI cukup mahal dibandingkan dengan sekolah non-RSBI. Mengingat kenyataan keuangan ini, beberapa pertanyaan segera muncul: Apakah biaya ini dibenarkan? Apakah temua evaluasi ini mendukung atau menolak kebijakan SBI dengan alasan keuangan? Dan akhirnya, jika program SBI dipertahankan dalam beberapa bentuk atau tingkat, bukti apa yang mendukung bahwa hal ini adalah investasi yang baik, dan apakah ada preseden yang membenarkan kelanjutan program?

Dalam hal pemerataan dan akses, satu kelompok pertanyaan lanjutan muncul: Apakah Program SBI adil dalam hal pemerataan sosial? Apakah struktur keuangan saat ini – misalnya kewenangan untuk memungut biaya dari orang tua – pada dasarnya bias ke arah kelas menengah dan atas? Jika biaya sekolah dihilangkan, sejauh manakah hal ini akan mengubah situasi? Akankah pembatalan program memberikan manfaat rakyat Indonesia? Apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan penyerapan murid berpenghasilan rendah jika struktur keuangan saat ini dipertahankan?

Pertanyaan-pertanyaan di atas adalah apa yang tengah dipikirkan oleh pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan. Kita akan membahas setiap pertanyaan di atas ditinjau dari evaluasi kami dan praktek-praktek negara-negara lain mengenai perbaikan pemerataan dan akses terutama yang berkaitan dengan keuangan.

Akan menjadi tidak pada tempatnya jika hanya melihat implikasi keuangan saja, dan tidak mempertimbangkan pembenaran keseluruhan program dalam hal pemerataan sosial dan akses. Argumen utama terhadap program yang berasal dari beberapa pemangku kepentingan yang berpengaruh adalah bahwa program ini pada dasarnya tidak adil. Dapat dikatakan bahwa dengan memungut biaya dari orang tua, ditambah dengan kebijakan perekrutan murid berpenghasilan rendah yang efektifitasnya masih dipertanyakan, murid berpenghasilan rendah secara tidak proporsional mendapat 'diskriminasi'. Kami merasa alasan ini ada benarnya, tetapi harus melihat semua pertimbangan lainnya, termasuk penyesuaian kebijakan dan perbaikan program, dan apakah itu menjadialasan untuk membatalkan program?

Untuk mengatasi masalah ini, kami membuat asumsi lain: Indonesia bisa belajar dari evaluasi analisis situasi kami, dan dari praktek-praktek terbaik internasional, dan berhasil menerapkan langkah-langkah perbaikan program yang memungkinkan sistem RSBI dan sekolah-sekolah untuk mencapai sasaran

pemerataan dan akses, dan melanjutkan peningkatan keseluruhan kualitas belajar dan mengajar untuk memenuhi visi program.

Kami merasa bahwa temuan kunci dari evaluasi kami, selain penilaian terhadap pemenuhan persyaratan tertentu, menunjukkan hambatan yang dihadapi sekolah yang membatasi sekolah dalam mencapai potensinya, misalnya: Bahasa Inggris sebagai pengantar (dibahas di awal bab ini), akreditasi internasional, adopsi kurikulum internasional, mencapai persyaratan persentase guru S2, kurangnya koherensi dalam program pengembangan profesional guru, integrasi TIK secara efektif, dan tidak adanya monitoring untuk perbaikan kinerja sekolah. Untuk mengurangi hambatan dan kendala, kami memberikan rekomendasi kebijakan dalam Opsi 3 di bawah ini dalam bab Rekomendasi. Salah satu masalah/temuan yang masih tersisa yang akan kita bahas secara panjang lebar adalah yang berhubungan dengan pemerataan dan akses.

Kami sangat prihatin bahwa sekolah belum mencapai kuota 20% untuk murid berpenghasilan rendah. Data kami menunjukkan bahwa secara keseluruhan, hanya 12% dari total murid di RSBI berasal dari keluarga berpenghasilan rendah. Data terpilah kami tentang seberapa dekat sekolah dalam mencapai kuota ini (Lihat Grafik 30-33, Bagian 5.3.9), menunjukkan bahwa banyak sekolah yang jauh dari memenuhi persyaratan pemenuhan, dan jauh untuk mencapai standar minimum. Kita dapat menyimpulkan dari data ini bahwa prinsip “pelanggan membayar penuh” bisa menjadi disinsentif bagi RSBI untuk memenuhi kuota murid berpenghasilan rendah. Dan tentu saja ada faktor-faktor lain yang mungkin berperan di sini, termasuk mereka yang berpendapat bahwa murid berpenghasilan rendah tengah yang menerima beasiswa (di RSBI) didiskriminasi dan diganggu, atau bahwa murid berpenghasilan rendah sulit untuk direkrut dengan alasan kinerja akademik yang secara keseluruhan rendah bagi mereka dari kelompok sosio-ekonomi bawah, atau jumlah masyarakat seperti itu jumlahnya sedikit di kota besar seperti Jakarta Selatan. Pertanyaannya kemudian adalah: dapatkah kendala dan hambatan tersebut diatasi untuk membuat RSBI lebih mudah diakses dan lebih merata?

Kembali ke kasus Korea Selatan, kita dapat melihat preseden untuk mendukung alasan untuk mempertahankan program SBI, tapi perubahan substantif akan diperlukan untuk membuatnya lebih efektif, terutama terkait dengan dimasukkannya murid berpenghasilan rendah dan terpinggirkan²⁷. Korea memiliki program yang komprehensif untuk membantu meningkatkan prestasi akademik murid berpenghasilan rendah dan terpinggirkan. Mereka memiliki program-program khusus di sekolah yang membantu murid berpenghasilan rendah mengatasi capaian prestasi yang rendah terkait aspek sosio-ekonomi. Korea telah menerapkan konseling akademik dan sosial di sekolah, program pendampingan, dan memperluas program ini sampai kepada orang tua. Mereka telah menyediakan voucher untuk kegiatan ekstrakurikuler dan program lainnya yang sudah diperkaya. Melalui fokus kebijakan yang jelas dengan pedoman yang jelas, Korea telah membantu meningkatkan kesempatan pendidikan untuk semua, dan telah menempatkan sistem dukungan yang diperlukan untuk memberikan kesempatan bagi semua. Indonesia dapat belajar dari program ini dan negara-negara lain untuk membantu meningkatkan penyerapan dan mempertahankan murid berpenghasilan rendah murid.

Salah satu isu yang masih ada adalah kebijakan kuota murid berpenghasilan rendah. Laporan anecdotal (tidak sistematis) menunjukkan bahwa murid yang membayar membenci murid yang tidak membayar, dan situasi ini menciptakan kesenjangan sosial di beberapa sekolah, dan secara nyata menyebabkan intimidasi dan perpecahan. Sumber-sumber kebencian ini bisa disebabkan oleh fakta bahwa murid berpenghasilan rendah menerima beasiswa. Sumber-sumber lain dari kebencian mungkin berasal dari perbedaan sosial, budaya, dan bahasa. Kami tidak tahu seberapa luas hal ini, tetapi hal tersebut merupakan masalah sosial yang perlu ditangani. Kami merasa bahwa masalah ini mungkin melebihi kemampuan RSBI. Rekomendasi penyesuaian kebijakan harus mencakup ketentuan untuk mengurangi ketegangan sosial, yang dapat mencakup program sensitivitas pelaksanaan atau langkah-langkah harmonisasi lainnya.

27 Lihat: <http://www.ncee.org/programs-affiliates/center-on-international-education-benchmarking/top-performing-countries/south-korea-overview/>

6.5 Kesimpulan

Kembali ke pertanyaan yang diajukan di awal bagian ini: Apakah biaya program SBI dibenarkan? Kami merasa bahwa jawabannya adalah “Ya”, karena potensinya untuk menjadi pintu gerbang guna memasukkan praktik terbaik internasional ke dalam sistem pendidikan Indonesia, dan persepsi kualitatif dari komunitas sekolah mendukung ini. Apakah program pada dasarnya bias terhadap kelas menengah dan atas? Data kami mengenai kuota berpenghasilan rendah mendukung hal ini, tapi kami merasa bahwa ini bukan alasan untuk membatalkan program dengan alasan bahwa intervensi dan program rekrutmen yang aktif akan membantu untuk mengurangi bias (lihat Option 3 dalam Rekomendasi bawah). Akankah membatalkan program bermanfaat bagi kepentingan rakyat Indonesia? Bukti kami dan pengalaman dari evaluasi menunjukkan bahwa membatalkan program tersebut tidak akan bermanfaat dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Meskipun isu-isu pemerataan muncul, investasi di sekolah-sekolah akan berfungsi dalam memberikan contoh tindakan yang diperlukan yang dapat diterapkan di semua sekolah, dan menciptakan kesempatan untuk secara lengkap mengembangkan aspek pendidikan untuk perbaikan nasional. Untuk mendukung perubahan positif dalam program, suatu sistem yang lebih mendukung dan lebih formatif diperlukan, dan peningkatan kapasitas yang diperlukan di tingkat Dinas Pendidikan akan menjadi sangat penting.



Bab 7.

OPSI KEBIJAKAN SSI

Dari evaluasi ini, telah diidentifikasi opsi kebijakan yang mempertimbangkan arahan dari UU 20/2003 untuk membentuk “unit-unit pendidikan bertaraf internasional”. Opsi-opsi kebijakan ini dimaksudkan untuk dipilih dalam konteks peaturan perundang-undangan yang saat ini berlaku. Setelah melakukan analisis data secara intensif dan konsultasi dan wawancara dengan mitra kunci pemerintah di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota dan dengan personil sekolah dan anggota masyarakat, tiga pilihan/opsi mengenai masa depan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) diajukan untuk dipertimbangkan oleh penentu kebijakan

OPSI 1: Mempertahankan Kebijakan SBI Saat ini

Dasar Pemikiran: UU 20/2003 adalah hukum negara, dan meskipun sedang dikaji oleh Mahkamah Konstitusi, masih terlalu dini untuk mengubah hukum serta kebijakan rinci berbagai peraturan pelaksanaan UU tersebut. Mengubah peraturan tingkat yang lebih rendah seperti keputusan menteri pada umumnya dapat dilakukan tanpa kesulitan. Namun, mengubah UU adalah sebuah langkah yang tidak mudah, terutama karena melibatkan DPR yang biasanya lebih menekankan unsur politik ketimbang pertimbangan teknis.

Investasi besar-besaran telah dilakukan dalam program RSBI untuk membangun infrastruktur, pengadaan peralatan dan melatih para guru. Investasi ini telah dilakukan dengan dana pemerintah yang jumlahnya besar (lebih dari Rp 1 triliun), termasuk pinjaman yang cukup besar dari ADB untuk SMK Bertaraf Internasional, serta sejumlah besar biaya yang dibayar oleh orang tua dan kontribusi dari dunia usaha. Harapan pada murid, personil sekolah, orang tua dan masyarakat telah demikian tinggiterait dengan prospek sebuah sekolah internasional yang tersedia di setiap kabupaten dan kota di Indonesia.

Konsekuensi: Kelanjutan dari kebijakan saat ini akan menegaskan bahwa kebijakan tersebut efektif. Namun, hal ini akan bertentangan dengan banyak temuan dari evaluasi yang menunjukkan bahwa kebijakan dan peraturan tidak efektif untuk mencapai tujuan utama undang-undang tersebut. Meskipun program ini mendapatkan banyak dukungan, namun beberapa pemangku kepentingan yang berpengaruh prihatin tentang biaya dan persepsi bahwa itu merupakan program pemerintah bersubsidi untuk kelompok “elit”

Kesimpulan untuk Opsi 1: Temuan evaluasi menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan yang diharapkan dapat terwujud dengan meningkatkan standar sekolah terpilih untuk memenuhi

standar internasional ternyata belum efektif dalam meningkatkan kinerja murid dalam ujian nasional²⁸. Temuan tersebut juga menunjukkan bahwa akan sangat sulit, mahal dan memakan waktu untuk mewujudkan 1.339 sekolah yang ditunjuk sebagai RSBI untuk memenuhi semua standar dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri 78/2009. Selanjutnya, jika Permen ini diikuti, itu berarti 884 RSBI lain perlu dibentuk dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang yang menyatakan bahwa pada setiap tingkat pendidikan dasar dan menengah harus dibentuk di setiap kabupaten dan kota.

OPSI 2: Menghentikan Program RSBI

Dasar Pemikiran: Program ini sangat mahal dan menyerap dana pemerintah yang sebenarnya dapat digunakan untuk kebutuhan yang lebih mendesak seperti membantu sekolah dan kabupaten/kota memenuhi SPM dan melaksanakan pendidikan dasar gratis sesuai dengan kebijakan saat ini. Penelitian ini menunjukkan bahwa setelah enam tahun, mayoritas sekolah RSBI belum memenuhi kebutuhan infrastruktur maupun peralatan sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri 78/2009. Pemenuhan persyaratan ini membutuhkan investasi lebih lanjut yang cukup besar selama tahun-tahun mendatang. Selain itu, kelanjutan dari kebijakan mengenai satu sekolah (SBI) pada setiap jenis sekolah untuk setiap kabupaten/kota akan membutuhkan 884 sekolah tambahan, yang membutuhkan lebih banyak investasi untuk mencapai target yang ditentukan.

Sejumlah besar investasi, baik dari pemerintah, orang tua dan masyarakat selama enam tahun terakhir tidak menghasilkan perbaikan yang terukur dalam hal kinerja murid (diliat dari hasil Ujian Nasional yang rata-rata sama dengan murid dari sekolah yang sebanding yang tidak berstatus RSBI) dan adanya fakta bahwa peralatan mahal yang sudah dibeli tidak digunakan secara efektif.

Kritikan utama dari program RSBI adalah bahwa ia bersifat diskriminatif terhadap anak-anak dari strata sosial ekonomi bawah. Peraturan saat ini mensyaratkan paling sedikit 20% murid kurang mampu ditampung di sekolah-sekolah standar internasional, namun data evaluasi menunjukkan bahwa rata-rata murid yang menerima beasiswa (artinya: berasal dari kelompok tidak mampu) hanya sekitar 12%²⁹. Selain hambatan keuangan, murid yang kurang mampu juga menghadapi hambatan akademik dan budaya yang mungkin memiliki efek negatif secara nyata pada kemauan mereka untuk mendaftar ke RSBI. Kinerja akademik anak dari kelompok sosial ekonomi bawah cenderung lebih rendah dibandingkan dengan mereka dari strata sosial ekonomi yang lebih tinggi, dan sering kali murid kurang mampu yang menerima subsidi (di RSBI) mendapat menghadapi ejekan dari murid yang lebih kaya.

Konsekuensi: Opsi ini memiliki konsekuensi politik yang signifikan, karena membutuhkan perubahan dalam undang-undang (UU 20/2003). Selain itu, jika opsi ini diambil, perlu pertimbangan yang matang terkait investasi yang telah dilakukan pada 1.339 RSBI saat ini. Investasi ini mungkin bisa “dihapuskan” sebagai proyek percontohan yang tidak memenuhi harapan. Pada opsi ini pengecualian yang memungkinkan SD dan SMP negeri menarik biaya akan dibatalkan. Subsidi BOS tidak akan cukup untuk menutupi biaya operasional dan pemeliharaan yang mahal atas investasi peralatan dan infrastruktur yang sudah dilakukan. Evaluasi ini tidak menemukan bukti apakah sekolah-sekolah swasta bisa mencapai standar internasional yang didefinisikan saat ini tanpa bantuan pemerintah.

Data kualitatif menunjukkan bahwa ada banyak kebanggaan masyarakat terhadap RSBI; dan orang tua, personil sekolah dan stakeholder kunci memiliki harapan tinggi untuk masa depan. Bukti menunjukkan bahwa ada motivasi tinggi bagi para guru untuk meningkatkan mutu pengajaran, belajar Bahasa Inggris dan untuk meraih gelar yang lebih tinggi. Sekolah-sekolah lain (non RSBI) telah termotivasi untuk meningkatkan kualitas pengajaran dengan harapan bahwa sekolah tersebut suatu hari nanti

28 Meskipun murid RSBI unggul berdasarkan rata-rata nasional, data tidak meyakinkan karena rata-rata nasional termasuk sekolah di semua tingkat akreditasi, sedangkan hampir semua RSBI dalam sampel sudah di tingkat akreditasi “A”.

29 Lihat juga “*Design Research Policy Implementation RSBI*”, Pusat Penelitian Kebijakan, BALITBANG, Kemendikbud, Jakarta, 2011

dapat masuk program RSBI. Penghentian program kemungkinan akan membuat para guru dan tenaga kependidikan dan segmen tertentu masyarakat menjadi tertekan dan putus asa, yang dapat berakibat negatif terhadap dukungan masyarakat yang ada di sekitar sekolah, dan terhadap motivasi peningkatan kualitas pendidikan dalam beberapa waktu ke depan.

Berbagi hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Bahasa Inggris sebagai pengantar secara signifikan mengurangi pencapaian keseluruhan tujuan kurikulum³⁰. Temuan ini, bersama dengan sulitnya sekolah mencapai akreditasi dan adopsi kurikulum internasional telah mendukung klaim bahwa hal-hal tersebut telah menjadi hambatan yang signifikan untuk peningkatan kualitas pendidikan, dan jika hambatan tersebut dihapus, kinerja sekolah kemungkinan akan meningkat.

Kesimpulan untuk Opsi 2: Terdapat suatu efek samping potensial dari investasi yang sudah dilakukan jika kebijakan tersebut dihentikan, dan tunjangan khusus untuk RSBI untuk membebaskan biaya dibatalkan. BOS saja tidak cukup untuk mengoperasikan dan memelihara peralatan yang telah diadakan. Pemutusan kebijakan ini kemungkinan akan mengakibatkan RSBI kembali menjadi standar sebelumnya yang dapat mengakibatkan berkurangnya motivasi para pemangku kepentingan, dan berpotensi memiliki dampak negatif terhadap sikap masyarakat pemangku kepentingan RSBI dan motivasi untuk peningkatan kualitas pendidikan. Akhirnya, tanpa dukungan khusus yang melalui kebijakan ini, potensi untuk mengubah situasi dan menggunakan secara baik investasi tersebut dengan dukungan lanjutan yang relatif lebih moderat dari pemerintah dan masyarakat akan hilang.

OPSI 3: Modifikasi Kebijakan dan Regulasi

Dasar Pemikiran: Temuan evaluasi jelas menunjukkan bahwa murid di sekolah RSBI tidak menunjukkan kinerja yang lebih baik daripada rata-rata murid di sekolah sejenis yang tidak berstatus RSBI. Temuan juga menunjukkan bahwa sekolah RSBI masih jauh dari memenuhi semua persyaratan dan standar yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri 78/2009. Namun, bersama dengan beberapa penelitian tentang RSBI saat ini, evaluasi ini menunjukkan bahwa sebagian besar kekurangan yang teridentifikasi dapat diatasi dengan membuat modifikasi regulasi dalam payung hukum UU 20/2003 tanpa harus mengubah UU 20/2003 itu sendiri.

Keuntungan opsi ini adalah ia akan:

- mempertahankan dan memanfaatkan lebih lanjut investasi yang sudah dilakukan melalui program RSBI;
- tidak mengecewakan dan mengurangi motivasi di tingkat akar rumput akibat penghentian program, dan terus menjadi faktor pendorong untuk meningkatkan kualitas yang lebih baik di RSBI dan sekolah lainnya;
- meneruskan titik awal bagi praktik terbaik internasional tanpa kesulitan untuk mencapai persyaratan-persyaratan SBI terkait adopsi kurikulum dan akreditasi negara maju;
- hanya membutuhkan investasi lebih lanjut yang tidak terlalu besar oleh pemerintah dengan memanfaatkan kontribusi dari orang tua yang mampu dan dunia usaha;
- Mengenakan sanksi untuk memastikan 20% murid yang kurang mampu ditampung oleh RSBI.

Konsekuensi: Opsi ini akan membutuhkan perubahan signifikan dalam Peraturan Menteri 78/2009 - seperti menghapus persyaratan penggunaan Bahasa Inggris sebagai pengantar - tapi tidak membutuhkan perubahan dalam UU. Isu-isu besar lainnya yang perlu ditangani adalah yang berkaitan dengan: praktik pendanaan dan akomodasi untuk murid yang secara sosio-ekonomi kurang mampu, pertimbangan mengenai suatu standar akreditasi baru yang lebih tinggi dari Sekolah Standar Nasional tetapi tidak pada tingkat standar internasional sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri 78/2009, perbaikan manajemen pengawasan dan monitoring, status saat ini sekolah-sekolah RSBI yang

30 Lihat Nunan (2003); Kirkpatrick (2011); Sultan, et.al. (2012)

belum mencapai status SBI; target yang tidak terpenuhi untuk membangun empat tingkat bertaraf internasional di setiap kabupaten/kota sebagaimana diamanatkan oleh UU 20/2003 (diperlukan tambahan 884 sekolah atau lebih).

Kesimpulan untuk Opsi 3: Temuan evaluasi menunjukkan bahwa dengan menghapus hambatan pemenuhan SBI, RSBI memiliki potensi sebagai titik awal dan pusat penyebaran praktik terbaik internasional yang sangat dibutuhkan (tidak hanya dalam hal proses belajar-mengajar, tetapi juga dalam hal manajemen dan organisasi). Yang disajikan di bawah ini adalah rekomendasi khusus untuk sebuah peraturan menteri yang baru untuk menggantikan Peraturan Menteri 78/2009.

Membentuk Gugus Tugas antar Direktorat

Membentuk Gugus Tugas antar-Direktorat SBI untuk memfasilitasi dan mengawasi konsultasi dan penyusunan peraturan kebijakan menteri baru untuk SSI. Gugus Tugas SBI akan berada di atas masing-masing direktorat agar memungkinkan diperolehnya kebijakan yang lebih konsisten dan koheren dan pelaksanaan langkah-langkah baru untuk semua jenis sekolah.

Penyesuaian PermenDiknas 78/2009

Peraturan Menteri No 78 Tahun 2009 merupakan acuan saat ini untuk dijadikan pedoman kebijakan dan standar pemenuhan yang mengatur pelaksanaan Sekolah Bertaraf Internasional. Temuan evaluasi kami menunjukkan bahwa beberapa standar pemenuhan SBI dalam peraturan ini membatasi sekolah sampai pada suatu tingkat yang berdampak negatif terhadap kualitas kesempatan belajar bagi murid dan menciptakan kondisi tertentu yang hampir mustahil untuk dipenuhi dalam waktu dekat. Berikut ini adalah rekomendasi untuk modifikasi:

- **Hapus Bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar.** Kami menemukan bahwa ketentuan Bahasa Inggris sebagai pengantar telah memotivasi guru untuk memperbaiki Bahasa Inggris mereka, namun kompetensi yang dibutuhkan untuk penyampaian konsep yang kompleks, dan efektif dengan menggunakan Bahasa Inggris membutuhkan sumber daya dengan kemampuan bahasa yang sangat tinggi pada guru dan murid, dan upaya-upayayang diperlukan untuk secara memadai mengembangkan hal ini telah mengorbankan peningkatan kualitas secara keseluruhan. Penelitian yang dilakukan oleh Kemendikbud mendukung temuan studi lain (Lihat Nunan, 2003; Kirkpatrick, 2011; dan Sultan, et.al. 2012). Selain itu, temuan-temuan evaluasi – seperti rendahnya persentase guru dengan kompetensi TOEFL minimum, rendahnya frekuensi penggunaan Bahasa Inggris dalam pengajaran (7%), pencapaian persyaratan kompetensi Bahasa Inggris adalah salah satu dari tiga kesulitan utama seperti dilaporkan oleh kepala sekolah menunjukkan bahwa persyaratan Bahasa Inggris sebagai pengantar merupakan hambatan yang signifikan untuk memenuhi persyaratan SBI. Praktik terbaik internasional menunjukkan bahwa negara-negara yang dianggap terbaik pada ujian PISA, misalnya Korea Selatan dan Finlandia, tidak menggunakan Bahasa Inggris sebagai pengantar. Namun, dalam rangka mempersiapkan murid SBI untuk bersaing secara internasional dan mengambil manfaat dari sumber belajar berbahasa Inggris, penting agar Bahasa Inggris diberikan sebagai mata pelajaran wajib dari kelas awal sampai lulus, dan bahwa guru-guru terlatih untuk mengembangkan kompetensi kerja dalam Bahasa Inggris.
- **Hapus Persyaratan Akreditasi Negara OECD atau negara maju lain.** Hasil evaluasi menunjukkan pemenuhan sangat rendah (hanya 6%) akreditasi dari OECD atau dari negara maju lainnya. Memperoleh akreditasi tersebut merupakan pekerjaan yang memakan waktu dan sangat sulit karena pemerintah asing harus memberikan dasar hukum untuk akreditasi tersebut dan sekolah swasta asing akan diatur oleh standar akreditasi dan peraturan nasional. Kami percaya bahwa standar akreditasi seperti itu perlu menjadi referensi bagi SBI di Indonesia, tetapi tidak perlu menetakannya sebagai persyaratan bagi SBI. Hubungan sister school harus diteruskan dan diperluas karena ini bukanlah suatu usaha yang sulit atau mahal.

- **Hapus Persyaratan Adopsi Kurikulum Negara OECD atau negara maju lain.** Sekolah melaporkan bahwa adopsi kurikulum OECD atau negara maju lainnya sulit dilakukan. Kami tidak menemukan bukti pedoman khusus untuk adopsi kurikulum asing, atau instruksi untuk menilai dan menyelaraskan kurikulum tersebut dengan kurikulum Indonesia. Selain itu, kami menduga bahwa bahasa merupakan suatu hambatan yang signifikan untuk hal ini.
- **Kaji Ulang Perayaratatan Sertifikat ISO:** Data kuantitatif survei meliputi pemenuhan terhadap sertifikasi ISO 9001. SMK memiliki pemenuhan 100%. Jenis sekolah lainnya menunjukkan berbagai tingkat pemenuhan (SMA: 70%, SMP: 47%, dan SD: 6%). Selain temuan ini, dalam beberapa kasus selama wawancara, kepala sekolah non-SMK melaporkan bahwa pemenuhan ISO itu sangat mahal, dan dianggap memiliki kontribusi terbatas bagi kualitas sekolah secara keseluruhan. Sebuah tinjauan kontekstual ISO akan membantu untuk menentukan efektivitas perbaikan kualitas yang dimaksudkan.
- **Sertakan Kurikulum dari OECD atau Negara Lain Sebagai Referensi.** Sekolah RSBI dapat diminta untuk menggunakan kurikulum OECD atau dari negara maju sebagai referensi. Alasan untuk ini adalah untuk menetapkan harapan agar kurikulum asing digunakan untuk *referensi* isi, metodologi, dan evaluasi yang ditujukan untuk memperkaya dan memperluas pengajaran dan pembelajaran dalam konteks Indonesia, dan memungkinkan pemilihan spesifik referensi untuk mendukung pengembangan profesi guru berkelanjutan melalui proses adopsi, praktek, dan refleksi metodologi baru dan inovatif tanpa beban tambahan. Konsep ini bertujuan untuk membuka peluang baru untuk belajar, mengajar dan meningkatkan kompetensi untuk meningkatkan hasil belajar murid. Sekolah RSBI harus memiliki pelatihan khusus untuk mengakses sumber belajar dan metode dari negara-negara maju dan bagaimana memasukkan hal ini ke dalam kurikulum nasional sekolah.
- **Menambah Persyaratan Kelulusan melalui Adopsi Metode Ujian Internasional.** Adopsi persyaratan kelulusan tambahan akan membantu melembagakan keterampilan yang relevan bagi pencapaian prestasi tinggi. Inovasi ujian yang diterima secara internasional, seperti ujian PISA dan Pertanyaan Kreatif (yang mengukur tinggi pemikiran, seperti analisis, sintesis, dan evaluasi), akan berfungsi untuk memotivasi sekolah dan murid untuk mencapai kompetensi berdasarkan pada standar internasional yang ada. Penelitian akan diperlukan untuk menentukan standar yang realistis untuk ditetapkan pada tingkat yang dapat menjamin pencapaian kompetensi yang lebih tinggi dari pada yang dibutuhkan oleh ujian nasional.

Praktek Pendanaan dan Akomodasi untuk Murid Kurang Mampu

Praktek pendanaan saat ini dimana orang tua dan stakeholder lainnya memberikan kontribusi mayoritas dana (68% vs 24% oleh tiga tingkatan pemerintah) harus dilanjutkan karena orang tua kaya tidak mengeluh tentang biaya masuk dan biaya bulanan yang tinggi. Namun, di beberapa tempat RSBI telah menjadi “berorientasi pasar” di mana sekolah memungut biaya sebanyak mungkin selama masih bisa ditanggung oleh pasar yang hasilnya adalah membuat RSBI hanya melayani orang kaya. Oleh karena itu, dianjurkan agar terdapat “batas atas” untuk pengenaan biaya untuk menjadi memberikan lebih banyak kesempatan kepada orang tua yang kurang mampu untuk mendaftarkan anak-anak mereka di RSBI. Tambahan dana pemerintah khusus untuk infrastruktur harus dihentikan sampai evaluasi rinci dibuat untuk menentukan secara lebih spesifik infrastruktur dan peralatan yang diperlukan agar dimungkinkan sekolah-sekolah RSBI mencapai suatu tingkat pengembangan kemampuan murid agar menjalani ujian nasional dengan baik maupun lulus ujian standar internasional pada tingkat yang akan ditentukan (lihat butir terakhir di atas). Setelah persyaratan mengajar dalam Bahasa Inggris dihapus, penilaian kebutuhan harus dilakukan untuk menentukan jenis dan kedalaman pelatihan Bahasa Inggris yang diperlukan untuk mengakses dan menggunakan bahan-bahan pendidikan internasional dalam Bahasa Inggris dan berkomunikasi dengan sekolah di luar negeri. Ini akan jauh lebih layak daripada mengharuskan pengajaran materi pelajaran yang kompleks dalam Bahasa Inggris.

Sementara itu, subsidi pemerintah pusat untuk RSBI akan dihentikan dalam waktu dekat, meskipun dana BOS akan berlanjut. Pemerintah provinsi harus didorong untuk mendukung RSBI dengan anggaran mereka. Peraturan Pemerintah (PP) 38/2009 jelas mendefinisikan beberapa tanggung jawab bagi pemerintah provinsi dan kabupaten untuk mendukung sekolah bertaraf internasional. Anggaran pemerintah kabupaten sangat terbatas dan sebagian besar dana digunakan untuk membayar gaji pegawai negeri dan guru, sedangkan pemerintah provinsi memiliki lebih banyak fleksibilitas dalam menyediakan dukungan keuangan RSBI untuk peralatan, pemeliharaan dan pelatihan guru.

Masalah utama yang harus diatasi adalah kurangnya kesempatan bagi anak-anak yang kurang mampu dan anak-anak dari strata sosial ekonomi bawah. Meskipun peraturan menetapkan sedikitnya 20% murid kurang mampu ditampung di sekolah-sekolah bertaraf internasional, data evaluasi menunjukkan bahwa rata-rata jumlah penerima beasiswa hanya sekitar 12%. Sanksi harus diberikan pada RSBI yang tidak memenuhi kuota ini. Kriteria 20% harus berlaku untuk kelas internasional di sekolah-sekolah yang melaksanakan kelas nasional maupun internasional. Hal itu mungkin membuat sekolah secara aktif merekrut murid tersebut, seperti yang disarankan oleh seorang pejabat tinggi yang mengelola RSBI. Subsidi harus cukup untuk menutup semua kebutuhan murid termasuk buku, seragam, dan kegiatan ekstra kurikuler.

Murid yang kurang mampu tidak hanya menghadapi hambatan keuangan untuk berpartisipasi dalam RSBI, tetapi juga hambatan akademik dan budaya. Secara umum, kinerja akademik anak dari kelompok sosial ekonomi bawah cenderung lebih rendah daripada anak dari kelompok sosial ekonomi tinggi. Agar memungkinkan bagi anak-anak untuk bersaing di sekolah RSBI mereka harus menerima materi perbaikan khusus, baik dalam bentuk voucher untuk menghadiri tutorial khusus (Bimbingan Belajar atau "Bimbel") atau materi tambahan lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan akademik mereka. Ada contoh yang baik dari praktek-praktek internasional, seperti diterapkan di Korea Selatan dimana pengelola RSBI dapat melihat proses bimbingan. Akhirnya, murid yang kurang mampu penerima subsidi dan perlakuan khusus mungkin menghadapi ejekan dari murid yang mampu. RSBI harus diminta untuk menyediakan beberapa bentuk kegiatan/program inklusi, harmonisasi, dan pelatihan kepekaan untuk mengatasi masalah ini.

Membuat Standar Akreditasi Baru

Temuan menunjukkan bahwa sekolah RSBI tidak mungkin mencapai status standar internasional dengan segera dan kemungkinan akan membutuhkan investasi yang cukup besar, baik dari pemerintah maupun masyarakat untuk mencapai hal ini. Pada saat yang sama, berdasarkan penilaian secara keseluruhan dari data kuantitatif dan kualitatif, Tim Evaluasi menyimpulkan bahwa sebagian besar RSBI memiliki potensi untuk mencapai kinerja yang lebih tinggi jika hambatan yang dijelaskan di atas dihapus, dan jika rekomendasi untuk masukan seperti dijelaskan di atas dilaksanakan. Oleh karena itu, kami merekomendasikan bahwa standar akreditasi baru harus diberlakukan yang mengakui orientasi (bukan standar) internasional yang menetapkan tingkat kinerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan Standar Nasional akreditasi "A". Hal ini akan melegalkan atau memvalidasi kelangsungan hidup RSBI sebagai sekolah khusus sekolah sambil mengakui mereka belum mencapai standar internasional, meskipun statusnya standar internasional tetap menjadi tujuan jangka yang sangat panjang.

Pengkayaan Praktek Manajemen, Supervisi dan Monitoring

Guna memungkinkan pengembangan kualitas di sekolah RSBI, sebuah perencanaan yang efisien dan efektif dan sistem penjaminan mutu harus diberlakukan. Sebuah kebijakan yang dimodifikasi untuk RSBI melalui peraturan menteri yang baru seperti dijelaskan di atas akan memerlukan peningkatan kapasitas para manajer dan pelaksana program di tingkat provinsi, kabupaten dan sekolah agar dapat memahami peraturan baru dan mendapatkan keterampilan yang diperlukan untuk memonitor dan mengevaluasi kemajuan dalam pemenuhan standar akreditasi baru seperti dijelaskan di atas dan bagaimana cara terbaik untuk menghubungkan sekolah-sekolah lain untuk mengakses prestasi yang telah dibuat oleh RSBI.

Investasi dalam Program Pengembangan Profesi Berkelanjutan yang Terkonsolidasi dan Koheren bagi Guru

Kunci peningkatan kualitas terletak pada guru dan kompetensi mereka untuk menerapkan dan mempraktikkan metode inovatif yang mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku murid yang diperlukan untuk mencapai suatu tingkat/kualitas yang tinggi. Agar peningkatan kualitas terjadi di sekolah SBI, guru dan kepala sekolah harus memimpin proses atau memfasilitasi praktek mengajar baik yang meliputi adopsi dan raktek metode baru, menemukan cara-cara untuk mengintegrasikan partisipasi murid dan TIK, merumuskan rencana pengembangan profesi guru berdasarkan kolaborasi dengan rekan-rekan, refleksi dan evaluasi diri, dan menemukan cara untuk menumbuhkan komitmen untuk secara teratur dan konsisten berbagi pengetahuan dan pengalaman praktis dengan rekan-rekan untuk perbaikan kualitas secara keseluruhan. Hal itu harus melibatkan dukungan dari semua murid, tidak peduli situasi keuangan atau latar belakang sosial mereka. Program tersebut harus terus-menerus, setiap hari, dengan tujuan menciptakan sekolah sebagai lingkungan belajar profesional.

Mengembangkan Program Kepemimpinan untuk Kepala Sekolah

Sekolah tidak dapat berubah tanpa kepala sekolah yang berdedikasi dan aktif. Penting bagi kepala sekolah untuk menyadari dan mempraktekkan metode kepemimpinan yang mencakup tujuan jangka panjang untuk pengembangan pribadi/profesional dan memungkinkan staf sekolah untuk mencapai tingkat yang tinggi.

Tidak Tercapainya Target Mengembangkan Sekolah Bertaraf Internasional di Empat Jenjang Pendidikan di Setiap Kabupaten/Kota

Dengan asumsi bahwa UU 20/2003 tidak berubah dalam waktu dekat, target membangun empat sekolah bertaraf internasional (masing-masing satu di empat jenjang) di setiap kabupaten/kota tetap berlaku. Pemetaan evaluasi terhadap RSBI yang ada menunjukkan bahwa 1.339 sekolah telah ditunjuk sebagai RSBI. Berdasarkan data pemetaan, terdapat 884 sekolah lainnya yang belum masuk dalam program untuk memulai perjalanan mencapai standar SBI. Tim Evaluasi merekomendasikan agar proses konsolidasi berlangsung di antara sekolah-sekolah RSBI yang ada saat ini seperti dijelaskan di atas, sementara target untuk memenuhi secara lengkap standar pemenuhan tetap berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan oleh karena itu agar waktu untuk mengembangkan sekolah yang tersisa ditunda untuk jangka waktu 1-3 tahun yang selama jangka waktu tersebut Kemendikbud akan melakukan penelitian intensif untuk menentukan sejauh mana kebijakan baru efektif dalam memperkenalkan praktik internasional terbaik dan dalam meningkatkan kinerja akademik murid. Pada akhir periode evaluasi suatu kebijakan akan dibuat apakah diputuskan (atau tidak diputuskan): (i) pemerintah memberi tambahan dukungan pada RSBI yang mencapai akreditasi standar baru guna memungkinkan mereka untuk terus mencapai standar SBI yang sebenarnya, (ii) membuat akreditasi baru sebagai tujuan akhir dan dengan demikian membatalkan klasifikasi “standar internasional” (misalnya, mengubah sebutan menjadi “referensi internasional”) dan dengan demikian membutuhkan perubahan terhadap UU 20/2003, (iii) pemerintah memberikan dukungan kepada 884 (atau mungkin lebih) sekolah lain untuk mencapai sekolah RSBI atau status akreditasi baru.

LAMPIRAN 1. KERANGKA ACUAN KERJA

Topik	: Evaluasi Sekolah Standar Internasional
Sumber Dukungan	: Kemitraan untuk Pengembangan Kapasitas dan Analisis Pendidikan (ACDP)
Metode Penyeleksian	: IDC – QCBS
Jangka Waktu Pekerjaan	: 5 Bulan
Mitra Pelaksana	: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Organisasi Peserta	: Asian Development Bank

I. Tujuan Pembangunan

1. Tujuan pembangunan dari Evaluasi Sekolah Standar Internasional (SSI) adalah untuk berkontribusi terhadap pencapaian menengah jangka panjang tujuan sosial dan ekonomi pembangunan nasional melalui pengembangan penyesuaian kebijakan, strategi, dan program-program untuk meningkatkan sekolah-tingkat kualitas pendidikan

II. Latar Belakang Strategis

2. Sekolah Standar Internasional pertama kali diizinkan di bawah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (20/2003). Undang-undang mengharuskan pemerintah pusat dan / atau pemerintah daerah harus membentuk 'satu sekolah bertaraf internasional' pada setiap tingkat pendidikan (SD, SMP, jenderal senior SLTA menengah dan kejuruan) di masing-masing kota / kabupaten. Hal ini ditegaskan dalam keputusan menetapkan Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada tahun 2005. Kedua sekolah negeri dan swasta dan madrasah dapat dipertimbangkan untuk status standar internasional.
3. Alasan utama yang diartikulasikan untuk pembentukan sekolah bertaraf internasional adalah untuk memberikan kontribusi untuk mencapai tujuan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memperkuat saing internasional. Saat ini adasekitar 1.300 sekolah bertaraf internasional yang mewakili sekitar 0,4% dari sekolah nasional. Dengan sekitar 500 kota/kabupaten ada kebutuhan tersirat untuk setidaknya 2.000 sekolah bertaraf internasional (meskipun ini tidak memperhitungkan sekolah beberapa kota/kabupaten). The Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2010-14 menetapkan target untuk membangun setidaknya satu sekolah standar utama internasional di 85% dari kota/kabupaten pada tahun 2014, dan 75% untuk SMP, dan 70% untuk baik umum dan kejuruan menengah atas.
4. Definisi dari sebuah sekolah bertaraf internasional diKementerian Pendidikan dan Kebudayaan pedoman adalah bahwa itu memenuhi semua Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan diperkaya dengan memperhatikan standar pendidikan salah satu negara anggota OECD dan/atau negara lain yang canggih seperti bahwa mencapai keunggulan kompetitif secara internasional'. Selain NSE pedoman menentukan standar kualitas lain yang harus dipenuhi, termasuk, antara lain, akreditasi oleh badan akreditasi di negara anggota OECD, kurikulum muatan setara atau lebih tinggi dari standar yang diajar kandi negara anggota OECD, penggunaan bahasa Inggris sebagai pengantar untuk ilmu pengetahuan, matematika dan mata pelajaran kejuruan dari kelas 4 sekolah dasar, kompetensi bahasa Inggris guru dalam mata pelajaran, kompetensi bahasa Inggris kepala sekolah, dan akseske sumber daya pembelajaran berbasis ICT.
5. Dalam prakteknya, kemajuan dalam mendirikan sekolah-sekolah bertaraf internasional yang memenuhi standar kualitas yang ditetapkan sangat bervariasi. Standar tertentu, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan kurikulum, proses belajar mengajar dan media pengajaran, sangat menantang untuk dicapai. Sebagai contoh, secara luas diakui bahwa kompetensi bahasa Inggris yang terbatas dari guru dan kepala sekolah menjadi penghalang yang cukup untuk menerapkan standar sebagai media pengajaran. Sebuah studi 2009 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada kompetensi bahasa Inggris guru di 549 sekolah internasional laporan standar

yang lebih dari setengah dari semua guru di evaluasi pada standar kompetensi terendah dari pemula dengan di bawah 1% memenuhi dua standar atas kompetensi lanjutan dan “kompetensi umum profesional”.

6. Tidak hanya sangat beragam sehingga tingkat kepatuhan terhadap standar tetapi juga interpretasi yang berbeda dalam prakteknya, bagaimana standar pendidikan internasional harus disampaikan, terutama sebagai kurikulum hal dan pengantar. Adalah umum bagi sekolah untuk menggunakan kurikulum asing dan/atau bahan pengajaran, terutama dalam bahasa Inggris, yang tidak sesuai dengan kurikulum nasional dan yang menciptakan kesulitan dalam mempersiapkan murid untuk ujian nasional (dalam Bahasa Indonesia)
7. Sekolah bertaraf internasional-baik negeri maupun swasta-menerima subsidi dari pemerintah jauh lebih besar dari pada yang diberikan kepada sekolah-sekolahlainnya, dan juga, pada umumnya, memerlukan kontribusi keuangan yang cukup besar dari orang tua/murid. Tidak mengherankan sekolah yang terpilih untuk status standar internasional, sebagian besar terletak di daerah begitu tinggi status sosial-ekonomi dan sebagian besar melayani murid dari keluarga kaya dengan kemampuan untuk membayar.
8. Daripada sekolah beroperasi sepenuhnya dengan standar internasional itu adalah umum bagi sekolah untuk mengoperasikan campuran kelas standar internasional bersama kelas reguler. Standar internasional kelas yang berlaku kelas khusus diuntungkan dari fasilitas yang lebih baik dan dukungan, dan membutuhkan sumbangan keuangan dari orang tua / murid (atau kontribusi yang lebih tinggi). Perbedaan karena itu jelas baik antara tetapi juga dengan di sekolah-sekolah dan kekhawatiran telah dikemukakan mengenai potensi sekolah bertaraf internasional untuk membuat dan / atau mengabadikan perpecahan sosial. Sementara itu sehingga tujuan mendirikan sekolah bertaraf internasional adalah untuk memberikan kesempatan bagi anak-anak dari latar belakang kaya kurang, dan beberapa sekolah yang menyediakan beasiswa, sejauh ini dalam praktek sangat terbatas dengan akses ke sekolah bertaraf internasional / kelas sebagian besar didasarkan pada kemampuan untuk membayar.
9. Dalam konteks ini ada cukup besar pada terjadi perdebatan mengenai sekolah bertaraf internasional. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Oleh karena itu berencana untuk melakukan evaluasi komprehensif yang akan digunakan untuk menentukan kebijakan masa depan dalam hal sekolah bertaraf internasional. Studi kritis akan memeriksa baik pemikiran dan pelaksanaan tanah modus sekolah berstandar internasional karakteristik yang spesifik dan pendekatan. Ini akan mencakup analisis efektivitas model dalam hal praktik pendidikan dan hasil, kelayakan pelaksanaan termasuk kapasitas, efisiensi, dan pertimbangan pendanaan, dan implikasi dalam hal keadilan sosial.
10. Evaluasi akan membangun penelitian pada Sekolah Standar Internasional dilakukan oleh Balitbang, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sebuah kebutuhan untuk ACDP untuk melengkapi penelitian ini telah diidentifikasi, khususnya untuk memberikan lebih komprehensif dan mendalam pengajaran (meskipun tidak terbatas pada) dan pembelajaran yang dituangkan dalam lingkup bekerja di bawah.

III. Hasil

11. Tujuan dari Evaluasi Sekolah Standar Internasional adalah untuk memberikan bukti, komprehensif berbasis, analisis situasi, evaluasi dan rekomendasi mengenai kebijakan dan praktek Sekolah Standar Internasional di Indonesia.
12. Hasil yang diharapkan adalah kebijakan sehingga lebih efektif dan strategi mengenai Sekolah Standar Internasional.

IV. Lingkup Pekerjaan

A. Fokus Teknis

13. Evaluasi akan membahas daerah / masalah yang diuraikan di bawah ini. Ini bukan daftar lengkap.
 - Pemetaan dan analisis status penyediaan pendidikan Sekolah Standar Internasional secara nasional, termasuk jumlah sekolah berdasarkan jenis, kelas, dan alokasi geografis, kota / desa, status sosial-ekonomi dari lokasi, pendaftaran di sekolah internasional kelas standar, dan informasi mengenai pendirian direncanakan sekolah berada.
 - Evaluasi kepatuhan / pencapaian standar yang ditentukan untuk Sekolah Standar Internasional termasuk Standar Nasional Pendidikan dan standar khusus tambahan untuk sekolah berstandar internasional. Evaluasi akan menggabungkan kedua evaluasi kuantitatif dan kualitatif (lihat poin di bawah) dan akan membahas bidang-bidang berikut:
 - o Medium instruksi
 - o Pelaksanaan Kurikulum
 - o Metodologi belajar mengajar
 - o Pengajaran dan bahan pembelajaran, termasuk bahan tambahan
 - o kualifikasi dan kompetensi kepala sekolah dan Guru (termasuk kompetensi dalam bahasa Inggris mana yang sesuai.)
 - o Guru profesional pembangunan (termasuk pelatihan bahasa Inggris / upgrade) Mahasiswa penilaian dan praktek pemeriksaan, termasuk hasil di mana fasilitas sekolah mungkin termasuk infrastruktur, furniture, perpustakaan dan peralatan, termasuk penggunaan ICT.
 - o Ketersediaan / penyediaan kegiatan ekstra kurikuler
 - o Sekolah praktik manajemen termasuk perencanaan, pelaporan, manajemen personalia, komite sekolah dan partisipasi masyarakat lainnya
 - o peran, sistem dan kapasitas pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah kabupaten untuk jaminan kualitas dan peraturan praktek pengawasan standar Sekolah
 - o analisis pembiayaan Sekolah, termasuk sumber-sumber keuangan, dana hibah, biaya / kontribusi, struktur biaya, biaya unit, termasuk analisis komparatif dengan jenis lain dari sekolah
 - o analisis belanja publik di tingkat pusat dan kabupaten termasuk analisis tingkat subsidi, efisiensi, efektivitas biaya dan isu-isu keberlanjutan
 - o Penggunaan dan pemerataan beasiswa (atau mekanisme lainnya) untuk pendaftaran mahasiswa dari latar belakang keluarga miskin atau kurang kaya.
 - Tingkat Evaluasi Sekolah juga harus mencakup analisis status sekolah terhadap mutu pendidikan lainnya monitoring / evaluasi instrumen, khususnya dalam akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah (Sekolah Standar Internasional harus mencapai peringkat A), tetapi instrumen lainnya juga berlaku, misalnya NSE pemantauan oleh BSNP, Sekolah Evaluasi Diri
 - Dalam konteks analisis di atas, evaluasi kebijakan Standar Internasional sentral Sekolah dan kerangka peraturan termasuk pemikiran dan pedoman spesifik dan sistem.
14. Di luar analisis di atas evaluasi akan memberikan rekomendasi mengenai kebijakan Sekolah Berstandar Internasional dan implementasi.

15. Evaluasi harus memperhitungkan internasional yang relevan 'baik' praktek dan pelajaran dari negara lain. Secara khusus evaluasi harus mempertimbangkan penelitian rekening pendidikan internasional dan bukti tentang pengantar

Anggota Tim	Orang Bulan
Pimpinan Tim / Pakar Kualitas Pendidikan(Internasional)	5
Pakar Pendidikan (Nasional)	5
Spesialis Pembiayaan Pendidikan (Nasional)	5
Analisis Data (Nasional)	5
Total	20

B. Ruang Lingkup Bantuan dan Batas Waktu

16. Studi ini akan dilaksanakan oleh tim konsultan yang terdiri dari personil berikut:
 17. Tim konsultasi akan terdiri dari tiga konsultan nasional dan pimpinan satu tim internasional / konsultan (fasih berbahasa Inggris lisan dan tertulis).

Kegiatan	Batas Waktu
Start-up	Juni
Awal Konsultasi di Jakarta, Desain dari Rencana dan Metodologi Penelitian	Juni
Penyampaian Laporan Pendahuluan termasuk Rencana Penelitian	Juli
Bidang Penelitian dan konsultasi yang sedang berlangsung di Jakarta	Agustus
Penyampaian Laporan Draft Evaluasi / Laporan Interim	September
Lokakarya Konsultasi Nasional	
Oktober	
Penyampaian Laporan Lokakarya Konsultasi	Oktober
Finalisasi dari Laporan Evaluasi	Oktober

18. Konsultasi akan dilaksanakan pada awal tahun 2012 selama lima bulan. Kerangka waktu indikatif adalah sebagai berikut:
19. Evaluasi akan mengadopsi pendekatan penelitian yang komprehensif menggabungkan berbagai metodologi kuantitatif dan kualitatif. Hal ini dipertimbangkan bahwa penelitian akan mencakup, tetapi tidak terbatas pada, tipe-tipe berikut:
- Evaluasi mendalam kualitatif melalui kunjungan ke minimal 100 Sekolah Standar Internasional. Ini akan mencakup observasi kelas, wawancara, metode partisipatif, analisis pemangku kepentingan, studi kasus, dan penilaian organisasi / kapasitas.
 - Survei kuesioner kepada seluruh Sekolah Standar Internasional untuk analisis kuantitatif dan statistik, dan analisis dasar lainnya
 - Pengumpulan data, analisis dan wawancara dengan memilih dinas pendidikan provinsi dan kabupaten, departemen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan instansi terkait lainnya, contoh : BSNP, BAN-SM
20. Pemilihan untuk kunjungan sekolah harus memastikan cakupan luas proporsional mewakili tingkat dan jenis sekolah, dan alokasi geografis, dan pemilihan sampel harus acak. Metodologi survei, pendekatan sampling, instrumen survei dan perkiraan anggaran rinci untuk survei akan ditinjau dalam konsultasi dengan instansi Pengguna, Sekretariat ACDP dan ADB. Dukungan dana atau survei akan diberikan sebagai jumlah sementara dalam kontrak. Peneliti nasional tambahan mungkin diusulkan untuk membantu kegiatan melakukan penelitian lapangan.
21. Penyisihan partisipasi staf Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selektif dalam penelitian lapangan juga harus diusulkan untuk tujuan memfasilitasi kepemilikan dan membangun kapasitas. Aspek-aspek ini akan dirinci dan dibenarkan dalam Rencana Penelitian dikembangkan

selama awal dan dimasukkan dalam Laporan Pendahuluan.

22. Konsultasi khusus juga akan digelar dengan tim lain yang didukung ACDP konsultasi dan berbagi informasi, seperti yang diperlukan, untuk memastikan hubungan yang efektif dan berbagi informasi antara kegiatan terkait

V. Penyampaian/Penyerahan Output

23. Hasilnya akan menjadi sebagai berikut:
 - Laporan awal termasuk rencana dan desain penelitian
 - Draft Laporan Evaluasi / Laporan Interim
 - Laporan Evaluasi Akhir termasuk Laporan Lokakarya Konsultasi Nasional

VI. Manajemen dan Pengaturan Pelaporan

24. Tim konsultan akan dipandu oleh:
 - Kepala Pusat Penelitian Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
25. Kepala Pusat Penelitian Kebijakan akan membentuk kelompok teknis kecil dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (dengan partisipasi dari kementerian lain / departemen jika diperlukan) untuk memantau dan mengawasi kemajuan konsultasi tersebut. Kelompok teknis akan difasilitasi oleh ACDP dan tim konsultan akan melaporkan kemajuan untuk pertemuan kelompok teknis yang diperlukan.
26. Selain itu, Kepala Pusat Penelitian Kebijakan (juga Manager Program ACDP) dengan dukungan dari Sekretariat ACDP akan mengadakan rapat koordinasi khusus menyatukan tim konsultasi dan / atau departemen teknis / lembaga dari kegiatan ACDP lain yang didukung untuk tujuan pemantauan kemajuan, berbagi informasi, dan memfasilitasi hubungan yang efektif antara kegiatan terkait.
27. Tiga puluh (30) rangkap (dengan CD) dari masing-masing dokumen output dalam versi draft dan final akan disampaikan dalam format Word ke agen pengguna utama (Kepala Pusat Penelitian Kebijakan, Balitbang), lima (5) eksemplar (dengan CD) akan diserahkan kepada Manajer Program ACDP / Sekretariat, dan lima (5) salinan (dengan CD) akan diserahkan kepada Spesialis Sektor Sosial (Penanggulangan Kemiskinan) Misi rumah tinggal ADB di Indonesia. Pusat Penelitian Kebijakan, Balitbang, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui konsultasi dengan Manajer Program ACDP akan bertanggung jawab untuk meninjau laporan akhir.
28. Manager Program ACDP (mewakili Badan Pelaksana) dan ADB akan bertanggung jawab untuk persetujuan akhir dari semua laporan.
29. Kepala Pusat Penelitian Kebijakan akan menunjuk anggota staf untuk membantu koordinasi kerja tim. Ini akan mencakup pemberian bimbingan pada orang-orang yang harus dipenuhi, lokasi untuk kunjungan lapangan, perencanaan lokakarya konsultasi, membantu dengan mengakses dokumentasi yang sesuai dan berpartisipasi dalam kunjungan lapangan dan pertemuan teknis.

VII. Konsultasi, Sosialisasi, Diseminasi dan Tindak Lanjut

30. Konsultasi yang luas akan dilakukan untuk mengembangkan evaluasi. Minimal, tim konsultan akan memastikan konsultasi dengan lembaga-lembaga pemerintah pusat dan mitra pembangunan, di Jakarta:
 - Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat jenderal yang relevan dan departemen / pusat, termasuk Direktorat Sekolah Dasar, Direktorat Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Sekolah Menengah, Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan Senior, Direktorat Jaminan Mutu Pendidikan, Direktorat untuk Guru dan pendidikan Tenaga, Pusat Penelitian Kebijakan, Pusat Kurikulum dan Buku teks, Pusat Penilaian pendidikan, Pusat Data Statistik pendidikan dan (Balitbang)
 - Departemen Agama, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Direktorat Pendidikan Madrasah

- dan departemen terkait lainnya.
 - Bappenas, Direktorat Agama dan Pendidikan
 - Badan Standar Nasional Pendidikan
 - Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah
 - Asian Development Bank, AusAID, Uni Eropa, Bank Dunia dan mitra pembangunan lainnya yang diperlukan
31. Menurut kebutuhannya mungkin tepat untuk berkonsultasi dengan departemen pemerintah lainnya, Departemen Keuangan.
32. Pada regional dan tingkat sekolah tim konsultan akan memastikan konsultasi dengan pihak-pihak sebagai berikut:
- Provinsi dan dinas pendidikan kabupaten dari kedua Kepala Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kemenag, guru dan personil sekolah lainnya.
 - Orang tua dan anggota masyarakat
 - badan / organisasi pendidikan lain terkait
33. Pemangku kepentingan lainnya akan dikonsultasikan sebagaimana diperlukan, misalnya, universitas fakultas yang bertanggung jawab untuk pelatihan guru, non-pemerintah organisasi yang terlibat dalam pendidikan.
34. Setelah produksi Laporan Evaluasi Draft, Lokakarya Konsultatif Nasional akan diadakan di Jakarta untuk mempresentasikan temuan dan rekomendasi, serta meminta komentar untuk memberi masukan ke revisi laporan. Orang yang akan diundang untuk Lokakarya Konsultasi Nasional akan disepakati dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tersebut, secara luas mencerminkan daftar dalam paragraf 31 dan 33 di atas.
35. Setelah laporan disetujui, baik rancangan dan laporan akhir akan diberikan kepada peserta konsultasi dan peserta lokakarya konsultasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mungkin setuju untuk mengedarkan dokumen lebih luas ke pihak yang berkepentingan.
36. Manajer Program ACDP / Sekretariat, melalui konsultasi dengan mitra pelaksana, akan setuju, merencanakan dan melaksanakan sosialisasi lebih lanjut dan diseminasi hasil penelitian dan rekomendasi. Ini mungkin termasuk produksi ringkasan kebijakan, diseminasi melalui ACDP dan / atau situs web Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dimasukkan dalam jurnal ACDP, presentasi di konferensi / seminar ACDP.

VIII. Konsultasi Profil yang Diperlukan

37. Tim secara keseluruhan akan memiliki pengalaman substansial peningkatan pendidikan sekolah tingkat kualitas termasuk pelaksanaan kurikulum, pengajaran dan pembelajaran, dan manajemen sekolah, dan pemahaman spesifik dan pengetahuan tentang sistem sekolah Indonesia, dan keterampilan menulis laporan yang sangat baik.
38. Pimpinan Tim / Ahli Kualitas Pendidikan (International) akan memiliki kualifikasi sebagai berikut, keterampilan dan pengalaman:
- Gelar Master di bidang pendidikan, atau daerah terkait;
 - Minimal 5 tahun pengalaman sebagai Pimpinan Tim dalam tugas konsultasi pengembangan;
 - Berpengalaman dalam merancang dan mengelola penelitian pendidikan / evaluasi;
 - Setidaknya 10 tahun pengalaman internasional yang berkaitan dengan:
 - o Pendidikan undang-undang / peraturan yang terkait dengan pendidikan tingkat sekolah;
 - o pendidikan sistem jaminan mutu, dan
 - o tingkat sekolah kurikulum, pengajaran dan pembelajaran, penilaian dan manajemen.
 - o keterampilan menulis laporan sangat baik.
39. Ahli Pendidikan (Nasional) akan memiliki kualifikasi sebagai berikut, keterampilan dan pengalaman:
- minimal gelar Master di bidang pendidikan, atau daerah terkait; Setidaknya 10 tahun pengalaman dalam kerjasama pembangunan;

- berpengalaman dalam merancang dan mengelola penelitian pendidikan / evaluasi, pengalaman Substansial pendidikan strategi peningkatan kualitas sekolah tingkat, misalnya berkaitan dengan kurikulum, pengajaran dan pembelajaran, penilaian, dan manajemen sekolah;
 - Pengalaman Spesifik media isu instruksi;
 - Pengalaman dalam pembiayaan tingkat sekolah ;
 - keterampilan menulis laporan termasuk penyelesaian survei kompleks dan evaluasi, dan
 - Pengalaman dari sistem pendidikan Indonesia
40. Spesialis Pendidikan Keuangan (Nasional) akan memiliki kualifikasi sebagai berikut, keterampilan dan pengalaman:
- Minimal gelar Master di bidang yang relevan;;
 - Sekurangnya 10 tahun pengalaman di bidang analisis keuangan
 - Berpengalaman dalam sistem pendidikan Indonesia dan pendidikan keuangan dan analisis data.
41. Analis Data (Nasional) akan memiliki kualifikasi sebagai berikut, keterampilan dan pengalaman
- Minimal gelar Master di bidang statistik atau bidang analisis kuantitatif;
 - Pengalaman signifikan yang berkaitan dengan analisis data survei dan data Pemerintah Indonesia untuk pendidikan atau sektor sosial yang terkait, dan
 - keterampilan dalam analisis dan penyajian data statistik, termasuk pemetaan informasi geografis

LAMPIRAN 2. PERATURAN DAN REGULASI YANG MENGATUR SSI

Pengembangan program SBI di Indonesia berdasarkan peraturan perundangan-undangan sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
- c) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah,
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar nasional Pendidikan,
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,
- f) Peraturan pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan,
- g) Peraturan pemerintah Nomor 78 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional pada Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Jo PP. Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
- i) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Rencana kerja Pemerintah Tahun 2011
- j) Peraturan Menteri Pendidikan nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah,
- k) Peraturan menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan,
- l) Peraturan menteri Pendidikan nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI
- m) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Betaraf Internasional Pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah,
- n) Peraturan menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014, dan
- o) Rencana Strategis Direktorat jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan menengah, Departemen Pendidikan nasional Tahun 2010-2014.

LAMPIRAN 3. KRITERIA PEMENUHAN STANDAR SBI

INDIKATOR	KRITERIA	CATATAN
Akreditasi	i. Terakreditasi "A" dari BAN ii. Tambahan Akreditasi dari negara OECD atau negara maju lainnya	
Kurikulum dan Kompetensi Lulusan	i. Adopsi Kurikulum dari Negara Lain ii. Rataan hasil UAN 7.0 untuk RSBI dan 8.0 untuk SBI	
Proses Belajar Mengajar	i. Adopsi Metode Belajar-Mengajar dari Negara lain ii. Sekolah lain menggunakan SSI sebagai referensi iii. Penggunaan Bahasa Inggris atau Bahasa Asing Lain untuk mata ajaran tertentu sejak Kelas 4	
Evaluasi	i. Menggunakan standard evaluasi dari negara OECD atau negara maju lainnya	Penggunaan portfolios sebagai bagian proses evaluasi
Kualifikasi Guru	i. Minimum S2/S3: 10% (SD), 20% (SMP), 30% (SMA / K) ii. Mampu menggunakan ICT dalam mengajar	
Kualifikasi Kepala Sekola	i. Minimum S2/S3 ii. Mampu secara aktif berbahasa asing	
Infrastruktur	i. Infrastruktur ICT tersedia di setiap kelas ii. Perpustakaan dengan Fasilitas ICT/Perpustakaan Digital	
Manajemen	i. Terdapat hubungan resmi dengan Sister School yang ada di Indonesia atau negara maju ii. Memiliki Sertifikat ISO 9001 versi 2000 atau yang terbaru, dan ISO 14000	
Pembiayaan	i. Menerapkan Administrasi Keuangan yang transparan dan akuntabel ii. 20% dari Murid Miskin dan menerima bantuan/beasiswa	

LAMPIRAN 4. ISU YANG MUNCUL DARI EVALUASI

NO.	ISU	IMPLIKASI	INDIKATOR YG MEMUNGKINKAN
1.	Kurangnya kejelasan definisi " Standard Internasional "	Tidak ada patokan yang solid untuk evaluasi ISS; Berbeda interpretasi di kalangan sekolah-sekolah; Kurangnya kontrol oleh masyarakat (termasuk orang tua) terhadap kinerja sekolah	Pemahaman yang baik antara pemerintah, sekolah dan orang tua pada definisi
2.	Kebijakan kejelasan tentang kurikulum standar internasional	- Disparitas yang luas untuk kurikulum internasional yang diadopsi sekolah; - Mengurangi konsistensi antar-sekolah	- Ketersediaan dokumen kurikulum resmi internasional; - Implementasi kurikulum internasional di tingkat sekolah; - Pengetahuan pada kurikulum internasional antara pemerintah dan sekolah;
3.	Guru dengan keterampilan 'pedagogis untuk pendekatan partisipatif	- kurikulum internasional tidak dapat disampaikan dengan baik kepada murid; - Prestasi dari ISS untuk aspek pedagogis;	- Mengajar kegiatan di kelas; - peningkatan terhadap nilai ujian murid;
4.	Kualifikasi akademik guru	- Isi kurikulum internasional tidak dapat disampaikan dengan baik; - Prestasi dari ISS untuk aspek pedagogis;	Hasil tes akademik bagi guru;
5.	Pendanaan untuk pengembangan profesional	- Pendanaan yang tersedia di tingkat sekolah tidak cukup; - Sekolah bergantung pada pendanaan eksternal untuk pengembangan profesional;	- Alokasi anggaran untuk pengembangan profesional (di semua tingkat pemerintahan dan di tingkat sekolah); - Frekuensi pelatihan yang dilakukan oleh instansi terkait; - Frekuensi partisipasi dalam pelatihan profesional;
6.	Lemahnya kompetensi bahasa Inggris untuk kepala sekolah & guru ISS	- Sekolah gagal untuk membangun sebuah jaringan internasional; - Isi kurikulum internasional tidak dapat disampaikan dengan baik; - Murid tidak memahami dengan baik apa yang guru berikan;	- Penggunaan bahasa Inggris dalam kegiatan mengajar di kelas; - Pemahaman murid pada isi yang disampaikan oleh guru dalam bahasa Inggris; Hasil uji murid (dalam bahasa Inggris);
7.	Relevansi skor tes standar Inggris Internasional pada kemampuan untuk mengajar mata pelajaran tertentu dalam bahasa Inggris	nilai ujian bahasa Inggris gagal untuk mendeteksi masalah bahasa Inggris di antara guru;	Hasil Score Bahasa Inggris; Penggunaan Bahasa Inggris pada aktivitas mengajar di dalam kelas;

8.	Transparansi keuangan	Sulit untuk mengontrol salah urus dan penipuan; Sekolah gagal untuk membuktikan bahwa mereka menggunakan dana dengan benar;	sistem pelaporan keuangan yang berjalan; Peran komite sekolah dan orang tua dalam mengontrol praktek keuangan sekolah;
9.	Hubungan antara ISS & SBM	- ISS tidak melaksanakan MBS dengan baik; - ISS tidak dikelola dengan baik;	- Keberadaan dan fungsi komite sekolah; - Keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam pengelolaan sekolah dan proses belajar mengajar;
10.	pemantauan kepatuhan	- Pemantauan ISS tidak dilakukan dengan baik; - Prestasi ISS tidak dimonitor dengan baik; - Dampak yang tidak diinginkan dari ISS tidak dimonitor dengan baik;	- Pemantauan sistem ISS yang sudah ada; - Pelaksanaan sistem pemantauan ISS yang sudah ada;
11.	Batas waktu pada pendanaan program	Sekolah masih tidak dapat membiayai sendiri setelah program berakhir;	Kemampuan sekolah untuk memobilisasi dana non-pemerintah;
12.	Frekuensi perubahan staf	- Kurangnya pemahaman terus-menerus pada pejabat pemerintah terhadap isu ISS; - kurangnya pemahaman terhadap ide dasar dari program ISS;	pengetahuan Pejabat pemerintah dan pemahaman tentang konsep ISS;
13.	Konflik antara murid ISS dan murid reguler	Lingkungan pembelajaran yang tidak baik;	tanggapan Guru dan murid terhadap keberadaan kelas internasional di sekolah mereka;
14.	Pengaruh meritokrasi masuk pada kebijakan ekuitas	Sekolah gagal untuk merekrut murid dari keluarga miskin;	proses seleksi murid / sistem yang sudah ada ; Jumlah dan proporsi murid miskin;
15.	Kesulitan merekrut murid yang berpenghasilan rendah	Tidak dapat memenuhi kuota sebesar 20%;	proses seleksi murid / sistem yang sudah ada ; Jumlah dan proporsi murid miskin;
16.	Komunikasi kebijakan / jalan akses kepada masyarakat	- Kebijakan tersebut tidak terinformasikan dengan baik; - Tidak dapat memenuhi kuota sebesar 20%;	- Jumlah dan proporsi murid miskin; - Pengetahuan tentang kebijakan akses antara pemerintah, sekolah pejabat dan orang tua;
17.	Persaingan antara sekolah bagi murid miskin	Sekolah gagal untuk merekrut murid dari keluarga miskin;	Jumlah dan proporsi murid miskin;
18.	kejelasan Kebijakan tentang pedoman mitra internasional	- praktek yang berbeda antar sekolah dalam mengembangkan jaringan internasional; - Jaringan internasional dibangun, tapi tidak ada implikasi terhadap kualitas sekolah;	- Keberadaan jaringan internasional; - Sifat jaringan internasional yang dikembangkan oleh sekolah;
19.	Faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi kemampuan sekolah untuk menarik murid berpenghasilan rendah	Tidak dapat memenuhi kuota sebesar 20%;	Jumlah dan proporsi murid miskin;

LAMPIRAN 5. DESAIN STUDI EVALUASI DAN RENCANA KERJA MAKSUD DARI EVALUASI

Evaluasi Sekolah Standar Internasional dimaksudkan untuk melakukan analisis situasi Sekolah Standar Internasional (RSBI) guna mendapatkan wawasan dan pemahaman tentang isu-isu kunci dan faktor kausal dalam kebijakan dan lingkungan praktek dalam rangka pembuatan rekomendasi yang informatif untuk penyesuaian kebijakan dan perbaikan program.

TUJUAN EVALUASI

- 1) Mendapatkan data kuantitatif yang valid dan dapat diandalkan untuk membangun analisis situasi program RSBI dalam hal kepatuhan sekolah, perubahan sejarah, dan perbandingan dengan sekolah non-SSI
- 2) Menugaskan Tim Studi Lapang melakukan survey random sampling terhadap minimal 70 RSBI dan 8 non-RSBI untuk secara akurat melaksanakan pengamatan dan pencatatan dan wawancara mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder)
- 3) Memperoleh data kualitatif yang valid dan dapat diandalkan dalam upaya mendapatkan informasi tentang alasan kausal yang mendasari isu-isu kunci untuk membuat rekomendasi yang informatif tentang kebijakan dan praktek untuk penyesuaian kebijakan dan perbaikan kualitas program
- 4) Melaksanakan wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan di tingkat Provinsi dan Kabupaten untuk mendapatkan wawasan tentang interpretasi kontekstual kebijakan, praktek pelaksanaan, dan data mengenai keseluruhan kapasitas organisasi yang RSBI
- 5) Membangun kapasitas di Pusat Penelitian Kebijakan (Balitbang) dengan menyertakan counterpart dalam kegiatan studi lapangan.

PERTANYAAN-PERTANYAAN KUNCI

- 1) Apakah status saat ini dari semua sekolah RSBI?
- 2) Apa alasan yang mendasari isu-isu kunci yang berkaitan dengan kepatuhan?
- 3) Apa alasan yang mendasari isu-isu kunci yang berkaitan dengan peningkatan kualitas?
- 4) Interpretasi kebijakan apa dan praktik organisasi yang bagaimana yang mendasari isu-isu pelaksanaan RSBI?
- 5) Apakah hambatan akhir, tantangan, dan kesenjangan untuk pencapaian visi RSBI?

METODOLOGI DAN RUANG LINGKUP

Tiga kegiatan akan termuat dalam Evaluasi Sekolah Standar Internasional:

- 1) Survei Cepat Sekolah Standar Internasional
- 2) Studi Lapang
- 3) Wawancara pemangku kepentingan/stakeholder

SURVEI CEPAT RSBI

Maksud Survei Cepat RSBI

Survei Cepat RSBI dimaksudkan untuk mendapatkan informasi profil untuk semua Sekolah Standar Internasional guna memberi pemahaman yang lebih baik tentang status program.

Tujuan Khusus Survei Cepat RSBI

Tujuan Khusus Survei Cepat RSBI adalah:

- 1) Untuk memperbaharui dan verifikasi data profil sekolah seluruh RSBI
- 2) Untuk membuat suatu basis data informasi kepatuhan dan pencapaian seluruh RSBI
- 3) Untuk membuat suatu peta dan bagan RSBI yang menyajikan informasi profil dan pengambilan keputusan yang informatif.

Survei Cepat RSBI merupakan survey terpusat ke seluruh RSBI dengan menggunakan kuesioner singkat untuk mendapatkan data dasar mengenai sekolah dan situasinya terkait dengan persyaratan RSBI.

Metode dan Lingkup Survei Cepat RSBI

Survei Cepat RSBI akan menjadi suatu survei kuantitatif yang dilakukan terpusat, dari kantor Trans Asia Intra. Metode ini memungkinkan untuk semua jenis sekolah RSBI-SD, SMP, SMA, SMK, MA, Umum & Swasta-dihubungi melalui telepon, fax, email dan/atau surat biasa untuk mengirim dan mengadministrasikan kuesioner survei. Kuesioner akan mencakup data dasar sekolah, guru, dan informasi murid. Pertanyaan-pertanyaan juga akan mencakup informasi status yang berkaitan dengan sejarah RSBI dan kepatuhan termasuk data: pedoman kepatuhan yang diadopsi, lulusan, penilaian murid, praktek ujian, fasilitas, ICT, manajemen sekolah, media pengajaran, kurikulum, dll Enumerator dari lulusan sarjana akan dipekerjakan dan dilatih oleh Ahli Analisis data untuk melakukan survei dan memasukkan data.

Ahli Analisis Data akan:

- Mendukung Tim Evaluasi untuk mengidentifikasi calon enumerator yang berkualitas
- Mensupervisistaf TIA dan/atau staf sementara untuk menyelesaikan daftar nomor telepon semua sekolah
- Mengembangkan protokol pelatihan untuk enumerator
- Mengembangkan naskah untuk kontak awal melalui telepon
- Mengembangkan skema coding untuk kuesioner dengan bantuan dari Tim Evaluasi
- Mengembangkan table untuk entri data
- Melaksanakan kontrol kualitas
- Mensupervisi disagregasi data untuk analisis oleh Tim Evaluasi

Metode Pengumpulan Data Survei Cepat RSBI:

Seluruh sekolah akan disurvei dengan menggunakan kuesioner. Sekolah akan diminta untuk menyediakan data dari Semester 1 tahun 2011-2012. Tabel berikut meringkas metode dalam urutan preferensi:

METODE	PENGIRIMAN KUISIONER	PENGEMBALIAN KUISIONER
Kontak Awal	Kontak awal akan dilakukan melalui telepon ke semua sekolah untuk menginformasikan survei, dan konfirmasi metode pengiriman kuesioner	Semua sekolah akan ditelepon untuk memeriksa apakah mereka telah menerima kuesioner dan memberikan batas waktu 2 hari untuk pengisian.
Metode 1	Fax	Wawancara telepon
Metode 1	Email	Wawancara telepon
Metode 2	Pos	Wawancara telepon
Tindak Lanjut	Tindak lanjut melalui telepon akan dilakukan jika diperlukan	

Manajemen Data dan Analisis Survei Cepat RSBI

Ahli Analis Data akan membuat table basis data untuk tujuan entri dan pengelolaan data. Pengodean dari pertanyaan survei akan dilakukan oleh Tim Evaluasi di bawah supervise Ahli Analis Data. Kepatuhan, sejarah, dan analisis komparatif akan dilakukan melalui korelasi dengan situasi demografis.

Kontrol Kualitas Survei Cepat RSBI

Semua sekolah akan disurvei. Ahli Analisis data akan melakukan uji petik, tindak lanjut telepon ke sekolah untuk tujuan kontrol kualitas.

SURVEI LAPANG

Tujuan Survei Lapang

Tujuan Studi Lapang adalah untuk memperoleh data kuantitatif dan kualitatif yang mendalam, valid dan reliabel dari sampel RSBI yang representatif untuk mendapatkan wawasan dan pemahaman tentang isu-isu kunci dan penyebab yang mendasari guna pembuatan rekomendasi yang informatif untuk penyesuaian kebijakan dan perbaikan program.

Tujuan Khusus Survei Lapang

Tujuan Khusus Survei Lapang adalah:

- 1) Menugaskan Tim Studi Lapang untuk melaksanakan survey sampling acak minimal terhadap 100 RSBI dan 30 dari non-RSBI guna melaksanakan secara akurat pengamatan dan pencatatan dan wawancara mendalam dengan berbagai stakeholder (pemangku kepentingan);
- 2) Memperoleh data kualitatif yang valid dan dapat diandalkan dalam rangka untuk mendapatkan informasi tentang alasan kausal yang mendasari isu-isu kunci untuk membuat rekomendasi informatif terhadap penyesuaian kebijakan dan perbaikan kualitas program berdasarkan dari kedua jenis data kuantitatif dan kualitatif
- 3) Melaksanakan wawancara pemangku kepentingan tingkat Provinsi dan Kabupaten untuk memberikan pemahaman dan data kapasitas organisasi secara keseluruhan yang mendukung RSBI
- 4) Membangun kapasitas di Pusat Penelitian Kebijakan (Balitbang) dengan menyertakan counterpart dalam studi lapangan.

Sampel Studi Lapang

Sebuah sampel acak dari 72 RSBI dari semua jenis sekolah -SD, SMP, SMA, SMK, MA, negeri dan swasta plus 8 sekolah non-RSBI sebagai kelompok pembanding, dipilih untuk dikunjungi dan untuk observasi sekolah/kelas observasi dan wawancara mendalam dengan kepala sekolah, guru, murid, komite sekolah, dan orang tua dan anggota masyarakat lainnya. Sebelum pengambilan sampel Kabupaten dengan > 2 RSBI (245) dikelompokkan menjadi tiga kelompok demografis: Kota Besar > 2.000.000, Kota Kecil <1.000.000, dan Kabupaten. Hasilnya adalah sampel yang proporsional di 6 Kota Besar, 6 Kota Kecil, dan 9 Kabupaten. Sekolah RSBI kemudian dipilih secara proporsional dalam Kabupaten masing-masing. Sampel didistribusikan lebih dari 12 Provinsi.

Seleksi Sampel Pembanding

Sampel yang akan menjadi pembanding berasal dari sekolah non-RSBI yang dipilih secara non-acak yakni sekolah dengan reputasi baik sebagai sekolah berkualitas sehingga dimungkinkan untuk membandingkan ukuran-ukuran kualitas RSBI dengan non-RSBI dengan kualitas output yang sama. Alasan penggunaan pemilihan non-acak ini adalah untuk menggali lebih dalam apa yang membuat sekolah berkualitas tidak terkait dengan RSBI, dan kemudian bisa membangun analisis perbandingan antara peubah prediktor RSBI dengan peubah respon RSBI. Kita kemudian dapat lebih yakin bahwa perbedaan antara sekolah kemungkinan akan terkait dengan status RSBI mereka (atau status non-RSBI), dan tidak lain, faktor yang tidak dapat dikendalikan.

Pembuatan Kerangka Sampel Sekolah dan Rincian Nomor Kontak

Sebelum Studi Lapangan, Tim Evaluasi akan menggunakan data yang ada, dan data dari hasil survei telepon RSBI yang telah dilakukan lebih awal, untuk kemudian mengkompilasi sebuah daftar dari semua sekolah RSBI dengan rincian kontak saat ini.

Metode Pengumpulan Data

Tiga jenis metode yang akan digunakan untuk mengumpulkan data selama Studi Lapangan: 1) Survei Sekolah, 2) Pengamatan Sekolah & Kelas, dan 3) Wawancara Mendalam. Sebuah kuesioner Survei Sekolah akan dibuat oleh tim untuk mengumpulkan informasi kuantitatif untuk menginformasikan analisis situasi Sekolah Standar Internasional. Pengamatan Sekolah akan dilakukan oleh tim dengan mengamati keberadaan dan kondisi keseluruhan fasilitas sekolah. Sesi kelas akan diamati menggunakan metode survey pengamatan-langsung, di mana perilaku guru dan murid selama jam pelajaran dicatat untuk mendapatkan “profil” lingkungan belajar (lihat di bawah). Wawancara mendalam akan dilakukan oleh tim untuk memperoleh data kualitatif dari para pemangku kepentingan kunci seperti kepala sekolah, guru, murid, komite sekolah, dan orang tua.

Perancangan dan Menguji Instrumen Survei

Tim Evaluasi akan merancang dan memodifikasi instrumen yang ada untuk Evaluasi. Masalah-masalah utama yang diidentifikasi selama periode awal memberikan dasar untuk merancang pertanyaan yang lebih dalam yang akan terdiri dari survei kualitatif. Instrumen survei kuantitatif untuk observasi langsung sekolah dan kelas disediakan oleh masing-masing direktorat untuk digunakan sebagai dasar, namun, karena adanya kemungkinan variasi latar belakang dan pengalaman Tim Studi Lapangan, observasi kelas akan disimpan menggunakan metode “langsung”, di mana perilaku guru dan murid dicatat, bukan khusus membuat peringkat perilaku individu guru. Metode-langsung memungkinkan bagi pengamat untuk menunjukkan perilaku guru dan murid selama pelajaran di kelas. Metode-langsung akan memungkinkan untuk analisis faktor seperti waktu yang dihabiskan mengajar, waktu yang digunakan murid untuk bekerja dalam kelompok atau bekerja secara individual, yang dapat dikorelasikan dengan kompetensi mengajar. Juga, kuesioner wawancara terstruktur akan dikembangkan untuk wawancara petugas Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten yang difokuskan pada tantangan organisasi. Instrumen-instrumen tersebut akan diuji, diperbaiki, dan diuji kembali di sekolah SSI non-sampel di Jakarta.

Pengkodean Pertanyaan

Setiap pertanyaan survei akan diberi kode berdasarkan pada domain evaluasi dan tema yang dirinci dalam Laporan Pendahuluan proyek (Lihat Matrix Evaluasi pada Lampiran 3 terlampir). Pengkodean akan memungkinkan untuk memudahkan disagregasi dan perbandingan. Pengkodean tertutup akan banyak digunakan, dengan beberapa coding terbuka untuk pertanyaan kualitatif.

Tim Studi Lapangan

Tim Evaluasi mengusulkan agar tujuh (7) Tim Studi Lapangan dilatih dan dikerahkan untuk melakukan Studi Lapangan di 22 Kabupaten, dengan masing-masing tim bertanggung jawab untuk rata-rata 11 sekolah. Setiap tim akan terdiri dari dua orang (atau tiga jika tim memiliki mitra dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan), salah satu memiliki pengalaman, peneliti berlatar belakang perguruan tinggi sebagai Ketua Tim Studi Lapangan, dan satu orang sarjana sebagai Pencacah. Seorang peneliti akan terlibat sebagai Koordinator Ketua Tim Studi Lapangan untuk membantu Tim Evaluasi dalam tugas koordinasi. Ketua Tim Evaluasi akan mengawasi manajemen Tim Studi Lapangan dengan dukungan dari Tim Evaluasi.

Supervisi Lapangan

Tim Evaluasi yang terdiri atas Tenaga Ahli Pendidikan, Spesialis Pendidikan Keuangan, dan Ahli Analisis data akan bertindak sebagai Pengawas Lapangan selama pengumpulan data di lapangan. Masing-masing akan diberi tanggungjawab untuk mensupervisi dan mengawasi dua atau tiga Tim Studi Lapangan. Jadwal pengawasan akan dikembangkan oleh Team Leader, yang akan membantu Pengawas Lapangan selama kegiatan studi lapangan.

Pengembangan Kapasitas Mitra/Counterparts

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kapasitas Pusat Penelitian Kebijakan (Balitbang) dalam melaksanakan penelitian kebijakan. Hal ini diusulkan dalam Studi Lapangan bahwa tiga mitra (counterpart) dari Pusat berpartisipasi sebagai anggota Tim Studi Lapangan untuk menemani tim di lapangan dalam mengumpulkan data. Para mitra (counterpart) juga akan membantu Tim Studi Lapangan dalam mengorganisir data, dan membantu tim mereka dalam pembuatan laporan ringkas. Para mitra (counterpart) sebanyak mungkin akan berpartisipasi dalam kegiatan pelatihan & uji coba, serta kunjungan ke lapangan untuk mengumpulkan data.

Pelatihan dan Uji Coba

Ahli Analis data, dengan bantuan dari Tim Evaluasi, akan merancang rencana pelatihan bagi Tim Studi Lapang. Pelatihan ini akan mencakup praktek di sekolah yang juga akan berfungsi untuk menyempurnakan instrumen dan protokol pengambilan sampel. Sebuah sampel uji coba sekolah RSBI non-studi di Jakarta (jumlah sekolah akan ditentukan) akan dipilih untuk praktek pilot. Dua putaran uji coba pilot direncanakan untuk pelatihan dan finalisasi instrumen. (Lihat Rencana Kerja yang diusulkan.)

Pengerahan Tim Survei Lapang

Tim Survey Lapang mengikuti Protokol/Prosedur Lapangan (lihat lampiran). Tim akan diturunkan sekitar tanggal 1 September 2012. Tim akan melakukan perjalanan pertama ke Dinas Pendidikan Provinsi, kemudian ke Kabupaten Dinas Pendidikan sebelum melakukan perjalanan ke sekolah. Tim akan menghabiskan sekitar 1 hari di masing-masing sekolah.

WAWANCARA PEMANGKU KEPENTINGAN

Wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan pemerintah dan non-pemerintah akan dilakukan di tingkat pusat, provinsi, dan Kabupaten untuk mendapatkan informasi dan data kualitatif mengenai isu-isu kebijakan, dan praktik pelaksanaan, tantangan, dan hambatan dari model RSBI, konsep, dan kebijakan. Wawancara ini akan dilakukan pada semua tingkatan, dan akan berlangsung selama Evaluasi di tingkat pusat, dan akan dilakukan di tingkat Provinsi dan Kabupaten oleh Tim Studi Lapangan dan Pengawas (Tim Evaluasi 020) selama studi lapangan seperti dibahas di atas. Tujuan utama dari wawancara ini adalah untuk mendapatkan informasi kapasitas organisasi untuk menginformasikan hasil penilaian. Tidak ada implikasi anggaran langsung untuk kegiatan ini di tingkat pusat.

ORGANISASI DATA, ANALISIS, DAN PELAPORAN

Ahli Analis data akan mengembangkan instrument yang tepat untuk data entru. Tim Survei Cepat RSBI dan Tim Studi Lapangan akan dilatih untuk memasukkan data dengan benar. Data yang dimasukkan akan diproses dan dianalisis dengan menggunakan software statistik. Pemilahan dan analisis akan didasarkan pada Matrix Evaluasi yang dijelaskan dalam tubuh laporan. Masing-masing Tim akan memasukkan data dan mengirimkan file MS Excel untuk Analisis Data setelah selesai. Para Ketua Tim Studi Lapang akan bertanggung jawab untuk menulis sebuah laporan ringkas terkait temuan kualitatif dari hasil Wawancara Mendalam. Keseluruhan analisis dan pelaporan akan dilakukan oleh Tim Evaluasi.

KONTROL KUALITAS

Selama pengumpulan data, Ahli Analis Data akan melakukan spot-check melalui telepon terhadap sekitar 10% dari sekolah sampel dan sekolah pembanding untuk tindak lanjut guna memastikan bahwa tim telah mengunjungi dan telah melakukan pekerjaan secara menyeluruh di sekolah. Ia juga akan menghubungi kantor Dinas untuk tindak lanjut. Selama proses memasukkan data, Ahli Analis data secara acak akan memeriksa ketepatan pemasukkan data dengan cara cross-check dan membandingkan data mentah dengan data yang dimasukkan sesuai kebutuhan.

RESIKO

Tabel di bawah ini menguraikan risiko dan langkah-langkah yang direncanakan untuk mengurangi efeknya pada hasil dari Studi Lapangan.

RESIKO	IMPLIKASI	MITIGASI
Mekanisme komunikasi yang buruk pada beberapa sekolah	Data tidak lengkap	Pemeriksaan menyeluruh untuk mendapatkan informasi kontak yang benar dan tindak lanjut dengan semua sekolah dan kantor pendidikan yang sesuai, jika perlu
Bias pengamatan	Berdampak parah pada validitas dan reliabilitas data pada selang kepercayaan statistik	Pelatihan ketat dan diawasi dan uji coba untuk pengumpulan data, melibatkan peneliti yang terdidik dan berpengalaman sebagai Pemimpin Tim wawancara mendalam dan pengumpulan data kualitatif, penggunaan metode observasi langsung di kelas.
Peneliti dan pencacah yang kurang memenuhi kualifikasi	Mengurangi ketaatan untuk mengikuti praktik penelitian yang baik, mungkin dipandang oleh para pemangku kepentingan sebagai di bawah-kualifikasi dan kurang serius	Merekrut peneliti yang berkualitas dan berpengalaman dan enumerator yang memiliki referensi dan/atau reputasi dari sumber terpercaya yang dinilai kompeten dan dapat diandalkan
Manajemen Data, Data entri dan Pengkodean	Kesalahan entri data kerakibat pada keandalan keseluruhan penelitian, pengkodean melarang ekstraksi temuan kunci untuk analisis	Cross-check dan tindak lanjut, melibatkan peneliti yang berpengalaman, menggunakan matriks pengkodean yang mencerminkan isu-isu kunci dan pertanyaan evaluasi, dan menguji sistem
Ketersediaan pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam evaluasi	Mengurangi reliabilitas statistik temuan dan isu-isu kunci, memperlambat rekomendasi untuk penyesuaian kebijakan dan perbaikan program	Ikuti jalur formal dalam menghubungi sekolah meminta partisipasi, menjalin kontak dengan beberapa pemangku kepentingan, meningkatkan kekuatan evaluasi dengan melibatkan peneliti yang berpengalaman, dan kompeten, menyesuaikan rencana logistik untuk memenuhi ketersediaan stakeholder

STAF

STAF SURVEI CEPAT RSBI

Ketua Tim Survei Cepat RSBI (1) – 24 orang-hari

Peran dan Tanggung jawab

- Memimpin dan mengawasi Enumerator
- Mengkoordinasikan pekerjaan dengan Ahli Analis data
- Fax, email, dan telepon sekolah
- Masukkan data ke dalam spreadsheet Excel
- *Cross-check* data di mana diperlukan
- Tindak lanjut dengan sekolah bilamana diperlukan

Kualifikasi dan Pengalaman

- Mahasiswa pascasarjana dalam ilmu sosial
- Pengalaman dalam desain penelitian dan survei
- Intermediate untuk pengguna tingkat lanjut dari MS Excel
- Memiliki keterampilan komunikasi yang baik, lisan maupun tulisan
- Baik dalam kompetensi Bahasa Inggris
- Pengalaman memimpin tim

Enumerator Survei Cepat RSBI (3) – 69 orang hari

Peran & Tanggung Jawab

- Fax, email, dan telepon sekolah
- Masukkan data ke dalam spreadsheet Excel
- Cross cek data di mana diperlukan
- Tindak lanjut dengan sekolah manakala diperlukan

Kualifikasi dan Pengalaman

- Mahasiswa pascasarjana dalam ilmu sosial
- Pengalaman dalam desain penelitian dan survei
- Memiliki keterampilan komunikasi yang baik, lisan maupun tulisan
- Kompetensi dalam bahasa Inggris yang baik

PERSONIL STUDI LAPANG

Koordinator Ketua Tim Studi Lapang (1) – 32 orang hari

Peran dan tanggung jawab

- Membantu Analis Data dan Tim Evaluasi dalam mengkoordinasikan Tim Survey Lapangan
- Memimpin dan mengawasi Enumerator Survei sebagai anggota Tim Bidang Studi
- Mengkoordinasikan pekerjaan dengan Analis Data dan Tim Evaluasi
- Tindak lanjut dengan Office Manager Tim Evaluasi pada janji Kunjungan Studi
- Bertemu dan mewawancarai pejabat pemerintah, kepala sekolah, guru dan pemangku kepentingan lainnya
- Melibatkan dan mendukung mitra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, jika berlaku
- Jadilah terutama bertanggung jawab untuk melakukan wawancara mendalam di lapangan

- Membantu Enumerator Bidang Studi untuk memasukkan data ke spreadsheet Excel
- *Cross-check* data di mana diperlukan
- Tindak lanjut dengan sekolah yang diperlukan
- Bidang Studi Laporan Lengkap berisi ringkasan wawancara mendalam, dan merinci nama dan nomor kontak dari semua orang bertemu dan mewawancarai

Kualifikasi & Pengalaman

- Dosen tingkat menengah di sebuah universitas atau fasilitas penelitian ilmu sosial
- Minimum S2 (Magister)
- Pengalaman minimal 5 tahun dalam survei dan desain penelitian
- Pengguna tingkat menengah lanjut s.d pengguna tingkat lanjut dari MS Excel
- keterampilan komunikasi yang baik, lisan maupun tulisan
- kompetensi bahasa inggris yang Baik
- Pengalaman dalam mengawasi mahasiswa pascasarjana
- Pengalaman koordinator Proyek yang diutamakan

Tim Pemimpin Bidang Studi (6) - 32 orang- masing-masing tim perhari (total 192 orang)

Peran & Tanggung Jawab

- Memimpin dan mengawasi Enumerator Survei
- Mengkoordinasikan pekerjaan dengan Kepala Koordinator Bidang Tim Studi, Analis Data dan
- Tindak lanjut dengan Manajer Evaluasi Tim Kantor pada janji Studi Kunjungan
- Bertemu dan mewawancarai pejabat pemerintah, kepala sekolah, guru dan pemangku kepentingan lainnya
- Melibatkan dan mendukung mitra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, jika berlaku
- Menjadi penanggungjawab utama untuk melakukan wawancara mendalam di lapangan
- Membantu Enumerator Bidang Studi untuk memasukkan data ke spreadsheet Excel
- Cross cek data di mana diperlukan
- Tindak lanjut dengan sekolah yang diperlukan
- Laporan Lengkap Bidang Studi berisi ringkasan wawancara mendalam, dan merinci nama dan nomor kontak dari semua orang bertemu dan mewawancarai

Kualifikasi & Pengalaman

- Dosen tingkat menengah di sebuah universitas atau fasilitas penelitian ilmu sosial
- Minimum S2 (Magister)
- Pengalaman minimal 5 tahun dalam survei dan desain penelitian
- Pengguna tingkat menengah lanjut s.d pengguna tingkat lanjut dari MS Excel
- keterampilan komunikasi yang baik, lisan maupun tulisan
- kompetensi bahasa inggris yang Baik
- Pengalaman dalam mengawasi mahasiswa pascasarjana

Tim Studi Bidang Enumerator (7) - 32 orang hari -(224 total)

Peran & Tanggung Jawab

- Melakukan pengamatan sekolah kuantitatif di lapangan
- Bertanggung jawab atas catatan rinci yang diperlukan selama wawancara mendalam
- Tindak lanjut untuk mengkonfirmasi janji yang diperlukan
- Masukkan data ke dalam spreadsheet Excel
- Cross cek data di mana diperlukan
- Tindak lanjut dengan sekolah yang diperlukan
- Membantu Kepala Bidang Studi dalam menulis laporan Tim Bidang Studi

Kualifikasi & Pengalaman

- Mahasiswa pascasarjana dalam ilmu sosial
- Pengalaman dalam survei dan desain penelitian
- keterampilan komunikasi yang baik, lisan maupun tulisan
- kompetensi bahasa Inggris yang baik dan aset, tetapi tidak diperlukan

PROTOKOL STUDI LAPANGAN (untuk mengunjungi Provinsi & Kabupaten)

Lokasi	Kegiatan	Tugas	Data yang dikumpulkan
Kementerian pusat (Kemendikbud, Kemenag)	Mendapatkan izin untuk melakukan kunjungan	Melakukan komunikasi penelitian kepada pejabat pemerintah terkait. Meminta Kemendikbud untuk menulis surat kepada Dinas Pendidikan (di provinsi dan kabupaten terpilih) tentang kunjungan tim. Surat itu harus menunjukkan (setidaknya: Tujuan penelitian ini, tanggal kunjungan, nama peneliti, nama sekolah yang akan dikunjungi).	-
	Pengumpulan data sekunder	Pengumpulan data ISS yang ada di Direktorat relevan (Kemendikbud: SD, SMP, SMA, SMK, Kemenag: Madrasah semua tingkat)	Sekolah profile (termasuk nama, alamat, nomor telepon, jumlah murid, jumlah kelas, jumlah kelas internasional), namun tergantung pada ketersediaan data yang di kantor.
	Wawancara mendalam	Mewawancarai pejabat pemerintah yang relevan pada peraturan / kebijakan tentang ISS	Informasi tentang ide dasar dan arah OSS program, alokasi sumber daya untuk ISS, monitoring dan sistem evaluasi ISS.
Kantor Proyek (Jakarta)	Tindak lanjut panggilan telepon ke kantor Dinas Pendidikan surat dari Kemendikbud atau Kemenag	Memeriksa apakah surat tersebut telah diterima, Memeriksa apakah kepala Dinas telah membuat disposisi untuk stafnya;	Informasi yang harus dipenuhi oleh peneliti lapangan selama kunjungan.
Provinsi	Pertemuan dengan Kepala Dinas Provinsi dan / atau staf	Membahas tentang isu-isu ISS di provinsi, penilaian kapasitas organisasi, Mengumpulkan data sekunder di ISS;	Sumber daya yang dialokasikan untuk ISS, Jumlah dan kapasitas sumber daya manusia menangani ISS, Program yang terkait dengan ISS, Monitoring dan evaluasi sistem untuk ISS;
kabupaten/ kota	Pertemuan dengan Kepala Dinas Kabupaten dan / atau staf	Membahas tentang isu-isu ISS di kabupaten; penilaian kapasitas organisasi, Mengumpulkan data sekunder di ISS, Memeriksa status surat dari Kemendikbud atau Kemenag, Meminta staf untuk menemani peneliti lapangan selama kunjungan ke sekolah-sekolah;	Sumber daya yang dialokasikan untuk ISS, Jumlah dan kapasitas sumber daya manusia menangani ISS, Program yang terkait dengan ISS, Monitoring dan evaluasi sistem untuk ISS;

Sekolah	Pertemuan dengan Kepala Sekolah	Mewawancarai kepala sekolah, Menjelaskan kegiatan selama kunjungan; Meminta data yang tersedia di sekolah;	rencana pembangunan Sekolah , anggaran sekolah, laporan keuangan sekolah, profil data sekolah; Banyak hal-hal lain seperti tercermin pada kuesioner untuk survei sekolah;
	Pertemuan dengan komite sekolah	Wawancara Mendalam	Peran dan tanggung jawab SC, Respon status ISS, dll, hal-hal lain Banyak yang tercermin pada pedoman wawancara;
	Melakukan pengamatan sekolah	Lihatlah beberapa hal yang tidak dapat dicakup oleh survei sekolah (menggunakan kuesioner);	Ketersediaan dan utilitas dari fasilitas yang dibutuhkan oleh standar internasional;
	Melakukan observasi kelas	Lihatlah kapasitas guru di sekolah internasional (bahasa Inggris, isi, metode partisipatif)	Persiapan yang dilakukan oleh guru sebelum mengajar, Kegiatan guru di kelas, Beberapa hal lain dari tercermin instrumen observasi kelas;
	Pertemuan dengan beberapa orang tua murid	Wawancara Mendalam	Respon untuk program sekolah, Beberapa hal-hal lain seperti tercermin pedoman wawancara;
	Pertemuan dengan beberapa murid	Wawancara Mendalam	Respon untuk mata pelajaran disampaikan dalam bahasa Inggris, Beberapa hal-hal lain seperti tercermin pedoman wawancara;

JADWAL KERJA SURVEI CEPAT RSBI

Main Activities & Deliverables		2012																											
		June				JULY				AUGUST				SEPTEMBER				OCTOBER				NOVEMBER							
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4						
PHASE 1: INCEPTION PHASE																													
RSBI Mapping																													Pers. Resp.
Compile Master List of RSBI Schools																													ET
Prepare RSBI Survai Cepat questionnaire																													ET
Design RSBI Survai Cepat scope, methodology & plan																													ET
TORs for activities																													TL, ET
Approval of RSBI Survai Cepat plan & budget																													ACDP, MOEC
PHASE 2: EVALUATION																													
2.1 Concept mobilization & instrument design																													
RSBI Survai Cepat																													
Draft survey questionnaire																													ET
Finalization of Sampling Protocol																													ET
Finalization of Survey Questionnaire																													ET
Design of data entry spreadsheet & database																													DA, ET
2.2 Research preparation & staffing																													
Approval of proposed staffing																													ACDP
RSBI Survai Cepat																													
Training plan for RSBI Survai Cepat Team																													DA, ET
Recruit RSBI Survai Cepat Team (4 people)																													EFS, ET
Train RSBI Survai Cepat C24Team																													EFS, DA, ET
2.3 Research, Data Collection, Consultations																													
RSBI Survai Cepat																													
Administer Survey																													SST, DA, ET
Data entry & Organization																													SST, DA, ET
2.4 Data Organization & Analysis																													
RSBI Survai Cepat																													
Create ISS Map and charts addressing key issues & questions																													ET
Comparative analysis on identified parameters																													ET
Cross-check data with Field Study findings																													DA, ET

LEGEND: TIA = Trans Intra Asia; IPAC = Institute of Public Administration of Canada; ET = Evaluation Team; ACDP = ACDP Consultants; TL = Team Leader; DA = Data Analyst; ACDPS = ACDP Secretariat; EFS = Education Finance Specialist; ES = Education Specialist; CSC = Case Study Coordinator; C STL = Case Study Team Leader; SST = School Survey Teams; FST = Field Study Teams; CST = Case Study Team

110

TUGAS STUDI LAPANGAN

[illegible]

JADWAL

[illegible]

ANGGARAN EVALUASI

SURVAI CEPAT						
	ITEM	UNITS	PERSON	QTY	UNIT COST	COST
RESEARCH STAFF (Phone)						
	Team Leader - Assistant/Surveyor (Enumerator)	DY	1	24	350,000	8,400,000
	Assistant/Surveyor (Enumerator)	DY	1	23	300,000	6,900,000
	Assistant/Surveyor (Enumerator)	DY	1	23	300,000	6,900,000
	Assistant/Surveyor (Enumerator)	DY	1	23	300,000	6,900,000
					Subtotal Research Staff	29,100,000
DATA ENTRY						
	Data Entry for 1023 surveys	SV		1350	5,000	6,750,000
					Subtotal Data Entry	6,750,000
QUESTIONNAIRES						
	Printer ink	1		3	700,000	2,100,000
	Printing/Photocopy	2		1,350	250	675,000
	Envelope (Post)	1		200	7,500	1,500,000
					Subtotal Questionnaires	4,275,000
EQUIPMENT						
	Photocopier lease	1		1	2,000,000	2,000,000
	Telephone lines (5 temp lines)	5		1	5,000,000	25,000,000
	Fax Machine lease	1		1	500,000	500,000
					Subtotal Equipment	27,500,000
					Survai Cepat Total	67,625,000

FIELD STUDY						
TEAM 1 - BANTAN & JAWA BARAT						
	NUMBER OF SCHOOLS: 11	UNITS	PERSON	NO.	UNIT COST	COST
	Field Researcher	DY	1	32	380,000	12,160,000
	Assistant/Surveyor	DY	1	32	300,000	9,600,000
	Per diem - BANTEN	DY	2	5	340,000	3,400,000
	Per diem - JAWA BARAT	DY	2	15	510,000	15,300,000
	Lodging	DY	2	15	610,000	18,300,000
	Data Entry	SV	1	66	15,000	990,000
	Car hire	DY	1	20	500,000	10,000,000
					Team 1 Subtotal	69,750,000
TEAM 2 - JAKARTA SELATAN						
	NUMBER OF SCHOOLS: 13					
	Field Researcher	DY	1	32	380,000	12,160,000
	Assistant/Surveyor	DY	1	32	300,000	9,600,000
	Researcher 2 (MoEC)	DY	1	32	0	0
	Per diem - JAKARTA	DY	3	20	510,000	30,600,000
	Data Entry	SV	1	78	15,000	1,170,000
	Car hire	DY	1	5	500,000	2,500,000
					Team 2 Subtotal	56,030,000
TEAM 3 - JAWA TENGAH, SULAWESI UTARA						
	NUMBER OF SCHOOLS: 9					
	Field Researcher	DY	1	32	380,000	12,160,000
	Assistant/Surveyor	DY	1	32	300,000	9,600,000
	Per diem - JAWA TENGAH	DY	2	25	350,000	17,500,000
	Lodging	DY	2	25	450,000	22,500,000
	AIR TICKET RT JAKARTA - SEMARANG	TK	2	2	2,040,000	8,160,000
	AIR TICKET RT JAKARTA - YOGYAKARTA	TK	2	1	2,120,000	4,240,000
	AIR TICKET RT JAKARTA - MANADO	TK	2	1	4,770,000	9,540,000
	Data Entry	SV	1	54	15,000	810,000
	Car hire	DY	1	25	500,000	12,500,000
					Team 3 Subtotal	97,010,000

TEAM 4 - JAWA TIMUR						
NUMBER OF SCHOOLS: 12						
Field Researcher	DY	1	32	380,000	12,160,000	
Counterpart (MoEC - Balitbang)	DY	1	32	0	0	
Assistant/Surveyor	DY	1	32	300,000	9,600,000	
Per diem - JAWA TIMUR	DY	3	25	390,000	29,250,000	
Lodging - JAWA TIMUR	DY	3	25	390,000	29,250,000	
AIR TICKET RT JAKARTA - SURABAYA	TK	3	2	2,500,000	15,000,000	
AIR TICKET RT JAKARTA - MALANG	TK	3	1	2,520,000	7,560,000	
Data Entry	SV	1	72	15,000	1,080,000	
Car hire	DY	1	25	500,000	12,500,000	
				Team 4 Subtotal	116,400,000	
TEAM 5 - YOGYAKARTA						
NUMBER OF SCHOOLS: 11						
Field Researcher	DY	1	32	380,000	12,160,000	
Assistant/Surveyor	DY	1	32	300,000	9,600,000	
Per diem - YOGYAKARTA	DY	2	23	400,000	18,400,000	
Lodging - YOGYAKARTA	DY	2	23	520,000	23,920,000	
AIR TICKET RT JAKARTA - YOGYAKARTA	TK	2	2	2,120,000	8,480,000	
Data Entry	SV	1	66	15,000	990,000	
Car hire	DY	1	23	500,000	11,500,000	
				Team 5 Subtotal	85,050,000	
TEAM 6 - KALIMANTAN TIMUR, SULAWESI SELATAN						
NUMBER OF SCHOOLS: 12						
Field Researcher	DY	1	32	380,000	12,160,000	
Assistant/Surveyor	DY	1	30	300,000	9,000,000	
Per diem - KALIMANTAN TIMUR	DY	2	8	400,000	6,400,000	
Per diem - SULAWESI SELATAN	DY	2	17	410,000	13,940,000	
Lodging - KALIMANTAN TIMUR	DY	2	8	550,000	8,800,000	
Lodging - SULAWESI SELATAN	DY	2	17	420,000	14,280,000	
AIR TICKET RT JAKARTA - TARA KAN	TK	2	1	7,000,000	14,000,000	
AIR TICKET RT JAKARTA - MAKASSAR	TK	2	1	3,580,000	7,160,000	
Data Entry	SV	1	72	15,000	1,080,000	
Car hire	DY	1	25	500,000	12,500,000	
				Team 6 Subtotal	99,320,000	
TEAM 7 - ACEH, SUMATRA SELATAN, NUSA TENGGARA BARAT						
NUMBER OF SCHOOLS: 12						
Field Researcher	DY	1	32	380,000	12,160,000	
Assistant/Surveyor	DY	1	30	300,000	9,000,000	
Per diem - ACEH	DY	2	8	340,000	5,440,000	
Per diem - SUMATRA SELATAN	DY	2	7	340,000	4,760,000	
Per diem - NUSA TENGGARA BARAT	DY	2	7	420,000	5,880,000	
Lodging - ACEH	DY	2	8	410,000	6,560,000	
Lodging - SUMATRA SELATAN	DY	2	7	400,000	5,600,000	
Lodging - NUSA TENGGARA BARAT	DY	2	7	540,000	7,560,000	
AIR TICKET OW JAKARTA - BANDA ACEH	TK	2	1	3,000,000	6,000,000	
AIR TICKET OW BANDA ACEH - PALEMBANG	TK	2	1	3,000,000	6,000,000	
AIR TICKET OW PALEMBANG JAKARTA	TK	2	1	1,200,000	2,400,000	
AIR TICKET RT JAKARTA - SUMBAWA	TK	2	1	4,500,000	9,000,000	
Data Entry	SV	1	72	15,000	1,080,000	
Car hire	DY	1	25	500,000	12,500,000	
				Team 7 Subtotal	93,940,000	
FIELD SUPERVISION - EDY PRIYONO						
Supervisor (EP)	DY	1		0	0	
Per Diem - BANTEN	DY	1	2	340,000	680,000	
Per Diem - JAKARTA	DY	1	4	510,000	2,040,000	
Per Diem - JAWA TENGAH	DY	1	6	350,000	2,100,000	
Per Diem - JAWA BARAT	DY	1	3	410,000	1,230,000	
Per Diem - SULAWESI UTARA	DY	1	4	350,000	1,400,000	
Lodging - JAWA BARAT	DY	1	2	460,000	920,000	
Lodging - JAWA TENGAH	DY	1	5	450,000	2,250,000	
Lodging - SULAWESI UTARA	DY	1	4	500,000	2,000,000	
AIR TICKET RT JAKARTA - SEMARANG	TK	1	1	2,040,000	2,040,000	
AIR TICKET RT JAKARTA - YOGYAKARTA	TK	1	1	2,120,000	2,120,000	
AIR TICKET RT JAKARTA - MANADO	TK	1	1	4,770,000	4,770,000	
Car hire	DY	1	6	500,000	3,000,000	
				Supervision Subtotal	24,550,000	

FIELD SUPERVISION - MUHAMMAD NUR AIDI						
Supervisor (MN)	DY	1		0	0	
Per Diem - JAWA TIMUR	DY	1	11	390,000	4,290,000	
Per Diem - YOGYAKARTA	DY	1	7	400,000	2,800,000	
Lodging - JAWA TIMUR	DY	1	8	390,000	3,120,000	
Lodging - YOGYAKARTA	DY	1	5	520,000	2,600,000	
AIR TICKET OW JAKARTA - SURABAYA	TK	1	1	1,750,000	1,750,000	
AIR TICKET OW SURABAYA - YOGYAKARTA	TK	1	1	2,000,000	2,000,000	
AIR TICKET OW YOGYAKARTA - JAKARTA	TK	1	1	1,750,000	1,750,000	
AIR TICKET RT JAKARTA - SURABAYA	TK	1	1	2,500,000	2,500,000	
AIR TICKET RT JAKARTA - MALANG	TK	1	1	2,520,000	2,520,000	
Car hire	DY	1	3	500,000	1,500,000	
				Supervision Subtotal	24,830,000	
FIELD SUPERVISION - BAMBANG SOEPENO						
Supervisor (BS)	DY	1		0	0	
Per diem - KALIMANTAN TIMUR	DY	1	5	410,000	2,050,000	
Per Diem - SUMATERA SELATAN	DY	1	4	340,000	1,360,000	
Per diem - SULAWESI SELATAN	DY	1	5	410,000	2,050,000	
Per diem - NUSA TENGGARA BARAT	DY	1	4	420,000	1,680,000	
Lodging - KALIMANTAN TIMUR	DY	1	4	470,000	1,880,000	
Lodging - SUMATRA SELATAN	DY	1	3	400,000	1,200,000	
Lodging - SULAWESI SELATAN	DY	1	4	420,000	1,680,000	
Lodging - NUSA TENGGARA BARAT	DY	1	3	540,000	1,620,000	
AIR TICKET RT JAKARTA - TARAKAN	TK	1	1	7,000,000	7,000,000	
AIR TICKET RT JAKARTA - PALEMBANG	TK	1	1	2,120,000	2,120,000	
AIR TICKET RT JAKARTA - MAKASSAR	TK	1	1	3,580,000	3,580,000	
AIR TICKET RT JAKARTA - SUMBAWA	TK	1	1	4,500,000	4,500,000	
Car hire	DY	1	1	500,000	500,000	
				Supervision Subtotal	31,220,000	
TEAM LEADER - JOHN HENLY						
TEAM LEADER (JH)	DY	1		0	0	
AIR TICKET RT JAKARTA - SURABAYA	TK	1	1	2,500,000	2,500,000	
AIR TICKET RT JAKARTA - YOGYAKARTA	TK	1	1	2,120,000	2,120,000	
AIR TICKET RT JAKARTA - SUMBAWA	TK	1	1	4,500,000	4,500,000	
Car hire	DY	1	0	500,000	0	
				Supervision Subtotal	9,120,000	
HONOR/FEE						
District Counterpart	DY	22	1	500,000	11,000,000	
Respondant - Principal/Head Teach	DY	80	1	150,000	12,000,000	
Respondant - School Staff	DY	80	3	100,000	24,000,000	
				Honor/Fee Subtotal	47,000,000	
MISC. TRAVEL EXPENSES						
Airport transport		1	45	300,000	13,500,000	
Airport tax		1	102	40,000	4,080,000	
				Misc. Travel Subtotal	17,580,000	
QUESTIONNAIRES						
Printer ink		1	4	700,000	2,800,000	
Communication costs		18	1	300,000	5,400,000	
Printing/Photocopy		80	40	500	1,600,000	
Envelope (LARGE)		160	1	7,500	1,200,000	
				Questionnaires Subtotal	11,000,000	
EQUIPMENT						
Photocopier lease		1	1	2,000,000	2,000,000	
				Equipment Subtotal	2,000,000	
TRAINING						
Field Supervisor Per diem		7	5	510,000	17,850,000	
Assistant/Surveyor Per diem		7	5	510,000	17,850,000	
Training Air Ticket (RT Medan-Jakarta)		1	1	5,000,000	5,000,000	
Lodging		4	4	610,000	9,760,000	
				Training Subtotal	50,460,000	
				FIELD SURVEY TOTAL	835,260,000	

LAMPIRAN 6. MATRIKS EVALUASI

Matriks evaluasi dikembangkan untuk membimbing dan fokus pada garis evaluasi penyelidikan. Tiga komponen dasar kerangka analitis studi: kepatuhan, perubahan sejarah dan perbandingan. Dalam tiga komponen, empat topik domain berniat untuk menutupi luas wilayah sistem pendidikan sektor: 1) pengaturan organisasi; 2) Pendidikan manajemen; 3) Lingkungan belajar; dan 4) komunitas sekolah. Untuk membantu membentuk studi terhadap peningkatan kualitas, ketiganya dibaur dengan tema penting dalam peningkatan kualitas pendidikan yang teridentifikasi dan terintegrasi: kapasitas sistem; pengembangan profesional; dan kepemimpinan. Tema-tema ini akan dipisahkan berdasarkan masing-masing domain evaluasi di atas, membantu untuk membentuk dan fokus pada penyelidikan evaluasi, manajemen data, analisis dan rekomendasi. Bersama empat domain dan tiga tema akan dimasukkan ke dalam matriks evaluasi. Tabel berikut menunjukkan struktur evaluasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang selaras:

PEMENUHAN	
	ORGANISASI PENGATURAN
	- Apa kebijakan dan fitur pedoman yang mempengaruhi pemenuhan kapasitas pada sistem? - Apa saja bidang utama keterampilan dan peningkatan kompetensi untuk membantu meningkatkan pemenuhan secara keseluruhan dalam sistem? - Apakah struktur kepemimpinan organisasi dan praktek dapat membantu untuk meningkatkan pemenuhan secara keseluruhan? - Apakah isu keuangan berdampak pada pemenuhan?
	MANAJEMEN PENDIDIKAN
	- Apakah praktek manajemen berbasis sekolah mempengaruhi pemenuhan kapasitas sekolah? - Peran apa yang dapat Provinsi dan Dinas Kabupaten berikan dalam meningkatkan pemenuhan pada sekolah? - Apakah praktek kepemimpinan sekolah akan membantu untuk menjembatani kesenjangan pemenuhan di sekolah? - Bagaimana pengaturan keuangan berdampak pada pemenuhan manajemen pendidikan secara keseluruhan?
	LINGKUNGAN PEMBELAJARAN
	- Apa kekuatan dan kelemahan yang berdampak pada kurikulum dan pemenuhan praktek pengajaran? - Apa kunci mendasar kompetensi mengajar untuk memastikan bahwa standar kualitas pembelajaran terpenuhi? - Bagaimana pemenuhan persyaratan disesuaikan untuk meningkatkan persamaan akses secara keseluruhan dan kualitas prestasi murid? - Apa dampak ketentuan keuangan dan pengaturan biaya pada pemenuhan?
	KOMUNITAS SEKOLAH
	- Apa efek pemenuhan yang lebih luas terhadap komunitas sekolah? - Apa hubungan antara sekolah dan masyarakat sangat penting untuk mencapai peraturan pemenuhan? - Apa langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk mencapai peraturan pemenuhan dan tujuan pembelajaran? - Bagaimana struktur keuangan berdampak masyarakat?

SEJARAH	
	PENGATURAN ORGANISASI
	- Bagaimana program mengubah standar prosedur operasi dan kapasitas mereka untuk mengelola kebijakan dan pedoman persyaratan? - Bagaimana program mempengaruhi perubahan dalam akuntabilitas dan transparansi praktik? - Apakah struktur kepemimpinan organisasi dan praktek telah berubah sebagai hasil dari program ini?
	MANAJEMEN PENDIDIKAN
	- Bagaimana pemantauan sekolah berubah sebagai hasil dari program ini? - Bagaimana perencanaan dan praktek manajemen data berubah sebagai hasil dari program ini? - Bagaimana pengelolaan sekolah berubah sebagai hasil dari program ini? - Apa isu-isu manajemen telah muncul secara langsung terhubung dengan iklim keuangan di seluruh Sekolah Standar Internasional??
	LINGKUNGAN PEMBELAJARAN
	- Perubahan apa yang telah terjadi dalam praktek mengajar sebagai hasil dari program ini? - Bagaimana jenis dan frekuensi pengembangan profesional berubah sejak menjadi Sekolah Standar Internasional? - Apa peningkatan kualitas dan keterampilan hasil pembelajaran murid dan pencapaian perubahan telah dihasilkan dari program ini?
	KOMUNITAS SEKOLAH
	- Bagaimana program berdampak pada keterlibatan komunitas sekolah dengan sekolah? - Apa yang berubah dari persepsi komunitas sekolah telah dihasilkan dari sekolah untuk menjadi Sekolah Standar Internasional? - Apa yang berubah dari keterlibatan sekolah dengan keterlibatan organisasi non-pemerintah yang terjadi sebagai akibat dari menjadi Sekolah Standar Internasional? - Bagaimana sekolah berpengaruh terhadap situasi keuangan di kalangan keluarga?
PERBANDINGAN	
	PENGATURAN ORGANISASI
	- Apa perbandingan yang dapat dibuat antar tingkat akreditasi sekolah sebagai hasil dari program ini? - Apa efek yang dimiliki oleh pembiayaan Sekolah Standar Internasional dalam pengukuran kualitas komparatif?
	MANAJEMEN PENDIDIKAN
	- Bagaimana sifat dan frekuensi kesempatan pengembangan profesional yang berbeda antara sekolah reguler dan sekolah berstandar internasional? - Apa praktek kepemimpinan sekolah berbeda antara sekolah reguler dan sekolah berstandar internasional?
	LINGKUNGAN PEMBELAJARAN
	- Apa perbedaan dan persamaan antara ruang kelas di kelas Standar Internasional dan kelas non-Sekolah Internasional Standar? - Apa perbedaan dalam kualitas dan prestasi antara kelas Standar Internasional dan tingkat yang sama dan kelas di sekolah umum? - Apa perbedaan dan persamaan dalam metode pengajaran antara sekolah berstandar reguler dan Internasional?
	KOMUNITAS SEKOLAH
	- Apa perbedaan dan persamaan dalam keterlibatan komunitas antara sekolah reguler dan sekolah internasional? - Apa perbandingan dapat dibuat antara sekolah-kegiatan berbasis keterlibatan komunitas antara sekolah reguler dan sekolah berstandar internasional? - Apa perbandingan dapat dibuat antara tingkat keterlibatan organisasi non-pemerintah di sekolah umum dan sekolah berstandar internasional?

LAMPIRAN 7. SAMPEL STUDI LAPANGAN SAMPEL SEKOLAH RSBI

NO	PROVINSI	KABUPATEN	NAMA RSBI	STRATA	STATUS
1	BANTEN	KOTA TANGERANG SELTAN	SD ISLAM CIKAL HARAPAN	SD	NEGERI
2	BANTEN	KOTA TANGERANG SELTAN	SD Pembangunan Jaya	SD	SWASTA
3	BANTEN	KOTA TANGERANG SELTAN	SD Al-Zahra Indonesia	SD	SWASTA
4	JAKARTA	KOTA JAKARTA SELATAN	SDN RAWAJATI 08 PAGI	SD	NEGERI
6	JAKARTA	KOTA JAKARTA SELATAN	SMA NEGERI 28 JAKARTA	SMA	NEGERI
7	JAKARTA	KOTA JAKARTA SELATAN	SMA ISLAM AL AZHAR 1 JAKARTA	SMA	SWASTA
8	JAKARTA	KOTA JAKARTA SELATAN	SMK NEGERI 6 JAKARTA	SMK	NEGERI
9	JAKARTA	KOTA JAKARTA SELATAN	SMK NEGERI 57 JAKARTA	SMK	NEGERI
10	JAKARTA	KOTA JAKARTA SELATAN	SMK NEGERI 20 JAKARTA	SMK	NEGERI
11	JAKARTA	KOTA JAKARTA SELATAN	SMPN 19 JAKARTA	SMP	NEGERI
12	JAKARTA	KOTA JAKARTA SELATAN	SMPN 68 JAKARTA	SMP	NEGERI
13	JAKARTA	KOTA JAKARTA SELATAN	SMP BAKTI MULYA 400	SMP	SWASTA
14	JAKARTA	KOTA JAKARTA SELATAN	SMP SEKOLAH CITA BUANA	SMP	SWASTA
15	JAWA BARAT	KOTA BANDUNG	SMA Negeri 5 Bandung	SMA	NEGERI
16	JAWA BARAT	KOTA BANDUNG	SMK NEGERI 1 BANDUNG	SMK	NEGERI
17	JAWA BARAT	KAB. SUKABUMI	TK/SD BERTARAF INTERNASIONAL KAB. SUKABUMI	SD	NEGERI
18	JAWA BARAT	KAB. SUKABUMI	SMA NEGERI 1 CIBADAK	SMA	NEGERI
19	JAWA BARAT	KOTA SUKABUMI	SMK NEGERI 3 SUKABUMI	SMK	NEGERI
20	JAWA BARAT	KOTA SUKABUMI	SMK NEGERI 1 SUKABUMI	SMK	NEGERI
21	JAWA TENGAH	KAB. PEKALONGAN	SMPN 1 WIRADESA PEKALONGAN	SMP	NEGERI
22	JAWA TENGAH	KOTA SALATIGA	SDN SALATIGA 06	SD	NEGERI
23	JAWA TENGAH	KOTA SALATIGA	SMA NEGERI 1 SALATIGA	SMA	NEGERI
24	JAWA TENGAH	KOTA SALATIGA	SMK NEGERI 2 SALATIGA	SMK	NEGERI
25	JAWA TENGAH	KAB. SEMARANG	SMA Negeri 1 Ungaran	SMA	NEGERI
26	JAWA TENGAH	KOTA SEMARANG	SMK NEGERI 04 SEMARANG	SMK	NEGERI

27	JAWA TENGAH	KAB. WONOSOBO	SMA MUHAMMADIYAH WONOSOBO	SMA	SWASTA
28	JAWA TENGAH	KAB. WONOSOBO	SMPN 1 WONOSOBO	SMP	NEGERI
29	JAWA TIMUR	KAB. LAMONGAN	SDN MADE IV	SD	NEGERI
30	JAWA TIMUR	KOTA MALANG	SDN KAUMAN I	SD	NEGERI
31	JAWA TIMUR	KAB. MALANG	TK/SD BERTARAF INTERNASIONAL BANI HASYIM	SD	SWASTA
32	JAWA TIMUR	KOTA MALANG	SMA NEGERI 4 MALANG	SMA	NEGERI
33	JAWA TIMUR	KAB. MALANG	SMA NEGERI 1 KEPANJEN	SMA	NEGERI
34	JAWA TIMUR	KOTA. MALANG	SMK NEGERI 6 MALANG	SMK	NEGERI
35	JAWA TIMUR	KOTA. MALANG	SMPN 5 MALANG	SMP	NEGERI
36	JAWA TIMUR	KAB. TRENGGALEK	SDN 3 SURODAKAN	SD	NEGERI
37	JAWA TIMUR	KAB. TRENGGALEK	SMA NEGERI 1 TRENGGALEK	SMA	NEGERI
38	JAWA TIMUR	KAB. TRENGGALEK	SMK NEGERI 1 POGALAN	SMK	NEGERI
39	JAWA TIMUR	KAB. TRENGGALEK	SMPN 1 TRENGGALEK	SMP	NEGERI
40	YOGYAKARTA	KAB. KULON PROGO	SDN Wates IV	SD	NEGERI
41	YOGYAKARTA	KAB. SLEMAN	SMPN 4 Pakem	SMP	NEGERI
42	YOGYAKARTA	KOTA YOGYAKARTA	SD MUH SAPEN I	SD	SWASTA
43	YOGYAKARTA	KOTA YOGYAKARTA	SMA NEGERI 3 YOGYAKARTA	SMA	NEGERI
44	YOGYAKARTA	KOTA YOGYAKARTA	SMA NEGERI 2 YOGYAKARTA	SMA	NEGERI
45	YOGYAKARTA	KOTA YOGYAKARTA	SMA BOPKRI 1	SMA	SWASTA
46	YOGYAKARTA	KOTA YOGYAKARTA	SMK NEGERI 5 YOGYAKARTA	SMK	NEGERI
47	YOGYAKARTA	KOTA YOGYAKARTA	SMK MUHAMMADIYAH 3 YOGYAKARTA	SMK	NEGERI
48	YOGYAKARTA	KOTA YOGYAKARTA	SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA	SMK	NEGERI
49	YOGYAKARTA	KOTA YOGYAKARTA	SMPN 5 YOGYAKARTA	SMP	NEGERI
50	KALIMANTAN TIMUR	KAB. TARAKAN	SMA NEGERI 1 TARAKAN	SMA	NEGERI
51	KALIMANTAN TIMUR	KAB. TARAKAN	SMK NEGERI 2 TARAKAN	SMK	NEGERI
52	KALIMANTAN TIMUR	KAB. TARAKAN	SMPN 1 TARAKAN	SMP	NEGERI
53	SULAWESI SELATAN	KOTA MAKASSAR	SMA ISLAM ATHIRAH MAKASSAR	SMA	SWASTA
54	SULAWESI SELATAN	KOTA MAKASSAR	SMK NEGERI KEHUTANAN	SMK	NEGERI
55	SULAWESI SELATAN	KOTA MAKASSAR	SMPN 6 MAKASSAR	SMP	NEGERI
56	SULAWESI SELATAN	KOTA MAKASSAR	SMP ISLAM ATHIRAH	SMP	SWASTA
57	SULAWESI SELATAN	KAB. PINRANG	SMA NEGERI 1 PINRANG	SMA	NEGERI
58	SULAWESI SELATAN	KAB. PINRANG	SMK NEGERI 2 PINRANG	SMK	NEGERI
59	SULAWESI SELATAN	KAB. PINRANG	SMPN 1 PINRANG	SMP	NEGERI

60	SULAWESI UTARA	KAB. TOMOHON	SD GMIM IV TOMOHON	SD	SWASTA
61	SULAWESI UTARA	KAB. TOMOHON	SMA LOKON SANTO NIKOLAUS TOMOHON	SMA	SWASTA
62	ACEH	KAB. ACEH BARAT	SDN PERCONTOHAN MEULABOH	SD	NEGERI
63	ACEH	KAB. ACEH BARAT	SMA NEGERI 4 WIRA	SMA	NEGERI
64	ACEH	KAB. ACEH BARAT	SMK NEGERI 2 MEULABOH	SMK	NEGERI
65	SUMATERA SELATAN	KOTA PALEMBANG	SMA NEGERI 17 PALEMBANG	SMA	NEGERI
66	SUMATERA SELATAN	KOTA PALEMBANG	SDN 87 Palembang	SD	NEGERI
67	NUSA TENGGARA BARAT	KAB. SUMBAWA	SDN 2 SUMBAWA BESAR	SD	NEGERI
68	NUSA TENGGARA BARAT	KAB. SUMBAWA	SMA NEGERI 2 SUMBAWA BESAR	SMA	NEGERI
69	NUSA TENGGARA BARAT	KAB. SUMBAWA	SMK NEGERI 2 SUMBAWA BESAR	SMK	NEGERI
70	NUSA TENGGARA BARAT	KAB. SUMBAWA	SMPN 1 SUMBAWA BESAR	SMP	NEGERI

SEKOLAH PEMBANDING NON-RSBI

NO	PROVINSI	KABUPATEN	NAMA SEKOLAH PEMBANDING (NON-RSBI)	STRATA	STATUS
1	ACEH	KAB. ACEH BARAT	SMP NEGERI 2 MEULABOH	SMP	NEGERI
2	JAKARTA	KOTA JAKARTA SELATAN	SMP Islam Taman Quraniyah	SMP	
3	JAKARTA	KOTA JAKARTA SELATAN	SDN Duren Tiga 01 Pg.	SD	NEGERI
4	JAWA TIMUR	KAB. LAMONGAN	SDN UNGGULAN JETIS 3	SD	NEGERI
5	JAWA BARAT	KOTA BANDUNG	SMA NEGERI 4	SMA	NEGERI
6	YOGYAKARTA	KOTA YOGYAKARTA	SD NEGERI KEPUTRAN 2	SD	NEGERI
7	SUMATERA SELATAN	KOTA PALEMBANG	SMA NEGERI 1 PALEMBANG	SMA	NEGERI
8	JAWA BARAT	KOTA SUKABUMI	SMP NEGERI 3	SMP	NEGERI
9	JAWA TENGAH	KAB. WONOSOBO	SMK NEGERI 2 WONOSOBO	SMK	NEGERI

LAMPIRAN 8. DOKUMEN-DOKUMEN YANG DIKONSULTASIKAN SELAMA EVALUASI

- Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. http://www3.bkpm.go.id/file_uploaded/Indonesia_Education_Act.pdf.
- Ag Kustulasari, S. (2009) The International Standard School Project in Indonesia: a Policy Document Analysis. Thesis. College of Education and Human Ecology. The Ohio State University. http://etd.ohiolink.edu/view.cgi/Kustulasari%20Ag.pdf?acc_num=osu1242851740
- Coleman, H. (2009). Are 'International Standard Schools' really a response to globalisation? Paper presented at the International Seminar 'Responding to Global Education Challenges', held at Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia. http://www.academia.edu/705475/AreInternationalStandard_Schools_really_a_response_to_globalisation
- Coleman H. (2009) Indonesia's "International Standard Schools: What are they for?" 8th Language and Development Confernece, Dhaka. http://www.academia.edu/705483/Indonesias_InternationalStandard_Schools_What_are_they_for
- DPRWants Immediate Evaluation of RSBI Schools. (2012) Basic Education-Trust Fund. <http://bectrustfund.wordpress.com/2012/07/17/dpr-wants-immediate-evaluation-on-rsbi-schools/>
- Education Ministry Doesn't Regulate RSBI Fee. (2012) Basic Education-Trust Fund. <http://bectrustfund.wordpress.com/2012/07/06/education-ministry-doesnt-regulate-rsbi-fee/>
- Fate of RSBI Depends on Court Ruling. (2012) Basic Education Capacity -Trust Fund. <http://bectrustfund.wordpress.com/2012/06/13/fate-of-rsbi-depends-on-court-ruling/>
- Fathurahman Pupuh. (2012) Model of the Character Education in Developing Countries. *Journal of Applied Sciences Research*, 8(3): 1813-1816.
- Firman, H. and Tola, B. (2008). *The Future of Schooling in Indonesia*. CICE Hiroshima University, *Journal of International Cooperation in Education*, Vol.11 No.1 pp.71 – 84.
- Gauthier C, Dembélé M, Researcher, Bissonnette S, Richard M. (2005) Quality of teaching and quality of education. A Review of research findings. Document prepared for the EFA Global Monitoring Report, UNESCO. <http://www.unesco.org/new/en/unesco/resources/online-materials/publications/unesdoc-database/>
- Hariyanto. How to Prepare the School with International Standard (RSBI) in Indonesia June 5, 2009. <http://www.psb-psma.org/content/blog/how-prepare-school-with-international-standard-rsbi-indonesia>
- Hattie J. (2003) Teachers Make a Difference What is the research evidence? University of Auckland Australian Council for Educational Research, October 2003 <https://www.det.nsw.edu.au/proflearn/areas/qt/research.htm#4>
- Investing in Indonesia's Education at the District Level. An Analysis of Regional Public Expenditure and Financial Management. February 2009. <http://ddp-ext.worldbank.org/EdStats/IDNper09.pdf>.
- IPB Halts RSBI School Preferential Treatment. <http://www.thejakartaglobe.com/education/ipb-halts-rsbi-school-preferential-treatment/4978>

- Kartikawangi D. (2011) Information, Education, Awareness: A Pioneering International School (RSBI) Case in Indonesia. The Asian Conference on Education Official Conference Proceedings. The International Academic Forum. pp 506-516. http://iafor.org/ace_proceedings.html
- Kirkpatrick, A. 2011. *English as a Medium of Instruction in Asian Education [from Primary to Tertiary]: Implications for Local Languages and Local Scholarship*. Applied Linguistics Review. Vol. 2 pp. 99-120.
- Kustulasari, A. 2009. *The International Standard School Project in Indonesia: a Policy Document Analysis*. Thesis Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Master of Arts in the Graduate School of The Ohio State University, College of Education and Human Ecology, Ohio State University.
- Marhum M. English Language in Indonesian Schools in the Era of Globalization. Tadulako University. <http://pskti.uksw.edu/pskti-arsip/publikasi/jurnal/2009/09/english-language-in-indonesian-schools-in-the-era-of-globalization/>
- Nunan, D. 2003. *The Impact of English as a Global Language on Educational Policies and Practices in the Asia-Pacific Region*. TESOL Quarterly 37:4 pp. 589-613.
- Peta Kemampuan Bahasa Inggris Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Rintisan Sekolah Bertaraf International (Berdasarkan Test of English for International Communication (TOEIC) Direktur Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal, Pendidikan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional (2009)
- Poor Students Reluctant to Enroll in RSBI Schools. (2012) Basic Education-Trust Fund. <http://becrtrustfund.wordpress.com/2012/06/25/poor-students-reluctant-to-enroll-in-rsbi-schools-2/>
- Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 Mengenai Divisi Hubungan Pemerintah
- Regulation No. 78/2009 of Minister of National Education, The Operation of the International Standard School in the Basic and Secondary Level (MoEC, 2009). Translated from: Peraturan menteri Pendidikan National Republik Indonesia, Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional Pada Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah.
- Rowe K. (2003) The Importance of Teacher Quality as a Key Determinant of Students' Experiences and Outcomes of Schooling. Background paper to keynote address presented at the ACER Research Conference 2003 Carlton Crest Hotel, Melbourne, 19-21 October. <https://www.det.nsw.edu.au/proflearn/areas/qt/research.htm#4>
- RSBI School Depends on Parent Contribution. (2012) Basic Education Capacity -Trust Fund. <http://becrtrustfund.wordpress.com/2012/05/16/rsbi-school-depends-on-parents-contribution/>
- RSBI School in Indonesia. (2010) Family - Adrilerna blog.com weblog. <http://adrilerna.blog.com/2010/08/11/rsbi-school-in-indonesia/>
- RSBI Schools Prone to Corruption: Activists (2012) The Jakarta Post. <http://www.thejakartapost.com/news/2011/08/19/rsbi-schools-prone-corruption-activists.html>
- Study of the Legal Framework for the Basic Education Sector, USAID-DBE1 2009
- Subekhi Hadi Purnomo. English Teaching and RSBI Schools. (2012) Jurnal Linguistik Terapan. Vol. 1(1). <http://jlt.transbahasa.com/?p=61>

- Sultan, S., Borland, H. and Eckersley, B. (2012). *English Medium of Instruction [EMI] in Indonesian Public Junior Secondary School: Students' Language Use, Attitudes/Motivation and Foreign Language Outcomes*. ACTA International TESOL Conference, Cairns, Australia.
- Sumitomo B, Said H, Mislan. (2012). Constraints and Improvement: A case Study of Indonesia's International Standard Schools in Improving its Capacity Building. *Journal of Education and Learning*. Vol. 6(1)pp. 22-3.
- TeacherQualityandStudentAchievement:ResearchReview.(2005)<http://www.centerforpubliceducation.org/Main-Menu/Staffingstudents/Teacher-quality-and-student-achievement-At-a-glance/Teacher-quality-and-student-achievement-Research-review.html>
- Transcript for Policy Dialog on RSBI and 12 year Wajar, Hotel Saphir, Yogyakarta, 9 April 2012
- Wahyuni NC. (2012) Central Java RSBI Student Forced Out of School by Rich Kids. Jakarta Globe. <http://www.thejakartaglobe.com/education/central-java-rsbi-student-forced-out-of-school-by-rich-kids/522284>
- Whitehead & Hadisontosa (2011) Teaching Practice, Social and Policy Implications of the International Standard Schools (SBI)/Rintisan SBI (RSBI) schools system. Powerpoint presentation at BC Symposium on RSBI/SBI Policy. Yogyakarta, 25 January 2011.

LAMPIRAN 9. TINJAUAN KEBIJAKAN

Program SSI yang dimandatkan dalam Pasal 50 Undang-undang 20 tahun 2003, peraturan pendidikan di Indonesia, mengharuskan setiap kota/kabupaten membangun sedikitnya satu unit pendidikan “di semua tingkat pendidikan, untuk dikembangkan menjadi pendidikan berstandar internasional.”³¹ Pasal 50 juga mengatur manajemen pendidikan tingkat provinsi dikelola berdasarkan peraturan pemerintah. Sama pentingnya dengan Keputusan Presiden No 19 Tahun 2005 mengenai standar pendidikan nasional (SPN), di mana pasal 61 menguatkan UU 20 tahun 2003 untuk membangun satu unit pendidikan internasional seperti yang telah dijelaskan di atas. UU 20 tahun 2003 lebih jauh menjelaskan bahwa tujuan utama UU ini adalah “meningkatkan kualitas pendidikan yang berdaya saing di tingkat nasional, regional, dan internasional, (dan) meningkatkan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat dan tantangan global. Dasar pemikiran dari pembangunan unit internasional adalah “membangun jaminan kualitas pendidikan yang dapat bersaing di tingkat global.”³²

Karena UU 20 tahun 2003 dan Kepres 19 tahun 2005 menjadi dasar dari pembangunan program Sekolah Standar Internasional, Peraturan Menteri no.78 tahun 2009 menyediakan pedoman dalam implementasi program. Peraturan ini memberikan gambaran mengenai gambaran standar SSI yang diharapkan dapat dicapai. Peraturan tersebut juga mengatur bahwa sekolah SSI dapat meningkatkan dananya yang didapat dari berbagai sumber, termasuk orang tua (biaya pendidikan) – yang benar-benar diharapkan dari SSI adalah adanya “pendidikan gratis” di Indonesia. Tabel di bawa ini meringkas ketiga kebijakan tersebut:

UU 20/2003	UU Republik Indonesia tentang Sistem Pendidikan Nasional	Membangun Sekolah berstandar internasional di Indonesia
Peraturan Pemerintah 19/2005	Standar Pendidikan Nasional	Menguatkan 20/2003, dan menyediakan dasar pemikiran bahwa SSI sebagai pemicu untuk membanfun pembeding pendidikan regional dan internasional serta standar pelayanan minimum
Permen 78/2009	Peraturan Menteri Pendidikan Nasional mengenai Pemberlakuan Sekolah Standar Internasional di pendidikan dasar dan ppendidikan menengah.	Mengatur tinjauan umum, standar khusus dalam kurikulum, proses belajar, kualifikasi guru dan kepala sekolah, fasilitas dan infrastruktur termasuk ICT, manajemen, pendanaan, jaminan kualitas, dan budaya sekolah

Sejumlah peraturan pemerintah lainnya memiliki kebijakan SSI atau referensi. Secara khusus Peraturan Pemerintah No 38 tahun 2007 (untuk desentralisasi) mengatur peran dan tanggung jawab pemerintah pusat, provinsi, dan daerah untuk SSI, termasuk tanggung jawab terhadap kurikulum, staf, proses belajar mengajar, fasilitas, dan pendanaan.

31 Lihat Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional, pasal 50, Paragraf 3.

32 Ibid. Pasal 91, Paragraf 1.

LAMPIRAN 10. TABEL DATA SURVEI KUANTITATIF SEKOLAH

1. Akreditasi

Tabel 1.1. Akreditasi sekolah sampel, berdasarkan tingkat pendidikan dan status sekolah (%)

	Akreditasi terbaru (A4)		Mendapat akreditasi dari lembaga negara maju (A15)		
	A	Kurang dari A	Ya	Tidak	Total
Tipe sekolah:					
■ RSBI	95,71	4,29	5,71	94,29	100,00
■ Non RSBI	88,89	11,11	0,00	100,00	100,00
■ Semua	94,94	5,06	5,06	94,94	100,00
RSBI berdasarkan tingkat pendidikan:					
■ SD	88,24	11,76	0,00	100,00	100,00
■ SMP	100,00	0,00	13,33	86,67	100,00
■ SMA	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
■ SMA	94,44	5,56	11,11	88,89	100,00
RSBI berdasarkan status:					
■ Negeri	96,30	3,70	3,70	96,30	100,00
■ Swasta	93,75	6,25	12,50	87,50	100,00

2. Kurikulum dan Kinerja Kompetensi Lulusan

Tabel 2.1. Penghargaan internasional dan adopsi kurikulum dari beberapa negara, berdasarkan tingkat pendidikan dan status sekolah (%)

	Have ever gained academic international award (D9)			Adopsi kurikulum dari negara lain (B6)			
	Ya	Tidak	Total	Ya	Tidak	Tidak tahu	Total
Berdasarkan status sekolah:							
■ RSBI	7,14	92,86	100,00	37,14	60,00	2,86	100,00
■ Non RSBI	0,00	100,00	100,00	11,11	88,89	0,00	100,00
■ Semua	6,33	93,67	100,00	34,18	63,29	2,53	100,00
RSBI berdasarkan tingkat pendidikan:							
■ SD	5,88	94,12	100,00	23,53	76,47	0,00	100,00
■ SMP	6,67	93,33	100,00	33,33	66,67	0,00	100,00
■ SMA	15,00	85,00	100,00	45,00	50,00	5,00	100,00
■ SMK	0,00	100,00	100,00	44,44	50,00	5,56	100,00
RSBI berdasarkan status:							
■ Negeri	7,41	92,59	100,00	35,19	61,11	3,70	100,00
■ Swasta	6,25	93,75	100,00	43,75	56,25	0,00	100,00

Tabel 2.2. Nilai ujian nasional rata-rata, berdasarkan tingkat pendidikan dan status sekolah (%)

	Mata Pelajaran (D2)						
	Fisika*	Kimia*	Biologi*	IPA**	Matematika	Bahasa Inggris	Semua mata pelajaran
Berdasarkan status sekolah:							
■ RSBI	7,93	8,57	8,18	8,41	8,43	7,99	8,19
■ Non RSBI	8,51	8,90	8,31	7,87	8,50	7,77	8,25
■ Semua	7,98	8,61	8,19	8,29	8,44	7,96	8,20

RSBI berdasarkan tingkat pendidikan:							
■ SD	n.a	n.a	n.a	8,42	8,31	8,99	8,33
■ SMP	n.a	n.a	n.a	8,41	8,80	8,22	8,52
■ SMA	7,93	8,57	8,18	n.a	8,59	8,18	8,25
■ SMK	n.a	n.a	n.a	n.a	8,07	7,48	7,72
RSBI berdasarkan status:							
■ Negeri	8,23	8,70	8,36	8,56	8,51	7,99	8,22
■ Swasta	7,01	8,16	7,67	8,23	8,18	7,98	8,10

* Hanya untuk SMA

** Hanya untuk SD & SMP

Tabel 2.3. Ketersediaan ICT berdasarkan penyampaian transkrip kepada siswa, menurut tingkat pendidikan dan status sekolah (%)

	Ketersediaan ICT berdasarkan penyampaian transkrip (D5)		
	Ya	Tidak	Total
Berdasarkan status sekolah:			
■ RSBI	44,29	55,71	100,00
■ Non RSBI	11,11	88,89	100,00
■ Semua	40,51	59,49	100,00
RSBI berdasarkan tingkat pendidikan:			
■ SD	17,65	82,35	100,00
■ SMP	53,33	46,67	100,00
■ SMA	50,00	50,00	100,00
■ SMK	55,56	44,44	100,00
RSBI berdasarkan status:			
■ Negeri	44,44	55,56	100,00
■ Swasta	43,75	56,25	100,00

3. Proses Belajar Mengajar

Tabel 3.1. Ketersediaan ICT pada saat proses belajar mengajar, berdasarkan tingkat pendidikan dan status sekolah (% Ya)

	Aspek ICT (A28b)					
	Ketersediaan komputer di semua ruang kelas	Komputer selalu digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi	Ketersediaan jaringan internet di semua ruang kelas	Internet selalu digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi	Ketersediaan proyektor LCD di semua ruang kelas	Proyektor LCD selalu digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi
Berdasarkan status sekolah:						
■ RSBI	37,14	51,61	68,57	37,70	54,29	51,47
■ Non RSBI	0,00	50,00	11,11	0,00	0,00	25,00
■ Semua	32,91	51,52	62,03	34,85	48,10	50,00
RSBI berdasarkan tingkat pendidikan:						
■ SD	47,06	50,00	64,71	46,15	47,06	56,25
■ SMP	40,00	53,33	73,33	53,85	73,33	46,67
■ SMA	40,00	47,06	75,00	22,22	70,00	50,00
■ SMK	22,22	56,25	61,11	35,29	27,78	52,94

RSBI berdasarkan status:						
■ Negeri	35,19	53,19	62,96	32,61	50,00	50,00
■ Swasta	43,75	46,67	87,50	53,33	68,75	56,25

Informasi pendukung:

■ Q5F : Pertanyaan #C2 (persepsi murid terhadap kemampuan guru menggunakan ICT)

Tabel 3.2. Adopsi metode belajar mengajar dari negara lain, berdasarkan tingkat pendidikan dan status sekolah (%)

	Adopsi metode belajar mengajar negara lain (B8)			
	Ya	Tidak	Tidak tahu	Total
Berdasarkan status sekolah:				
■ RSBI	37,14	60,00	2,86	100,00
■ Non RSBI	11,11	88,89	0,00	100,00
■ Semua	34,18	63,29	2,53	100,00
RSBI berdasarkan tingkat pendidikan:				
■ SD	23,53	76,47	0,00	100,00
■ SMP	33,33	66,67	0,00	100,00
■ SMA	45,00	45,00	5,00	100,00
■ SMK	44,44	50,00	5,56	100,00
RSBI berdasarkan status:				
■ Negeri	35,19	61,11	3,70	100,00
■ Swasta	43,75	56,25	0,00	100,00

Tabel 3.3. Status sekolah, proses belajar mengajar sebagai referensi sekolah lain, berdasarkan tingkat pendidikan dan status sekolah (%)

	Telah menjadi referensi sekolah lain (B10)			
	Ya	Tidak	Tidak tahu	Total
Berdasarkan status sekolah:				
■ RSBI	64,29	28,57	7,14	100,00
■ Non RSBI	55,56	33,33	11,11	100,00
■ Semua	63,29	29,11	7,59	100,00
RSBI berdasarkan tingkat pendidikan:				
■ SD	64,71	29,41	5,88	100,00
■ SMP	53,33	40,00	6,67	100,00
■ SMA	70,00	25,00	5,00	100,00
■ SMK	66,67	22,22	11,11	100,00
RSBI berdasarkan status:				
■ Negeri	62,96	31,48	5,56	100,00
■ Swasta	68,75	18,75	12,50	100,00

4. Evaluasi

Tabel 4.1. Penerapan metode evaluasi murid, berdasarkan tingkat pendidikan dan status sekolah (% "Ya")

	Metode evaluasi (D1)						
	Tugas/ proyek	Performa	Produk	Tes tertulis	Evaluasi sikap	Evaluasi diri	Portfolio
Berdasarkan status sekolah:							
■ RSBI	97,14	100,00	100,00	100,00	97,14	90,00	85,71
■ Non RSBI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	88,89	88,89
■ Semua	97,47	100,00	100,00	100,00	97,47	89,87	86,08
RSBI berdasarkan tingkat pendidikan:							
■ SD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	82,35	76,47
■ SMP	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
■ SMA	90,00	100,00	100,00	100,00	95,00	85,00	80,00
■ SMK	100,00	100,00	100,00	100,00	94,44	94,44	88,89
RSBI berdasarkan status:							
■ Negeri	98,15	100,00	100,00	100,00	96,30	87,04	83,33
■ Swasta	93,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	93,75

5. Guru

Tabel 5.1. Persentase Guru dengan pendidikan S-2 atau S-3 berbanding jumlah guru pada mata pelajaran yang diajar, berdasarkan tingkat pendidikan dan status sekolah (% rata-rata) – C2

	Metode evaluasi (D1)					
	IPA*	Fisika**	Kimia**	Biologi**	Matematika	Portfolio
Berdasarkan status sekolah:						
■ RSBI	3,52	25,19	49,31	23,60	14,63	10,28
■ Non RSBI	8,89	20,00	0,00	23,96	14,00	8,04
■ Semua	4,32	24,71	45,51	23,61	14,56	10,05
RSBI berdasarkan tingkat pendidikan:						
■ SD	3,99	n.a	n.a	n.a	5,31	2,94
■ SMP	n.a	15,48	20,00	21,31	16,98	11,00
■ SMA	n.a	32,88	69,44	27,42	19,04	11,81
■ SMK	n.a	24,00	35,71	12,00	16,07	14,89
RSBI berdasarkan status:						
■ Negeri	5,17	25,86	46,83	25,72	15,56	13,32
■ Swasta	1,16	22,22	66,67	15,63	11,56	0,00

* Hanya untuk SMA

** Hanya untuk SD & SMP

Tabel 5.2. Persentase guru bersertifikat berbanding jumlah guru pada mata pelajaran yang diajar, berdasarkan tingkat pendidikan dan status sekolah (Rata-rata %) – C2

	Mata pelajaran**				
	Fisika	Kimia	Biologi	Matematika	Bahasa Inggris
Berdasarkan status sekolah:					
■ RSBI	76,47	69,92	78,49	72,83	66,91
■ Non RSBI	70,00	77,67	100,00	68,83	53,00
■ Semua	75,79	70,50	80,69	72,37	65,49
RSBI berdasarkan tingkat pendidikan:					
■ SMP	69,44	55,00	83,89	70,56	70,38
■ SMA	96,84	78,90	84,60	87,53	72,15
■ SMK	54,87	61,17	50,00	58,44	58,63
RSBI berdasarkan status:					
■ Negeri	80,14	75,43	82,59	76,47	69,64
■ Swasta	60,38	52,78	64,62	55,50	54,63

** Hanya untuk SMP, SMA and SMK

Tabel 5.3. Persentase guru yang dilatih menggunakan bahasa Inggris berbanding dengan total jumlah guru yang mengajar mata pelajaran, berdasarkan tingkat pendidikan dan status sekolah (% rata-rata) – C2

	Mata pelajaran**				
	Fisika	Kimia	Biologi	Matematika	Bahasa Inggris
Berdasarkan status sekolah:					
■ RSBI	78,80	65,20	75,56	70,30	90,11
■ Non RSBI	13,00	37,50	16,75	8,60	80,00
■ Semua	71,49	63,70	70,26	64,00	89,08
RSBI berdasarkan tingkat pendidikan:					
■ SMP	76,13	54,25	80,00	62,78	75,00
■ SMA	98,26	79,00	82,90	85,95	91,85
■ SMK	52,00	44,09	45,00	55,94	95,50
RSBI berdasarkan status:					
■ Negeri	75,82	61,37	78,65	68,33	90,69
■ Swasta	92,86	78,13	69,75	79,13	87,50

** Hanya untuk SMP, SMA and SMK

Tabel 5.4. Persentase guru yang aktif menggunakan bahasa Inggris berbanding dengan total jumlah guru yang mengajar mata pelajaran, berdasarkan tingkat pendidikan dan status sekolah (% rata-rata) – C2

	Mata pelajaran**				
	Fisika	Kimia	Biologi	Matematika	Bahasa Inggris
Berdasarkan status sekolah:					
■ RSBI	48,13	41,68	51,80	40,14	93,98
■ Non RSBI	28,75	66,00	18,75	15,33	100,00
■ Semua	46,33	43,15	47,91	37,10	94,60
RSBI berdasarkan tingkat pendidikan:					
■ SMP	76,00	79,25	90,22	70,38	85,71
■ SMA	48,33	43,06	42,18	72,15	89,89
■ SMK	26,92	24,30	6,25	58,63	100,00
RSBI berdasarkan status:					
■ Negeri	39,58	33,00	45,09	33,14	92,81
■ Swasta	81,25	77,83	73,86	70,75	100,00

** Hanya untuk SMP, SMA and SMK

Informasi pendukung:

■ Q5F: Pertanyaan #C1 (apakah murid mengerti apa yang diucapkan oleh guru dalam bahasa Inggris)

6. Staf Pendidikan (Kepala Sekolah)

Tabel 6.1. Kualifikasi kepala sekolah, berdasarkan tingkat pendidikan dan status sekolah (%)

	Aspek Kualifikasi (C1)						
	Berpendidikan kurang dari S2	Pendidikan S-2 atau S-3	Berpar-tisipasi dalam pelatihan kepala sekolah	Bersertifikat	Dapat berbahasa Inggris secara aktif	Hanya menggunakan bahasa Inggris secara pasif	Dilatih dalam bahasa Inggris
Berdasarkan status sekolah:							
■ RSBI	22,86	77,14	91,43	91,43	42,86	55,71	82,86
■ Non RSBI	22,22	77,78	77,78	88,89	22,22	77,78	44,44
■ Semua	22,78	76,22	89,87	91,14	40,51	58,23	78,48
RSBI berdasarkan tingkat pendidikan:							
■ SD	47,06	52,94	82,35	94,12	23,53	70,59	88,24
■ SMP	6,67	93,33	100,00	86,67	46,67	53,33	80,00
■ SMA	20,00	75,00	90,00	95,00	75,00	35,00	75,00
■ SMK	16,67	83,33	94,44	88,89	33,33	66,67	88,89
RSBI berdasarkan status:							
■ Negeri	20,37	79,63	94,44	94,44	38,89	59,26	81,48
■ Swasta	31,25	68,75	75,00	81,25	56,25	43,75	87,50

7. Infrastruktur

7.1. Infrastruktur Sekolah Umum

Tabel 7.1. Kondisi umum sekolah, berdasarkan tingkat pendidikan dan status sekolah (% Ya)** – Dari Q2 : Bagian C

	Sekolah terlihat bersih	Lapangan olahraga tersedia	Lapangan sekolah cukup luas	Papan informasi profil sekolah tersedia
Berdasarkan status sekolah:				
■ RSBI	64,29	28,57	7,14	100,00
■ Non RSBI	55,56	33,33	11,11	100,00
■ Semua	63,29	29,11	7,59	100,00
RSBI berdasarkan tingkat pendidikan:				
■ SD	64,71	29,41	5,88	100,00
■ SMP	53,33	40,00	6,67	100,00
■ SMA	70,00	25,00	5,00	100,00
■ SMK	66,67	22,22	11,11	100,00
RSBI berdasarkan status:				
■ Negeri	62,96	31,48	5,56	100,00
■ Swasta	68,75	18,75	12,50	100,00

Hasil dari observasi sekolah oleh enumerator (bukan berdasarkan wawancara)

7.2. Fasilitas ICT dalam Ruang Kelas

Catatan: Lihat Tabel 3.1 di atas

7.3. Perpustakaan

Tabel 7.2. Kondisi perpustakaan sekolah, berdasarkan tingkat pendidikan dan status sekolah (%)

	Aspek kondisi perpustakaan (A28a)						
	Adanya perpustakaan	Adanya fasilitas internet di dalam perpustakaan	Internet dalam keadaan yang baik	Digunakan oleh guru sebagai salah satu alat penunjang pembelajaran			
				Selalu	Sering	Kadang	Tidak pernah
Berdasarkan status sekolah:							
■ RSBI	98,57	80,00	94,92	31,43	50,00	15,71	2,86
■ Non RSBI	100,00	33,33	75,00	11,11	55,56	33,33	0,00
■ Semua	98,73	74,68	93,65	29,11	50,63	17,72	2,53
RSBI berdasarkan tingkat pendidikan:							
■ SD	100,00	82,35	87,50	41,18	52,94	0,00	5,88
■ SMP	100,00	73,33	100,00	33,33	60,00	6,67	0,00
■ SMA	100,00	90,00	100,00	20,00	50,00	30,00	0,00
■ SMK	94,44	72,22	92,86	33,33	38,89	22,22	5,56
RSBI berdasarkan status:							
■ Negeri	98,15	74,07	93,02	25,93	53,70	16,67	3,70
■ Swasta	100,00	100,00	100,00	50,00	37,50	12,50	0,00

** Hanya untuk SMP, SMA and SMK

Informasi pendukung:
■ Q2: Bagian E (observasi di perpustakaan)

7.4. Laboratorium

Tabel 7.3. Ketersediaan dan Kondisi Laboratorium, berdasarkan tingkat pendidikan dan status sekolah (%)--A28c

	Lab IPA tersedia	Lab IPA dalam kondisi yang baik	Lab bahasa tersedia	Lab Bahasa dalam kondisi baik	Lab komputer tersedia	Lab komputer dalam kondisi baik
Berdasarkan status sekolah:						
■ RSBI	78,57	82,54	85,71	83,87	98,57	94,20
■ Non RSBI	100,00	55,56	33,33	50,00	100,00	88,89
■ Semua	81,01	79,17	79,75	81,82	98,73	93,59
RSBI berdasarkan tingkat pendidikan:						
■ SD	58,82	86,67	76,47	85,71	100,00	82,35
■ SMP	100,00	73,33	86,67	100,00	100,00	93,33
■ SMA	100,00	95,00	95,00	68,42	100,00	100,00
■ SMK	55,56	69,23	83,33	87,50	94,44	100,00
RSBI berdasarkan status:						
■ Negeri	77,78	83,33	88,89	83,67	98,15	92,45
■ Swasta	81,35	80,00	75,00	84,62	100,00	100,00

Supporting information:

- Q2: Section F (observation on lab)

Tabel 7.4. Ketersediaan Fasilitas Lain, berdasarkan tingkat pendidikan dan status sekolah (%)

	Ketersediaan Ruang Multimedia (A28c)	Ketersediaan Ruang Kesenian (A28d)	Ketersediaan klinik kesehatan (A28d)	Ketersediaan fasilitas olahraga (A28d)
RSBI berdasarkan tingkat pendidikan:				
■ SD	52,94	64,71	94,12	100,00
■ SMP	80,00	80,00	86,67	93,33
■ SMA	80,00	75,00	85,00	95,00
■ SMK	61,11	44,44	88,89	100,00
■ SEMUA	68,57	65,71	88,57	97,14
RSBI berdasarkan status:				
■ Negeri	66,67	55,56	87,04	96,30
■ Swasta	75,00	100,00	93,75	100,00

8. Manajemen Sekolah

Tabel 8.1. Tersedianya sertifikat ISO dan *sister school* pada RSBI, berdasarkan tingkat pendidikan dan status sekolah (%)

	Memiliki sertifikat ISO (A19)	Memiliki sister school (A17)
RSBI berdasarkan tingkat pendidikan:		
■ SD	5,88	23,53
■ SMP	46,67	46,67
■ SMA	75,00	75,00
■ SMK	100,00	44,44
■ SEMUA	58,57	48,57
RSBI berdasarkan status:		
■ Negeri	70,37	46,30
■ Swasta	18,75	56,25

Tabel 8.2. .Perencanaan dan Pelaporan Sekolah, berdasarkan tingkat pendidikan dan status sekolah (%)

	Sekolah memiliki rencana pengembangan (E1)	Sekolah memiliki rencana tahunan (E2)	Melapor kepada orang tua (E3)	Melapor kepada Dinas Pendidikan Kabupaten (E4)
Berdasarkan status sekolah:				
■ RSBI	98,57	100,00	90,00	85,71
■ Non RSBI	88,89	77,78	88,89	77,78
■ Semua	97,47	97,47	89,87	84,81
RSBI berdasarkan tingkat pendidikan:				
■ SD	100,00	100,00	94,12	76,47
■ SMP	93,33	100,00	86,67	86,67
■ SMA	100,00	100,00	95,00	85,00
■ SMK	100,00	100,00	83,33	94,44
RSBI berdasarkan status:				
■ Negeri	98,15	100,00	87,04	88,89
■ Swasta	100,00	100,00	100,00	75,00

Tabel 8.3. Ketersediaan dan Peran Komite Sekolah, berdasarkan tingkat pendidikan dan status sekolah (% Ya)

	Memiliki komite sekolah (E5)	Peran komite sekolah (E6)			
		Menjembatani komunikasi antara orang tua dan sekolah	Memberikan rekomendasi atau saran kepada sekolah	Mendukung program sekolah	Mengawasi dan mengevaluasi sekolah
Berdasarkan status sekolah:					
■ RSBI	100,00	98,57	100,00	98,57	94,29
■ Non RSBI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
■ Semua	100,00	98,73	100,00	98,73	94,94
RSBI berdasarkan tingkat pendidikan:					
■ SD	100,00	94,12	100,00	94,12	100,00
■ SMP	100,00	100,00	100,00	100,00	86,67
■ SMA	100,00	100,00	100,00	100,00	95,00
■ SMK	100,00	100,00	100,00	100,00	94,44
RSBI berdasarkan status:					
■ Negeri	100,00	100,00	100,00	100,00	94,44
■ Swasta	100,00	93,75	100,00	93,75	93,75
Informasi Pendukung:					
■ Q5C: pertanyaan #C4 (keterlibatan orang tua dalam manajemen sekolah)					

Tabel 8.4. Keterlibatan sektor swasta, berdasarkan tingkat pendidikan dan status sekolah (% Ya)

	Keterlibatan sektor swasta (E9)	Peran komite sekolah (E6)								
		Penyampaian harapan/aspirasi	Pengembangan visi, misi, dan tujuan sekolah	Pengembangan sekolah dan rencana pembangunan	Pengembangan sekolah dan rencana tahunan	Implementasi rencana sekolah	Proses belajar mengajar	Aktivitas ekstrakurikuler	Renovasi/pengembangan sekolah	Penyediaan fasilitas sekolah
Berdasarkan status sekolah:										
■ RSBI	62.86	25.71	5.71	18.57	11.43	31.43	21.43	42.86	48.57	48.57
■ Non RSBI	55.56	22.22	11.11	33.33	22.22	33.33	22.22	33.33	44.44	55.56
■ Semua	62.03	25.32	6.33	20.25	12.66	31.65	21.52	41.77	48.10	49.37
RSBI berdasarkan tingkat pendidikan:										
■ SD	70.59	29.41	5.88	17.65	5.88	29.41	35.29	52.94	52.94	41.18
■ SMP	46.67	6.67	0.00	13.33	6.67	20.00	0.00	40.00	46.67	40.00
■ SMA	70.00	25.00	0.00	15.00	10.00	30.00	10.00	45.00	60.00	60.00
■ SMK	61.11	38.89	16.67	27.78	22.22	44.44	38.89	33.33	33.33	50.00
RSBI berdasarkan status:										
■ Negeri	61.11	24.07	7.41	18.52	12.96	25.93	20.37	38.89	46.30	51.85
■ Swasta	68.75	31.25	0.00	18.75	6.25	50.00	25.00	56.25	56.25	37.50

Tabel 8.5. Ketersediaan regulasi spesifik pada beberapa sekolah, berdasarkan tingkat pendidikan dan status sekolah (%)

	Kebijakan larangan merokok (E12)	Kebijakan anti-penindasan (E13)	Kebijakan larangan diskriminasi (E14)
RSBI berdasarkan tingkat pendidikan:			
■ SD	88,24	100,00	100,00
■ SMP	100,00	100,00	100,00
■ SMA	95,00	100,00	100,00
■ SMK	100,00	94,44	100,00
■ SEMUA	95,71	98,57	100,00
RSBI berdasarkan status:			
■ Negeri	94,44	98,15	100,00
■ Swasta	100,00	100,00	100,00

Informasi Pendukung:

- Q5F: Pertanyaan #C3 (merokok), #C4 (penindasan)
- Q5C: pertanyaan #C5 (merokok), #C6 (penindasan)

9. Pendanaan

Tabel 9.1. Biaya Pendidikan Sekolah, berdasarkan tingkat pendidikan dan status sekolah (Rp 000)

	Biaya masuk (G3)				Biaya bulanan (G4)			
	Min	Mean	Median	Max	Min	Mean	Median	Max
Berdasarkan status sekolah:								
■ RSBI	0	5.858	3.000	58.000	0	395	178	4.900
■ Non RSBI	0	1.233	500	6.000	0	70	0	350
■ Semua	0	5.331	2.500	58.000	0	358	171	4.900
RSBI berdasarkan tingkat pendidikan:								
■ SD	0	6.040	3.000	24.000	0	253	150	940
■ SMP	0	6.093	2.250	27.800	0	588	175	4.900
■ SMA	0	8.723	4.750	58.000	0	601	238	4.500
■ SMK	0	2.309	2.500	5.415	0	141	171	355
RSBI berdasarkan status:								
■ Negeri	0	3.407	2.875	58.000	0	184	150	1.360
■ Swasta	100	14.133	15.000	27.800	45	1.107	625	4.900

Tabel 9.2. Jumlah rata-rata penerima beasiswa, berdasarkan tingkat pendidikan dan status sekolah

	Biaya masuk (G3)			
	Min	Mean	Median	Max
Berdasarkan status sekolah:				
■ RSBI	0	140	57	864
■ Non RSBI	0	33	25	110
■ Semua	0	128	38	864
RSBI berdasarkan tingkat pendidikan:				
■ SD	0	42	24	238
■ SMP	0	98	18	712
■ SMA	0	94	50	339
■ SMK	0	318	259	864
RSBI berdasarkan status:				
■ Negeri	0	160	74	864
■ Swasta	0	71	17	700

Tabel 9.3. Beberapa Aspek dalam Pelaporan Finansial Sekolah, berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Status Sekolah (%)

	Sistem administrasi finansial (G6)			Semua pendapatan sekolah termasuk dalam anggaran sekolah (G7)	Laporan finansial diletakkan pada tempat yang bisa diakses di sekolah (G9)
	Secara Manual	Komputerisasi	Semi-komputerisasi		
Berdasarkan status sekolah:					
■ RSBI	7,14	44,29	48,57	88,57	55,71
■ Non RSBI	22,22	44,44	33,33	77,78	66,67
■ Semua	8,86	44,30	46,84	87,34	56,96
RSBI berdasarkan tingkat pendidikan:					
■ SD	11,76	41,18	47,06	76,47	58,82
■ SMP	0,00	40,00	60,00	93,33	86,67
■ SMA	10,00	50,00	40,00	90,00	50,00
■ SMK	5,56	44,44	50,00	94,44	33,33
RSBI berdasarkan status:					
■ Negeri	9,26	42,59	48,15	90,74	62,96
■ Swasta	0,00	50,00	50,00	81,25	31,25

Tabel 9.4. Pengeluaran Tahunan Sekolah Non-Gaji dan Biaya per Unit per Murid, berdasar Tingkat Pendidikan dan Status Sekolah– G2 & A26

	Total pengeluaran non-gaji (Rp juta)				Biaya per unit per Murid (Rp 000)			
	Min	Median	Mean	Max	Min	Median	Mean	Max
Berdasarkan status sekolah:								
■ RSBI	35.80	2.490	3.030	11.200	71	3.119	4.423	31.359
■ Non RSBI	39.87	447	972	3.180	379	862	1.051	2.454
■ Semua	35.80	2.306	2.790	11.200	71	2.642	4.034	31.359
RSBI berdasarkan tingkat pendidikan:								
■ SD	35,8	631	1.380	7.450	71	1.087	2.694	17.580
■ SMP	268	2.040	2.270	7.150	487	4.260	4.834	21.567
■ SMA	719	3.320	3.740	10.900	742	5.043	5.370	14.484
■ SMK	640	3.830	4.460	11.200	1.170	2.674	4.712	31.358
RSBI berdasarkan status:								
■ Negeri	35,8	2.490	3.080	11.200	71	2.777	3.924	31.359
■ Swasta	321	2.490	2.820	7.450	522	3.926	6.216	21.567

Tabel 9.5a. Pendanaan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi, berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Status Sekolah

	Pemerintah Pusat (Rp juta)				Pemerintah Provinsi (Rp juta)			
	Min	Median	Mean	Max	Min	Median	Mean	Max
Berdasarkan status sekolah:								
■ RSBI	0	213	544	3.960	0	57,8	361	4.560
■ Non RSBI	0	236	266	674	0	69,6	312	1.440
■ Semua	0	216	512	3.960	0	66,0	356	4.560
RSBI berdasarkan tingkat pendidikan:								
■ SD	0	238	347	1.390	0	0	90,3	1.020
■ SMP	0	639	1.070	3.960	0	0	466	4.460
■ SMA	0	205	377	2.540	0	73,5	146	750
■ SMK	0	200	472	3.700	0	177	770	4.560
RSBI berdasarkan status:								
■ Negeri	0	279	636	3.960	0	85,4	452	4.560
■ Swasta	0	140	231	1.390	0	0	54,1	550

Tabel 9.5b. Pendanaan dari Pemerintah Kabupaten dan Orang Tua, berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Status Sekolah

	Pemerintah Kabupaten (Rp juta)				Orang Tua (Rp juta)			
	Min	Median	Mean	Max	Min	Median	Mean	Max
Berdasarkan status sekolah:								
■ RSBI	0	43,1	7,44	10.100	0	1.710	2.640	13.400
■ Non RSBI	0	27,3	4,40	3.200	0	0	727	3.980
■ Semua	0	41,7	7,09	10.100	0	1.657	2.420	13.400
RSBI berdasarkan tingkat pendidikan:								
■ SD	0	0	74,7	663	0	169	1.790	13.400
■ SMP	0	0	261	2.400	0	832	1.580	5.640
■ SMA	0	82,7	686	4.110	0	3.400	3.520	10.600
■ SMK	0	643	1.840	10.100	0	3.620	3.330	9.040
RSBI berdasarkan status:								
■ Negeri	0	129	957	10.100	0	1.550	2.180	10.600
■ Swasta	0	0	23,3	373	0	4.350	4.170	13.400

Tabel 9.5c. Pendanaan dari Masyarakat (selain orang tua) dan Sumber Lainnya, berdasarkan Tingkat dan Status Sekolah

	Masyarakat selain Orang Tua (Rp juta)				Sumber Lainnya (Rp juta)			
	Min	Median	Mean	Max	Min	Median	Mean	Max
Berdasarkan status sekolah:								
■ RSBI	0	0	79,0	2.030	0	0	231	7.600
■ Non RSBI	0	0	0	0	0	0	3,1	15,1
■ Semua	0	0	70,0	2.030	0	0	205	7.600
RSBI berdasarkan tingkat pendidikan:								
■ SD	0	0	12,4	123	0	0	26,1	323
■ SMP	0	0	116	1.390	0	0	217	1.070
■ SMA	0	0	106	2.030	0	0	169	1.460
■ SMK	0	0	81,3	1.370	0	0	503	7.600
RSBI berdasarkan status:								
■ Negeri	0	0	101	2.030	0	0	1,9	15,1
■ Swasta	0	0	4,9	59	**	**	**	**

** jumlah kasus sangat kecil, hanya satu sekolah swasta yang melapor

10. Isu-isu Lainnya : Supervisi dan Peran Pemerintah Daerah

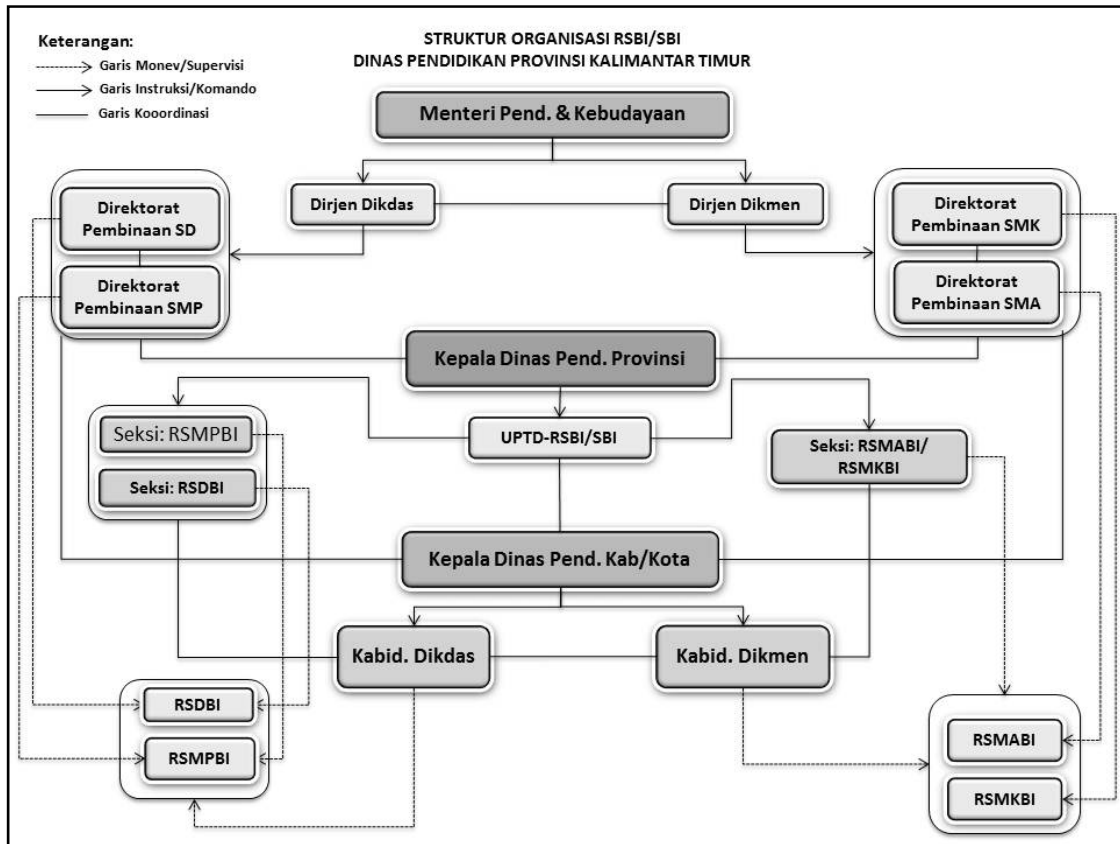
Tabel 10.1. Harapan dan Implementasi Peran Dinas Pendidikan Kabupaten, berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Status Sekolah (%)--- F1

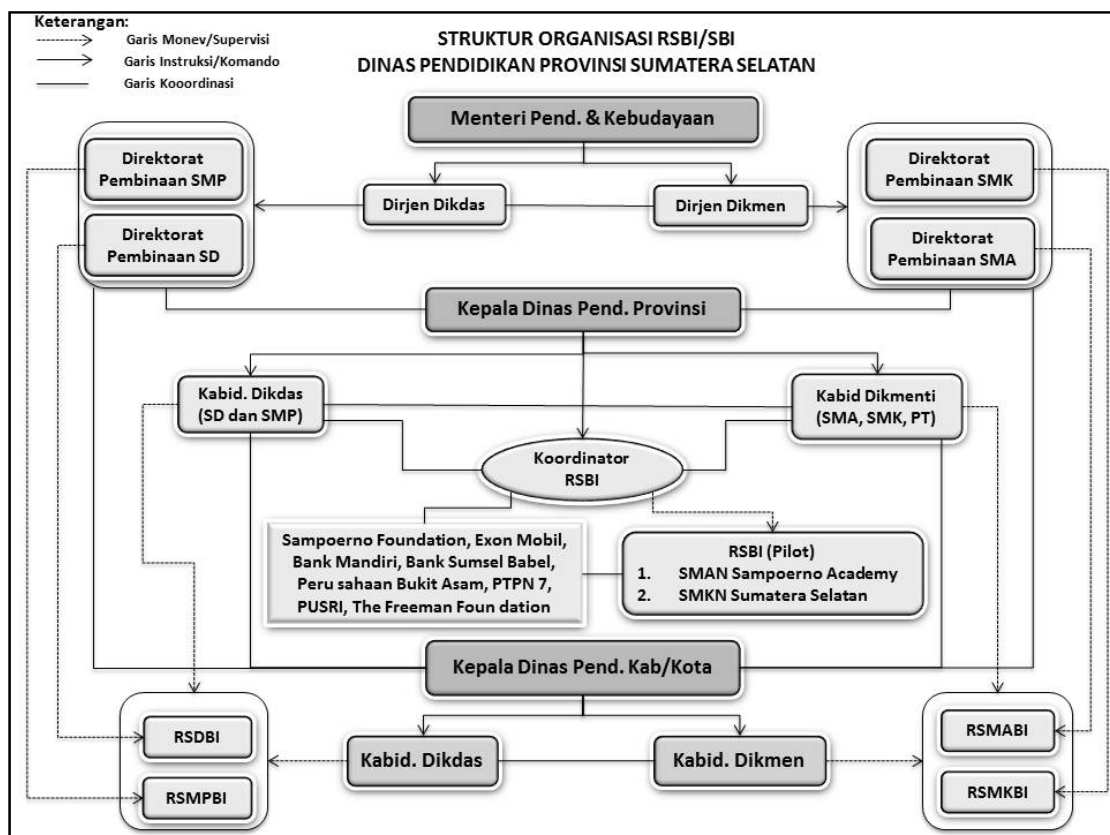
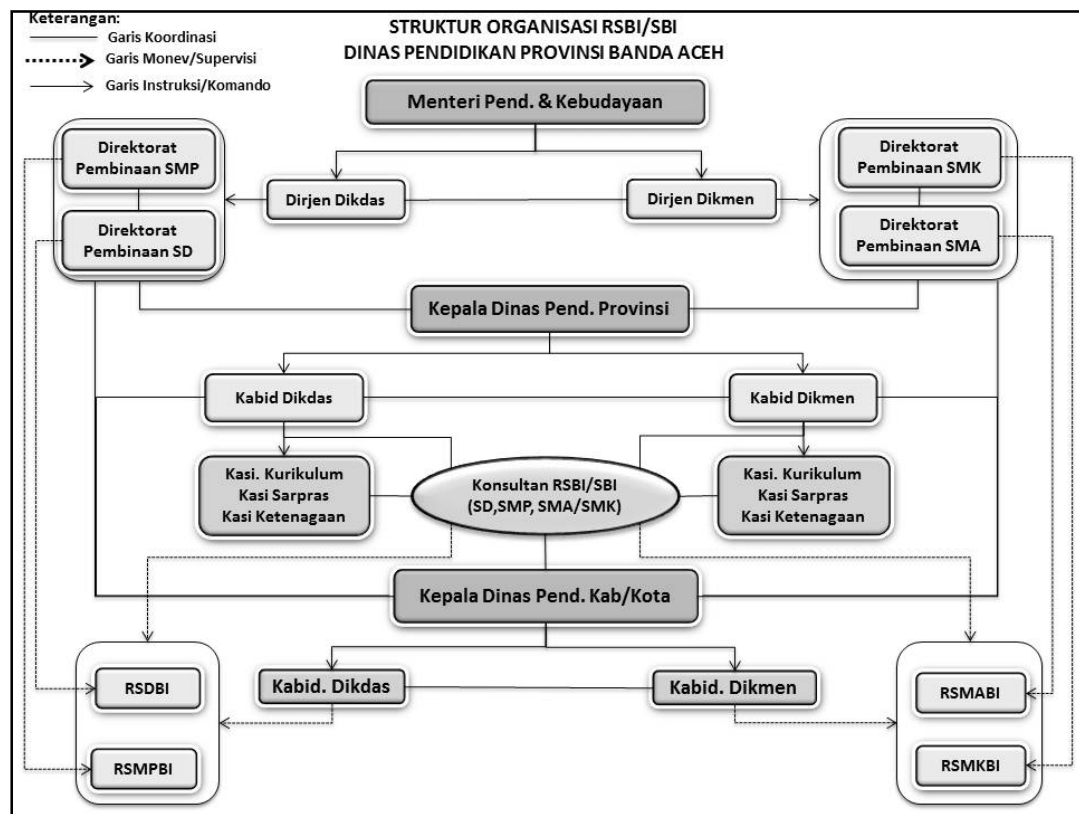
	Memberikan Timbal Balik		Monitoring		Menyediakan Pelatihan		Bantuan Finansial		Menyediakan Guru Berkualitas		Membayar Guru dengan Tepat		Memberikan Fleksibilitas	
	Harapan	Implementasi	Harapan	Implementasi	Harapan	Implementasi	Harapan	Implementasi	Harapan	Implementasi	Harapan	Implementasi	Harapan	Implementasi
Berdasarkan status sekolah:														
■ RSBI	97.14	78.57	100.00	88.57	98.57	84.29	94.29	53.62	87.14	51.43	90.00	71.43	94.29	85.51
■ Non RSBI	100.00	66.67	100.00	88.89	100.00	66.67	100.00	44.44	88.89	44.44	88.89	44.44	100.00	66.67
■ Semua	97.47	77.22	100.00	88.61	98.73	82.28	94.94	52.56	87.34	50.63	89.87	68.35	94.94	83.33
RSBI berdasarkan tingkat pendidikan:														
■ SD	100.00	82.35	100.00	100.00	100.00	88.24	94.12	35.29	76.67	41.18	94.12	70.59	94.12	81.25
■ SMP	86.67	66.67	100.00	86.67	93.33	80.00	80.00	42.86	80.00	46.67	66.67	66.67	80.00	80.00
■ SMA	100.00	80.00	100.00	80.00	100.00	90.00	100.00	70.00	90.00	50.00	95.00	65.00	100.00	100.00
■ SMK	100.00	83.33	100.00	88.89	100.00	77.78	100.00	61.11	100.00	66.67	100.00	83.33	100.00	88.89
RSBI berdasarkan status:														
■ Negeri	98.15	79.63	100.00	88.89	98.15	83.33	94.44	54.72	96.30	53.70	94.44	75.93	96.30	81.48
■ Swasta	93.75	75.00	100.00	87.50	100.00	87.50	93.75	50.00	56.25	43.75	75.00	56.25	87.50	100.00

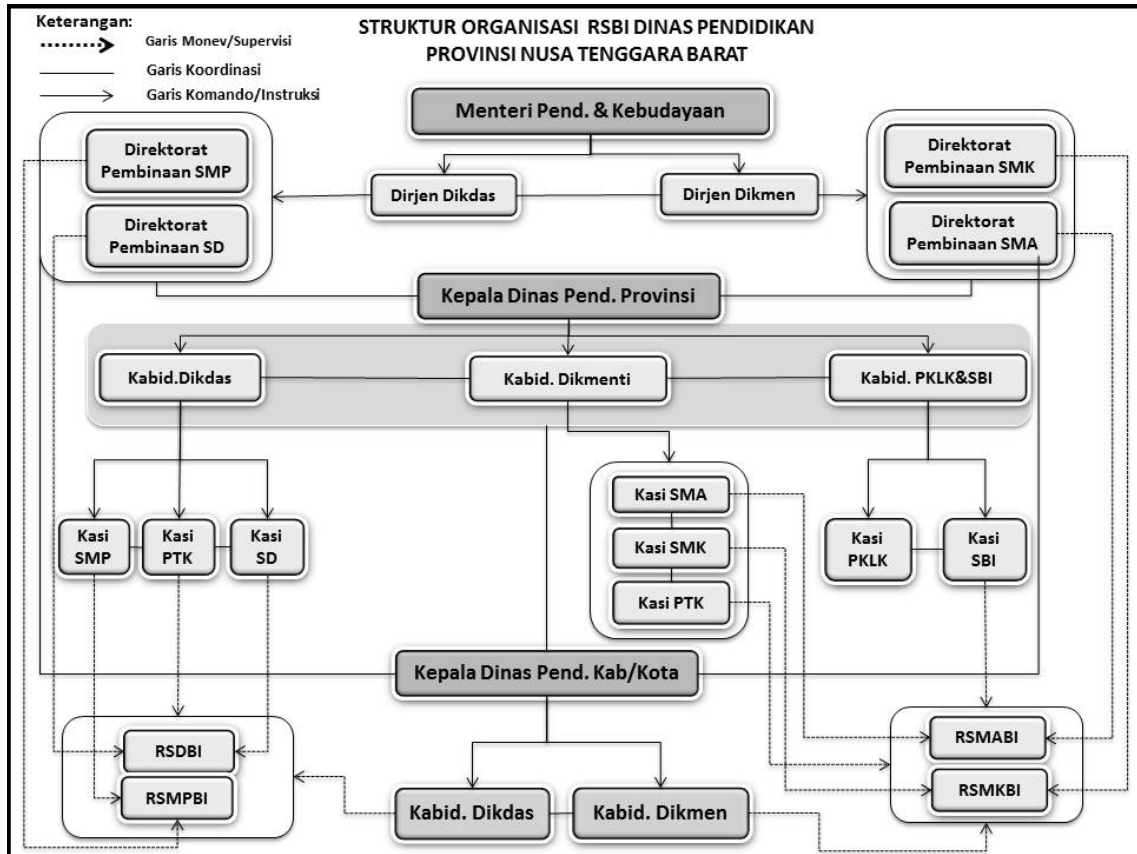
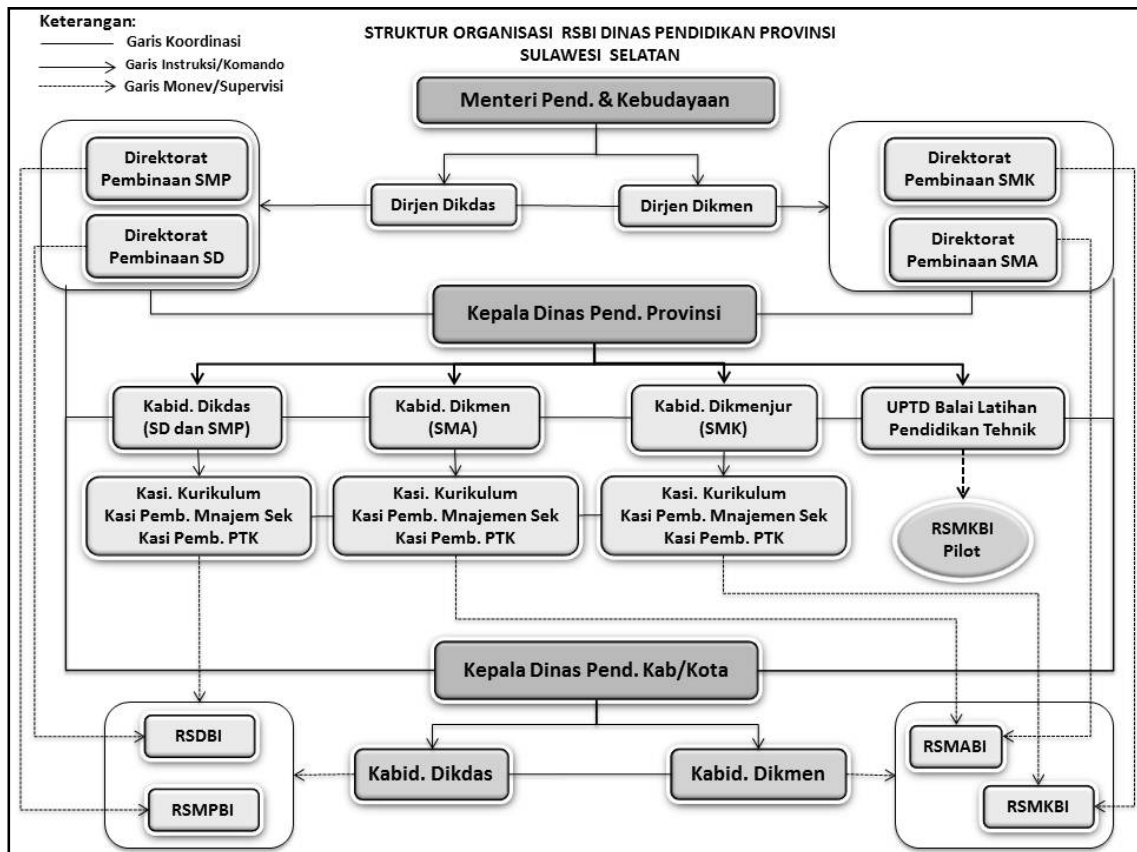
Tabel 10.2. Frekuensi dan Durasi Supervisi Sekolah, berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Status Sekolah

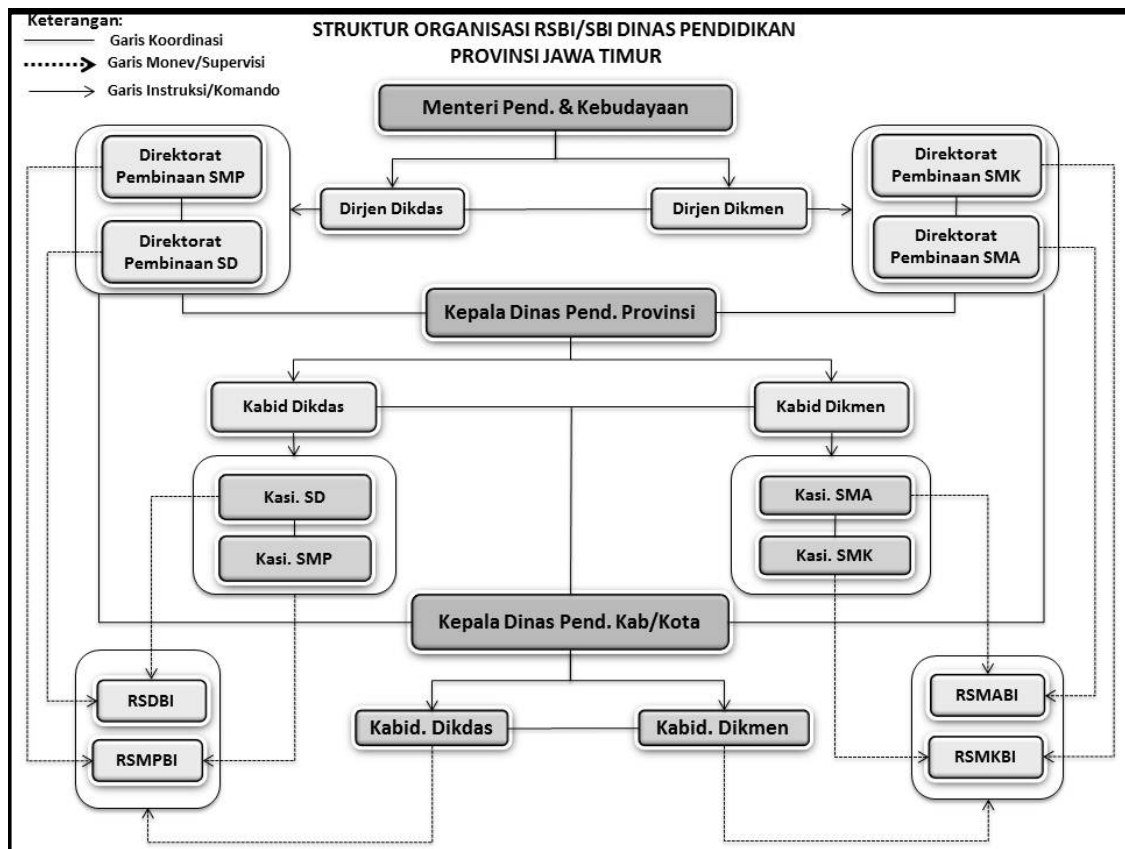
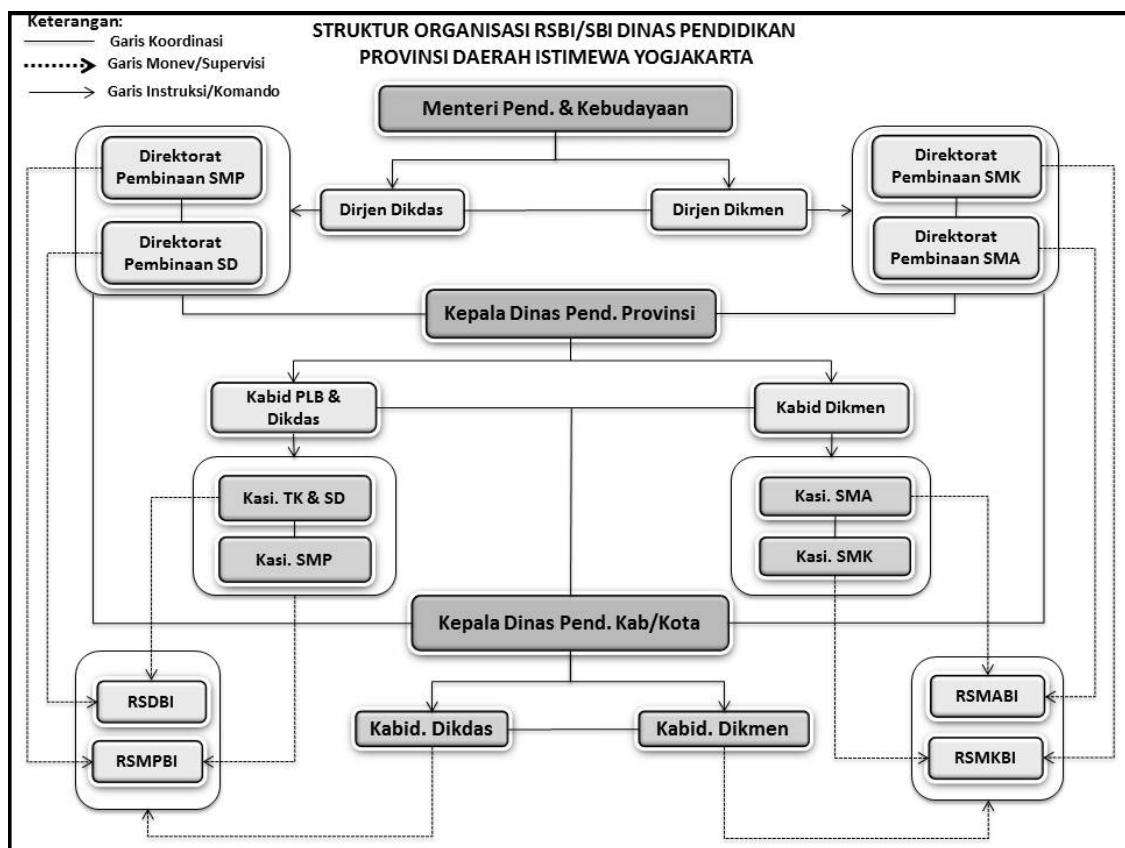
	Frekuensi Kunjungan oleh Supervisor dalam 1 Tahun (F2)				Durasi (jam) per kunjungan (F3)			
	Min	Mean	Median	Max	Min	Mean	Median	Max
Berdasarkan status sekolah:								
■ RSBI	0,00	13,54	12,00	50,00	0,00	2,41	2,00	8,00
■ Non RSBI	5,00	19,22	12,00	96,00	1,00	2,89	2,00	6,00
■ Semua	0,00	14,19	12,00	96,00				
RSBI berdasarkan tingkat pendidikan:								
■ SD	2,00	15,59	12,00	48,00	1,00	2,24	2,00	8,00
■ SMP	0,00	11,80	12,00	24,00	0,00	2,47	2,00	4,00
■ SMA	2,00	11,85	12,00	30,00	1,00	2,60	2,00	6,00
■ SMK	3,00	14,94	12,00	50,00	1,00	2,33	2,00	5,00
RSBI berdasarkan status:								
■ Negeri	2,00	15,39	12,00	50,00	1,00	2,63	2,00	8,00
■ Swasta	0,00	7,31	6,00	24,00	0,00	1,69	2,00	3,00

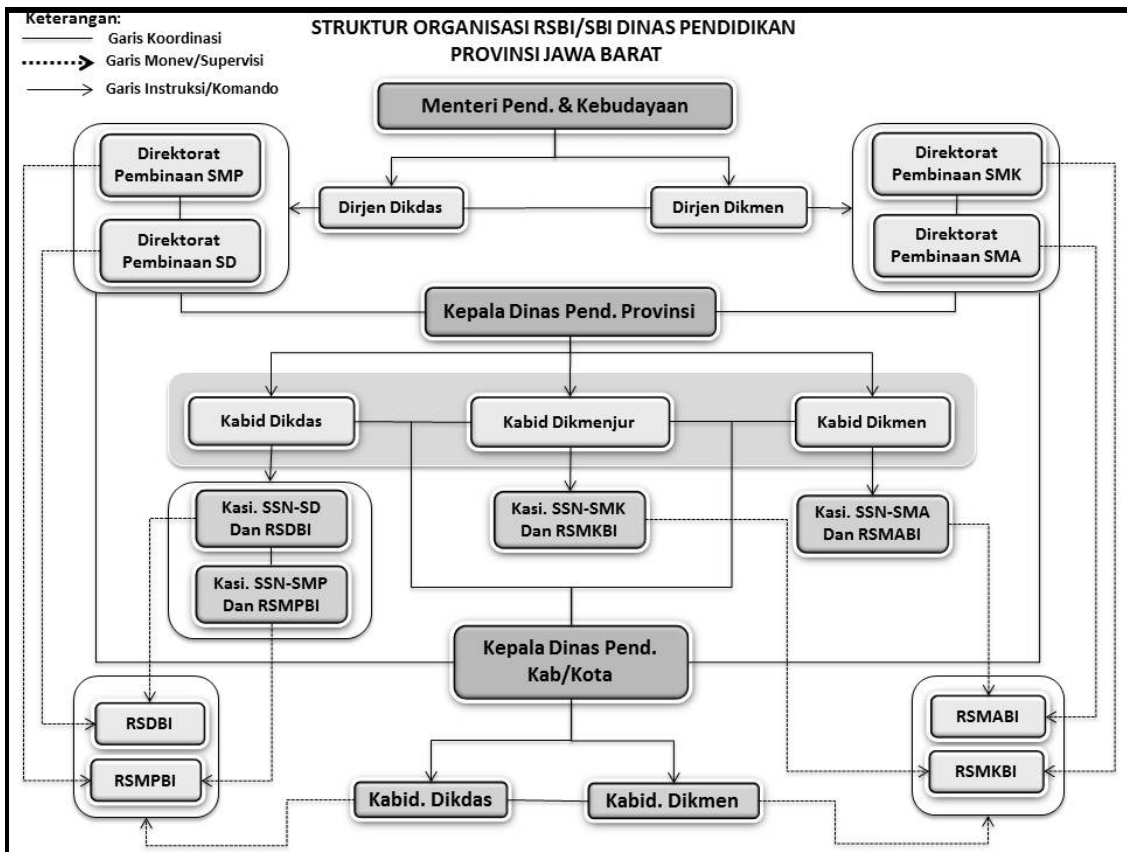
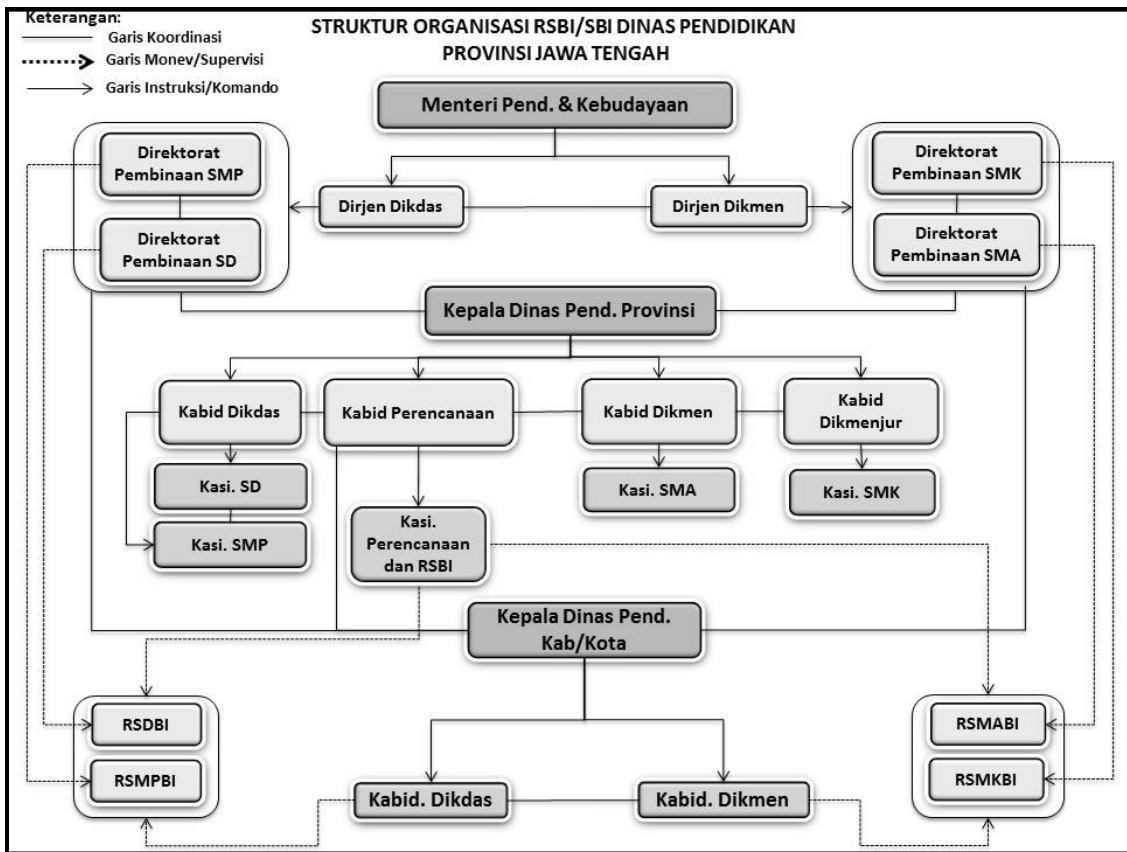
LAMPIRAN 11. BAGAN ORGANISASI PROVINSI

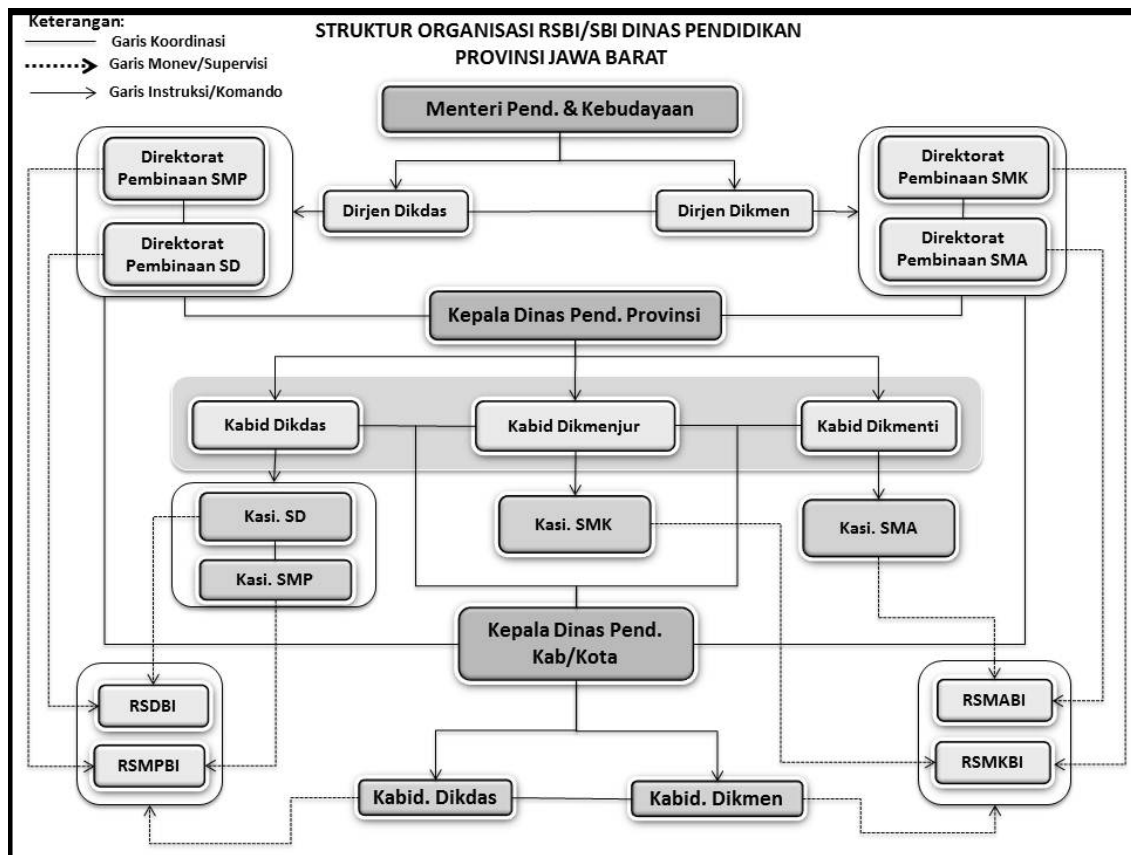
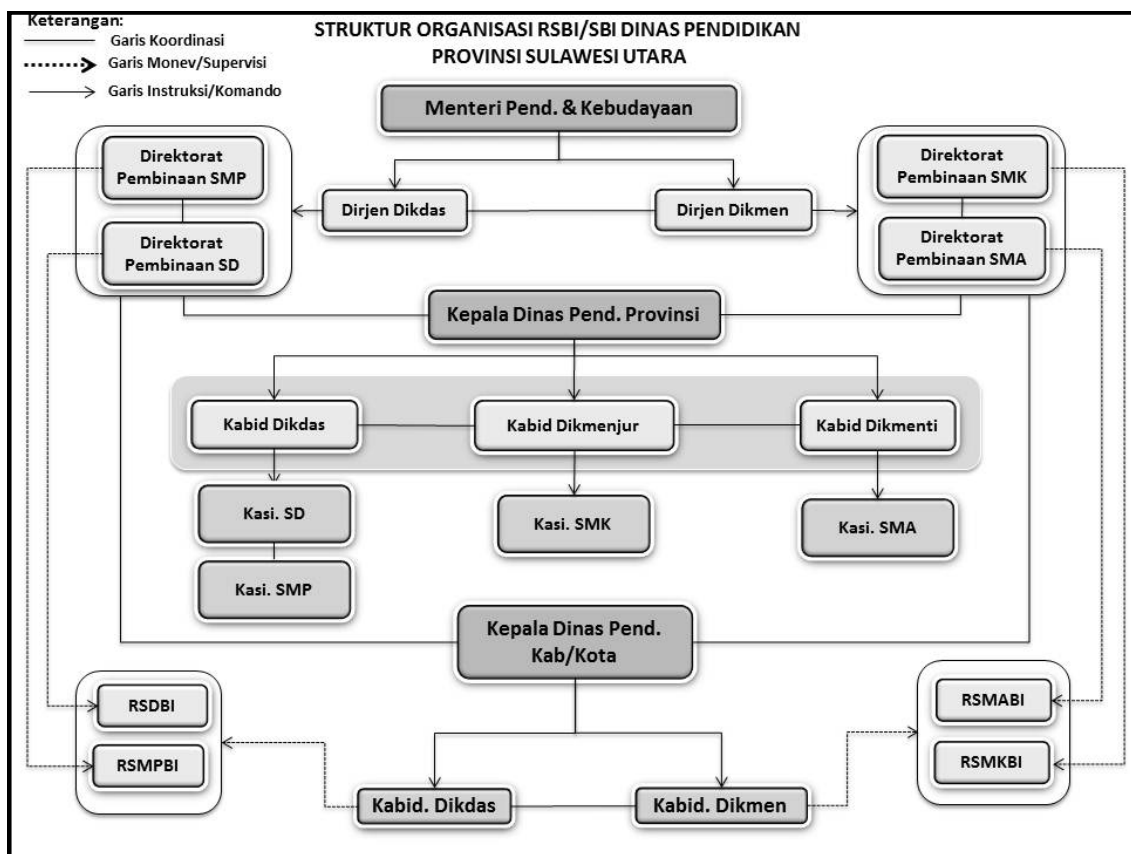


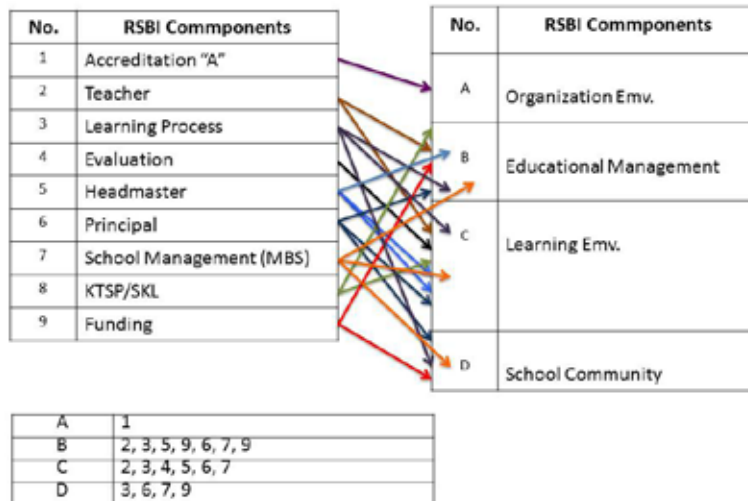
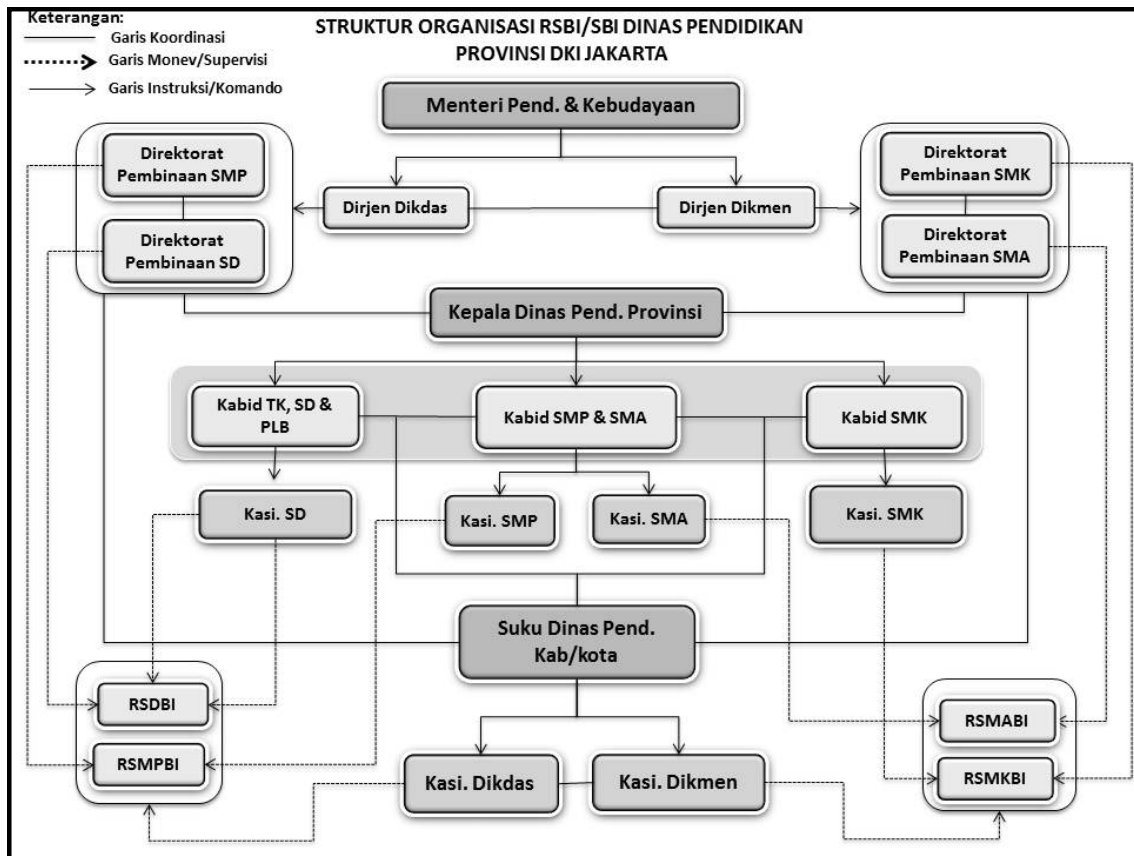












LAMPIRAN 12. STUDI METODE PENGAMBILAN SAMPEL

Penyeleksian Sampel RSBI

Langkah krusial dalam pendesaian studi ini adalah menentukan metode pengambilan contoh. Selama Fase Awal, Tim dapat memperoleh daftar sekolah RSBI berikut informasi kontak dan tanggal penyetujuan dari tiap direktorat Kemendikbud — SD, SMP, SMA, SMK. Data ini terdiri dari data primer yang digunakan untuk merencanakan kegiatan Survei Cepat dan Studi Lapangan.

Sebuah representatif yang proporsional dari contoh sekolah RSBI diharapkan akan muncul dari studi lapangan yang mendalam. Penalaran dilakukan dengan menganggap distribusi, lokasi dan jumlah RSBI, dan waktu yang terbatas serta sumber daya teralokasi dalam studi tersebut. Untuk mendapatkan gambaran yang akurat mengenai RSBI, studi ini perlu menyelidiki ke dalam situasi program di sekolah, dan peran serta mekanisme desentralisasi pemerintah dalam mengelola dan mengawasi proyek tersebut. Karena kebijakan SSI telah didorong oleh pemerintah pusat ke dalam sistem desentralisasi di Indonesia, pengambilan contoh harus memungkinkan peneliti menginvestigasi beberapa daerah administratif untuk menjawab pertanyaan mengenai sifat pengambilan kebijakan, interpretasi, dan implementasi serta implementasi hasil (dan tantangan) di sekolah.

Untuk menghasilkan data yang memungkinkan untuk membuat generalisasi tentang ISS program, tim evaluasi melakukan metode *sampling* probabilitas untuk memastikan bahwa sampel mewakili realitas yang ada. Dari data yang diberikan oleh Kemendikbud, tim awal yang melakukan latihan pemetaan mengungkapkan bahwa sebagian besar sekolah RSBI berada di pusat populasi utama, yaitu di Jawa, dan sampel sekolah secara acak sederhana (*simple random sampling*) digunakan untuk memilih sekolah di kota-kota pulau Jawa, sehingga menimbulkan hasil, pendapat, dan interpretasi yang bias terhadap daerah perkotaan Jawa. Untuk mencegah hal ini, tim menggunakan bertingkat sampling (*stratified sampling*) dari kota/kabupaten untuk memastikan perwakilan yang proporsional dalam sampel acak, serta memperluas bidang penyelidikan untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat dari semua sekolah.

Sebelum sekolah diseleksi secara acak, tim perlu memilah secara bertingkat berdasarkan tiga tipe kriteria lokasi demografi sosio-ekonomi: “Kota Besar” (pop. > 1,000,000), “Kota Kecil” (pop. < 1,000,000), dan “Kabupaten” (atau pedesaan). Untuk mengeliminasi seleksi nol - Kota/Kabupaten tanpa RSBI— dan kemungkinan memilih kabupaten untuk memasukkan program, tim melakukan stratifikasi lokasi di 254 Kota/Kabupaten dengan > 2 RSBI yang menghasilkan: 15 kota besar; 74 Kota kecil; dan 165 Kabupaten (pedesaan)

Data dari Kemendikbud mengindikasikan bahwa sebanyak 1.339 RSBI berada di 500 Kota/Kabupaten di Indonesia, dengan rata-rata 3,6 sekolah per Kota/Kabupaten. Harapan kami adalah mendapatkan ukuran contoh sebanyak 80 sekolah dengan 72 RSBI dan 8 non-RSBI sebagai pembandingan. Oleh karena itu, kami harus menyeleksi sekolah secara proporsional dengan perkiraan 24 Kota/Kabupaten, yaitu dengan distribusi 2 kota besar, 8 kota kecil, dan 14 Kabupaten. Dengan distribusi seperti ini, jumlah sekolah yang proporsional dapat terseleksi secara acak menggunakan *random number generation*. Hasil dari pengujian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 24 - Lokasi Sampel dan Tipe Distribusi

	SD			SMP			SMA			SMK			TOTAL
	N	S	Non-RSBI	N	S	Non-RSBI	N	S	Non-RSBI	N	S	Non-RSBI	
Kota Jakarta	1	1	S	2	2	S	1	1		3			13
Kota Makassar				1	1			1		1			4
Kota Tangerang	1	2											3
Kota Bandung							1		N	1			3
Kota Sukabumi						N				2			3
Kota Salatiga	1						1			1			3
Kota Semarang										1			1
Kota Malang	1			1			1			1			4
Kota Yogyakarta		1	N	1			2	1		3			9
Kota Palembang	1						1		N				3
Kab. Sukabumi	1						1						2
Kab. Pekalongan				1									1
Kab. Semarang							1						1
Kab. Wonosobo				1				1				N	3
Kab. Tomohon		1						1					2
Kab. Lamongan	1		S										2
Kab. Malang		1					1						2
Kab. Trenggalek	1			1			1			1			4
Kab. Kulon Progo	1												1
Kab. Sleman				1									1
Kab. Tarakan				1			1			1			3
Kab. Pinrang				1			1			1			3
Kab. Aceh Barat	1					N	1			1			4
Kab. Sumbawa	1			1			1			1			4
TOTAL													79

N = Negeri; S = Swasta;

Distribusi dari Tipe Sekolah

Dari data RSBI Kemendikbud, setiap tipe sekolah menyajikan kira-kira 25% dari tipe sekolah. *Random stratified sampling* menyajikan hasil yang cukup dalam distribusi tipe sekolah. Tabel berikut menunjukkan distribusi:

Tabel 25 - Distribusi Tipe Sekolah dalam Studi Sampel RSBI

	NEGERI	SWASTA	TOTAL
SD	11	6	17
SMP	12	3	15
SMA	15	5	20
SMK	18	0	18
TOTAL	56	14	70

Tabel 26 - Penyebaran Sekolah Berdasarkan Tipe Kepemilikan dari Tingkatan Sampel

TINGKAT	SAMPel KOTA/KAB.	SAMPel SEKOLAH		TOTAL
		NEGERI	SWASTA	
KOTA BESAR	2	9	6	15
KOTA KECIL	8	21	4	25
KABUPATEN	14	26	4	30
TOTAL	24	56	14	70

Daftar sekolah hasil studi lapangan dapat dilihat pada Lampiran 7.

Penyeleksian Sekolah Pembanding / Non-RSBI

Sembilan sekolah yang dipilih sebagai sekolah pembanding non-RSBI diseleksi dengan menggunakan *non-probabilistic* sampling. Kami menyeleksi sekolah pembanding tersebut berdasarkan reputasi lokal mereka sebagai sekolah yang “baik” sehingga kami semakin percaya bahwa perbedaan dan persamaan antara RSBI dan non-RSBI akan terlihat berdasarkan faktor-faktor dan fitur programnya.

Tabel 27 – Penyebaran Sekolah Pembanding Non-RSBI

TINGKAT	SD	SMP	SMA	SMK	TOTAL
KOTA BESAR	1	1			2
KOTA KECIL	1	1	2		4
KABUPATEN	1	1		1	3
TOTAL	3	3	2	1	9

LAMPIRAN 13 PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 2009

TENTANG

PENYELENGGARAAN SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menumbuhkan, dan mengembangkan daya imajinasi, inovasi, nalar, rasa keingintahuan, dan eksperimentasi peserta didik untuk menemukan kemungkinan-kemungkinan baru sesuai dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran yang diajarkan pada sekolah bertaraf internasional, perlu memberikan arah mutu sekolah bertaraf internasional;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4754);
 5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
 6. Keputusan Presiden Nomor 187/M 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PENYELENGGARAAN SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
2. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
3. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
4. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang berbentuk sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
5. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
6. Standar Nasional Pendidikan selanjutnya disingkat SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. *Organisation for Economic Co-Operation and Development* yang selanjutnya disingkat *OECD* adalah organisasi internasional yang tujuannya membantu pemerintahan negara anggotanya untuk menghadapi tantangan globalisasi ekonomi.
8. Sekolah bertaraf internasional selanjutnya disingkat SBI adalah sekolah yang sudah memenuhi seluruh SNP yang diperkaya dengan keunggulan mutu tertentu yang berasal dari negara anggota *OECD* atau negara maju lainnya.
9. Negara maju lainnya adalah negara yang tidak termasuk dalam keanggotaan *OECD* tetapi memiliki keunggulan dalam bidang pendidikan tertentu.
10. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan nasional.
11. Departemen adalah Departemen Pendidikan Nasional.

Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan SBI adalah untuk menghasilkan lulusan yang memiliki:

- a. kompetensi sesuai standar kompetensi lulusan dan diperkaya dengan standar kompetensi pada salah satu sekolah terakreditasi di negara anggota *OECD* atau negara maju lainnya;
- b. daya saing komparatif tinggi yang dibuktikan dengan kemampuan menampilkan keunggulan lokal ditingkat internasional;
- c. kemampuan bersaing dalam berbagai lomba internasional yang dibuktikan dengan perolehan medali emas, perak, perunggu dan bentuk penghargaan internasional lainnya;
- d. kemampuan bersaing kerja di luar negeri terutama bagi lulusan sekolah menengah kejuruan;
- e. kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Inggris (skor *TOEFL Test* > 7,5) dalam skala *internet based test* bagi SMA, skor *TOEIC* 450 bagi SMK), dan/atau bahasa asing lainnya;
- f. kemampuan berperan aktif secara internasional dalam menjaga kelangsungan hidup dan perkembangan dunia dari perspektif ekonomi, sosio-kultural, dan lingkungan hidup;
- g. kemampuan menggunakan dan mengembangkan teknologi komunikasi dan informasi secara profesional.

BAB II STANDAR PENYELENGGARAAN

Bagian Pertama Umum

Pasal 3

SBI pada jenjang pendidikan dasar dan menengah diselenggarakan setelah memenuhi seluruh 8 (delapan) unsur SNP yang diperkaya dengan standar pendidikan negara anggota OECD atau negara maju lainnya.

Bagian Kedua Kurikulum

Pasal 4

- (1) Kurikulum SBI disusun berdasarkan standar isi dan standar kompetensi lulusan yang diperkaya dengan standar dari negara anggota *OECD* atau negara maju lainnya.
- (2) SBI menerapkan satuan kredit semester (SKS) untuk SMP, SMA, dan SMK.

Bagian Ketiga Proses Pembelajaran

Pasal 5

- (1) SBI melaksanakan standar proses yang diperkaya dengan model proses pembelajaran di negara anggota *OECD* atau negara maju lainnya.
- (2) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud ayat (1) menerapkan pendekatan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, aktif, kreatif, efektif, menyenangkan, dan kontekstual.
- (3) SBI dapat menggunakan bahasa pengantar bahasa Inggris dan/atau bahasa asing lainnya yang digunakan dalam forum internasional bagi mata pelajaran tertentu.
- (4) Pembelajaran mata pelajaran Bahasa Indonesia, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Sejarah, dan muatan lokal menggunakan bahasa pengantar bahasa Indonesia.
- (5) Penggunaan bahasa pengantar bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimulai dari kelas IV untuk SD.

Bagian Keempat Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 6

- (1) Pendidik SBI memenuhi standar pendidik yang diperkaya dengan standar pendidik sekolah dari negara anggota OECD atau negara maju lainnya.
- (2) Seluruh pendidik mampu memfasilitasi pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Pendidik mampu mengajar dalam bahasa Inggris dan/atau bahasa asing lainnya yang digunakan dalam forum internasional bagi mata pelajaran/bidang studi tertentu, kecuali Bahasa Indonesia, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Sejarah, dan muatan lokal.
- (4) SD bertaraf internasional memiliki paling sedikit 10% pendidik yang berpendidikan S2 atau S3 pendidikan guru sekolah dasar (PGSD) dan/atau berpendidikan S2 atau S3 sesuai dengan mata pelajaran yang diampu dari perguruan tinggi yang program studinya terakreditasi.
- (5) SMP bertaraf internasional memiliki paling sedikit 20% pendidik yang berpendidikan S2 atau S3

sesuai dengan bidang studi yang diampu dari perguruan tinggi yang program studinya sudah terakreditasi.

- (6) SMA dan SMK bertaraf internasional memiliki paling sedikit 30% pendidik yang berpendidikan S2 atau S3 sesuai dengan bidang studi yang diampu dari perguruan tinggi yang program studinya terakreditasi.
- (7) Pendidik mata pelajaran kejuruan pada SMK harus memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi kompetensi, dunia usaha/industri, asosiasi profesi yang diakui secara nasional atau internasional.
- (8) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki skor TOEFL $\geq 7,5$ atau yang setara atau bahasa asing lainnya yang ditetapkan sebagai bahasa pengantar pembelajaran pada SBI yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) SBI dapat memperkerjakan pendidik warga negara asing apabila tidak ada pendidik warga negara Indonesia yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi yang diperlukan untuk mengampu mata pelajaran/bidang studi tertentu.
- (2) Pendidik warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 30% dari keseluruhan pendidik.
- (3) Pendidik warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mampu berbahasa Indonesia dengan baik.

Pasal 8

- (1) Tenaga kependidikan SBI sekurang-kurangnya meliputi kepala sekolah, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, tenaga kebersihan, dan tenaga keamanan.
- (2) Tenaga kependidikan SBI memenuhi standar tenaga kependidikan yang diperkaya dengan standar tenaga kependidikan sekolah di negara anggota OECD atau negara maju lainnya.

Pasal 9

- (1) Kepala sekolah sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) wajib :
 - a. berkewarganegaraan Indonesia;
 - b. berpendidikan minimal S2 dari perguruan tinggi yang program studinya terakreditasi atau dari perguruan tinggi negara lain yang diakui setara S2 di Indonesia;
 - c. telah menempuh pelatihan kepala sekolah dari lembaga pelatihan kepala sekolah yang diakui oleh Pemerintah;
 - d. mampu berbahasa Inggris, dan/atau bahasa asing lainnya secara aktif;
 - e. memiliki skor TOEFL $\geq 7,5$ atau bahasa asing lainnya secara aktif;
 - f. memiliki jiwa kewirausahaan;
 - g. kemampuan di bidang manajemen, organisasi, dan kepemimpinan pendidikan serta kewirausahaan;
 - h. mampu membangun jejaring internasional;
 - i. kemampuan mengoperasikan komputer/teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya; dan
 - j. kemampuan mengembangkan rencana pengembangan sekolah (RPS)/rencana kerja sekolah (RKS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).

Bagian Kelima
Fasilitas dan Infrastruktur

Pasal 10

- (1) SBI memenuhi standar sarana dan prasarana yang diperkaya dengan standar sarana dan prasarana pendidikan dari negara anggota OECD atau negara maju lainnya.
- (2) Setiap ruang kelas SBI dilengkapi dengan sarana pembelajaran berbasis TIK.
- (3) SBI memiliki perpustakaan yang dilengkapi dengan sarana digital yang memberikan akses ke sumber pembelajaran di seluruh dunia (e-library).
- (4) SBI memiliki ruang dan fasilitas untuk mendukung pengembangan profesionalisme guru.
- (5) SBI melengkapi sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan peserta didik untuk mengembangkan potensinya di bidang akademik dan non-akademik

Bagian Keenam
Manajemen

Pasal 11

Pengelolaan SBI harus:

- a. Memenuhi standar pengelolaan yang diperkaya dengan standar pengelolaan sekolah di Negara OECD atau Negara maju lainnya;
- b. Menerapkan system manajemen mutu ISO 9001 dan ISO 14000 versi terakhir;
- c. Menjalin kemitraan dengan sekolah unggul di dalam negeri dan/atau di Negara maju;
- d. Mempersiapkan peserta didik yang diharapkan mampu meraih prestasi tingkat nasional dan/atau internasional pada aspek ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni;
- e. Menerapkan sistem kredit semester untuk sekolah menengah kejuruan, dan
- f. Menerapkan menerapkan sistem administrasi sekolah berbasis teknologi informasi dan komunikasi pada 8 (delapan) standar nasional pendidikan.

Pasal 12

- (1) Pengelolaan SBI pada SD, SMP, SMA, dan SMK dapat diselenggarakan secara :
 - a. satu sistem-satu atap
 - b. satu sistem tidak-satu atap
 - c. beda sistem tidak-satu atap
- (2) Model terpadu-satu sistem-satu atap dilaksanakan dalam satu atap dilaksanakan dalam satu lokasi dengan menggunakan sistem pengelolaan pendidikan yang sama
- (3) Model terpisah-satu sistem-tidak satu atap dilaksanakan dalam lokasi yang berbeda atau terpisah dengan menggunakan sistem pengelolaan pendidikan yang sama.
- (4) Model terpisah-beda sistem-tidak satu atap dilaksanakan di lokasi yang berbeda (terpisah) dengan sistem pengelolaan pendidikan yang berbeda.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan model SBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan tersendiri.

Bagian Ketujuh
Pembiayaan

Pasal 13

- (1) Biaya penyelenggaraan SBI memenuhi standar pembiayaan pendidikan dan menerapkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
- (2) Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan masyarakat sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membiayai penyelenggaraan SBI.
- (3) SBI dapat memungut biaya pendidikan untuk menutupi kekurangan biaya di atas standar pembiayaan yang didasarkan pada RPS/RKS dan RKAS.
- (4) Pemerintah dapat menyediakan bantuan dana sarana dan prasarana, pendidik, dan tenaga kependidikan serta bantuan lainnya untuk keperluan penyelenggaraan SBI yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau masyarakat
- (5) Pemerintah provinsi dapat menyediakan bantuan dana, sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan serta bantuan lainnya untuk keperluan penyelenggaraan SBI yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah kabupaten/kota, atau masyarakat.
- (6) Pemerintah kabupaten/kota dapat menyediakan bantuan dana, sarana dan prasarana, pendidik, dan tenaga kependidikan serta bantuan lainnya untuk keperluan penyelenggaraan SBI yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, atau masyarakat.
- (7) Masyarakat dapat menyediakan bantuan dana, sarana dan prasarana, pendidik, dan tenaga kependidikan serta bantuan lainnya untuk keperluan penyelenggaraan SBI yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.
- (8) Bantuan pada SBI dituangkan dalam dan digunakan sesuai dengan rencana pengembangan sekolah/rencana kerja sekolah, rencana kegiatan, dan anggaran sekolah.
- (9) Bantuan pada SBI dapat dihentikan apabila sekolah yang bersangkutan tidak menunjukkan kinerja yang sesuai dengan tujuan penyelenggaraan SBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 14

- (1) Tata cara pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan penyelenggaraan SBI berpedoman pada prinsip efisiensi, efektivitas, keterbukaan dan akuntabilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dalam pembiayaan penyelenggaraan SBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Indonesia dan memperoleh hasil audit akuntan publik dengan predikat wajar tanpa pengecualian.

Bagian Kedelapan
Penilaian

Pasal 15

- (1) SBI menerapkan standar penilaian yang diperkaya dengan sistem penilaian pendidikan sekolah unggul di negara anggota OECD atau negara maju lainnya.
- (2) SBI menerapkan model penilaian otentik dan mengembangkan model penilaian berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Peserta didik SBI wajib mengikuti ujian nasional.
- (4) SBI melaksanakan ujian sekolah yang mengacu pada kurikulum satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (5) SBI dapat melaksanakan ujian sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya.
- (6) SBI dapat memfasilitasi peserta didiknya untuk mengakses sertifikasi yang diakui secara internasional dan/atau mengikuti ujian akhir sekolah yang sederajat dari negara anggota OECD atau negara maju lainnya.

BAB III PESERTA DIDIK

Pasal 16

- (1) Penerimaan murid baru SBI pada sekolah dilaksanakan berdasarkan persyaratan sebagai berikut :
- a. SD
 1. Akte Kelahiran;
 2. Tes kecerdasan di atas rata-rata Tes Intelegensi Kolektif Indonesia (TIKI) dan/atau tes potensi akademik;
 3. Tes minat dan bakat;
 4. Surat keterangan sehat dari dokter;
 5. Kesiadaan membayar pungutan untuk menutupi kekurangan biaya di atas standar pembiayaan pendidikan kecuali bagi peserta didik dari orang tua yang tidak mampu secara ekonomi
 - b. SMP
 1. Nilai rata-rata rapor SD Kelas IV sampai Kelas VI minimal 7,5;
 2. Nilai rata-rata ijazah SD minimal 7,5;
 3. Tes kecerdasan di atas rata-rata Tes Intelegensi Kolektif Indonesia (TIKI) dan/atau tes potensi akademik;
 4. Tes minat dan bakat;
 5. Surat keterangan sehat dari dokter; dan
 6. Kesiadaan membayar pungutan untuk menutupi kekurangan biaya di atas standar pembiayaan pendidikan kecuali bagi peserta didik dari orang tua yang tidak mampu secara ekonomi.
 - c. SMA/SMK
 1. Nilai rata-rata rapor SMP Kelas VII sampai Kelas IX minimal 7,5;
 2. Nilai rata-rata ijazah SMP minimal 7,5;
 3. Tes kecerdasan di atas rata-rata Tes Intelegensi Kolektif Indonesia (TIKI) dan/atau tes potensi akademik;
 4. Tes minat dan bakat;
 5. Tes bahasa Inggris;
 6. Tes kemampuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
 7. Surat keterangan sehat dari dokter; dan
 8. Kesiadaan membayar pungutan untuk menutupi kekurangan biaya di atas standar pembiayaan pendidikan kecuali bagi peserta didik dari orang tua yang tidak mampu secara ekonomi.
- (2) SBI wajib mengalokasikan beasiswa atau bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik warga negara Indonesia yang memiliki potensi akademik tinggi tetapi kurang mampu secara ekonomi paling sedikit 20% dari jumlah seluruh peserta didik.

Pasal 17

- (1) Pembinaan peserta didik dimaksudkan untuk mengembangkan potensinya secara maksimal, baik potensi akademik maupun non akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pola pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan tatap muka, penugasan terstruktur dan tidak terstruktur, dan pengembangan diri.

Pasal 18

- (1) Peserta didik yang telah menyelesaikan program pendidikan dan lulus ujian nasional serta ujian sekolah yang diselenggarakan oleh SBI memperoleh ijazah.
- (2) Peserta didik SMK yang telah menyelesaikan program pendidikan kejuruan dan lulus ujian yang diselenggarakan oleh SBI diberi ijazah dan sertifikat kompetensi internasional sesuai kompetensi keahlian internasional yang dicapai.
- (3) Peserta didik yang mengikuti dan lulus sertifikasi dari lembaga yang diakui secara internasional berhak memperoleh sertifikat yang diakui secara internasional.

BAB IV KULTUR SEKOLAH

Pasal 19

- (1) SBI mengembangkan lingkungan sekolah yang bersih, tertib, indah, rindang, aman, sehat, bebas asap rokok dan narkoba, bebas budaya kekerasan, dan berbudaya akhlak mulia.
- (2) Proses pendidikan berpusat pada pengembangan peserta didik, lingkungan belajar yang kondusif, penekanan pada pembelajaran, profesionalisme, harapan tinggi, keunggulan, respek terhadap setiap individu dan komunitas sosial warga sekolah.
- (3) SBI mengembangkan budaya kompetitif dan kolaboratif serta jiwa kewirausahaan yang dilandasi oleh moral dan etika yang tinggi.
- (4) SBI membangun kultur yang mengarah pada peningkatan kemampuan di bidang bahasa Inggris dan/atau bahasa asing lainnya, teknologi informasi dan komunikasi, dan budaya lintas bangsa.

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan SBI dilaksanakan dengan menjalin kerja sama bidang akademik dan non-akademik dengan satuan pendidikan setara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui di negaranya.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan dasar atau pendidikan menengah; dan
 - b. memperluas jaringan kemitraan untuk kepentingan satuan pendidikan
- (3) Kerja sama akademik dan non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk :
 - a. penyelenggaraan program sekolah kembar (sister school);
 - b. penyelenggaraan program kegiatan perolehan kredit;
 - c. penyelenggaraan program transfer kredit;
 - d. pertukaran peserta didik;
 - e. pertukaran pendidik dan/atau tenaga kependidikan;
 - f. pemanfaatan bersama berbagai sumberdaya;
 - g. penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler;
 - h. pemagangan khusus pendidikan menengah kejuruan;
 - i. penyelenggaraan pertemuan ilmiah;
 - j. penyelenggaraan program penelitian; dan/atau
 - k. penyelenggaraan seminar bersama
- (4) Kerja sama pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat dibatalkan, apabila setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pengendali terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KEWENANGAN PENYELENGGARAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota menyelenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) SBI.
- (2) Dalam hal pemerintah kabupaten/kota tidak mampu menyelenggarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah kabupaten/kota bekerja sama dengan pemerintah provinsi.
- (3) Dalam hal pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi tidak mampu menyelenggarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah provinsi dan kabupaten/kota bekerja sama dengan Pemerintah.
- (4) Masyarakat dapat menyelenggarakan SBI.
- (5) Penyelenggaraan SBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilakukan setelah memperoleh izin dari Menteri.

Pasal 22

- (1) Pemerintah kabupaten/kota menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) SD bertaraf internasional dan/atau memfasilitasi penyelenggaraan paling sedikit 1 (satu) SD bertaraf internasional yang diselenggarakan masyarakat.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, maka pemerintah kabupaten/kota menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) SD yang dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional.
- (3) Pemerintah kabupaten/kota menyerahkan SMP, SMA, dan SMK yang bertaraf internasional dan yang disiapkan untuk dikembangkan menjadi SBI kepada pemerintah provinsi.
- (4) Pemerintah kabupaten/kota menyerahkan 1 (satu) SD untuk dikembangkan menjadi SBI kepada pemerintah provinsi apabila pemerintah kabupaten/kota tidak menyelenggarakan SD bertaraf internasional.

Pasal 23

- (1) Pemerintah provinsi memfasilitasi penyelenggaraan SD bertaraf internasional di kabupaten/kota.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pendanaan investasi;
 - b. pendanaan biaya operasional;
 - c. penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - d. penjaminan mutu.

Pasal 24

- (1) Pemerintah provinsi menerima satuan pendidikan yang diserahkan oleh kabupaten/kota atau mendirikan satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah untuk dikembangkan menjadi SBI.
- (2) Pemerintah provinsi menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) SMP, 1 (satu) SMA, dan 1 (satu) SMK bertaraf internasional dan/atau memfasilitasi penyelenggaraan paling sedikit 1 (satu) SMP, 1 (satu) SMA, dan 1 (satu) SMK bertaraf internasional yang diselenggarakan masyarakat di setiap kabupaten/kota di wilayahnya.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dipenuhi, maka pemerintah provinsi menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) SMP, 1 (satu) SMA, dan 1 (satu) SMK yang dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional.
- (4) Pemerintah kabupaten/kota dapat membantu penyelenggaraan SMP, SMA, dan SMK bertaraf internasional atau yang dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional.

Pasal 25

Pemerintah dapat mendirikan satuan pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional.

Pasal 26

- (1) Pemerintah kabupaten/kota merencanakan kebutuhan mengangkat, menempatkan, memutasikan, memberikan kesejahteraan, memberikan penghargaan, memberikan perlindungan, melakukan pembinaan dan pengembangan, dan memberhentikan pendidik dan tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil pada SD bertaraf internasional atau yang dikembangkan menjadi SBI yang diselenggarakan oleh Pemerintah kabupaten/kota.
- (2) Pemerintah provinsi merencanakan kebutuhan, mengangkat, menempatkan, memutasikan, memberikan kesejahteraan, memberikan penghargaan, memberikan perlindungan, melakukan pembinaan dan pengembangan, dan memberhentikan pendidik dan tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil pada SD, SMP, SMA, dan SMK bertaraf internasional atau yang dikembangkan menjadi SBI yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi.
- (3) Pemerintah merencanakan kebutuhan mengangkat, menempatkan, memutasikan, memberikan kesejahteraan, memberikan penghargaan, memberikan perlindungan, melakukan pembinaan dan pengembangan, dan memberhentikan pendidik dan tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil pada satuan pendidikan bertaraf internasional atau yang dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
- (4) Mutasi kepala sekolah pegawai negeri sipil pada SBI atau yang dikembangkan menjadi SBI harus mendapat izin dari Menteri.
- (5) Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dapat menugaskan pendidik Pegawai Negeri Sipil pada SBI atau yang dikembangkan menjadi SBI yang diselenggarakan masyarakat.

BAB VI

PERIZINAN PENYELENGGARAAN

Pasal 27

Izin penyelenggaraan SBI dapat diberikan oleh Menteri kepada satuan pendidikan yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. mempunyai hasil studi kelayakan untuk menjadi SBI;
- b. memperoleh nilai akreditasi A dari BAN-S/M;
- c. berbadan hukum pendidikan;
- d. memenuhi standar nasional pendidikan yang diperkaya dengan standar pendidikan salah satu sekolah di negara anggota *OECD* atau negara maju lainnya;
- e. telah bekerja sama dengan salah satu satuan pendidikan atau lembaga pendidikan internasional;
- f. memiliki rencana pengembangan SBI;
- g. memperoleh rekomendasi pemerintah daerah;
- h. memiliki sumber pendanaan dari pemerintah atau pemerintah daerah untuk sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah dan penyelenggara sekolah untuk sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan
- i. penyelenggara SBI menjamin kecukupan pendanaan selama 6 (enam) tahun kedepan.

Pasal 28

- (1) Untuk memperoleh izin penyelenggaraan SBI dari Menteri, badan hukum pendidikan satuan pendidikan atau badan hukum pendidikan penyelenggara mengajukan usulan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 huruf a sampai dengan huruf i.
- (3) Paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah menerima usul rencana penyelenggaraan SBI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Departemen melakukan verifikasi kelayakan penyelenggaraan SBI.
- (4) Paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dilakukan verifikasi, Menteri memberikan izin atau menolak memberikan izin penyelenggaraan SBI.
- (5) Verifikasi oleh Departemen sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan Tim Pengendali yang ditetapkan oleh Menteri.
- (6) Izin penyelenggaraan SBI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan hanya untuk satu sekolah

BAB VII
PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN

Pasal 29

- (1) Pengendalian penyelenggaraan SBI dimaksudkan untuk ketercapaian tujuan penyelenggaraan sekolah bertaraf internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud ayat(1) meliputi:
 - a. verifikasi dalam rangka perizinan;
 - b. supervisi, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan SBI.
- (3) Menteri dapat membentuk Tim Pengendali untuk membantu pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (2).

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Pengawasan penyelenggaraan dan pengelolaan satuan pendidikan dasar dan menengah bertaraf internasional mencakup pengawasan akademik dan non-akademik.
- (2) Pemerintah melakukan pengawasan secara nasional terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada SBI.
- (3) Pemerintah provinsi melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada SBI yang menjadi kewenangannya.
- (4) Pemerintah kabupaten/kota melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada SBI yang menjadi kewenangannya.

BAB IX
PELAPORAN DAN TINDAK LANJUT

Pasal 31

- (1) SBI wajib menyampaikan laporan tertulis tentang penyelenggaraan pendidikan yang bersangkutan setiap 1 (satu) tahun kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Sekolah Dinas Pendidikan Provinsi dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
- (2) Menteri dapat meminta laporan SBI sesuai dengan kebutuhan.

BAB X SANKSI

Pasal 32

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Menteri ini dapat dikenakan sanksi berupa :
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. pelarangan menerima peserta didik baru, dan atau
 - c. pencabutan izin penyelenggaraan SBI.
- (2) Sanksi sebagaimana diatur dalam ayat (1) diberikan setelah memperoleh pertimbangan dari tim pengendali.
- (3) Pencabutan izin penyelenggaraan SBI dilakukan apabila :
 - a. SBI sudah tidak lagi memenuhi persyaratan penyelenggaraan satuan pendidikan bertaraf internasional;
 - b. SBI sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran atau manajemen satuan pendidikan bertaraf internasional; dan
 - c. SBI memperkerjakan pendidik dan/atau tenaga kependidikan asing yang tidak sesuai dengan persyaratan dan prosedur.

Pasal 33

SBI yang izin penyelenggaraannya dicabut menjadi satuan pendidikan yang berada di bawah pembinaan pemerintah kabupaten/kota atau pemerintah sesuai kewenangannya.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Satuan pendidikan yang menyatakan sebagai SBI wajib menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Menteri ini paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Menteri ini ditetapkan.
- (2) Satuan pendidikan yang tidak dapat memenuhi ketentuan ayat (1) tidak boleh menggunakan nomenklatur SBI.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 16 Oktober 2009
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

DITANDATANGANI
Bambang Sudibyo

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,

DITANDATANGANI

Dr. A. Pengerang Moenta, SH, M.H.,
DFM. NIP 196108281987031003

LAMPIRAN 14. JADWAL PENCAPAIAN

No.	Pencapaian	Tanggal	Status/ Keterangan
1.	Penandatanganan Persetujuan	12 Juni 2012	
2.	Penyebaran tim konsultan nasional	12 Juni 2012	
3.	Penyebaran tim <i>Leader</i>	23 Juni 2012	
4.	Laporan draf awal	12 Juli 2012	Diserahkan kepada TIA oleh <i>Team Leader</i>
5.	Lokakarya Awal	31 Juli 2012	
6.	Laporan Awal dan draf akhir anggaran	28 Agustus 2012	Diserahkan kepada ACDP oleh TIA
7.	Aktivasi pengumpulan data Survei Cepat	29 Agustus 2012	Tim yang terdiri dari 3 enumerator dan 1 koordinator/supervisor yang berlokasi di kantor TIA
8.	Pelatihan dan percobaan studi lapangan	12-16 September 2012	Pelatihan lokakarya dan dua kali percobaan instrumen pengumpulan data di lapangan
9.	Aktivasi studi lapangan	17 September 2012	Tujuh (7) tim disebarkan; konsultan nasional sebagai supervisor
10.	Kunjungan oleh <i>Team Leader</i>	01 Okt – 11 Okt 2012	<u>Kota Yogyakarta</u> – 2 RSBI <u>Jawa Tengah</u> – 4 RSBI: 2 Wonosobo; 1 RSBI Temanggung; 1 RSBI Magelang <u>Jawa Barat</u> – Dinas Pendidikan Kota Sukabumi, 1 RSBI & 1 non-RSBI Kota Sukabumi
11.	Penyelesaian pengumpulan data Survei Cepat dari 1.339 RSBI	05 Oktober 2012	Kira-kira 62% sekolah merespon; pencatatan perhitungan belum terselesaikan
12.	Entri data untuk Survei Cepat	16 Oktober 2012	Selesai
13.	Penyelesaian pengumpulan data studi lapangan dari 79 sekolah: 70 RSBI, 9 non-RSBI	12 Oktober 2012	Survei tersebut meliputi : 12/12 Provincial Dinas 23/23 Kota/Kab. Dinas 79/79 Schools
14.	Pendataan data kuesioner studi lapangan (diantarkan kepada <i>Team Leader</i>)	17 Oktober 2012	Selesai : 100% kembali 24/24 Kota/Kab. Dinas 79/79 sekolah (53%)
15.	Entri data studi lapangan	31 Oktober 2012 31 Oktober 2012	Kuantitatif telah selesai dan lengkap Kualitatif telah selesai dan lengkap
16.	Wawancara <i>stakeholder</i>	15 Oktober 2012	Lengkap
17.	Analisis Data	02 November 2012	Selesai
18.	Penyerahan draf laporan akhir	06 November 2012	Diserahkan kepada TIA oleh <i>Team Leader</i>

ANEKS LAPORAN PELAKSANAAN WORKSHOP

Report on the National Consultation Workshop

Day/ date	: Wednesday/ 21 November 2012
Time	: 10.00 am – 1.00 pm
Place	: Ruang Sidang Puslitjak Balibang, MoEC Jl. Jend. Sudirman – Senayan South Jakarta
Participants	: 1. Ministry of Education and Culture (MoEC) ■ Policy and Research Center (Puslitjak), ■ Vocational Education Directorate (SMK) Representative ■ Senior Secondary Education Directorate (SMA) Representative 2. National Development Planning Agency (Bappenas) - 1 Participant 3. National Accreditation Board (BAN-SM) – 1 Participant 4. National Board of Education Standards (BSNP) – 1 Participant 5. Asian Development Bank (ADB) – 1 Participant 6. AusAid – 2 Participants 7. ACDP Secretariat – 4 Participants 8. ACDP – 020 – 8 Participants

Minutes of Meeting

1. Opening Remarks by Dr. Bambang Indriyanto – Head of Centre for Policy Research, Balitbang – MoEc

- The purpose from the workshop is to review and discuss the results ACDP – 020. Based on the 020 evaluation, policy decisions will be taken regarding whether or not to continue the RSBI program. BSNP will have a major influence in determining the future policy.
- The result of this research should not be limited by time and space while giving recommendation, but still have the flexibility on how this result of study may be a supplementary to the policy development, for example, how RSBI should be managed, as well as with other schools.
- Changes in the curriculum have been approved by the Vice President and it will be brought to the Cabinet in within three weeks.
- The result of this ACDP evaluation can be a synthesis that can be a supplementary to what is being faced by MoEC.

2. Presentation of results by Team leader, John Henly

The presentation lasted over 1 hour. Power points in both Bahasa Indonesia and English were used. These are attached to this report.

3. Discussion, Dr. Bambang Indriyanto as moderator

Discussion was lively. Participants spoke mainly in Bahasa Indonesia, with some English. The most pertinent comments are summarized as follows.

Prof. Dr. Farid A. Moeloek, SpOG, Head of BSNP

- The key to improving the quality of education is the Teacher. Teachers should meet international standards and should have S2 or S3 degrees.
- Improving education facilities is required.
- English medium is not the key but English as a second language should be mandatory.
- The RSBI program should be continued and at a minimum there should be one RSBI in each province to serve as a model for other schools. Clusters of schools with RSBI as the center should be established.

Ms. Tita, BAN-SM Representative

- RSBI keeps to be continued. There should be at least one RSBI in each province to serve as models for other schools. At the high school level there are 26 model schools, which have better accreditation results. There are model madrasah that could be used as models in Jambi, Banten and Gorontalo. These are referred to as International Based Madrasah
- English should be required in RSBI

Mr. Sutarum Wiryono, Project Officer Education – ADB IRM

- Can you show us that RSBI attract smarter (higher quality) students?
- Assuming that they are a better quality student, how is it that their national exam scores are lower than non RSBI?

Mr. John Henly, Team Leader

- Pak Idris had done research that shows RSBI teachers are better than non-RSBI teachers but also found that RSBI scores were lower.
- RSBI school open their enrolment online before others schools (non RSBI) open it and they select the students based on their academic performance.

Dr. Edy Priyono, Education Finance Specialist ACDP – 020

- He requested clarification from Ms. Gita related to international madrasah since MoRA discontinued the RSBI program in 2011.
- I am also a bit confused, do you agree if we continue the RSBI program or not?

Ms. Tita, BAN-SM Representative

- I agree that this program be continued, but we should have some data about the profile of each region, for example how many teachers have S2 and S3, so if we want to make a model school of it.
- There is Minister Decree by five ministers (SK 5 Menteri) about the mapping of teachers.

For example, local governments find it difficult to transfer teachers to RSBI, but there are examples where some RSBI have specially recruited senior teachers. In order to make such transfers the location and qualifications of teachers need to be mapped. This year in December, restructuring and mapping are underway. The question to be answered is who is in charge of transferring teachers to RSBI?

Mr. Yunus, Directorate of Vocational High Schools (SMK)

- If RSBI is to be continued there needs to be not only changes in regulations but also in terms of teacher qualifications. Having S2 or S3 degree is not the only criteria, but other aspects of teacher qualifications should be considered. We also need clear policy of how other schools can become RSBI.
- Vocational schools may find it difficult to have teachers with S2 degrees.
- SMK RSBI should be associated with industry.

Mr. Prapto, Bappenas Representative

- In my opinion, RSBI is a obsession that leads to some uneven conditions in the community.
- There are issues of justice. 20 % of RSBI seats are reserved for the poor, but only 29 % schools are willing or able to meet the quota although public funds are used for this purpose. Because the RSBI environment is very different, when the poor attend RSBI they will have problems adjusting to this "Life Style" although academically capable. So the question is: is the policy morally acceptable?

Dr. Abdul Malik, Core Consultant – ACDP Secretariat

- The report has very deep data which has the potential for extensive analysis. The current report is much better than a previous draft.
- The people should have the freedom to choose a good thing for their children, especially education.
- Problems become serious if they use the public not private funds to financing their education.
- Policy changes would be destructive if not managed well.
- Some funding issues relating to use of public funds arise. It was interesting to see that in this

study operational costs for SMK RSBI are lower than that of general schools, whereas the opposite is usually the case.

- We have to think fundamentally. What are the underlying bases of the SBI articles in the Law? What is the position of SBI in the context of the whole education system (what is their role and their goal), is it to improve the education overall?

Dr. Bambang Indriyanto – Head of Centre for Policy Research, Balitbang – MoEc

- In the beginning, RSBI schools were developed for those who were smart students, but there was an intervention from House Representatives (DPR) that all students whether they come from middle-high income, can go to RSBI schools.
- The Minister has stated that there is no problem with RSBI program, the implementation itself is the real problem.
- The development period is what we called as “rintisan”.
- The starting point of SMP, SMA, and SMK selection was not done with the same concept. The selection of SMP was based on the school that has a good reputation, while SMA was selected by their willingness to be a good reputation school, and SMK was selected by their relation to the industry.
- If we want to terminate the RSBI, we have to make an amendment of Articles 50 and 146 of the Law and Regulation PP17. It is more difficult than continuing RSBI.
- The Ministry is reviewing how to recruit and assess the teachers.
- The recommendations should have a relation to the changes of curriculum, teachers' professionalism, standardization, and assessment criteria

Dr. Idris HM. Noor, M.Ed, Researcher, Policy Research, MoEC

- This study is used data from a study on RSBI conducting by Puslitjak, MoEC in 2010.

Mr. Basilius Bengoteku, Program Specialist ACDP Secretariat

- The Final Evaluation Reported no costs for maintenance which is important to know because the facilities in RSBI are expensive.
- The study shows the unit cost for RSBI is 4 times as much as regular schools. It is important to know how much of this is used for maintenance.

Prof. Dr. Farid A. Moeloek, SpOG, Head of BSNP

- If we want to recommend the Minister that this program should be continued, we have to suggest something that support the low-income people.
- You can make a trial model. Teachers qualities must improved.
- The improvement of education is an evolution not revolution

Mr. David Harding, ACDP Secretariat

- How do we measure the quality? Quality is not something that static
- We don't want to make some mistakes while we are recommending something.
- I am wondering why some low income students can do better than those who come from middle-high income families.

4. Closing Remarks by Dr. Bambang Indriyanto – Head of Centre for Policy Research, Balitbang – MoEC

- This is a productive policy dialog and will be a starting point to look forward
 - If there is an initiative from House of Representative (DPR) to change the Education Law (Sisdiknas), this evaluation could be an empirical basis and could become a valuable momentum for the coming 10 years.
 - The morality problem discussed here is important and needs to be considered.
 - Revisions in regulation will be taken up by Puslitjak which will also consider funding strategies.
 - We request ACDP to facilitate follow up meetings between BAN, BSNP, and Balitbang to develop policy options based on this evaluation.
-

